
SOSIOHUMANIORA

Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora
Journal of Social Sciences and Humanities

Volume 21, No. 3, Nopember 2019

Editor	: Asep Sumaryana
Editor Bagian	: Suwandi Sumartias Sulaeman Rahman Nidar Agus Nero Sofyan Munadjat Rd. Ahmad Buchari Yoga Bestari Anissa Lestari Kadiyono Nia Kurniati Asep Agus Handaka Suryana Ella Lesmanawaty Wargadinata Linda Sunarti
Manajer Jurnal	: Usep Sahrudin U. Santosa Kusumah
Sekretariat	: Trisatya Yono Yugiono Lala Adilla Nur Dodih Firmansyah

Alamat Penerbit / Redaksi:

Direktorat Sumberdaya Akademik dan Perpustakaan Universitas Padjadjaran
Graha Kandaga (Perpustakaan) Jatinangor Lt. 4
Jl. Raya Bandung - Sumedang KM. 21 Jatinangor
Telepon/Fax (022) 842 88806 ext. 3806 dan E-mail: sosiohumaniora@yahoo.co.id
website: <http://sosiohumaniora.unpad.ac.id/user>

(Terbit 3 Kali dalam Satu Tahun: Maret, Juli dan Nopember)

PERINGKAT AKREDITASI SINTA 2

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 3/E/KPT/2019

Terindeks di:



DAFTAR ISI

SOSIOHUMANIORA

Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora
Journal of Social Sciences and Humanities

Volume 21, No. 3, Nopember 2019

Sinergi Polri Bersama Masyarakat di Tanjung Balai Karimun dalam Mencegah Radikalisme dan Pengamalan Hadist Intoleransi (Aslati, Silawati, Darmawati, dan M. Fahli Zatrachadi)	228 - 236
DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v21i3.22731	
Hubungan <i>E-Service Quality</i> dan <i>E-Loyalty</i> dengan <i>E-Satisfaction</i> pada Konsumen Go-Jek dan Grab di Kota Semarang (Sri Pudjarti, Nurchayati, dan Honorata Ratnawati Dwi Putranti)	237 - 246
DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v21i3.21491	
Karakteristik Petani dan Profil Usahatani Ubi Jalar di Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung (Hepi Hapsari, Elly Rasmikayati, Agung Karuniawan, dan Bobby Rachmat Saefudin)	247 - 255
DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v21i3.21288	
Modalitas Dinasti Ahmad Hidayat Mus pada Pemilihan Kepala Daerah di Maluku Utara 2018 (Marno Wance, dan Raoda M. Djae)	256 - 268
DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v21i3.21547	
Persepsi Pelaku Usaha UMKM tentang Tarif Final 1% Menjadi Tarif Final 0,5% di Kota Bandung (Kasir dan Deni Hamdani)	269 - 278
DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v21i3.23455	
Kontribusi Dunia Usaha dalam Pelaksanaan Program Citarum Harum (Studi kasus pelaksanaan CSR perusahaan listrik dalam mendukung Program Citarum Harum) (Risna Resnawaty, Ishartono, dan Dessy Hasanah)	279 - 286
DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v21i3.20206	
Dampak Erupsi Gunung Sinabung terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Petani Hortikultura di Kabupaten Karo (Hoiden Leonardo Nainggolan, Albina Ginting, Jongkers Tampubolon, Johndikson Aritonang, dan Meiliani Hutagalung)	287 - 295
DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v21i3.22382	
Green Building Policy Formulation in the Municipality of Bandung Indonesia (Engkus)	296 - 304
DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v21i3.23612	
Kinerja Implementasi Tata Kelola Hutan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (Rita Rahmawati, Denny Hernawan, Djoyo Sektiono, dan Dudung Darusman)	305 - 315
DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v21i3.7328	
Kesantunan Bahasa Jawa Ceramah Emha Ainun Nadjib Grebeg Sura Ke 4000 di Colomadu Tahun 2018 (Rizka Rahma Pradana)	316 - 322
DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v21i3.19345	
The Good Governance Implementation at Village in East Nusa Tenggara Province (Ella Wargadinata, dan Ika Sartika)	323 - 332
DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v21i3.22120	
Indonesia dan Ancaman Terorisme: Dalam Analisis Dimensi Imaterial (Ardli Johan Kusuma, Tulus Warsito, Surwandono, dan Ali Muhammad)	333 - 341
DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v21i3.21142	
<i>Willingness To Pay</i> Masyarakat terhadap Sumberdaya Terumbu Karang di Kawasan Konservasi Perairan Pulau Biawak (Iwang Gumilar)	342 - 348
DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v21i3.21371	
Faktor Penghambat dan Pendukung Badan Usaha Milik Desa pada Kawasan Pertambangan Emas di Sumbawa Barat (Ibrahim, Iwan Tanjung Sutarna, Ibrahim Abdullah, Kamaluddin, dan Mas'ad)	249 - 354
DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v21i3.23464	
Implementasi Digital Marketing untuk Meningkatkan Kepuasan Nasabah dan Berdampak pada Citra Lembaga Perbankan (Suatu Survey pada Lembaga Perbankan Nasional PT. Bank Negara Indonesia (persero), Tbk (Andi Sukandi, Numung Ayu Sofiaty (Efi), dan Yoyo Sudaryo)	355 - 364
DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v21i3.23464	

PENGANTAR REDAKSI

Dalam Volume 21 akhir tahun 2019, disajikan 15 tulisan yang dapat kiranya disimak, dikritisi serta dijadikan input dalam mencermati kondisi yang ada disekitaran kita. Persoalan Polri yang tetap aktual dalam melaksanakan tugasnya bisa dibaca dalam tulisan Aslati yang mengambil setting di Karimun. Demikian halnya dengan *E-service quality* tulisan Pudjarti dengan lokus Semarang juga menjadi perlu mendapat apresiasi.

Selain dua tulisan diatas, persoalan pertanian dan petani juga tidak henti-henti menjadi bahasan menarik termasuk di dalamnya usahatani. Hapsari menguaknya dengan mengkhususkannya dalam petani ubi jalar di Arjasari Bandung dapat disimak dan mungkin saja bisa berkaitan dengan usahatani lainnya di tempat berbeda. Bisa juga dihubungkan dengan UMKM yang ditulis Kasim di kota Bandung. Tidak berlebihan jika pelibatan dunia usaha juga menjadi penting untuk meningkatkan UMKM serta merawat lingkungan seperti ditulis Adinegara dalam tulisannya tentang Citarum Harum.

Tulisan lainnya berkaitan dengan kedinastian Ahmad Hidayat yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa di Maluku Utara yang ditulis Wance. Boleh jadi konteks ini bisa ada di wilayah lain, bahkan di level lebih tinggi. Mungkin pembaca juga bisa mencermati kepatronan tersebut untuk kasus yang berbeda. Persoalan terorisme yang dikupas Kusuma agaknya dapat menggunakan alur berpikir yang sama sehingga sejumlah akar masalah dapat diinventarisir untuk dicarikan solusinya.

Sorotan terhadap pemerintah tidak boleh ditinggalkan mengingat sosok ini menjadi penting dan dominan dalam membangun. Wargadinata menyoroti *good governance* di Nusa Tenggara, Rahmawati mengupasnya dalam kerangka Tata Kelola Hutan Taman Nasional gunung Halimun. Engkus mengupasnya dari sisi formulasi kebijakan *Green Building* di kota Bandung. Kajian yang bertumpu pada posisi pemerintah menjadi menarik untuk ditarik esensinya demi perbaikan kinerja kedepan.

Tulisan lain yang ada di volume ini adalah digital marketing di BNI hasil riset Sukandi, BUMDes di Sumbawa tulisan Ibrahim dkk, *Willingness to Pay* terumbu karang pulau Biawak karya Gumilar, serta kesantunan bahasa jawa Emha yang ditulis Pradana.

Selamat mencermati dan mengkritisinya

Hormat kami,

Dewan Redaktur

SINERGI POLRI BERSAMA MASYARAKAT DI TANJUNG BALAI KARIMUN DALAM MENCEGAH RADIKALISME DAN PENGAMALAN HADIST INTOLERANSI

Aslati¹, Silawati², Darmawati³, dan M. Fahli Zatrachadi⁴

¹Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi,

^{2,4}Program Studi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi,

³Program Studi Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Jl. HR. Soebrantas no. 155 Km. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp 0761-56164

E-mail: aslati@uin-suska.ac.id

ABSTRAK. Menurut Undang-undang yang berlaku di Indonesia pemerintah bertanggungjawab memberikan rasa aman kepada masyarakat. Oleh sebab itu berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan rasa aman itu diantaranya melakukan upaya pencegahan munculnya kelompok Radikal dan Intoleransi. Yang menjadi Subjek Penelitian adalah Polri melalui fungsi Bhabinkamtibmas serta unsur terkait dan objek penelitian adalah sinergitas Polri bersama masyarakat dalam upaya pencegahan radikalisme dan Intoleransi serta pengamalan hadist. Setelah dilakukan penelusuran data lapangan maka diperoleh kesimpulan bahwa Polres Karimun melalui fungsi Bhabinkamtibmas secara bersinergi dengan seluruh elemen masyarakat berupaya melakukan langkah pencegahan terjadinya tindakan radikalisme dan intoleransi seperti menyambangi warga masyarakat untuk mendengar secara langsung keluhan warga dan berupaya memberi solusi dari permasalahan yang terjadi, menciptakan hubungan yang harmonis antara aparat kepolisian dengan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang bersentuhan langsung dengan warga, memberikan bimbingan atau penyuluhan agama tentang Jihad yang benar menurut Hadits, menyebarluaskan informasi terkait Harkamtibmas, menghidupkan pelaksanaan Siskamling, memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat, memotivasi kegiatan masyarakat yang bersifat positif, berkoordinasi dengan perangkat desa/kelurahan dan pihak-pihak terkait lainnya serta bertindak sebagai mediator, negosiator dan fasilitator untuk kepentingan warga masyarakat dalam rangka pemecahan masalah kejahatan dan masalah sosial lainnya. Di sisi lain secara berkesinambungan Polres Karimun melaksanakan Focus Grup Discussion (FGD) dengan masyarakat dalam hal sosialisasi upaya pencegahan radikalisme dan intoleransi melalui lembaga-lembaga seperti Kemenag, FKUB, Lembaga pendidikan, Lembaga Agama lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif, Media serta LSM yang ada di Karimun.

Kata kunci: Intoleransi; Masyarakat; Polri; Radikal; Sinergi

THE INDONESIAN POLICE AND SOCIETY SYNERGY IN TANJUNG BALAI KARIMUN IN PREVENTING RADICALISM AND INTOLERANT HADITH IMPLEMENTATION

ABSTRACT. *In the government context, state apparatus have an obligation to provide safety for every citizen. Therefore, the object of this research is the police synergy with society to prevent radicalism and intolerance in the territory of Karimun resort police office of Kepulauan Riau. Research method used is Research and development (R&D). This research finds that the Karimun resort police office through the function of Bhabinkamtibmas cooperatively with all elements of the society to prevent radicalism and intolerance, namely visiting to social activities to listen the problems of the society about the Kamtibmas (security and order of the society) and providing information and solutions, maintaining or keeping the good relationship, supervising and guiding people in law and security to improve people consciousness based on human rights, provide religious guidance or counseling about true jihad according to the hadith, disseminating information about the police policies related to security and social order protection (Harkamtibmas), supporting the implementation of Siskamling (traditional security) to provide safety for people, providing the police service to people needed, actuating the positive society's activities, coordinating the Kamtibmas development with village's apparatus and relevant parties, conducting or providing a consultation, mediation, negotiation, facility, motivation to people in Harkamtibmas and providing solutions for social and criminal problems. Furthermore, the Karimun resort police office continuously conducts Focus Grup Discussion (FGD) with the society to socialize the radicalism and intolerance prevention done through several institutions like Kemenag (Religious Affairs Office), FKUB (Forum for Religious Harmony), Education Institutions, Executive Institutions, Legislative Institutions, Judicative Institutions, Media and NGOs in Karimun.*

Key words: Intolerance; Indonesian Police; Society; Radicalism; Synergy

PENDAHULUAN

Dasar dari ketatanegaraan NKRI adalah Pancasila (Pigome, 2011), maka gerakan-gerakan yang bersifat radikalisme di Indonesia akan sangat merugikan ketatanegaraan tersebut. Adanya gerakan radikalisme memberikan dampak buruk terhadap sistem negara dimana negara akan dipandang rendah oleh bangsa lain dan yang pasti

dampak terhadap masyarakat bahwa masyarakat tidak lagi mendapatkan rasa aman. Hal ini bersesuaian pada pancasila yakni sila yang berkenaan dengan ketuhanan yang Maha Esa dimaksudkan pemahaman dari kalimat ini adalah tidak ada satu agamapun mengajarkan tentang kekerasan apalagi cenderung radikal (Abdillah, 2014). Tindakan intoleransi dan radikalisme berawal dari pemahaman keyakinan tertentu yang paling benar sedangkan kelompok lain yang

berbeda adalah salah. Sesuatu yang berawal dari intoleransi maka jika dibiarkan akan menjadi radikalisme. Selanjutnya jika bibit radikalisme ini mendapat tempat atau suasana yang kondusif maka akan berkembang menjadi terorisme (Darraz, 2013). Kebanyakan kelompok intoleransi yang berkembang saat ini mengatasnamakan agama tertentu. Dalam perkembangannya mereka menggunakan media teknologi informasi dan media-media sosial lainnya dalam menyebarkan pemahamannya kepada masyarakat dengan memilintir hadits sebagai dasar kebenaran melakukan tindakan radikal (Asrori, 2015). Munculnya konflik sosial ditengah masyarakat membutuhkan cara khusus untuk pencegahannya, dalam hal ini oleh pemerintah Indonesia melalui aparat terkait yang menangani, salah satunya adalah aparat kepolisian (Prasetyo, 2016).

Keberadaan kelompok radikal dan intoleransi secara umum ditandai dengan oleh gagasan dan pemikiran intoleransi berbentuk ujaran kebencian, namun lambat laun hal tersebut berubah menjadi suatu perbuatan dalam bentuk kejahatan kebencian. Kebencian yang ada pada seseorang berawal dari ketidak tenang jiwa (Hadi, 2015). Adapun yang dimaksud dengan ujaran kebencian adalah perbuatan melalui kata-kata dan tulisan yang berbentuk hasutan, atau menyulut serta menyebarkan benih kebencian kepada pihak lain dengan cara mempertajam jurang pemisah dan perbedaan, biasanya terkait suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan atau kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit serta etnis (Ridho, 2018).

Dalam rangka upaya pencegahan paham radikalisme dan intoleransi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, maka yang bertanggungjawab bukan saja pihak kepolisian namun sangat diperlukan partisipasi seluruh elemen masyarakat. Secara kelembagaan, pencegahan dan penindakan pidana terorisme dilakukan oleh aparat Negara sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 9 tahun 2013 (Republik Indonesia, 2013) tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme dan Perpres. Nomor 12 tahun 2012 tentang perubahan atas Perpres nomor 46 tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan terorisme. Namun pada aspek lain diperlukan keterlibatan masyarakat secara aktif terhadap pencegahan terorisme dan paham radikal, tingkat penyebaran paham radikal dan intoleransi. Atas semua itu sangat diperlukan antisipasi dari dari seluruh elemen masyarakat dan diharapkan mampu menciptakan keberlangsungan kehidupan sosial bermasyarakat (Terorisme, 2016).

Polri bertugas memberikan pelayanan keamanan dan ketertiban kepada masyarakat maka Polri sudah lama mengindikasikan eksistensi kelompok radikal dan intoleransi di Indonesia. Secara umum langkah-langkah yang dipersiapkan oleh Polri bertujuan untuk pencegahan munculnya kekerasan yang bermuara pada konflik sosial.

Penanganan kelompok radikal dan intoleransi merupakan salah satu program optimalisasi aksi menuju Polri yang semakin profesional, modern dan terpercaya (Promoter) melalui fungsi Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Adapun tugas pokok dari Bhabinkamtibmas adalah sebagai garda terdepan (Widjajanto, Perwita, Rezasyah, & Hersutanto, 2013), atau corong dalam menyampaikan pesan-pesan Polri secara langsung kepada masyarakat dan selanjutnya membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam hal keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). (Surbakti, 1992) Setiap kesatuan Polri di Indonesia mempunyai unit Bhabinkamtibmas, begitu juga dengan Kepolisian Resort Karimun. Menurut informasi awal melalui observasi penelitian bahwa di kabupaten Karimun pernah terdapat aliran Syiah yang mana komunitas masyarakat yang menganut aliran ini sudah berkembang. Hal ini menimbulkan keresahan ditengah masyarakat. Aparat kepolisian bekerjasama dengan aparat pemerintah Kabupaten berupaya mengadakan komunikasi secara intensif serta mengadakan pembinaan dan pendekatan-pendekatan terhadap kelompok tersebut sehingga akhirnya saat ini tidak ada lagi kelompok Syiah tersebut.

Kesalahpahaman dalam mengamalkan hadits juga berdampak pada perilaku yang keliru yang bisa jadi dapat membuat orang yang memahami hadits itu berubah menjadi radikal, seperti potongan hadits berikut yang artinya: "Barangsiapa diantara kamu melihat kemungkaran maka cegahlah dengan tangan, kalau ia tidak sanggup (berbuat demikian), maka hendaklah ia mengubah dengan lisannya, dan kalau tidak sanggup (pula), maka hendaklah ia melakukan dengan hatinya (mendo'akan), yang demikian adalah lemah-lemah iman." (H.R. Ahad, Muslim dan Ashab as-Sunan). Mencegah dengan tangan tersebut bukanlah dimaknai dengan kekerasan, tetapi dengan kekuasaan. Apabila hadis dipahami dengan tekstual saja maka cara penolakan terhadap kemungkaran yang utama dengan cara kekerasan, yang artinya menggunakan tangan. Harusnya masyarakat tahu bahwa tidak semua hadis dapat dipahami secara tekstual. Adakalanya dipahami secara kontekstual (Khamid, 2016).

Pada Maret 2016 terjadi penyerangan terhadap anggota Polsek Balai, setelah dilakukan interogasi diperoleh informasi bahwa pelaku penyerangan mendapatkan paham radikal dari internet. Namun demikian tidak tertutup kemungkinan bahwa kejadian tersebut dapat terulang, hingga perlu diupayakan pencegahan terhadap masuk dan beredarnya paham radikal dan intoleransi terhadap masyarakat di kabupaten Karimun. Dalam rangka penjabaran Program Prioritas Promoter Kepolisian Resort Karimun sangat gencar mengadakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam Rangka pencegahan

dan penanganan kelompok radikal pro kekerasan dan intoleransi seperti kegiatan FGD dengan melibatkan MUI, FKUB, Lembaga Pendidikan, Lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif, tokoh masyarakat, tokoh adat.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (Gunawan, 2013) Penelitian lapangan merupakan penelitian kualitatif di mana menggunakan pengamatan dan menjadi partisipan dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati budaya setempat. Roice Singleton (dalam Fatahillah, 2018), penelitian lapangan berasal dari dua tradisi yang terkait yakni antropologi dan sosiologi dimana etnografi merupakan studi antropologi dan etnomethodologi merupakan studi sosiologi.

Pendekatan yang digunakan ialah wawancara mendalam kepada aktor-aktor kunci dan melakukan Focus Group Discussion (FGD) dengan *stakeholders* kepada anggota komunitas. Secara praktis penelitian dilakukan menggunakan Pendekatan metode *Participatory Action Research* PAR (Yaumi, 2016). Penelitian ini memperhatikan perubahan sosial, yang melihat proses pemberdayaan dapat mewujudkan tiga tolak ukur, yakni adanya komitmen bersama dengan masyarakat, adanya *local leader* dalam masyarakat dan adanya institusi baru dalam masyarakat yang dibangun berdasarkan kebutuhan. Informan dalam penelitian ini sebanyak 3 orang dari pihak polres dan 3 dari masyarakat. Analisis data kualitatif menggunakan Teknik Komparatif Konstan dengan menempuh beberapa tahapan analisis yaitu: Pertama, menempatkan data ke dalam kategori-kategori. Kedua, memperluas kategori tersebut sehingga diperoleh data yang murni dan tidak tumpang tindih satu dengan yang lainnya. Ketiga mencari hubungan antara kategori. Keempat, menyederhanakan dan mengintegrasikan data ke dalam struktur teoritis yang koheren.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sinergi Polri bersama masyarakat yang dimaksud di sini adalah bagaimana tugas Polri akan lebih bisa terealisasi dan mencapai tujuan dalam pencegahan kelompok radikal pro kekerasan dan intoleransi dilakukan dengan melibatkan masyarakat. Dimulai saat bergulirnya reformasi tahun 1998 banyak perubahan yang terjadi di pemerintahan ditandai dengan bubarnya pemerintahan orde baru dan digantikan dengan pemerintahan reformasi yang dipimpin oleh Presiden BJ. Habibie.

Kapolri dalam meningkatkan integritas dan kedisiplinan anggota yang dibentuk didalam paradigma dan organisasi. Mengingat pada masa Reformasi tidak sedikit dari anggota kapolri tertangkap dan terungkap ke publik sedang melanggar kode etik profesi bahkan juga ada

sebagai Polri pada saat itu terjerat hukum seperti, suap, korupsi, rekening gendut, narkoba dan lainnya. Selain kasus hukum diatas, Polri dan TNI juga sering terlibat serang antara anggota yang terjadi dilapangan dan ketegangan antara lembaga penegak hukum masih mewarnai perjalanan reformasi Kepolisian. Adapun tugas pokok dari Kepolisian Negara Republik Indonesia; memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sehingga merasa memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penegakan Hukum.

Tindakan radikal merupakan perubahan dalam cara berpikir yang dilakukan secara paksaan baik secara politik maupun social (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Jika dilihat dari pandangan keagamaan, radikalisme agama diartikan sebagai pemahaman pada keagamaan yang mengacu kepada pondasi agama yang sangat mendasar dengan fanatisme keagamaan yang sangat tinggi, sehingga dari pemahaman tersebut banyak yang menggunakan kekerasan kepada orang lain yang berbeda paham atau berbeda aliran untuk mengaktualisasikan pemahaman keagamaan yang dianut dan dipercayai untuk dipaksa terima.

Berdasarkan pengertian radikalisme tersebut, maka kesan yang sangat melekat dari gerakan radikalisme itu ialah kesan yang negatif, kesan negatif tersebut yaitu adanya tindakan paksaan dan tindakan kekerasandalam upaya mengaktualisasikannya. Adapun dalam konteks ini, semua agama tidak ada yang mengajarkan untuk radikal, sekalipun itu agama Islam yang di identikan selalu melakukan kekerasan. Islam adalah agama yang pengasih dan menebar kebaikan tanpa melakukan kekerasan dan islam merupakan agama yang mengajarkan kasih sayang, bersikap lemah lembut, selalu berbuat baik dan adil, serta membangun sikap toleransi. Bahkan didalam Al-Qur'an telah menegaskan bahwa Islam sebagai agama Rahmatan lil 'alamin (pembawa rahmat bagi seluruh alam). Allah SWT berfirman didalam QS. Al-Anbiyah, 107:

“Dan tiadalah Kami utus engkau (ya Muhammad) melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam”

Al-Qur'an diturunkan sebagai pedoman hidup manusia untuk mencapai kebahagiaan dan kedamaian di dunia dan akhirat. Yang mana kedamaian itu termasuk kedalam kategori kebaikan, oleh karna itu jelas sekali bahwa Al-Qur'an mengajarkan kebaikan dan melarang perbuatan yang tercela (buruk). “Rahmat” berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti kelembutan, pengampunan dan kasih sayang. Agama Islam juga memerintahkan kaum Muslimin untuk menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran. Akan tetapi bila didalam mencegah kemungkaran itu menimbulkan kemungkaran yang lain, maka pencegahan yang seperti ini harus ditinggalkan. Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan “mencegah kemungkaran itu ada empat tingkatan:

1. Menyingkirkan kemunkaran dan digantikan dengan lawannya (yaitu kemakrufan);
2. Menyingkirkan kemunkaran dengan mengurangnya walau pun tidak menghapuskan secara keseluruhan;
3. Menyingkirkan kemunkaran, tetapi kemudian muncul kemunkaran yang serupa itu;
4. Menyingkirkan kemunkaran tetapi kemudian muncul kemunkaran yang lebih jahat daripadanya.

Dari prinsip-prinsip tersebut dapat dilihat bahwa islam adalah agama yang rahmat bagi kaum muslim dan bagi umat manusia yang lain. Islam merupakan agama yang membenci secara langsung mengenai aksi kezaliman apapun itu bentuknya dan apapun itu alasannya, karan islam agama yang senantiasa mengajarkan dan memerintahkan kepada ummatnya untuk selalu berbuat kedamaian, persahabatan dan harus saling kasih sayang sekalipun dengan agama selain islam. Didalam Al-Qur'an mengatakan bahwa orang yang melakukan aksi kezaliman termasuk orang-orang yang merugi dalam kehidupannya, merugi disini dia tidak akan mendapatkan syurganya Allah. Orang yang melakukan kezaliman dia akan diicap di dunia sebagai pelaku kejahatan dan di akhirat akan dimasukkan di api neraka. Allah SWT, berfirman:

Artinya: Katakanlah, “*apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya?*” *orang yang sedang menyia-nyikan kehidupannya didunia ini, sedangkan dia merasa perbuatan yang mereka perbuat adalah perbuatan sebaik-baiknya. Orang tersebut adalah orang kafir terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan (Kafir terhadap) perjumpaan dengan Dia. Dan terhapuslah amalan-amalan mereka dan kami tidak menjumpai amalan satu pun dari mereka pada hari kiamat. Demikian balasan mereka itu ialah neraka jahanam, yang disebabkan atas kekafiran mereka dan disebabkan mereka menjadikan ayat0ayat-Ku dan rasul-rasul-Ku sebagai bahan olok-olok.*”

Menurut Syariat Islam ada pemahaman yang dikenal dengan *Amar Ma'ruf Nahi Mungkar*, bahwa amalan ini merupakan amalan yang mengajarkan untuk melihat amal kebaikan dan amal keburukan. Pemahaman ini bisa juga mendatangkan kekeliruan jika dipahami dengan salah dan bisa menimbulkan kekerasan. Rasulullah SAW bersabda mengenai Nahi Munkar:

“Barangsiapa di antara kamu melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangan, kalau tidak sanggup (berbuat demikian), maka hendaklah ia mengubah dengan lisannya, dan kalau tidak sanggup (pula), maka hendaklah ia melakukan dengan hatinya (mendo'akan), yang demikian adalah selemah-lemah iman.”(H.R. Muslim No. 186).

Jika hadis ini dipahami secara tekstual, maka nahi mungkar akan dipahami dengan cara kekerasan, yaitu dengan tangan. Tidak semua hadis dan ayat Al-Qur'an dapat di pahami dengan cara tekstual, melainkan dengan cara penafsiran yang dilakukan oleh para ulama-ulama. Adapun penafsiran secara kontekstual arti dari mencegah dengan tangan itu bukan termasuk dengan kekerasan, akan tetapi dengan kekuasaan. Artinya mencegah kemungkaran dengan kekuasaan yang dimiliki, seperti pemimpin harus mencegah kemungkaran yang dilakukan oleh bawahannya dari perilaku kemungkaran yang dimana perilaku tersebut dapat mencelakakan diri sendiri. Contoh yang lain seperti orang tua yang melarang anaknya untuk melakukan kemungkaran karna orang tua mempunyai kekuasaan atas anaknya, begitu seterusnya.

Rasulullah bersabda dan mengeluarkan pesan kepada sahabatnya ketika dalam penyebaran agama Islam (HR. Muslim no. 4622):

“Gembirakanlah, jangan kamu buat mereka lari (karena ketakutan), dan mudahkanlah, jangan kamu persulit”.

Dalam sudut pandang Islam salah satu yang menyebabkan munculnya paham radikalisme adalah disebabkan oleh kedangkalan ilmu dalam memahami agama. Hal ini telah membawa persoalan yang cukup serius dalam mempertajam perpecahan dan tindakan inoleran diantara umat Islam, yaitu di mulai dari munculnya Khawarij yang memberontak dan keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib, setelah terjadi perang Shiffin antara pasukan Ali melawan Mu'awiyah bin Abi Sufyan yang kemudian berakhir dengan proses tahkim (perundingan) atau arbitrase yang pada akhirnya memutuskan penurunan Ali bin Abi Thalib dari kursi Kekhalifahan. Gerakan kaum Khawarij itu merupakan paham ekstrem dan radikal pertama yang mewarnai sejarah umat Islam yang kemudian berpengaruh terhadap paham-paham keagamaan yang muncul belakangan di dalam Islam.

Intoleransi merupakan kebalikan dari kata toleransi. Yang memiliki arti ialah sikap yang mencerminkan adanya kebencian, iri hati, saling tidak memahami, tidak mau mengalah, dan lebih mementingkan diri sendiri atau kepentingan golongan sendiri. Mereka tidak menghargai atas hak yang telah dititipkan Tuhan kepada mereka. Mereka akan selalu mengatakan bahwa mereka adalah benar, ikuti atau tertindas, ikuti atau pergi. Sajarawan Inggris pada abad ke-19 bernama Arnold Toynbee, pembentuk agama yang menganiaya agama lain karna “dianggap salah”, ironisnya membuat agama yang menganiaya agama lain itu menjadi salah dan merusak legitimasinya sendiri. Konsep modern yang mengenai intoleransi berkembang dari kontroversi religious antara Agama Kristen dan Agam Katolik pada abad ke-17 dan

abad ke-18 di Inggris. Doktrin yang mengenai “Toleransi beragama” pada saat itu bertujuan untuk menghapuskan sentiment-sentimen dan dogma-dogma beragama dari kekuasaan politik.

Intoleransi tidak cukup hanya dimaknai dengan kekerasan perbedaan agama. Intoleransi seharusnya dilihat dari rangkaian atau proses yang membantu dalam memahami bagaimana cara-cara penyebaran kata-kata, ide dan aksi-aksi yang bernuansa kebencian yang terkait dengan praktik kekerasan. Beberapa ahli memposisikan intoleransi dan kekerasan terhadap agama itu adalah suatu dua hal yang berbeda. Jika intoleransi itu dilihat dari simbolis, imajinasi, fantasi dan retorik, maka berbeda dengan kekerasan agama yang dilihat secara nyata dan actual.

Polri sebagai Katalisator yang bertugas sebagai pendorong terwujudnya toleransi dan sebagai penetralisir terhadap perbedaan pendapat yang dimana perbedaan tersebut bisa menimbulkan konflik serta mempercepat proses kerukunan dan toleransi. Polri sebagai Negosiator yaitu nego yang berarti perundingan, maka disini sebagai seorang juru perunding atau penengah dalam mengatasi dan menyelesaikan permasalahan yang ada dan mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Polri memiliki kebijakan; pertama, *Proactive Policing Strategy* yaitu deteksi dini, primitive, preventive sebagai langkah awal dalam mengatasi konflik agar tidak terjadi konflik yang terbuka. Kedua, koodinatif dan sinergitas yaitu penyelesaian yang dilakukan harus komprehensif, dalam artian harus mampu melibatkan semua orang didalam menyelesaikan konflik tersebut, termasuk elemen masyarakat dan pemerintah secara sinergis. Ketiga, cegah intoleransi yaitu melakukan pencegahan sedari dini mungkin supaya intoleransi itu tidak meluas dan menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa. Keempat, penindakan tegas terhadap tindakan intoleransi yaitu memberikan tindakan hukum secara tegas bagi yang melakukan tindakan intoleransi tersebut.

Adapun cara-cara polisi dalam upaya pencegahan proses radikalisme dengan cara menetralsi orang-orang yang berpotensi menjadi orang yang melakukan perekrutan dengan mengenali kelompok inti, pendukung dan simpatisan dengan melenahkan ideology radikal yang mereka coba sebarkan dengan membuat ideology yang baru yang bersifat moderat dengan cara memblokir media social dan melakukan penyebaran ideology tandingan tersebut kepada kelompok masyarakat yang rentan terkena radikalisme melalui media social dan melakukan bimbingan dan penyuluhan, dengan memahami konteks social dan budaya yang ada akan lenih mudah untuk melakukan bimbingan dan penyuluhan disetiap lapisan masyarakat dengan memanfaatkan kearifan local secara mengawai media yang menjadi sarana penyebaran paham radikalisme yakni media social, media elektronik dan media cetak.

Secara umum kepolisian melakukan strategi pendekatan lintas sektoral dalam rangka upaya pencegahan radikalisme dan intoleransi yaitu:

1. Galang dan deradikalisasi yang dilakukan terhadap jaringan radikal apabila telah ada dan tumbuh di wilayah baik kelompok atau perorangan dengan memberdayakan ormas atau agama.
2. Koodinasi terpadu antara Polri, TNI, Pemda untuk pendekatan deteksi dini dan dengan melakukan uoaya pro aktif untuk mencegah radikalisasi serta penindakan yuridis terhadap bibit-bibit tindakan radikal.
3. Monitoring Lapas. Back up monitoring apabila wilayah masing-masing terdapat Lapas yang didalamnya terdapat Napi teroris tentang kegiatan dan tingkah lakuk mereka.
4. Monitoring eks Napi yakni *back up* monitoring diwilayah masing-masing apabila terdapat warga eks napi terror yang telah bebas dan kembali ke lingkungannya.
5. Berdayakan Polmas yakni penguatan system Swakarsa serta memberdayakan tiga pilar Polmas untuk pencegahan

Sebagaimana dijelaskan pada bab pendahuluan bahwa yang dimaksud sinergitas Polri bersama masyarakat dalam upaya pencegahan radikalisme pro kekerasan dan intoleransi yang dilakukan oleh Polres Karimun penulis fokuskan pada fungsi Bhabinkamtibmas sebagai pelaksanaan tugas tersebut. Maka uraian berikut adalah melihat lebih dekat tentang keberadaan Satuan Bhabinkamtibmas di tubuh Pori. Berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara RI No.Pol Kep./8/II/2009 tentang perubahan buku petunjuk lapangan Kapolri No. Pol:BUJUKLAP/17/VII/1997 tentang sebutan Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babin kamtibmas) menjadi Bhayangkara Pembinaan Kamtibmas (Bhabinkamtibmas) dari tingkatan kepangkatan Brigadir sampai dengan Inspektur. Sedangkan menurut pasal 1 ayat 4 peraturan kapolri nomor3 tahun 2015 tentang masyarakat dikenakan sanksi pemolisian dengan Bhabinkamtibmas yang dimasad adalah pengemban Polmas di desa/kelurahan.

Melaksanakan kunjungan kepada masyarakat dengan bertujuan untuk mendengarkan keluhan warga masyarakat mengenai permasalahan yang dihadapi tentang Kamtibmas dan memberikan bimbingan penjelasan serta cara penyelesaiannya dan memelihara hubungan silaturahmi yang baik. Membimbing dan melakukan penyuluhan di bidang hukum dan Kamtibmas dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran akan hukum dan Kamtibmas dengan menjujung tinggi HAM. Dan melakukan penyebarluasan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri yang berkaitan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas). Mendorong pelaksanaan siskamling dalam

pengamanan lingkungan dan kegiatan masyarakat dengan mengkoordinasikan upaya pembinaan Kamtibmas dengan perangkat deasa dan pihak-pihak disekitar termasuk didalamnya masyarakat sekitar, menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif dengan memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang memerlukan dalam melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi, motivasi kepada masyarakat dalam Harkamtibmas dan pemecahan masalah yang terjadi dan kejahatan yang terjadi dilingkungan masyarakat.

Adapun tugas pokoknya adalah memberikan pembinaan kepada masyarakat, mendeteksi dan melakukan mediasi/ negosiasi supaya terciptanya kondisi yang kondusif di desa atau kelurahan setempat. Dalam melaksanakan tugasnya, Bhabinkamtibmas melakukan beberapa kegiatan kunjungan dari rumah ke rumah di seluruh wilayah sekitar dengan memberikan perlindungan sementara kepada masyarakat, orang yang tersesat dan orang yang mengalami kejahatan supaya masyarakat sekitar dapat meberikan informasi tentang terjadinya tindak pidana agar dapat di tindak secara lanjut, dan melakukan pembantuan untuk memecahkan masalah yang terjadi dan melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat dengan mengikut sertakan dalam memberikan bantuan kepada masyarakat terutama kepada korban bencana alam dan wabah penyakit dan memberikan bimbingan kepada masyarakat atau komunitas yang ada terkait dengan Kamtibmas dan Pelayanan Polri.

Adapun wewenang yang dimiliki Bhabinkamtibmas untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di kalangan masyarakat atau komunitas dengan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut kesepakatan FKPM dalam memlihara keamanan lingkungan masyarakat, dengan menumbuhkan dan mengawasi aliran yang di percayai oleh masyarakat yang dimana kepercayaan itu dapat juga menimbulkan perpecahan dan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa dengan mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) dan melakukan tindakan awal ditempat tersebut.

Dalam rangka pencegahan radikalisme dan intoleransi maka seluruh elemen masyarakat harus berperan aktif yakni terus menjaga kebhinnekaan dan sosialisasi 4 pilar sebagai berikut, pertama: Lembaga Pendidikan, dalam hal ini menanamkan pemahaman sejak dini bahwa perbedaan bukanlah sesuatu yang harus dipertentangkan, namun harus menjadi kekuatan yang saling melengkapi, kedua: Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Daerah berperan membangun kesadaran dan memberikan arahan contoh serta tauladan dalam kehidupan yang penuh dengan keharmonissan dan toleransi, ketiga: Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif berperan menjamin kehidupan yang penuh dengan toleransi dan harmonisasi melalui: a) penguatan regulasi dan penerapannya, b) mengalokasikan

dukungan anggaran agar badan, struktur dan system dapat bekerja dalam kehidupan masyarakat sehingga tercipta nilai-nilai kebhinnekaan, c) mencegah dan mengatasi ancaman terhadap kebhinnekaan

Upaya pencegahan Radikalisme pro kekerasan dan intoleransi tak dapat mengabaikan peran masyarakat luas dan lingkungan sosial. Kontribusi masyarakat sangatlah besar, baik dalam konteks memutus ideologisasi, mendeteksi keberadaan kelompok teroris, maupun dalam mengontrol tindak-tanduk jaringan kekerasan ini. Bahkan, peran masyarakat dan lingkungan juga sangat signifikan dalam mengungkap jaringan terorisme. Masyarakat berhak mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya atas peran yang dilakukannya. Masyarakat dan lingkungan sosial juga bisa berperan dalam upaya pencegahan dan pendeteksian dini terhadap potensi radikalisme dan intoleransi. Bahkan, perannya dapat dioptimalkan sebagai sarana melakukan upaya preventif dalam memutus rantai terorisme sampai ke akarnya.

Untuk kepentingan sajian data temuan penelitian maka dilakukan wawancara secara intensif terhadap informan penelitian yang sudah ditetapkan pada bab metodologi sekaligus data-data dokumentasi yang diperoleh dari data-data di Polres Karimun melalui Kasium. Wawancara dilakukan terhadap Kasat Bimas, Kanit Bimas, Personil Bhabinkamtibmas. Selanjutnya data lapangan diperoleh melalui wawancara dengan informan pendukung dari unsur masyarakat yakni Ketua FKUB, Ketua Dai, Kepala Kantor Kemenag, Tokoh Pendidikan Kabupaten Karimun.

Dalam rangka pencegahan kasus-kasus radikalisme dan intoleransi maka Polres Karimun berupaya secara intensif melakukan sosialisasi melalui berbagai kegiatan dengan melibatkan stakeholder atau pemangku kepentingan dan masyarakat secara langsung yang secara umum pelaksana kegiatan ini adalah dari unit Bhabinkamtibmas. Hal ini diungkapkan oleh Kapolres Karimun melalui Kasat Bimas. Pada kesempatan lain juga diungkapkan oleh bapak Iptu N, Briпка U dan Briпка A sebagai berikut.

1. Sambang warga

Dalam kegiatan sambang warga yang dilakukan oleh personil Bhabinkamtibmas yaitu dengan cara *door to door* ke rumah-rumah warga secara kontinyu, guna untuk mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan Kamtibmas dan memberikan penjelasan serta penyelesaiannya, memelihara hubungan silaturahmi/ persaudaraan. Dalam melakukan sambang warga yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas juga dikenal dengan istilah 4 D 1C yakni dating, duduk, dengar, dialog dan catat. Kegiatan ini dapat dilakukan dimana saja, seperti dirumah-rumah warga, warung, toko dan tempat-tempat yang ada komunitas atau kumpulan-kumpulan warga.

2. Pembimbingan dan penyuluhan

Bimbingan dan penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan kepatuhan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bimbingan dan penyuluhan ini juga untuk mencegah masuknya paham radikal dan Intoleransi masuk ke wilayah hukum Polres Karimun. Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah paham radikal (deradikalisme) seperti ISIS yang sangat anti dengan Pancasila.

Bhabinkamtibmas menyambangi warga dengan cara *Door To Door System* (DDS) di seluruh desa yang ada di wilayah hukum Polres Karimun. Kegiatan diisi dengan memberikan sosialisasi tentang paham radikal yang anti Pancasila. Dalam kegiatan ini, Bhabinkamtibmas mendatangi para tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat. Bhabinkamtibmas juga mendatangi setiap ada perkumpulan warga seperti warung kopi, tempat ibadah, bengkel, kantor desa, petani, mahasiswa yang sedang melaksanakan KKN dan tempat-tempat keramaian lainnya. Selain memberikan pesa-pesan Kamtibmas para Bhabinkamtibmas juga mengingatkan kepada masyarakat bila ada pendatang yang mengunjungi desanya bila mencurigakan agar segera melaporkan kepada tiga pilar desa, Bhabinkamtibmas, Babinsa dan Kepala Desa.

3. Penyebarluasan informasi

Setiap wilayah kelurahan atau desa peran Bhabinkamtibmas adalah sebagai garda terdepan untuk menangani permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat. Berbagai upaya penyebaran informasi terkait bahaya radikalisme dan intoleransi dilakukan oleh Bhabinkamtibmas diantaranya memasang stiker tempat-tempat keramaian warga, yang berisi himbauan tentang paham Radikalisme dan dan intoleransi. Penyebaran Informasi juga dilakukan melalui media-media social.

Selain itu penyebaran informasi dilakukan sebagaimana arahan Kapolri yakni dengan memperkenalkan ilmu pengetahuan, memberikan pemahaman keilmuan yang benar, memberikan pemahaman yang benar tentang nilai-nilai Pancasila, meminimalisir kesenjangan sosial, menjaga persatuan dan kesatuan, mendukung aksi perdamaian dan berperan aktif mencegah masuknya paham radikalisme dan terorisme.

4. Siskamling

Salah satu upaya yang dilakukan institusi Polri dalam menciptakan keamanan dan ketertiban dan menciptakan rasa aman dan nyaman adalah pembentukan dan pembinaan sistem keamanan lingkungan yang kita kenal dengan sebutan Siskamling. Dalam menjalankan tugas Siskamling Bhabinkamtibmas bekerjasama dengan aparat kelurahan atau desa, pemuda dan warga masyarakat. Tugas tersebut mencakup melakukan pendataan warga

secara berkala, mengecek rumah-rumah kos/sewa serta mewaspadaai pendatang yang tidak mempunyai kartu identitas.

Saat ini kegiatan Siskamling sudah dipengaruhi oleh perkembangan media teknologi. Disamping kegiatan Siskamling yang dilakukan secara konvensional juga sudah dilakukan Siskamling di media sosial (Medsos). Caranya dengan membentuk grup-grup messenger di setiap RT dan RW. Selanjutnya dari informasi di Medsos tersebut diharapkan terdeteksi hal-hal yang terjadi di lingkungan masyarakat terutama masalah-masalah sosial yang mengarah kepada tindakan radikalisme dan intoleransi.

5. Pelayanan.

Dalam membangun kerjasama yang bersinergi dengan masyarakat mencegah tindakan radikalisme dan intoleransi dalam hal ini Bhabinkamtibmas selalu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan berpartisipasi aktif dalam kegiatan masyarakat seperti menghadiri setiap undangan warga, pengajian yang diadakan warga, memberi solusi kepada masyarakat yang melaporkan setiap gangguan keamanan, menghadiri gotong royong warga

6. Menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif.

Dalam rangka pencegahan radikalisme dan intoleransi di wilayah hukum Polres Karimun melalui fungsi Bhabinkamtibmas melakukan upaya mengajak masyarakat melakukan kegiatan-kegiatan positif seperti Siskamling, olahraga bersama, gotong royong dan kegiatan-kegiatan social yang mempersempit gerakan radikalisme dan intoleransi.

7. Koordinasi.

Bhabinkamtibmas bertugas sebagai penyapai pesan-pesan dari Kamtibmas secara umum serta melakukan koordinasi ke aparat desa atau kelurahan dalam situasi Kamtibmas di wilayah polres Karimun. Perlunya koordinasi ini dikarenakan Bhabinkamtibmas tidak dapat selalu hadir di di Desa atau di Kelurahan binaan. Oleh karena itulah, diperlukan kerjasama dan saling mengkoordinasikan secara baik antara Bhabinkamtibmas dengan Kepala Desa, Kepala Suku, Lurah, Camat, RT, dan RW serta Tokoh masyarakat yang ada di sekitar, tujuannya lain tidak bukan hanyalah untuk selalu terjalin komunikasi dalam menyelesaikan permasalahan. Adapun tindakan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas ini merupakan suatu wujud layanan masyarakat yang di lakukan oleh Bhabinkamtibmas supaya terjaga kamtibmas di wilayah tersebut. Tujuan yang lain ialah untuk mendatangkan diri dengan masyarakat, sehingga masyarakat merasa aman, tentram, dan tidak merasa kegelisahan lagi yang di karenakan keamanan tidak ada.

8. Konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi dan motivasi
Upaya pencegahanyang dilakukan oleh Polres Karimun melalui fungsi Bhabinkamtibmas selanjutnya adalah melakukan konsultasi dengan pihak internal Polri itu sendiri yakni kepada atasan dan atasan akan memberikan arahan-arahan terkait tugas Kamtibmas yang akan dilaksanakan oleh anggota Bhabinkamtibmas. Adapun konsultasi dengan pihak eksternal Polri adalah dengan tokoh masyarakat serta aparat terkait. Pada tugas mediasi, Bhabinkamtibmas melakukan langkah-langkah mediasi untuk mencari solusi jika timbul permasalahan ditengah masyarakat terkait usaha-usaha radikalisme dan kasus-kasus intoleransi.

Dalam hal negosiasi yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas jika muncul permasalahan kamtibmas maka anggota Bhabinkamtibmas bertindak sebagai negosiator untuk mencari solusi pemecahan masalah tersebut. Selanjutnya sebagai fasilitator Bhabinkamtibmas dituntut untuk bisa memfasilitasi masyarakat dan berupaya menyelesaikan masalah tersebut melalui forum-forum yang lebih tepat seperti FKPM ataupun bermitra dengan instansi pemerintah di tingkat desa, kelurahan dan stakeholder yang ada ditengah masyarakat. Tugas terakhir dalam rangka upaya pencegahan radikalisme dan intoleransi yang dilakukan oleh Polres Karimun melalui fungsi Bhabinkamtibmas adalah memberikan motivasi kepada masyarakat terkait peran serta dalam pencegahan terjadinya tindakan radikalisme dan intoleransi.

Kasus-kasus radikalisme dan intoleransi dapat diminimalisir apabila terjadi sinergi aparat kepolisian dengan masyarakat, dalam hal ini segala unsur masyarakat dapat melakukannya melalui berbagai sosialisasi yang dilakukan diantaranya melalui :

1) Lembaga Pendidikan

Sosialisasi pencegahan radikalisme dan intoleransi kepada siswa dilakukan oleh pihak sekolah yaitu menanamkan pemahaman sejak dini bahwa perbedaan bukanlah sesuatu yang harus dipertentangkan, namun harus menjadi kekuatan yang saling melengkapi. Dalam hal ini juga pihak kepolisian mengadakan penyuluhan-penyuluhan ke sekolah-sekolah dalam berbagai jenjang pendidikan.

2) Tokoh masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda
Membangun kesadaran & memberikan arahan, contoh serta tauladan dalam kehidupan yanggg penuh dengan keharmonisan & toleransi

3) Lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif
Menjamin kehidupan yang penuh dengan toleransi & harmonisasi melalui:

a. Penguatan regulasi & penerapannya

b. Mengalokasikan dukungan anggaran agar badan, struktur & sistem dapat bekerja dalam kehidupan

Sinergi Polri Bersama Masyarakat di Tanjung Balai Karimun dalam Mencegah Radikalisme dan Pengamalan Hadist Intoleransi

(Aslati, Silawati, Darmawati, dan M. Fahli Zatrachadi)

masyarakat sehingga tercipta nilai-nilai kebhinnekaan
c. Mencegah & mengatasi ancaman terhadap kebhinnekaan

Selanjutnya dalam pencegahan radikalisme dan intoleransi oleh Polri bersinergi dengan masyarakat pada umumnya menggunakan pendekatan kultural dalam mencegah penyebaran paham radikal dan intoleransi hal ini didasarkan fakta bahwa tidak ada satupun kultur masyarakat terutama di Kabupaten Karimun yang memberi celah pada perilaku anarkis, sekalipun hal itu dilakukan atas nama agama karena radikalisme dan intoleransi menjadi paham yang inculture atau bertentangan dengan nilai-nilai budaya luhur masyarakat. Pendekatan kultural diyakini mampu menjadi alternatif dalam mencegah dan membendung paham radikalisme dan intoleransi karena mampu menyentuh langsung ke akar masalahnya yakni terkait dengan masalah lokal seperti kebijakan, keterasingan dan kemiskinan.

SIMPULAN

Untuk menciptakan Karimun terbebas dari cengkraman radikalisme, ekstrimisme dan terorisme semua pihak (eksekutif, legislatif, yudikatif, media, masyarakat) bersinergi yang kuat, membuat program/terobosan yang menyentuh sendi-sendi kehidupan serta implementasi program yang terus menerus/berkesinambungan, dengan sasaran untuk penghapusan atau mematikan radikalisme (individu, kelompok, narasi, infrastruktur dan tindakan atau perbuatannya). Hal ini sudah diupayakan oleh Polres Karimun melalui fungsi Bhabinkamtibmas dengan cara bersinergi dengan seluruh unsur masyarakat dalam rangka mendukung visi misi Polri untuk menciptakan suasana kondusif di tengah dalam kehidupan beragama dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, J. (2014). Radikalisme Agama: Dekonstruksi Tafsir Ayat-Ayat “Kekerasan” Dalam Al-Qur’an. *KALAM*, 8, (2), 281–300.
- Asrori, A. (2015). Radikalisme Di Indonesia: Antara Historisitas dan Antropisitas. *Kalam*, 9, (2), 253–268.
- Darraz, M.A. (2013). Radikalisme dan Lemahnya Peran Pendidikan Kewargaan. Dalam Menghalau Radikalitas Kaum Muda: Gagasan Dan Aksi. Jakarta: *Jurnal Institut Maarif*, 8, 154–173.
- Fatahillah, N.C. (2018). Penerapan kisah Rasulullah dalam menjaga kehormatan keluarga di Bulak Banteng Kenjeran Surabaya. Surabaya: UIN Sunan Ampel.

- Gunawan, I. (2013). *Metode penelitian kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hadi, M.F.Z. (2015). Tasawuf untuk Kesehatan Mental. *An-Nida*, 40, (1), 31–41.
- Khamid, N. (2016). Bahaya radikalisme terhadap NKRI. *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities*, 1, (1), 123–152.
- Pigome, M. (2011). Implementasi Prinsip Demokrasi dan Nomokrasi dalam Struktur Ketatanegaraan RI Pasca Amandemen UUD 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11, (2), 335–348.
- Prasetyo, D. (2016). Sinergi TNI-Polri dalam Deradikalisasi Terorisme di Indonesia. *Jurnal Keamanan Nasional*, 2, (1), 35–58.
- Republik Indonesia. (2013). Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Retrieved from Menteri Hukum dan HAM website: <https://www.ojk.go.id/apu-ppt/id/peraturan/uu/Pages/Undang-Undang-Nomor-9-Tahun-2013-tentang-Pencegahan-dan-Pemberantasan-Tindak-Pidana-Pendanaan-Terrorisme.aspx>
- Ridho, M. (2018). Ujaran Kebencian dalam Dakwah: Analisis tentang Pengejawantahan Ide Amar Ma'ruf Nahi Mungkar di Kalangan Para Da'i di Kalimantan Timur. *LENTERA*, 2, (1), 27-48.
- Surbakti, R. (1992). *Memahami ilmu politik*. Jakarta: Grasindo.
- Terorisme, B.N.P. (2016). *Strategi Menghadapi Paham Radikalisme Terorisme-ISIS*. Jakarta: Belmawa.
- Widjanto, A., Perwita, A.A.B., Rezasyah, T., & Hersutanto, B. (2013). *Penataan Kebijakan Keamanan Nasional*. Jakarta: Dian Cipta.
- Yaumi, M. (2016). *Action Research: Teori, model dan aplikasinya*. Jakarta: Prenada Media.

HUBUNGAN *E-SERVICE QUALITY* DAN *E-LOYALTY* DENGAN *E-SATISFACTION* PADA KONSUMEN GO-JEK DAN GRAB DI KOTA SEMARANG

Sri Pudjarti, Nurchayati, dan Honorata Ratnawati Dwi Putranti

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945, Semarang

E-mail: emilpujarti@gmail.com ; pandawi_ung@yahoo.co.id ; ratna.permai@gmail.com

ABSTRAK. Perkembangan di bidang internet yang begitu pesat menyebabkan perubahan dalam gaya hidup. Hadirnya internet tidak hanya pada usaha retail tetapi berkembang juga pada transportasi *online (moda online)* seperti Go-jek dan Grab, yang memberikan layanan transportasi secara *online* kepada konsumen. Kondisi ini perlu diperhatikan sebagai penyedia jasa untuk mempertahankan loyalitas pengguna jasa. Penelitian ini bertujuan mengembangkan model untuk mengeksplorasi antecedents dan konsekuensi dari *e-Loyalty*, serta menguji seberapa besar pengaruh *e-loyalty* konsumen melalui variabel *e-satisfaction* serta menganalisis pelayanan dan kepuasan berbasis elektronik membentuk loyalitas konsumen. Analisis data menggunakan metode Kuantitatif dengan sampel penelitian menggunakan random sampling dengan *purposive* sampling. Pengolahan data dengan menggunakan software SPSS versi 22. Sampling sebanyak 101 orang konsumen Go-jek dan Grab di Kota Semarang. Penyebaran daftar kuesioner dengan *Google form*. Hasil dari penelitian ini adalah tidak ada hubungan yang signifikan antara *e-Service quality* secara langsung terhadap *e-loyalty*. Hubungan positif dan signifikan antara *Service quality* terhadap *e-loyalty* melalui variabel *e-satisfaction*, sehingga dengan analisis jalur *e-satisfaction* mampu menjadi variabel *intervening*. Serta ditemukan pelayanan non elektronik juga berperan dalam loyalitas konsumen. Penemuan beberapa indikator baru untuk non elektronik diharapkan dapat dijadikan indikator dalam penelitian mendatang.

Kata Kunci: e-Service quality; e-satisfaction; e-Loyalty; moda on line

E-SERVICE QUALITY AND E-LOYALTY RELATIONS WITH E-SATISFACTION ON GO-JEK AND GRAB CONSUMERS IN SEMARANG CITY

ABSTRACT. The rapid development on the internet has caused changes in lifestyle. The presence of the internet is not only in retail business but also in online transportation (online mode) such as Go-jek and Grab, which provides transportation services online to consumers. This condition needs to be considered as a service provider to maintain the loyalty of service users. This study aims to develop a model to explore the antecedents and consequences of e-loyalty and examine how much influence consumer e-loyalty has through e-satisfaction variables and analyze electronic service and satisfaction based on consumer loyalty. Data analysis using quantitative methods with a sample of research using random sampling with purposive sampling. Processing data using SPSS version 22 software. The sampling of 101 Go-jek and Grab consumers in Semarang City. Distribution of questionnaire lists with Google form. The results of this study are that there is no significant relationship between e-Service quality directly towards e-loyalty. The positive and significant relationship between Service quality on e-loyalty through the e-satisfaction variable, so that by analyzing the path of e-satisfaction it can become an intervening variable. And found non-electronic services also play a role in consumer loyalty. The discovery of several new non-electronic indicators is expected to be used as an indicator in future research.

Keywords: e-Service quality; e-satisfaction; e-Loyalty; mode on line

PENDAHULUAN

Memasuki era industri 4.0 memaksa kita memasuki dua dunia, yaitu dunia nyata dan dunia virtual. *Internet of things* yang merupakan roh di era ini yang memberikan kondisi kepada manusia yang secara perorangan dan kelompok sangat bergantung kepada dunia virtual, semakin hari dirasa semakin *complicated* dan *smart*. <http://www.unpad.ac.id/2019/01/hadapi-revolusi-industri-4-0-apa-yang-harus-disiapkan>. Perkembangan virtual atau internet tersebut sangat pesat dan menyebabkan perubahan paradigma baru dalam gaya hidup, termasuk di dalam pola transaksi penjualan yang tidak harus bertatap muka secara langsung.

Saat ini kita hidup dalam masa ketika sebuah paradigma ekonomi baru, digambarkan dengan kecepatan,

inovasi, waktu siklus yang pendek. Kualitas dan kepuasan konsumen merupakan bagian aset yang tidak nyata, seperti pengakuan merek, pengetahuan, inovasi dan khususnya modal manusia. (Kreitner, Kinichi, 2014:13). Kecepatan perubahan proses pemasaran pada semua barang dan jasa mengharuskan memberikan pelayanan yang baik untuk tetap mempertahankan konsumen. Proses jual beli yang dulu mengharuskan kita bertatap muka, sekarang menjadi hanya sebatas “Klik” pada di *gadget* yang dapat menyambung dengan internet.

Komunikasi terjadi melalui saluran penyebaran informasi jual beli. Media internet pun selain menjadi salah satu sarana komunikasi juga memberikan peluang bagi siapa saja untuk menjalankan bisnis melalui media *online* yang disebut dengan *e-commerce* (Laurent, 2016). E-commerce merupakan proses transaksi secara terintegrasi

dengan media internet dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia (Laudon, 2012). Media massa dan media sosial menjadi saluran komunikasi lebih cepat sampai pada sasaran penerima informasi (Santi Susanti, Dwi Purnomo, Wahyu Gunawan, 2018). Pertumbuhan *e-commerce* yang matang akan dapat mencetuskan bisnis lainnya, seperti *online payment, online shopping, fulfillment, dan logistik*. Kemajuan segmen tersebut akhirnya akan mendorong industri internet lainnya untuk ikut berkembang (Akbar dan Parvez, 2009).

Pelayanan kepada konsumen secara langsung berpindah pada pelayanan *online*, yang sering disebut dengan *E-Quality service* (E-QS). E-QS berpengaruh positif pada kesuksesan bisnis online telah ditetapkan dalam literatur (Yang & Fang, 2004). Hubungan ini sering mengarah pada pembelian niat pelanggan (Aladwani, 2006), kepuasan pelanggan (Kim & Stoel, 2004), ekuitas merek situs web (Tsao & Tseng, 2011) dan loyalitas *online* (Gounaris, Dimitriadis, & Stathakopoulos, 2010; Marimon, Petnji, & Casadesus, 2012). Selain itu, literatur berfokus pada hubungan yang ada antara kualitas layanan dan nilai yang dirasakan, dan dampak ini pada kepuasan pelanggan, citra perusahaan, dan niat perilaku (Al Dmour, Alshurideh, & Shishan, 2014; Wu, 2014). Namun, terlepas dari wawasan yang diberikan oleh penelitian ini, masih lebih berfokus kepada penjualan retail dan belum menyinggung dan membahas untuk sektor transportasi *online* (Kassim & Abdullah, 2010).

Beberapa penelitian telah meneliti tentang E-service Quality (E-Sq) dan E-loyalty (E-Lt) dengan objek retail (Azam, Qiang, & Abdullah, 2012; Sundaram, Ramkumar, & Shankar, 2017). Tetapi dimungkinkan untuk penelitian objek lain karena kondisi akan berbeda (Anderson & Srinivasan, 2003). Kegiatan bisnis on line yang saat ini berkembang dengan pesat tentunya memerlukan keterlibatan pelayanan dari pemberi jasa semaksimal mungkin. Penelitian ini menemukan model penguatan dalam pelayanan gabungan antara pelayanan berbasis elektronik dan non elektronik. Pelayanan Bisnis *online* saat ini bersaing hanya berupa pengaturan “klik mouse” di *e-commerce* sehingga sangat penting perusahaan memahami cara membangun pelanggan dan kesetiaan di pasar *online*. Untuk tetap kompetitif, sebuah perusahaan harus terus menerus mengerjakan peningkatan nilai yang dirasakan bagi pelanggan untuk mencegah mereka beralih ke pesaing.

Harapan pelanggan terus meningkat dan pada kenyataannya, mungkin hampir tak terbatas elastis, jadi perusahaan tidak dapat berpuas diri lama dalam menawarkan yang dianggap nilai tertinggi kepada pelanggan (Anderson & Srinivasan, 2003). Penelitian Saiful Riza (2017) menyatakan bahwa kemudahan penggunaan aplikasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

kesetiaan pelanggan, tetapi dalam penelitian lain yang meneliti tentang bank di Irak menemukan bahwa kemudahan penggunaan aplikasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan, karena secara umum kemudahan dalam pelayanan secara elektronik sudah sangat membantu dalam menyelesaikan permasalahan sehingga menyebabkan konsumen setia terhadap suatu pilihan merek (Asgari, Ahmadi, Shamlou, Farokhi, & Farzin, 2016).

Keberhasilan dan kegagalan *online* bergantung pada seberapa baik pelanggan merasa puas Chen, Rodgers, & He (2008). Lingkungan *online* memiliki pengalaman berbeda dari lingkungan *offline* (Wolfenbarger, M., & Gilly, 2008). Indikator model kepuasan pelanggan tradisional mungkin tidak tepat ketika mengevaluasi dan digunakan sebagai indikator kepuasan konsumen dengan lingkungan non-tradisional, seperti pada kondisi *Internet-environment*. *Internet-environment* dikenal sebagai kepuasan elektronik, atau *e-satisfaction* (E-S). Literatur di bidang ini belum diperiksa secara kritis (Szymanski, D. M., & Hise, 2000), tetapi mewakili area yang berpotensi menghasilkan komponen *online* dari setiap bisnis atau organisasi yang dapat memperoleh manfaat. Mengatasi masalah ini, semakin banyak penelitian telah mulai memberikan konsep untuk mengukur, dan memodelkan kepuasan pengguna dalam *e-environment* situs web yang biasanya melayani fungsi yang sangat berbeda. Masing-masing definisi akan dirasa berbeda untuk setiap jenis bisnis seperti dalam bisnis organisasi, atau grup yang diwakili secara *online*, termasuk pemerintah, situs web pendidikan, nonprofit, dan politik. Hal menunjukkan kebutuhan untuk mengembangkan ukuran yang lebih komprehensif dari (E-S) yang dapat digunakan di seluruh disiplin dan menilai efektivitas situs web dari semua varietas.

Hubungan antara kepuasan dan Loyalitas hampir seperti intuitif (gerakan hati), beberapa peneliti telah mencoba untuk mengkonfirmasi hal ini seperti pada penelitian (Cronin & Taylor, 1992). Meskipun daya tarik intuitif, dan kekuatan hubungan antara kepuasan dan kesetiaan ditemukan hasil yang bervariasi secara signifikan dalam kondisi yang berbeda. Sebagai contoh, Jones dan Sasser (1995) menemukan bahwa kekuatan hubungan antara kepuasan dan kesetiaan tergantung pada struktur persaingan dari industri. Dalam penelitian yang lebih baru, (Oliver, 1999) menemukan kepuasan mengarah ke kesetiaan, tetapi kesetiaan sejati hanya bisa dicapai apabila faktor-faktor lain seperti jaringan sosial terlibat di dalamnya.

Pada awal tahun 2015 mulai banyak dijumpai *startup* yang mengembangkan layanan internet berupa ojek *online* dan menjadikan solusi transportasi di berbagai daerah. PT. Go-jek Indonesia merupakan salah satu perusahaan ojek *online* yang mengklaim dapat memberikan layanan yang

praktis dan efisien ditengah persoalan masyarakat. Masih ada beberapa *startup* yang juga memberikan penawaran serupa seperti Grab, Smart Jek, Uber, Ojesy jegger dan Blue jek (Koran *Sindo*, 2015). Saat ini Gojek telah menjadi salah satu *start up* dengan klasifikasi *unicorn* dimana memiliki aset 1 miliar dolar AS. Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 85,22% responden telah menggunakan layanan transportasi GO-Jek, sedangkan pengguna Grab hanya 66,24% dan Uber sekitar 50%. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/03/22/berapa-sumbangan-gojek-bagi-perekonmian-nasional>.

Pelayanan transportasi *on line* Go-Jek, juga memberikan kontribusi sebesar Rp 8,2 triliun/tahun terhadap perekonomian Indonesia. Sumbangan yang diberikan berbentuk penghasilan yang diterima oleh mitra pengemudi yang mencapai Rp 386,6 miliar/bulan. Menyumbang Rp 136,6 miliar/bulan melalui kemitraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Kondisi ini tentu harus dipelihara dengan baik oleh perusahaan untuk selalu meningkatkan pelayanan kepada pelanggan dalam bentuk *e-service quality*. *E-service quality* mencakup semua tahapan dari interaksi konsumen melalui *website*, yaitu sejauh mana *website* dapat memfasilitas penyediaan jasa tersebut secara efisien dan efektif (Tjiptono, 2011). *E-service quality* yang diberikan oleh perusahaan penyedia jasa *on line* harus benar-benar diperhatikan. Hal ini dikarenakan dengan kualitas layanan online yang baik, maka konsumen akan meningkatkan kepuasan pengguna jasanya, sehingga berdampak pada terciptanya loyalitas pelanggan pengguna jasa gojek. Meskipun demikian masih banyak keluhan dari masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan seperti keluhan tentang penentuan tarif baru (Liputan 6, 2018).

Hasil penelitian *E-service quality* memiliki hubungan dengan *website* seperti didukung dengan hasil penelitian dari Hansel Jonathan (2013), Amalia dan Tri Astuti (2016), Felicia Laurent (2016), dan Saiful Riza dan Sutopo (2017) yang menyatakan bahwa *e-service quality* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan dan juga loyalitas pelanggan. Inovasi dan deservasi produk terus dilakukan oleh PT. Go-jek untuk dapat menambah dan mempertahankan atau menciptakan loyalitas pelanggan. Salah satunya dengan memberikan *e-service quality* yang prima agar memberikan kemudahan kepada pelanggan dalam melakukan transaksi dengan memanfaatkan media internet di perkembangan teknologi untuk mendapatkan kepuasan yang lebih sehingga berdampak terhadap loyalitas pengguna jasa GoJek seperti pemberian promo menarik, penambahan fitur baru, produk baru dan pemberian voucher serta discount menarik (<https://www.go-jek.com/blog/promo/>). Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh *e-service Quality* (e-Sq) terhadap *e-loyalty* (e-Lt), pengaruh *e-satisfaction* (e-S) terhadap

e-loyalty (e-Lt) secara langsung dan tidak langsung serta menganalisis sejauh mana pelayanan dan kepuasan berbasis elektronik dan non elektronik membentuk loyalitas konsumen.

Perkembangan di bidang internet menyebabkan para pelaku usaha harus terus melakukan inovasi dan kreatif di bidang produk dan pelayanannya. Inovasi dan pelayanan elektronik/e-service dilakukan. ... perbuatan, usaha atau pertunjukan yang pengiriman di mediasi oleh teknologi informasi. Layanan elektronik tersebut meliputi unsur layanan *e-tailing*, dukungan pelanggan, dan pelayanan (Rowley, 2006). Dimensi *e-service quality* dapat dua yaitu dari perspektif perusahaan dan dari perspektif pengguna (Li. *et al.*, 2009). Perspektif perusahaan dimensi *e-service* yang menjadi perhatian, *ease of use*, *website design*, *reliability*, *system availability*, *privacy*, *responsiveness*, dan *empathy*. perspektif pelanggan, maka dimensi *e-service* yang harus diperhatikan adalah *experience* dan *trust*.

E-service quality juga merupakan pelayanan berbasis elektronik yang digunakan untuk memfasilitasi belanja, pembelian maupun pengiriman produk dan jasa secara efektif dan efisien (Valarie, Parasuraman & Malhotra, 2002). *E-Service Quality* memiliki dimensi yang biasa disebut dengan dimensi *E-SERVQUAL*. Adapun dimensi-dimensi dari *E-SERVQUAL* adalah sebagai berikut” (Parasuraman & Zeithmal, 2005): yang terdiri dari Efisiensi, Fleksibilitas, *System Availability*, Privasi, Daya tanggap, *Compensation Contact*. Kualitas pelayanan yang menyebabkan kepuasan pelanggan merupakan suatu keberhasilan perusahaan untuk meningkatkan loyalitas pelanggan yang menggunakan produk atau jasa perusahaan, Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan hipotesis yang dapat dituliskan adalah, diduga ada Pengaruh signifikan *E-Service Quality* terhadap *e-satisfaction*

E- satisfaction merupakan hal penting dalam persaingan di pasar (Zeglat.*et.al.*, 2016). Namun, konsep tersebut sulit untuk didefinisikan, karena banyaknya hubungan dengan variabel lain. Walaupun demikian, hal ini dapat dianggap sebagai sikap afektif, yang mempengaruhi perilaku pengguna dan penilaian suatu produk atau layanan, selanjutnya menentukan kesetiaan pengguna (Zhang & Dran, 2000). Variabel determinan dari *construct* telah dipelajari (Szymanski & Hise, 2000), sebagaimana hubungannya dengan *e-Service quality* dan loyalitas *online* (Cyr, Kindra, et al., 2010). Itu hubungan antara e-SQ dan kepuasan, termasuk kualitas informasi dan pencocokan harapan pelanggan, telah memodelkan oleh sejumlah peneliti (Zeglat. *et.al.*, 2016). Selanjutnya, Hsu & Hsu (2008), Shahabuddin (2014), dan Zeglat. *et.al.* (2016) menemukan bahwa ada korelasi yang signifikan dan positif antara kualitas layanan dan kepuasan pelanggan

dan loyalitas pelanggan. *E-service quality* memiliki hubungan dengan terciptanya dan bahkan meningkatnya loyalitas konsumen.

Pada saat pelanggan merasakan pengalaman bertransaksi yang baik melalui kualitas layanan dari suatu *website*, maka tingkat loyalitas akan meningkat. Konsekuensi dari adanya pelayanan yang baik oleh perusahaan adalah pelanggan akan bertahan pada pilihannya, serta memunculkan perilaku timbal balik, dimana hal tersebut mengacu pada perilaku dari pelanggan yang loyal. Hasil ini sejalan dengan penelitian Hansel (2013), Amalia dan Tri (2016), Felicia (2016), dan Saiful dan Sutopo (2017) yang menyatakan bahwa *e-service quality* berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan hipotesis yang dapat dituliskan dalam penelitian ini adalah, diduga ada pengaruh signifikan *e-satisfaction* terhadap *e-loyalty*.

Parasuraman dalam Tjiptono (2014) menyebutkan bahwa kualitas jasa *online* (*e-service quality*) sebagai suatu tingkat sebuah website secara efektif dan efisien memfasilitasi dalam hal berbelanja, melakukan pembelian dan proses penyerahan produk dan jasa. Oleh karena itu, kegiatan jasa online mempunyai ketergantungan yang tinggi terhadap teknologi informasi, misalnya dalam hal kecepatan, kehandalan, maupun keamanan. Secara keseluruhan, *e-service quality* merujuk kepada kualitas layanan yang diberikan kepada konsumen secara interaktif melalui teknologi informasi dengan berbasis *website*. Sifat interaktif dalam layanan ini dimaksudkan untuk memperkuat hubungan antara penyedia jasa (perusahaan) dan konsumen. *E-service quality* memiliki hubungan dengan terciptanya dan bahkan meningkatnya loyalitas konsumen. Ketika pelanggan merasakan pengalaman bertransaksi yang baik melalui kualitas layanan dari suatu *website*, maka tingkat loyalitas akan meningkat.

Kesetiaan perilaku mengacu pada pelanggan komitmen terhadap merek, dengan demikian mempertimbangkan komponen emosional yang akan menghasut pelanggan mengubah pemasok jika pemasok mengubah strategi pemasarannya (Pitta, Franzak, & Fowler, 2006). Jadi, kesetiaan tidak semata-mata menyangkut perilaku pembelian kembali, dan juga tidak semata-mata menyangkut komitmen, tetapi dibutuhkan keduanya faktor bersama, dengan mempertimbangkan bahwa kesetiaan juga muncul dari keterlibatan psikologis konsumen dengan situs *web*, yang menghasilkan sikap positif dan niat membeli kembali yang efektif (Pritchard, Havitz, & Howard, 1997). *E-service quality* telah ditemukan untuk mempengaruhi kepercayaan dan untuk menjelaskan kesetiaan emosional dari pengunjung situs *web* (Lynch, Kent, & Srinivasan, 2001). Rumusan hipotesis dapat dituliskan sebagai berikut, diduga ada pengaruh signifikan *E-Service Quality* terhadap *e-loyalty*.

METODE

Rancangan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Metode kuantitatif, Populasi penelitian ini adalah semua pengguna (konsumen) pengguna jasa moda *online* di kota Semarang dan sekitarnya dengan jumlah tidak diketahui. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *accidental sampling* (Sugiyono, 2012). Teknik sampling lain yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan berdasarkan kriteria-kriteria atau pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012). Adapun kriteria-kriteria penentuan sampel yang digunakan antara lain: Konsumen yang sudah menggunakan jasa moda *online* lebih dari empat kali, Konsumen yang memiliki aplikasi moda *online* di smartphone yang digunakan, Konsumen yang berusia lebih dari atau usia 17 tahun. Penyebaran daftar pertanyaan melalui *Google docs* yang disebar secara *online* melalui smartphone atau email kepada responden. Jumlah penyebaran daftar pertanyaan yang akan disebar sebanyak 125 responden untuk menghindari daftar pertanyaan tidak dibalas. wawancara dibuat menjadi dua bagian yaitu daftar pertanyaan tertutup dengan skala *likert* dan kuesioner terbuka pada setiap item pertanyaan. Tujuan dari dibuatnya dua jenis pertanyaan supaya data dapat diperoleh lebih lengkap, mendalam dan menyeluruh.

Hasil validitas uji pertama dengan responden sejumlah 30 orang, beberapa indikator tidak valid sehingga harus dihilangkan. Indikator awal dari variabel *E-service quality* adalah *system availability*, *Privacy Responsiveness* *Empathy*. Setelah dilakukan uji lapangan dengan pertanyaan *Favorable* dan *Unfavorable* maka pertanyaan item *Responsiveness* tidak valid, sehingga indikator ini dihilangkan. Selanjutnya untuk indikator dari variabel *E-satisfaction* dihilangkan pada item tampilan pada pertanyaan *Unfavorable*. Indikator yang digunakan adalah: Kemudahan, Informasi produk, situs Keamanan finansial Tampilan. Sedangkan pada variabel *E-loyalty*, indikator yang tidak valid adalah situs keamanan pada pertanyaan *Unfavorable* dan tampilan pada pertanyaan *Unfavorable*. Hasil Uji reliabilitas hasil semua diatas 0,7 artinya semua pertanyaan *reliabel*. Pengumpulan data dengan menggunakan *Google docs form* dengan alamat link :<https://goo.gl/forms/b2SFUPq7cnEXLN8z1>.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan dari hasil penyebaran kuesioner yang didapat maka selanjutnya para pengguna moda *online* Grab dan Gojak yang telah melakukan pengisian kuesioner akan di deskripsi untuk mengetahui profil mereka menurut Umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir, paling sering menggunakan aplikasi moda. Hasil deskripsi responden dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 1. Karakteristik Responden

Kategori	Alternatif jawaban	F	Persen (%)
Umur responden	19 -25 Tahun	24	23
	26-30 Tahun	20	20
	31-36 Tahun	13	13
	37-42 Tahun	14	14
	46-52 Tahun	14	14
	53-68 Tahun	16	16
Jenis Kelamin	Perempuan	52	51,2
	Laki-laki	49	48,7
Aplikasi Transportasi OnLine pada smartphone	Go-jek	37	37,4
	Grab	14	14
	Gojek dan Grab	50	48,6
Pendidikan terakhir	SMA/SMK/ Sejenisnya	26	26,2
	Sarjana (S1 atau D4)	40	40,2
	Magister S2	21	21,5
	Diploma	7	6,9
	Doktor	7	6,9
	Aplikasi yang sering digunakan	Go-Jek	40
Grab	23	23,4	
Pekerjaan saat ini	Tergantung Promo	20	19,6
	Tergantung kebutuhan	18	17,8
	Mahasiswa	23	23
	Dosen	16	15,9
	Pegawai swasta	40	40,2
	Aparatur sipil Negara	8	7,9
	Wiraswasta	14	14
	Mahasiswa	23	23

Sumber : data primer di olah 2019

Paling banyak konsumen usia 19-25 tahun, hal ini dikarenakan pada usia ini memiliki kegiatan yang padat untuk mobilisasi seperti para siswa SMU/SMK, mahasiswa dan karyawan swasta. Usia 53-68 merupakan pengguna yang juga memiliki minat terhadap moda *online*. Anggapan penggunaan dari nara sumber pada usia ini adalah segi kepraktisan, efisien dalam segi waktu dan biaya serta tenaga atau tidak bisa melakukan operasional sendiri sehingga membutuhkan bantuan moda *online* yang lebih praktis. Selain hal ini juga karena aplikasi yang mudah dipahami pada usia ini.

Hasil kuesioner didapatkan hasil responden berdasarkan jenis kelamin untuk pengguna moda on line adalah Laki-laki sebanyak 52 orang atau 51,2% dari sampel yang digunakan. Responden Perempuan sebanyak 49 orang atau 48,7% dari sampel yang digunakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah pengguna moda on line hampir seimbang jumlahnya. Bagi pengguna laki-laki layanan transportasi ini banyak membantu dalam kecepatan mobilitas, kepraktisan (menghindari macet dan kesulitan parkir). Bagi pengguna perempuan layanan

transportasi ini menawarkan berbagai fitur yang menarik untuk digunakan (*gofood, go glam, go clean, go massage*).

Hasil dari data lapangan menunjukkan bahwa 50% pengguna moda *online* menggunakan kedua aplikasi karena disesuaikan dengan promo yang berlaku (sistem pembayaran, voucher), sedangkan sebagian yang lain dibagi menjadi dua bagian memilih menggunakan aplikasi Go-jek dan Grab. Hasil yang ditunjukkan lebih banyak pengguna aplikasi Go-jek karena pertama kali yang masuk di kota Semarang adalah layanan ini. Konsumen merasa malas berpindah ke aplikasi lain karena harus mempelajari lagi.

Data pendidikan terakhir pengguna transportasi on line menunjukkan pengguna moda *online* paling banyak adalah sarjana S1 dan D4 karena pada pendidikan ini karena pada kelompok ini berpikir lebih kooperatif, objektif, mampu berpikir mandiri dan memiliki pengetahuan yang baik tentang internet. Hasil kuesioner didapatkan hasil responden berdasarkan Aplikasi yang sering digunakan adalah 40 orang (39,3%) “menggunakan aplikasi Go-Jek hal ini menggambarkan bahwa Go-Jek” lebih banyak digunakan karena jenis produk yang ditawarkan ragamnya banyak (*go-shop, Go clean dan Go laundry*, dan lain-lain) dan lebih dikenal oleh masyarakat terlebih dahulu. Grab dipilih oleh 23 orang atau (23,4%). Sedangkan konsumen yang memilih tergantung pada Promo sebesar 20 orang atau (19,6%) disebabkan responden memiliki ke dua aplikasi, sehingga dapat melihat promo apa yang ditawarkan pada saat akan digunakan (misalnya pemberian poin atau voucher pada Go-jek dan pembayaran OVVO pada Grab). Sedangkan 18 orang memilih tergantung kebutuhan, karena aplikasi yang ada pada Go-Jek, aplikasi grab tidak memiliki seperti contohnya (*go-shop, Go-clean dan Go-laundry*).

Hasil kuesioner didapatkan hasil responden berdasarkan Aplikasi yang sering digunakan paling banyak adalah pegawai swasta yaitu sebesar 40 orang atau (40,2%) hal ini dimungkinkan karena mobilitas pegawai swasta lebih banyak ragam dan jenisnya. Sedangkan mahasiswa sebanyak 23 orang atau (23%) sering menggunakan moda online ini dengan berbagai keperluan, seperti (Go-ride dan Go-food). Profesi Wiraswasta sebanyak 14 orang atau 14%, penggunaan moda on line ini digunakan untuk Go-sent (mengantar barang sampai pada tujuan). Hasil Regresi *e-service quality* terhadap *e-satisfaction* didapatkan hasil persamaan *e-service quality* terhadap *e-satisfaction* $Y_1 = 0,429 X_1 + e$. Hasil Hasil Regresi Berganda *e-service quality* dan *e-satisfaction* terhadap *e-loyalty* $Y_2 = 0,018 + 0,638 + e$. Persamaan linear tersebut dapat dibuat pengertian sebagai sebagai berikut : *E-service quality* (b_1) = 0,018. Nilai positif ini menunjukkan bahwa *e-service quality* meningkat maka akan meningkatkan *e-loyalty* *E-satisfaction* (b_2) = 0,638. Nilai positif ini menunjukkan

bahwa setiap ada peningkatan *e-satisfaction* maka akan meningkatkan *e-loyalty*.

Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah model regresi berdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas dilakukan dengan *kolmogorov smirnov test*, yaitu apabila nilai sig. > 0,05 maka model regresi berdistribusi normal Hasil uji kolmogorov smirnov test memperlihatkan adalah 0,928 dan signifikan pada 0,355 Ho diterima (data bresidual berdistribusi normal) nilai dibawah nilai Z tabel =1,96 dan diatas nilai signifikansi, hal ini berarti data residual terdistribusi normal. Uji heteroskedastisitas Model regresi juga harus terbebas dari masalah heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.

Hasil koefisien determinasi antara *e-service quality* terhadap *e-satisfaction* dapat dilihat pada Adjusted R Square sebesar 0,859. Nilai ini dapat diartikan bahwa *e-service quality* mampu menjelaskan *e-satisfaction* sebesar 85,9% (0,859 x 100%). Sementara sebesar 14,1% (100%- 85,9%) *e-satisfaction* dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini seperti variabel keamanan dan ketepatan waktu tunggu. Hasil uji F sebesar 18,337 dengan nilai sig. 0,000. Nilai sig. yang didapat lebih kecil (<) 0,05 sehingga model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel independent dan model regresi yang digunakan fit atau baik. Hasil uji efek intervening menunjukkan bahwa *e-service quality* terhadap *e-loyalty* melalui *e-satisfaction* lebih besar dibanding pengaruh *e-service quality* terhadap *e-loyalty*, dengan demikian maka menerima hipotesis yang menyatakan *e-service quality* berpengaruh terhadap *e-loyalty* yang diintervening oleh *e-satisfaction*. Hasil penelitian dengan jawaban terbuka dan mendalam tentang *e-service Quality* dapat dihasilkan beberapa kategori sebagai berikut

Tabel 2. Sikap konsumen terhadap *e-service Quality* yang mempengaruhi *e-loyalty*

Indikator awal	Empiris	Kategori
<i>System availability</i> 1. (fungsi teknis yang benar dari website),	<ul style="list-style-type: none"> Akurasi Data Akses internet Aplikasi 	Pelayanan elektronik
Privacy (keamanan dan perlindungan informasi pelanggan),	<ul style="list-style-type: none"> Keamanan finansial 	Pelayanan elektronik
Empathy (perawatan dan perhatian individual yang diberikan kepada pelanggan melalui saluran elektronik).	<ul style="list-style-type: none"> Sesuai antara yang tertera di aplikasi 	Pelayanan elektronik
Penambahan indikator	<ul style="list-style-type: none"> Membantu kegiatan Waktu tunggu Pengemudi Ramah 	Pelayanan non elektronik

Sumber : Data primer diolah 2019

Penambahan indikator baru adalah membantu kegiatan, waktu tunggu, pengemudi yang ramah, perilaku pengemudi, perilaku pengemudi yang sopan dan ramah merupakan pelayanan yang diinginkan oleh konsumen, dari pihak konsumen dapat menilai langsung perilaku pengemudi dengan pemberian bintang satu sampai lima yang di masukan dalam aplikasi yang bisa langsung diterima oleh provider.

Pemilihan merek moda *online* adalah bergantung kepada kebutuhan yang di perlukan oleh konsumen. Waktu tunggu atau respons dari pengemudi cepat akan membuat pelayanan semakin baik, hal ini ditunjang dengan pemahaman peta jalan secara baik sehingga tidak berulang-ulang menanyakan kepada konsumen karena belum tentu konsumen juga seseorang yang memahami daerah tersebut. Dari pandangan penulis ini, kualitas layanan elektronik adalah bidang di mana ada kemungkinan untuk memberikan layanan yang efisien dan efektif kepada pengguna melalui media elektronik. Parasuraman. *et.al.* (2002) berpendapat bahwa layanan elektronik memiliki dua keunggulan utama: *output* informasi dan *output* transaksional; oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa pelanggan *online* ditangkap oleh lingkungan virtual dalam mencari kedua kualitas ini (Barrutia & Gilsanse, 2009). Hasil penelitian dengan jawaban terbuka dan mendalam tentang *e-satisfaction* dapat dihasilkan beberapa kategori sebagai berikut:

Tabel 3. Sikap konsumen terhadap *e-satisfaction* yang mempengaruhi *e-loyalty*

Indikator awal	Empiris	Kategori
Kemudahan	<ul style="list-style-type: none"> Informasi jelas Mudah operasional aplikasi 	Kepuasan elektronik
Informasi produk	<ul style="list-style-type: none"> Diversifikasi produk Promo yang ditawarkan 	kepuasan elektronik
Situs Keamanan finansial	<ul style="list-style-type: none"> Kepercayaan 	Kepuasan elektronik
Tampilan	<ul style="list-style-type: none"> Kelengkapan fitur 	Kepuasan elektronik
Penambahan indikator	<ul style="list-style-type: none"> Penampilan pengemudi Kesan pertama Usia kendaraan Kecepatan respons pengemudi 	Kepuasan non elektronik

Sumber: data primer diolah 2019

Dari hasil kuesioner terbuka dan wawancara mendalam dihasilkan kategori kepuasan untuk *provider* adalah informasi yang disampaikan jelas dengan kecepatan respons dari pengemudi dan kepercayaan untuk informasi pembayaran yang jelas. Tampilan jarang dan harga akan dapat jelas terbaca oleh pihak masing-masing (pengemudi dan konsumen) sehingga tidak ada salah pengertian sehingga konsumen dalam pembayaran merasa puas

karena sejak awal sudah mengetahui jumlah yang harus dibayarkan sudah tertera dalam HP masing-masing. Sistem pembayaran dibagi dua yaitu dengan tunai dan non tunai, non tunai dinamakan *go pay* (Go-jek) dan Ovvo untuk sistem pembayaran yang dilakukan oleh Grab.

Perhatian terhadap kualitas informasi ini menjadi penting, mengingat informasi ini merupakan basis pengambilan keputusan. Hal ini seperti pada penelitian (Prawiranegara, dan Sumardjo, 2016) tentang kualitas informasi yang menunjukkan pengaruh karakteristik informasi terhadap kapabilitas petani dalam mengelola inovasi. Kepercayaan ini juga dapat diungkapkan bahwa identitas dari pengemudi jelas. Kelengkapan fitur juga meningkatkan kepuasan konsumen pengguna, seperti melihat peta, jumlah pembayaran, posisi penjemputan dan posisi driver pada saat proses penjemputan . Serta komunikasi dari driver selama menunggu penjemputan lewat telepon atau lewat chatting. Penambahan indikator adalah penampilan pengemudi, usia kendaraan, kecepatan respons pengemudi. Hasil penelitian dengan jawaban terbuka dan mendalam tentang *e-loyalty* dapat dihasilkan beberapa kategori sebagai berikut:

Tabel 4. Sikap konsumen terhadap *e-loyalty*

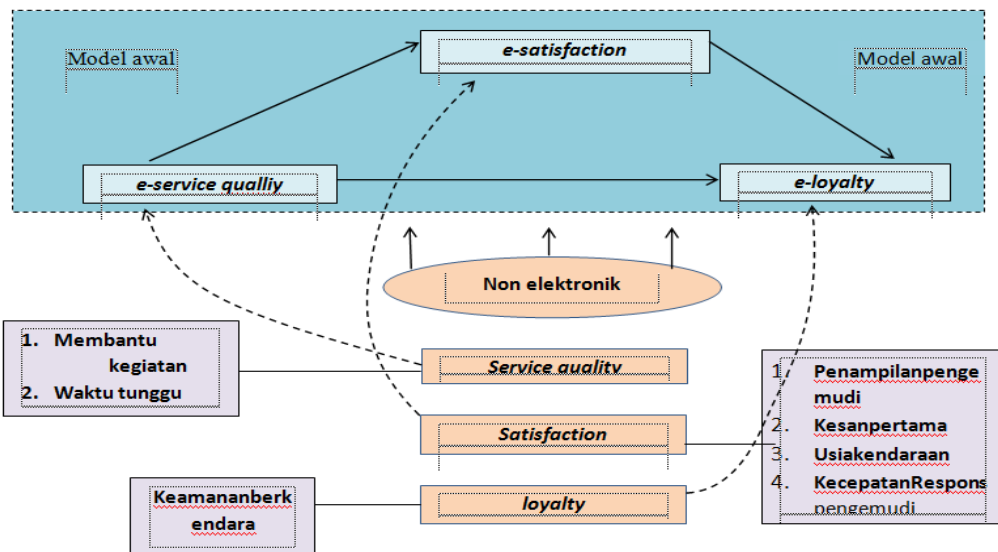
Indikator awal	Empiris	Kategori
Keterlibatan konsumen terhadap situs	• Kenyamanan	Loyalty elektronik
Menentukan merek sebagai pilihan utama	• Kepercayaan	Loyalty elektronik
Merekomendasikan pada orang lain	• Promosi	Loyalty elektronik
Tidak Mudah dipengaruhi tawaran produk lain	• Reputasi merek	Loyalty elektronik
Melakukan pembelian ulang	• Kebiasaan	Loyalty elektronik
Penambahan indikator	• Keamanan berkendara	Loyalty non elektronik

Sumber: data Primer diolah 2019

E-loyalty didefinisikan sebagai kesediaan untuk mengamati dan mengunjungi kembali situs *web* atau untuk melakukan transaksi di masa depan. Meskipun dasar-dasar teoritis kesetiaan tradisional dan fenomena yang didefinisikan baru sebagai kesetiaan elektronik umumnya serupa, mereka memiliki aspek unik yang terkait dengan pemasaran berbasis internet dan perilaku pembeli (Chang & Chen, 2008). Oleh karena itu, kesetiaan elektronik berbeda dari kesetiaan tanpa “E” (Elektronik), dan penekanannya adalah pada kesetiaan pelanggan yang berdagang dan berdagang di internet. Karena pasar internet berbeda dari pasar tradisional dalam hal kurangnya identitas manusia dan fitur fisik, loyalitas pelanggan *online* juga harus dianggap berbeda. *E-loyalty* didefinisikan sebagai kecenderungan yang dirasakan “untuk mengunjungi atau menggunakan kembali suatu situs *web* dan membeli dari situs *web* tersebut di masa depan. Anderson, Serini, dan Asan (2003) telah mendefinisikan *e-loyalty* sebagai sikap yang menguntungkan dan komitmen pelanggan terhadap bisnis elektronik yang menghasilkan perilaku belanja yang berulang (Leung.*et.al.*, 2011). Uraian diatas ditemukan model Hasil Olah data kualitatif dan penggabungan elektronik dan non elektronik dapat dilihat pada Gambar 2.

SIMPULAN

Hasil dari penelitian dengan pertanyaan terbuka ditemukan model bahwa dalam memberikan pelayanan secara elektronik diimbangi dengan pelayanan non elektronik, karena sentuhan langsung visual dan keramahan dari pengemudi sangat menentukan kepuasan dari konsumen. Model ini merupakan penemuan penelitian dari hasil uji empiris di lapangan, model yang di tawarkan dapat memberikan informasi kepada peneliti selanjutnya tentang pelayanan non elektronik. *E-service quality* mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap *e-satisfaction*. Artinya



Gambar 1. Model pelayanan elektronik dan non elektronik Go-jek dan Grab

bahwa semakin baik dan berkualitas pelayanan yang diberikan moda *online* maka semakin puas konsumen, pendapat ini didukung pada penelitian dengan objek situs Lazada. Kepuasan ditunjukkan dengan *e-satisfaction* yang diberikan tanda bintang satu sampai lima, satu sangat tidak puas dan lima adalah sangat puas. Penghargaan ini tidak hanya memberikan fasilitas pada konsumen untuk mengungkapkan kepuasannya, tetapi dari pihak pengemudi akan diberi penghargaan oleh provider Grab dengan diberikan ranking yang bagus sehingga mendapatkan bonus kinerja yang baik.

E-service quality tidak berpengaruh signifikan kepada *e-loyalty* secara langsung. Pelayanan yang baik tidak secara langsung menjadikan konsumen akan loyal karena evaluasi kepuasan pelanggan terhadap moda *online* dalam hal penggunaan *website*, sesuai kebutuhan, kecepatan jaringan menjadikan loyalitas semakin meningkat. Serta *e-satisfaction* mampu menjadi variabel *intervening* antara *e-service quality* dan *e-loyalty*, didukung oleh penelitian.

Secara umum variabel dimensi kualitas layanan elektronik memiliki dampak positif dan berdampak pada *e-loyalty*, serta variabel akuntabilitas, keamanan/privasi dan penyelesaian layanan dan desain situs *web*, dan karena variabel efisiensi dan kemudahan penggunaan tidak memiliki hubungan positif dan signifikan dengan *e-loyalitas*. Indikator kualitas layanan elektronik memiliki kondisi yang relatif diinginkan dalam populasi. Analisis menunjukkan konsumen memiliki tingkat kepuasan yang tinggi setelah melakukan pembelian *online*, mereka akan memiliki niat yang lebih tinggi untuk melakukan pembelian berulang. Jadi, bagi perusahaan *e-commerce* (EC), untuk membuat konsumen mengunjungi kembali situs *web* mereka dan melakukan pembelian berulang, mereka perlu meningkatkan tingkat kepuasan konsumen. Itu berarti pelanggan yang puas dapat ditingkatkan melalui berbagai faktor kualitas dari situs *web* belanja, karena ini sangat penting untuk perusahaan EC tidak hanya menyediakan produk berkualitas juga ragam produk yang beragam kepada konsumen, harus dirancang dengan baik tampilan *web* dengan informasi yang benar dan kualitas sistem tinggi kepada pelanggan untuk meningkatkan pengalaman membeli.

Pelanggan *online* menganggap kualitas informasi sebagai faktor terpenting. Kepuasan informasi, informasi yang disajikan oleh toko *online* harus mendukung layanan pelanggan dan pencarian produk. Informasi tersebut harus membantu dan relevan dalam memprediksi kualitas suatu produk atau layanan. Untuk memuaskan kebutuhan informasi pelanggan, informasi tersebut harus selalu *up date* kebutuhan pasar, dalam menyajikan produk dan layanan, sehingga cukup untuk membantu pelanggan membuat pilihan, memilih dengan benar tentang sajian *web* dan mudah dimengerti. Penelitian kami menunjukkan

bahwa kepuasan sistem juga terbukti memiliki signifikan berpengaruh pada kepuasan pelanggan *online*. Hasil menunjukkan bahwa transaksi pembelian dapat sangat dipengaruhi oleh fitur aplikasi, oleh karena itu penting untuk memahami efek kemudahan dalam penggunaan.

Keamanan adalah masalah lain dari pelanggan *online* dan merupakan faktor penting tetapi tidak diperhatikan oleh pengguna moda *online*. Keamanan hanya sebatas fisik (memakai helm) pada *go-ride* dan *Go-bike* tetapi untuk masalah yang lain, misal keamanan untuk kecelakaan kurang mendapat perhatian. Hal ini tentunya tetap harus memperoleh perhatian dari penyedia jasa agar memuaskan konsumen sebagai pengguna layanan belanja *online* dan memuaskan konsumen. Akhirnya hasilnya menunjukkan bahwa pelanggan *online* memiliki preferensi yang berbeda untuk faktor keamanan dan kebutuhan, dengan kelebihan informasi yang baik maka berpengalaman pelanggan *online* untuk menemukan dan memilih produk atau layanan terbaik dapat dipetakan dan permintaan sistem yang bersifat personalisasi untuk memperlakukan setiap pelanggan mendapatkan pelayanan secara individual.

Dalam penelitian ini responden kurang memberikan jawaban secara terperinci, cenderung untuk menjawab dengan jawaban singkat. Hal ini terjadi kemungkinan karena responden tidak dapat menyusun kata yang panjang, sehingga peneliti mencari data tambahan dengan wawancara mendalam dari pengguna moda *online*. Wawancara mendalam ini akan membantu peneliti untuk lebih memperjelas ulasan dan pembahasan dari perhitungan statistik uji hipotesis. Metode campuran digunakan dengan harapan lebih memberikan penjelasan tentang proses konsumen menanggapi *e-service quality* dan proses *e-loyalty* dari sebuah layanan jasa moda *online*.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M.M. & Parvez, N. (2009). Impact of Service Quality, Trust, and Customer Satisfaction on Customer Loyalty, *ABAC Journal*, 29, (1), 24-38.
- Aladwani, A.M. (2006). An Empirical Test Of The Link Between Web Site Quality And Forward Enterprise Integration With Web Consumers. *Business Process Management Journal*, 12, (2), 178-190.
- Anderson, R.E. & Srinivasan, S.S. (2003). E-Satisfaction and E-Loyalty: A Contingency Framework. *Psychology and Marketing*, 20, (2), 123-138.
- Azam, A., Qiang, F. & Abdullah, M.I. (2012). E-satisfaction in Business to Consumer Electronic Commerce, 3, (1), 7-8.
- Chen, Q., Rodgers, S. & He, Y. (2008). A Critical Review of the E-Satisfaction Literature. *American Behavioral Scientist*, 52, (1), 38-59.

- Cronin, J.'J. & Taylor, S.A. (1992). Measuring Service Quality: A Re-Examination And Extension. *Journal of Marketing*, 56, (3), 55-68.
- Cyr, D., Kindra, G. & Dash, S. (2008). Web Site Design, Trust, Satisfaction and E-Loyalty: The Indian Experience. *Online Information Review*, 32, (6), 773-790.
- Gounaris, S., Dimitriadis, S. & Stathakopoulos, V. (2010). An Examination of the Effects of Service Quality and Satisfaction on Customers' Behavioral Intentions In E-Shopping. *Journal of Services Marketing*, 24, (2), 142-156.
- Hadapi Revolusi Industri 4.0, Apa yang Harus Disiapkan?. (2019). <http://www.unpad.ac.id/2019/01/hadapi-revolusi-industri-4-0-apa-yang-harus-disiapkan/> diakses tanggal 28 februari 2019 pukul 7.07
- Hsu, J. & Hsu, C. (2008). The Relationships Between Service Quality and Customer Satisfaction in a Leading Chinese Web 2.0 Company. *The Business Review*, 11, (1), 84-90.
- Jonathan, H. (2013). Analisis Pengaruh E-Service Quality terhadap Customer Satisfaction yang Berdampak pada Customer Loyalty PT. Bayu Buana Travel Tbk. *Journal The WINNERS*, 14, (2), 104-112.
- Jones, T.O. & Sasser, W.E. (1995). Why Satisfied Customers Defect. *Harvard Business Review*, 73, 88-99.
- Kassim, N. & Asiah Abdullah, N. (2010). The Effect of Perceived Service Quality Dimensions on Customer Satisfaction, Trust, and Loyalty in E-Commerce Settings: A Cross Cultural Analysis. *Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics*, 22, (3), 351-371.
- Kim, S. & Stoel, L. (2004). Dimensional Hierarchy of Retail Website Quality. *Information and Management*, 41, (5), 619-633.
- Koran SINDO, 10 Jasa Transportasi Online di Indonesia, dari Go-Jek hingga UberRabu 23 September 2015 17:59 WIB <https://economy.okezone.com/read/2015/09/23/320/1219859/10-jasa-transportasi-online-di-indonesia-dari-go-jek-hingga-uber>.
- Kreitner, R. & Kinicki, A. (2014). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Laudon, K.C. & Laudon, J.P. (2012). *Management System: Managing the Digital Firm Twelfth Edition*. New Jersey: Prentice Hall.
- Laurent, F. (2016). Pengaruh E-Service Quality terhadap Loyalitas Pelanggan Go-Jek Melalui Kepuasan Pelanggan. *AGORA*, 4, (2), 95-100.
- Liputan 6. (2018). Go-Jek Naikkan Tarif per Kilometer, Ini Detailnya Andina Librianty Andina Librianty 14 Agu 2018, 16:07 WIB diakses 11 November pukul 6.42 WIB.
- Lynch, P.D., Kent, R.J., & Srinivasan, S.S. (2001). The global Internet Shopper: Evidence From Shopping Tasks In Twelve Countries. *Journal of Advertising Research*, 41, (3), 15-23.
- Marimon, F., Petnji, Y.L.H. & Casadesus Fa, M. (2012). Impact of E-Quality and Service Recovery on Loyalty: A Study of E-Banking in Spain. *Total Quality Management and Business Excellence*.
- Oliver, R. L. (1999). Whence Consumer Loyalty? *Journal of Marketing*, 63, 33-44.
- Parasuraman, A., Zeithaml, V. & Malhotra, A. (2005). E-S-QUAL: A Multiple-Item Scale for Assessing Electronic Service Quality. *Journal of Service Research*, 7, (3), 213-233.
- Pitta, D., Franzak, F. & Fowler, D. (2006). A Strategic Approach to Building Online Customer Loyalty: Integrating Customer Profitability Tiers. *Journal of Consumer Marketing*, 23, (7), 421-429.
- Prawiranegara, D. & Sumardjo. (2016). Pengaruh Kualitas Inforamasi Berbasis Cyber terhadap Kapabilitas Petani Sayuran Mengelola Inovasi di Jawa Barat. *Sosiohumaniora*, 18, (2), 177-184.
- Pritchard, M.P. & Howard, D.R. (1997). The Loyal Traveler: Examining a Typology of Service Patronage. *Journal of Travel Research*, 35, (Spring), 2-10.
- Riza, S. & Sutopo. (2017). Analisis Pengaruh E-Service Quality, Kualitas Informasi dan Persepsi Kemudahan terhadap E-loyalty dengan E-Satisfaction sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Pelanggan Lazada Indonesia). *Diponegoro Journal Of Management*, 6, (4), 1-13.
- Sativa, A. & Astuti, S.R.T. (2016). Analisis Pengaruh E-Trust dan E-Service Quality terhadap E-Loyalty dengan E- Satisfaction sebagai Variable Intervening (Study Kasus E-Commererce C2C Tokopedia). *Diponegoro Journal Of Management*, 5, (3), 1-10.
- Shahabuddin, A.M. (2014). E-service Quality for Customer Satisfaction Measurement: A Case Study on Islami Bank Bangladesh Ltd. *Global Disclosure of Economics and Business*, 3, 32-39.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta.
- Sundaram, V., Ramkumar, D. & Shankar, P. (2017). Impact of E-Service Quality on Customer Satisfaction and

- Loyalty Empirical Study in India Online Business Marketing Department, Government Sector of India Government Arts College, Paramakudi Indira Colleges of Engineering & Management, *Pune*, 21, (1), 48-69.
- Susanti, S., Purnomo, D. & Gunawan, W. (2018). Komunikasi Pemasara Produk Komoditas Lokal Berbasis Komunitas Melalui Penggunaan Media (Studi Kasus Fruits UP, UMKM di Jatinangor, *Sosiohumaniora*, 20, (3), 277–281.
- Szymanski, D. M., & Hise, R. T. (2000). E-satisfaction: An Initial Examination, *Journal of Retailing*, 76, 309–322.
- Tjiptono, F. (2012). *Service Management Mewujudkan Layanan Prima*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Tjiptono, F. (2014). *Pemasaran Jasa: Prinsip, Penerapan, dan Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Tsao, W.C., & Tseng, Y.L. (2011). The Impact of Electronic Service Quality on Online Shopping Behaviour. *Total Quality Management and Business Excellence*, 22, (9), 1007-1024.
- Valarie A., Zeitham, A., & Malhotra, P.A. (20012). Service Quality Delivery Through Web Sites: A Critical Review of Extant Knowledge. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 30, (4), 362-375.
- Wolfenbarger, M. & Gilly, M.C. (2003). eTailQ: Dimensionalizing, Measuring and Predicting Etail Quality. *Journal of Retailing*, 79, 183-198.
- Wu, H.C. (2014). The effects of Customer Satisfaction, Perceived Value, Corporate Image and Service Quality on Behavioral Intentions in Gaming Establishments. *Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics*, 26, (4), 540-565.
- Yang, Z. & Fang, X. (2004). Online Service Quality Dimensions and Their Relationship With Satisfaction: Acontent Analysis of Customer Reviews of Securities Brokerage Services. *International Journal of Service Industry Management*, 15, (3), 302-326.
- Zeglat, D., Shrafat, F. & Al-Smadi, Z. (2016). The Impact of the E-Service Quality (E-SQ) of Online Databases on Users Behavioural Intentions: A Perspective of Postgraduate Students. *International Review of Management and Marketing*, 6, (1).
- Zhang, P. & Dran, G. (2000). Satisfiers and Dissatisfiers: A Two-Factor Model for Website Design and Evaluation. *Journal of the American Society for Information Science*, 51, (14), 1253-1268.

KARAKTERISTIK PETANI DAN PROFIL USAHATANI UBI JALAR DI KECAMATAN ARJASARI, KABUPATEN BANDUNG

Hepi Hapsari¹, Elly Rasmikayati¹, Agung Karuniawan¹, dan Bobby Rachmat Saefudin²

¹ Fakultas Pertanian, Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung-Sumedang KM. 21 Jatinangor, Sumedang, 456363

² Fakultas Pertanian, Ma'soem University, Jl. Raya Cipacing No. 22, Jatinangor, Sumedang, 40132

E-mail: hepi.hapsari@unpad.ac.id

ABSTRAK. Ubi jalar merupakan salah satu sumberdaya hayati unggulan yang berdaya saing industri karena permintaan untuk ekspor yang tinggi. Namun demikian, kajian agribisnis ubi jalar dari sudut pandang sosial ekonomi di tingkat petaninya belum banyak diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Menganalisis karakteristik individu petani ubi jalar; dan 2) Memahami karakteristik usahatani ubi jalar ditinjau dari penggunaan benih ubi jalar, status kepemilikan lahan, pola tanam ubi jalar, penggunaan pupuk dan pestisida serta hasil produksi dan sistem pemasaran ubi jalar. Penelitian ini berlokasi di Kec. Arjasari, Kab. Bandung. Metode penelitian menggunakan metode *survey* dengan teknik *Simple Random Sampling*. Alat analisis data yang digunakan adalah *descriptive statistics analysis* yang diperkaya dengan hasil *Focus Discussion Group* (FGD). Hasil penelitian didapatkan bahwa petani ubi jalar di Kec. Arjasari, rata-rata berusia 51 tahun dengan pekerjaan utamanya adalah bertani ubi jalar. Mayoritas petani ubi jalar memiliki tingkat pendidikan rendah (SD dan tidak tamat SD) dengan kepemilikan lahan seluas 0,11-0,5 Ha yang merupakan warisan turun-temurun. Petani menanam ubi jalar varietas kuning putih (AC Putih) dan ubi ungu. Pemupukan biasanya hanya dilakukan sekali yaitu pada saat tanaman berusia sekitar 2 bulan dengan sistem pembukaan tanah. Rata-rata produksi ubi jalar petani adalah 250-300 kg /100 m². Tujuan pasar petani responden yakni bandar dengan sistem pembayaran tunai maupun tebasan. Kegiatan pascapanen seperti penyortiran dilakukan oleh petani dan bandar bersamaan saat berlangsungnya transaksi.

Kata kunci: karakteristik petani; usahatani; ubi jalar

FARMERS CHARACTERISTICS AND FARM BUSINESS PROFILE OF SWEET POTATO IN ARJASARI DISTRICTS, BANDUNG REGENCY

ABSTRACT. Sweet potato is one of commodity that have industrial competitiveness due to high export demand. However, socio-economic viewpoint at the level of the farmers of sweet potato agribusiness study have not been studied. The objectives of this paper, i.e. : 1) analyzing individual characteristics of sweet potato farmers; and 2) Understanding characteristics of sweet potato farming in terms of sweet potato seed use, land ownership status, sweet potato garden pattern, fertilizers and pesticides use and the production and marketing system of sweet potatoes. This study is located in the Arjasari District, Bandung Regency by using survey method with simple random sampling technique. Data is analyzed by using descriptive statistics analysis and enriched by Focus Group Discussion (FGD) method. The results of the study showed that sweet potato farmers in the Arjasari has the average 51 years old with farmer as their main job. Majority farmers are very low level of education (primary and not completed primary school) with private land ownership measuring 0.11 to 0.5 hectares of mostly hereditary legacy. Farmers planting white brass (AC White) and purple varieties. Fertilization is usually done only once when the age of the plant stompig around 2 months. Average production is amounted to 250-300 kg/100 m² of land. Their market destination is the Bandar with cash and slash payment systems. Postharvest activities such as sorting are carried out by farmers and dealers at the same time as the transaction.

Key words: farmers characteristic; sweet potato; farm business

PENDAHULUAN

Agribisnis merupakan pilihan pemerintah untuk dijadikan instrumen dalam menyejahterakan petani. Sebagai fakta bahwa agribisnis merupakan suatu sistem yang sangat kompleks yang menyangkut berbagai aspek dan saling terkait satu sama lain. Ubi jalar (*Ipomoea batatas* (L.) Lam.) merupakan salah satu sumberdaya nabati potensial dengan kandungan karbohidrat tinggi yang dapat mendukung terwujudnya ketahanan pangan nasional. Selain itu, ubi jalar juga mengandung mineral dan vitamin yang tinggi (Ishida *et al.*, 2000; Manrique and Roca, 2007; Burri, 2011). Ubi jalar dapat dimanfaatkan sebagai alternatif bahan pangan maupun sebagai bahan baku industri seperti a) daun untuk sayuran dan pakan

ternak, b) batang untuk bahan tanam dan pakan ternak, c) kulit ubi untuk pakan ternak, d) ubi segar digunakan sebagai bahan makanan, e) tepung ubi jalar sebagai bahan makanan, f) pati ubi jalar dimanfaatkan untuk fermentasi, pakan ternak, asam sitrat (Zuraida dan Supriati, 2001). Pemanfaatan ubi jalar sebagai bahan pangan, bahan baku industri, dan sumber energi merupakan respon terhadap kebijakan pemerintah tentang “Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal”, menunjang visi misi Jawa Barat “meningkatkan ekonomi pertanian” dengan prioritas tematik sektoral/tema riset potensial yaitu Jawa Barat bebas rawan pangan, serta dilandasi topik riset pilar pangan Universitas Padjadjaran yaitu “pangan lokal untuk pangan nasional”.

Berdasarkan data FAO dalam El Sheikhaet *al.* (2017) menunjukkan bahwa Indonesia merupakan produsen ubi jalar kelima di dunia dengan total produksi mencapai 4 juta ton. Permintaan pasar ekspor ubi jalar di Indonesia untuk bahan baku ubi madu, stick, dan pasteterus meningkat. Kebutuhan ekspor bahan baku ubi segar pada 2014 sekitar 15 ton/hari untuk ubi “madu”, 20 ton/hari untuk bahan baku stick, dan 25 ton/hari untuk pasta. Selain itu pada 2016, Indonesia mampu mengespor ubi jalar segar sebanyak 9.540 ton dengan tingkat konsumsi 2,12 – 8,64 kg perkapita per tahun (Nugroho *et al.*, 2017). Namun, dalam potensi tersebut terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh industri berbasis ubi jalar di Indonesia diantaranya adalah tidak terjaminnya kontinuitas bahan baku ubi jalar dari produsen baik kuantitas maupun kualitasnya, dan potensi hasil yang masih rendah. Hal ini disebabkan berbagai faktor yang terkait dengan kegiatan usahatani ubi jalar, seperti masih rendahnya kapasitas produksi ubi jalar produsen (kuantitas dan kualitas), terbatasnya luas tanam, rendahnya pemahaman bisnis dari pelaku produsen ubi jalar, dan masih rendahnya keterkaitan antara produsen ubi jalar sebagai penghasil bahan baku industri dengan mitra industri.

Wilayah sentra produksi ubi jalar di Indonesia adalah Provinsi Jawa Barat, Papua, Jawa Timur, NTT, dan Jawa Tengah (Rusdiana *et al.*, 2017). Provinsi Jawa Barat pada 2017 memiliki luas panen ubi jalar 22.479 Ha dengan produksi sebanyak 477.828 ton dan produktivitas 21,6 ton/ha (Kementerian Pertanian, 2018). Namun demikian, berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan tahun 2013 produktivitas ubi jalar Jawa Barat tersebut masih rendah dibandingkan produktivitas potensial yang mampu dihasilkan yakni 25-30 ton/ha. Belum adanya arahan yang jelas terkait pengembangan ubi jalar menyebabkan petani melakukan uji tanam ubi jalar pada lahan yang belum tentu sesuai dengan SOP atau di lahan marginal. Perbedaan lingkungan tumbuh ubi jalar menyebabkan perkembangan dan hasil ubi baik secara kualitas maupun kuantitas dapat berbeda (Nedunchezhiyan *et al.* 2012). Diketahui bahwa wilayah yang sesuai bagi pertumbuhan dan hasil ubi jalar dapat menunjang ekstensifikasi budidaya ubi jalar secara optimal. Terlebih dengan adanya varietas ubi jalar unggul yang berpeluang untuk digunakan secara luas. Hal ini dapat menunjang peningkatan ketersediaan produksi baik dari segi kuantitas, kualitas, maupun kontinuitas ubi jalar serta dapat mendukung pemenuhan pasokan bahan baku industri berbasis pangan ubi jalar.

Karakteristik petani selaku aktor yang berperan penting dalam kegiatan usaha tani mencerminkan perilaku yang menggambarkan motivasi, karakteristik pribadi (ciri khas), konsep diri, nilai-nilai, pengetahuan atau keahlian yang dibawa seorang petani yang berkinerja unggul dalam

berusahatani. Keberhasilan usahatani sangat bergantung pada kompetensi petani sebagai pengelola utama. Kompetensi petani tidak sama satu dengan lainnya, hal ini sangat tergantung kepada karakteristik yang mereka miliki (Manyamsari dan Mujiburrahmad, 2014). Asmarantaka (2017) menyatakan bahwa karakteristik petani responden merupakan salah satu hal penting karena akan berhubungan langsung dengan kegiatan usahatani. Berdasarkan hasil penelitiannya diketahui rata-rata umur petani ubi jalar adalah 49 tahun, tingkat pendidikan pada Sekolah Dasar (SD), rata-rata pengalaman usahatani 29 tahun, jumlah anggota keluarga sebanyak 4 orang, mayoritas petani tidak tergabung ke dalam kelompok tani.

Tingkat adopsi petani akan varietas unggul ubi jalar di Indonesia sangat rendah dan didominasi beragam varietas lokal yang spesifik lokasi. Dengan banyaknya varietas lokal ini maka kemungkinan variasi produktivitas ubi jalar di Indonesia berbasis masyarakat melalui penanaman varietas lokal yang beragam sangatlah besar. Beberapa varietas ubi jalar memiliki daya saing industri yang baik dan mudah untuk dibudidayakan oleh petani. Namun, kajian agribisnis ubi jalar dari sudut pandang sosial ekonomi di tingkat petaninya belum banyak diteliti. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk: 1) Menganalisis karakteristik individu petani ubi jalar; dan 2) Memahami karakteristik usahatani ubi jalar ditinjau dari penggunaan benih ubi jalar, status kepemilikan lahan, pola tanam ubi jalar, penggunaan pupuk dan pestisida serta hasil produksi dan sistem pemasaran ubi jalar.

METODE

Penelitian dilakukan dengan metode *survey-eksplanatory*, dengan teknik pengambilan sampel acak sederhana. Populasi penelitian adalah para petani ubi jalar di daerah sentra ubi jalar di Jawa Barat. Pengambilan sampel dilakukan dalam beberapa tahapan klaster. Tahap pertama, klaster sentra ubi jalar unggulan Unpad di Jawa Barat adalah Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung. Dari Kecamatan Arjasari akan ditentukan sampel desa dengan rumus sampling acak klaster tahap pertama. Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus sampel acak sederhana bisa diambil minimal 1 desa sentra ubi jalar unggulan Unpad yaitu Desa Arjasari. Penentuan Desa Arjasari sebagai lokasi penelitian dilakukan secara acak dengan menggunakan *software* minitab.

Selanjutnya dari Desa Arjasari diambil sejumlah responden petani ubi jalar dengan rumus sampling acak sederhana. Untuk menentukan ukuran sampel (*sample size*) yang akan digunakan sebagai sumber informasi dalam penelitian ini digunakan teknik penarikan sampel acak sederhana sebagai berikut (Anderson *et al.*):

dimana:

$$n = \frac{N\bar{p}(1-\bar{p})}{\left(\frac{B^2}{4N}\right) + \bar{p}(1-\bar{p})}$$

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

\bar{p} = *point estimate* untuk proporsi populasi dengan *sampling error* terkecil = 0,5

n = *bound on sampling error* = $2 \times 0,005 \times N = 0,1 \times N$

Dengan tidak adanya data valid tentang jumlah petani ubi jalar di Kecamatan Arjasari maka digunakan ukuran sampel sebanyak 100 orang petani. 100 orang petani ubi jalar tersebutlah yang dijadikan sebagai responden pada penelitian terkait petani ubi jalar unggulan Unpad. Ukuran sampel tersebut dapat menutupi dan mewakili ukuran populasi petani ubi jalar yang tak terhingga. Data diolah menggunakan alat analisis statistika deskriptif seperti diagram *pie*, tabel distribusi frekuensi, dan *crosstabulation*.

Analisis Pendapatan dan R/C Ratio

Pendapatan usahatani adalah selisih antara penerimaan dan biaya yang dikeluarkan. Biaya dalam usahatani terdiri dari biaya tunai dan biaya tidak tunai (biaya diperhitungkan). Tingkat penerimaan total usahatani dirumuskan sebagai berikut (Soekartawi, 1995) :

$$TR = P_y \times Y$$

TR = Total penerimaan

P_y = Harga per satuan produksi

Y = Jumlah Produksi

Pendapatan total usahatani dapat dinyatakan dalam persamaan:

$$I_{\text{tunai}} = TR - TC_{\text{tunai}}$$

$$I_{\text{total}} = TR - (TC_{\text{tunai}} + BD)$$

Keterangan :

TR = Penerimaan usahatani (Rp)

P_y = Harga output (Rp)

Y = Jumlah output (Rp)

I_{tunai} = Pendapatan tunai (Rp)

I_{total} = Pendapatan total (Rp)

TC_{tunai} = Total biaya tunai (Rp)

BD = Biaya diperhitungkan (Rp)

Analisis R/C rasio digunakan untuk mengetahui seberapa besar penerimaan yang dihasilkan dari setiap rupiah yang dikeluarkan untuk biaya usahatani. R = revenue (penerimaan); C = cost (biaya total). Jika nilai R/C > 1, berarti usahatani layak untuk dilakukan. Sebaliknya jika nilai R/C < 1, berarti usahatani tersebut tidak layak untuk dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Petani Ubi Jalar di Kecamatan Arjasari Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia petani merupakan faktor yang paling erat kaitannya dengan kekuatan dan kemampuan petani dalam melakukan kegiatan usahatani. Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa usia mayoritas petani ubi jalar di Kecamatan Arjasari berada pada kisaran 41-60 tahun dengan rata-rata usia 51 tahun. Dengan berpatokan pada usia produktif manusia bekerja yakni 15-64 tahun maka rata-rata usia petani tersebut termasuk ke dalam petani tua produktif. Petani yang berumur lebih tua biasanya kurang responsif terhadap perubahan inovasi teknologi (Asmarantaka, 2017).

Tabel 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No	Usia	Frekuensi / Persentase (%)	Rata-rata Usia
1	≤ 30 tahun	6	
2	31 - 40 tahun	29	
3	41 - 60 tahun	55	51 tahun
4	≥ 61 tahun	21	
Total		100	

Sumber: Data Primer 2018

Petani ubi jalar dengan usia dibawah atau sama dengan 30 tahun memiliki persentase paling rendah diantara kategori usia lainnya, padahal usia tersebut adalah usia dimana seseorang memiliki kekuatan bekerja yang sangat baik. Hal ini dapat menunjukkan bahwa sangat terbatasnya golongan muda yang bersedia bekerja di sektor pertanian terutama usahatani ubi jalar. Sektor industri yang saat ini berkembang pesat dengan jaminan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi menjadi alasan kuat pengalihan minat kaum muda untuk bekerja di sektor pertanian.

Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan Utama dan Pekerjaan Sampingan

Pada Tabel 2 terlihat bahwa 80% dari total petani responden yang dijadikan sampel penelitian menjadikan usahatani ubi jalar sebagai pekerjaan utamanya. Ini menunjukkan bahwa kegiatan usahatani ubi jalar merupakan pekerjaan yang menjadi primadona bagi masyarakat di Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung. Sedangkan dari tabel juga diketahui bahwa kurang dari 30% responden menjadikan usahatani ubi jalar sebagai pekerjaan sampingannya.

Tabel 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan Utama dan Pekerjaan Sampingan

No	Pekerjaan Utama	Frekuensi / Persentase (%)	Pekerjaan Sampingan	Frekuensi / Persentase (%)
1	Pedagang	4	Pedagang	4
2	Petani Ubi jalar	87	Petani Ubi jalar	17
3	PNS	3	PNS	1
4	Lainnya	6	Lainnya	45
Total		100	Total	67

Sumber: Data Primer 2018

Mayoritas petani responden memiliki pekerjaan sampingan yang cukup beragam diantaranya adalah guru, buruh, supir, petani padi dan palawija, petani jambu, petani pisang, dan lain-lain, sedangkan 33 orang petani responden tidak memiliki pekerjaan sampingan atau dapat dikatakan hanya menjadikan petani ubi jalar sebagai satu-satunya profesi/pekerjaan yang ditekuni. Hal ini kemudian menjadi menarik karena kurang lebih 1/3 dari total responden petani ubi jalar menjadikan usahatani ubi jalar sebagai pekerjaan utama dan satu-satunya pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Ini dapat membuktikan bahwa usahatani ubi jalar adalah usahatani yang menguntungkan dan menjanjikan untuk dilakukan.

Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir

Mengacu pada Tabel 3 diketahui bahwa mayoritas petani ubi jalar di Kecamatan Arjasari berpendidikan terakhir SD (Sekolah Dasar). Menurut Shead *dalam* Rachmat (2016), tingkat pendidikan dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu: (1) tingkat pendidikan rendah: buta huruf-SD; (2) tingkat pendidikan sedang: tamat SD-tamat SMA; dan (3) tingkat pendidikan tinggi: tamat-Akademi/Perguruan Tinggi. Lionberger *dalam* Rachmat (2016) menegaskan bahwa tingkat pendidikan formal akan berpengaruh terhadap produktivitas usahatani, tingkat melek huruf, dan akses informasi, serta tingkat penyerapannya atas aplikasi dan alih teknologi yang akan berdampak terhadap partisipasi dan daya adopsinya.

Apabila pernyataan Lionberger dan Shead tersebut dikaitkan dengan tingkat pendidikan petani ubi jalar di Kecamatan Arjasari maka petani ubi jalar tersebut masuk ke dalam kategori petani dengan tingkat pendidikan rendah sehingga lebih sulit mencerna informasi dan adopsi inovasi mengenai teknologi dan pelaksanaan kegiatan usahatani ubi jalar yang lebih baik. Adapun penyebab banyaknya responden dengan tingkat pendidikan hanya sebatas Sekolah Dasar (SD) tersebut dipengaruhi oleh masih kurangnya perhatian terhadap pendidikan dan keterbatasan

biaya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Tabel 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No.	Pendidikan Terakhir	Frekuensi / Persentase (%)
1	Akademi/Diploma	2
2	Sarjana	3
3	SD	55
4	SMA	18
5	SMP	18
6	Tidak Sekolah	4
Total		100

Sumber : Data primer 2018

Karakteristik Responden Berdasarkan Pengalaman Usahatani Ubi jalar

Tabel 4 menunjukkan bahwa mayoritas responden petani ubi jalar di Kecamatan Arjasari merupakan petani yang kurang berpengalaman/baru (kurang dari 15 tahun) dalam berusahatani ubi jalar. Awalnya, ubi jalar belum menjadi komoditas utama yang diusahakan, petani lebih cenderung bertani padi/palawija. Namun, sekitar tahun 2000, budidaya dan usahatani ubi jalar mulai gencar digalakan sehingga banyak petani beralih dari budidaya padi/palawija menjadi budidaya ubi jalar. Hal ini juga dibuktikan oleh banyaknya lahan sawah milik petani responden yang diubah fungsi menjadi kebun ubi jalar. Selain itu, banyak dari petani yang mendapatkan warisan berupa lahan/pohon ubi jalar sehingga mereka meneruskan usahatani ubi jalar hingga saat ini.

Tabel 4. Karakteristik Responden Berdasarkan Pengalaman Usahatani

No.	Pengalaman Usahatani (Tahun)	Frekuensi / Persentase (%)
1	5 – 15	53
2	16 – 30	32
3	30 – 50	13
4	> 50	2
Total		100

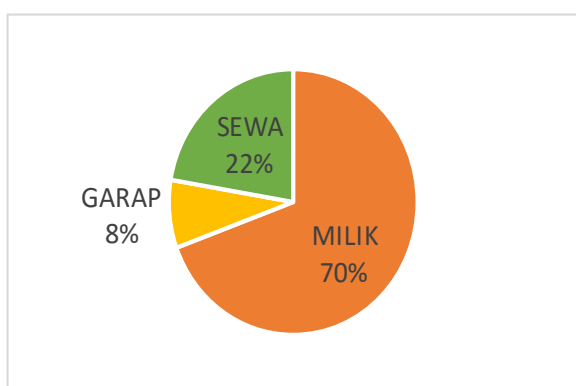
Sumber: Data Primer 2018

Petani dengan pengalaman usahatani ubi jalar kurang dari 5 tahun memiliki lahan ubi jalar yang sangat sempit dengan kondisi pohon yang belum produktif. Untuk meningkatkan penguasaan lahan dan jumlah pohon ubi jalarnya, petani tersebut cenderung melakukan sewa

kepada pemilik pohon ubi jalar yang sudah produktif. Sedangkan, responden petani ubi jalar yang sudah berusa hatani ubi jalar selama lebih dari 50 tahun pada umumnya merupakan petani yang sudah memiliki lahan/pohon ubi jalar pribadi dan cenderung tidak menyewa lahan/pohon ubi jalar orang lain. Rata-rata pengalaman usahatani ubi jalar petani responden adalah 18 tahun dengan pengetahuan dan pemahaman terkait teknik budidaya ubi jalar diperoleh secara otodidak.

Karakteristik Responden Berdasarkan Status Kepemilikan dan Penguasaan Lahan Ubi Jalar

Status penguasaan lahan petani ubi jalar dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 kategori yaitu status penguasaan lahan ubi jalar milik pribadi, garap, dan sewa. Dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Status Penguasaan Lahan Petani Ubi Jalar

Dari hasil penelitian di lapangan diketahui bahwa mayoritas petani ubi jalar memiliki lahan ubi jalar milik pribadi dengan kategori lahan sempit yakni 0,11-0,5 Ha dan tidak memiliki kebun/lahan ubi jalar lain yang digarap ataupun disewa. Kebun/lahan ubi jalar milik pribadi tersebut diperoleh petani respondendari warisan/harta peninggalan orangtua. Selain itu, terjadinya alih fungsi lahan oleh petani dari lahan sawah menjadi kebun/lahan ubi jalar yang mereka miliki menyebabkan penguasaan lahan ubi jalar tersebut secara otomatis berstatus milik.

Meskipun demikian, terdapat sebagian petani yang memiliki kebun/lahan ubi jalar dengan status milik dan juga sewa atau garap kebun/lahan ubi jalar milik orang lain. Sistem kontrak/sewa tersebut terkait dengan penyewaan pohon ubi jalar produktif milik petani lain, bukan satuan lahan. Jumlah pohon ubi jalar yang disewa oleh petani responden tersebut dikonversi ke dalam satuan luas lahan dan dibayar sesuai dengan kesepakatan. Status penguasaan lahan ubi jalar dan status penguasaan pohon ubi jalar memiliki hubungan yang bergaris lurus (*linier*). Rata-rata petani memiliki pohon ubi jalar pribadi sebanyak 11-50 pohon yang ditanam dengan jarak tanam pada umumnya yaitu 10 x10 m, maka jika dikonversi ke luas lahan menjadi 0,11 – 0,5 Ha.

Profil Usahatani Ubi Jalar

Penggunaan Benih Ubi Jalar

Petani ubi jalar di Kecamatan Arjasari yang dijadikan responden adalah petani yang menanam ubi jalar varietas kuningan putih (AC Putih) dan varietas ubi ungu. Varietas kuningan putih merupakan varietas lokal dan paling banyak dibudidayakan oleh petani di lokasi penelitian. Alasan petani menggunakan varietas kuningan putih dikarenakan varietas lokal unggulan dengan produktivitas tinggi, bercita rasa manis, bentuknya bulat, tahan terhadap panas, harga jual cukup tinggi, serta permintaan pasar yang kontinyu sepanjang tahun. Ciri fisik tanaman ubi jalar ini adalah daunnya yang runcing dan agak tipis serta berwarna hijau tua. Sedangkan varietas ubi ungu memiliki ciri fisik daunnya lebar dan tumbuh lebat serta warna daun yang hijau agak keunguan.



Gambar 2. Ubi Jalar Ungu (kiri) dan Ubi Jalar Kuning (kanan) yang banyak dibudidayakan oleh petani di Kecamatan Arjasari

Status Lahan dan Pola Tanam Ubi Jalar

Petani ubi jalar di Kecamatan Arjasari umumnya menanam ubi jalar di lahan milik pribadi. Pola tanam ubi jalar yang digunakan yakni pola tanamubi-palawija/padi-ubi yakni pola tanam yang diselingi penanaman palawija untuk lahan kebun/ladang dan padi untuk lahan sawah. Tanaman penyelang palawija dapat diganti dengan tanaman kacang-kacangan untuk meningkatkan kesuburan tanah. Petani yang tidak memiliki lahan biasanya menyewa atau menyakap lahan milik orang lain. Sewa lahan atau pohon ubi jalar dibayar dengan menggunakan hasil panen ubi. Selain itu, ada juga petani yang menggarap lahan gadai untuk ditanami ubi jalar.

Penggunaan Pupuk dan Pestisida

Pemeliharaan tanaman ubi jalar memerlukan perhatian yang serius dan cukup intensif dalam pemeliharaan sehari-harinya. Berdasarkan Tabel 5 menunjukkan bahwa frekuensi pemupukan tanaman ubi jalar yang dilakukan oleh mayoritas responden petani ubi jalar adalah hanya 1 kali dalam 1 tahun. Hal ini dirasa cukup bagi petani karena dosis yang diberikan sudah dirasa cukup untuk kebutuhan setiap tanaman ubi jalar, selain itu pengerjaan pemupukan yang pada umumnya tidak cukup dilakukan

dalam satu hari sehingga dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya jika hanya dilakukan sekali dalam setahun.

Kemudian berdasarkan tabel 6 menunjukkan bahwa penyiangan kebun ubi jalar yang dilakukan oleh mayoritas responden petani ubi jalar adalah hanya 1 kali dalam 1 tahun. Hal tersebut juga dirasa cukup oleh mayoritas petani ubi jalar, karena apabila dilakukan terlalu berlebihan kegiatan penyiangan dapat mengganggu pertumbuhan akar tanaman ubi jalar karena mayoritas petani ubi jalar bukan menggunakan alat manual dalam penyiangannya namun menggunakan obat pembasmi rumput liar/gulma.

Tabel 5. Frekuensi Pemupukan Pohon Ubi jalar/Tahun

No.	Pemupukan/Tahun	Frekuensi (Orang)
1	0 kali	1
2	1 kali	76
3	2 kali	18
4	3 kali	3
5	4 kali	2
Total		100

Sumber: Data Primer 2018

Menurut ketua kelompok tani ubi jalar di Kecamatan Arjasari, pemupukan biasanya hanya dilakukan sekali saja yaitu pada saat tanaman berusia sekitar 2 bulan dengan sistem pembukaan tanah. Tanah dibuka agar akar ubi jalar terlihat kemudian diberikan pupuk (biasanya pupuk NPK) lalu ditutup kembali dengan tanah, tetapi tidak terlalu dalam. Hal ini dimaksudkan agar akar dapat bernafas dengan lebih baik dan air hujan/irigasi bisa langsung mengenai akar tanaman sehingga proses pertumbuhan umbi akan lebih maksimal. Untuk lahan kebun atau ladang, pemupukan dilakukan saat akan memasuki musim hujan. Hal ini dikarenakan jenis pupuk NPK yang digunakan petani akan bekerja secara optimal dan mudah terserap tanaman saat terkena air.

Tabel 6 menunjukkan bahwa frekuensi pemberian pupuk hayati tanaman ubi jalar yang dilakukan oleh mayoritas responden petani ubi jalar adalah hanya 1 kali dalam 1 musim. Hal tersebut dirasa sangat cukup dan memang sesuai dengan standar operasional budidaya ubi jalar teknologi nutrisi ramah lingkungan berbasis pupuk hayati. Pemberian pupuk hayati akan meningkatkan keseimbangan mikrobiologis sehingga dapat memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan produksi ubi jalar.

Pemeliharaan tanaman ubi jalar yang berkala yaitu penyemprotan pestisida, fungisida, insektisida (obat-obatan) dan penggunaan pupuk hayati. Jika rata-rata dalam satu tahun petani ubi jalar dapat memanen ubi jalarnya sebanyak 2-3 kali, maka terdapat 2-3 kali musim penyemprotan ini. Pada fase ini, frekuensi penyemprotan harus dilakukan secara rutin. Dari hasil penelitian di

lapangan seperti yang dapat dilihat pada tabel 5.19 mayoritas responden petani ubi jalar melakukan penyemprotan pestisida dan obat penahan rontok bunga sebanyak 2 kali dalam 1 minggu. Penyemprotan ini biasanya dilakukan bersamaan dengan langsung mencampurkan bahan menjadi satu. Namun dalam beberapa kondisi dapat dilakukan tambahan dari salah satu zat tergantung cuaca di lapangan.

Tabel 6. Frekuensi Pemberian Pupuk Hayati pada Pohon Ubi jalar/Tahun

No.	Pemberian Pupuk Hayati/ Musim	Frekuensi (Orang)
1	0 kali	3
2	1 kali	87
3	2 kali	9
4	3 kali	1
Total		100

Sumber: Data Primer 2018

Tabel 7. Frekuensi Penyemprotan Pestisida dan Pemeliharaan Bunga Ubi jalar

No.	Penyemprotan/Minggu	Frekuensi (Orang)
1	1 kali/minggu	28
2	2 kali/minggu	66
3	3 kali/minggu	6
Total		100

Sumber: Data Primer 2018

Namun ternyata, jumlah penyemprotan yang dilakukan mayoritas petani ubi jalar di lapangan tidak sesuai dengan standar operasional budidaya ubi jalar dengan teknologi nutrisi ramah lingkungan berbasis pupuk hayati. Hasil wawancara menunjukkan bahwa petani banyak atau sering melakukan penyemprotan dikarenakan khawatir ubi jalar akan terserang hama lanas jika sering terjadi hujan. Hal ini karena apabila ubi jalar terserang hama, maka petani tidak akan mendapatkan hasil umbi ubi jalar sehingga akan merugi. Meski begitu, penyemprotan yang berlebihan malah akan membuat tanaman ubi jalar menjadi rentan dan pengeluaran petani pun bertambah.



Gambar 3. Tampilan Ubi Jalar yang terkena hama "Lanas"

Serangan hama “lanas” ini menyebabkan umbi menjadi busuk, permukaan kulit luar umbi tidak mulus, dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Berdasarkan informasi dari beberapa petani, disebutkan bahwa jika ubi yang terkena hama tersebut diproses/dimasak maka akan terbentuk sejenis zat racun yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Untuk meminimalisir dampak dari serangan hama tersebut, petani biasanya melakukan *treatment* khusus pada lahannya yakni dengan menambah kankapur dolomit dan garam tanpa iodium sebelum dilakukan penanaman atau pada saat pengolahan lahan. Hal ini bertujuan agar benih/larva “lanas” mati dan mencegah induknya untuk menyimpan lagi telur di lahan petani. Penyemprotan insektisida juga dilakukan untuk mengatasi serangan hama pengganggu tanaman ubi jalar. Meskipun petani sudah melakukan kegiatan pengendalian hama terhadap tanaman ubi jalar, namun faktanya masih terdapat kurang dari 50% hasil panen ubi jalar yang terkena hama “lanas” tersebut

Produksi dan Sistem Pemasaran Ubi Jalar

Usahatani ubi jalar yang dibudidayakan petani responden di Kecamatan Arjasari mampu menghasilkan produksi sebanyak 250 – 300 kg/100 m². Tujuan pasar petani ubi jalar tersebut yakni bandar yang berada di sekitar lokasi tempat tinggal atau kebun ubi jalar. Hasil panen ubi jalar dijual langsung oleh petani kepada bandar dengan sistem pembayaran tunai/*cash*. Selain itu, terdapat petani yang menjual ubi jalar dengan sistem tebasan, yang mana kegiatan panen dilakukan oleh pembeli/bandar. Sistem tebasan ini dipilih petani karena lebih efisien yakni petani tidak perlu mengeluarkan biaya untuk upah tenaga kerja saat panen. Penyortiran ubi jalar biasanya dilakukan oleh petani dan bandar bersamaan pada saat kegiatan jual-beli berlangsung.



Gambar 4. Beberapa Hasil Panen Ubi Jalar di Lokasi Penelitian

Mayoritas responden petani ubi jalar yang memiliki tingkat pendidikan terakhir SD ternyata mereka memilih menjual hasil ubi jalar ke pedagang pengumpul/tengkulak. Sedangkan yang memasok ke pasar modern dan

ke pasar tradisional secara langsung adalah responden petani yang tingkat pendidikannya lebih tinggi antara SMP dan SMA. Meski begitu, cukup banyak pula petani yang tingkat pendidikannya SMP dan SMA tetapi tetap memasok hasil ubi jalar ke pedagang pengumpul/tengkulak. Ini berarti tingkat pendidikan petani tidak terlalu mempengaruhi petani untuk memasok hasil ubi jalar ke pasar tertentu.

Pada kegiatan pemasaran hasil panen ubi jalar, ternyata mayoritas petani sejak dulu awal memulai usahatani ubi jalar sudah memasok ke tujuan pemasaran yang sama dengan yang dilakukan pada saat ini. Tidak banyak yang berubah dari tujuan pemasaran petani ubi jalar. Adapun beberapa petani yang tadinya hanya memasok ke tengkulak/bandar kemudian mencoba menjual hasil ubi jalar ke pasar tradisional nyatanya lebih memilih menjual hasil ubi jalar ke tengkulak/bandar kembali. Pada umumnya lama waktu petani mencoba ke tujuan pasar yang baru tidaklah lebih dari 1 tahun.

Tujuan pasar petani ubi jalar yang mayoritas menjual hasil panen ubi jalar ke pedagang pengumpul/tengkulak dan bandar ternyata kerap kali membuat petani tidak memiliki *bargaining position* yang tinggi di dalam penentuan harga jual umbi ubi jalar. Terlebih lagi apabila adanya bantuan sarpotan seperti berupa zat perangsang tumbuh dari tengkulak/bandar kepada petani ubi jalar. Hal tersebut membuat petani ubi jalar harus terus memasok hasil panen ubi jalar mereka ke tengkulak/bandar tertentu yang memberikan pinjaman tersebut hingga hutangnya terlunasi. Sehingga mayoritas responden petani ubi jalar hanya menjadi *price taker*.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa kondisi saat ini ternyata tidak berbeda jauh dengan saat awal responden petani ubi jalar memulai usahatani ubi jalar. Tujuan pasar yang tidak banyak berubah hingga saat ini juga membuat sistem penentuan harga tidak banyak berubah. Dengan sumber permodalan petani dari awal usahatani yang sudah dapat dikatakan cukup mandiri, maka sejak awal petani cenderung memilih pasar dengan sistem pembayaran yang tunai.

Analisis Pendapatan Usahatani Ubi Jalar di Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung

Pendapatan usahatani meruakan penghasilan yang diterima oleh petani dari kegiatan usahatannya. Pendapatan usahatani ubijalar adalah merupakan selisih antara penerimaan dengan biaya produksi usahatani ubi jalar.

Komponen biaya usahatani terbesar adalah biaya tenaga kerja luar keluarga yaitu sebesar 45 % dari total biaya. Penggunaan tenaga kerja luar keluarga karena tenaga kerja yang berasal dari dalam keluarga tidak mencukupi atau tidak tersedia. Kurangnya tenaga kerja

dalam keluarga karena isteri mengutamakan mengurus rumah tangga dan anak-anak masih sekolah atau bekerja di tempat lain. Usahatani ubi jalar banyak menggunakan tenaga kerja laki-laki karena jenis pekerjaan berat dalam pengolahan lahan, penanaman dan pemanenan. Penelitian Situmorang (2013) dan Nursan (2015) menemukan bahwa tenaga kerja merupakan komponen biaya usahatani terbesar pada usahatani jagung. Sedangkan Leovita, dkk. (2015) menemukan bahwa tenaga kerja merupakan komponen biaya usahatani terbesar pada usahatani ubi jalar.

Tabel 8. Pendapatan Usahatani Ubi Jalar per Ha per Musim Tanam di Kecamatan Arjasari tahun 2018

Uraian	Nilai
Produktivitas (Kg/Ha)	11.218
Harga Ubi Jalar (Rp/Kg)	2.775
Penerimaan Usahatani (Rp/Ha)	31.129.950
Biaya Produksi Usahatani (Rp/Ha)	13.860.960
Pendapatan Usahatani (Rp/Ha)	17.268.990
BEP Volume (Kg)	4.635
BEP Harga (Kg)	1.146
R/C atas Biaya Total	2,2

Sumber: Data Primer 2018

Biaya input terbesar lainnya adalah pembelian bibit ubi jalar sebesar 25% dari biaya total. Hal ini karena harga bibit rata-rata tergolong mahal yaitu Rp 110,- per bibit dan penggunaan bibit sembarang yang tidak sesuai anjuran. Penggunaan bibit ubi jalar di tempat penelitian sekitar 60.000 bibit per hektar. Sesuai anjuran Dinas Pertanian, dalam satu hektar efektif ditanami 80 % dengan jarak tanam 75cm x 30cm dan keperluan bibit sekitar 35.555 bibit. Namun umumnya petani di Kecamatan Arjasari menggunakan jarak tanam kurang dari yang seharusnya, sehingga kebutuhan akan bibit tinggi dan mengakibatkan biaya untuk bibit dan tenaga kerja untuk penanaman juga besar. Berdasarkan perhitungan R/C (penerimaan dibagi biaya) usahatani ubi jalar memiliki nilai besar yaitu 2,2 artinya setiap Rp 1.000,- biaya yang dikeluarkan petani dalam kegiatan produksi akan mendapatkan penerimaan sebesar Rp. 2.200,-. Nilai R/C lebih dari satu artinya usahatani ubi jalar layak untuk dilakukan. Kelayakan usahatani tidak hanya ditentukan aspek ekonomi semata, tetapi juga aspek sosial yaitu kompetensi petani, budaya (kebiasaan) petani, lingkungan (iklim), dan regulasi (kebijakan) pemerintah yang mendukung usahatani ubi jalar.

SIMPULAN

Karakteristik individu petani ubi jalar di Kecamatan Arjasari meliputi rata-rata petani berusia 51 tahun, menjadikan usahatani ubi jalar sebagai pekerjaan utama untuk

memenuhi kebutuhan keluarga, berpendidikan terakhir SD (Sekolah Dasar), memiliki rata-rata pengalaman usahatani ubi jalar selama 18 tahun, memiliki lahan ubi jalar dengan status milik pribadi yakni 0,11-0,5 Ha, dan tidak memiliki kebun/lahan ubi jalar lain yang digarap ataupun disewa.

Profil usahatani ubi jalar menunjukkan mayoritas petani menanam ubi jalar varietas kuning putih (AC Putih) dan varietas ubi ungu. Varietas kuning putih ini merupakan varietas lokal dan paling banyak dibudidayakan oleh petani di Kecamatan Arjasari. Kegiatan pemupukan ubi jalar biasanya hanya dilakukan sekali saja yaitu pada saat tanaman berusia sekitar 2 bulan dengan sistem pembukaan tanah. Petani mampu menghasilkan produksi ubi jalar sebanyak 250-300 kg /100 m². Tujuan pasar petani responden yakni bandar yang berada di sekitar lokasi tempat tinggal atau lahan ubi jalar dengan menggunakan sistem pembayaran secara tunai/cash maupun tebasan. Kegiatan pascapanen seperti penyortiran dilakukan oleh petani dan bandar bersamaan saat kegiatan jual-beli berlangsung.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kami sampaikan kepada Universitas Padjadjaran yang telah memberikan dana penelitian melalui Hibah Internal Unpad (HIU), Skema Riset Kompetensi Dosen Unpad (RKDU) tahun anggaran 2018.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, D.R., Sweeney, D.J., Williams, T.A., Camm, J.D. & Cochran, J.J. (2016). *Statistics for business & economics*. Nelson Education.
- Asmarantaka, R.W. (2017). Efisiensi dan Prospektif Usaha Tani Ubi Jalar (Studi Kasus Desa Petir, Dramaga, Jawa Barat, Indonesia). *Jurnal Pangan*, 26, (1), 29-36. DOI: <https://doi.org/10.33964/jp.v26i1.348>
- Burri, B.J. (2011). Evaluating Sweet Potato as an Intervention Food to Prevent Vitamin A Deficiency. *Compr. Rev. Food Sci. Food Saf.* 10, (2), 118–130. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1541-4337.2010.00146.x>
- El Sheikha, A.F. & Ray, R.C. (2017). Potential impacts of bioprocessing of sweet potato. *Critical reviews in food science and nutrition*, 57, (3), 455-471. DOI: <https://doi.org/10.1080/10408398.2014.960909>
- Ishida, H., Suzuno, H., Sugiyama, N., Innami, S., Tadokoro, T. & Maekawa, A. (2000). Nutritive Evaluation on Chemical Components of Leaves, Stalks and Stems of Sweet Potatoes (*Ipomoea batatas* Poir). *Food Chemistry*. 68, (3), 359–367. [https://doi.org/10.1016/S0308-8146\(99\)00206-x](https://doi.org/10.1016/S0308-8146(99)00206-x)

- Kementerian Pertanian. (2018). Aneka Ubi Unggul: Ubi kayu-ubi jalar-talas. (<http://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/5451>, diakses tgl 3 Maret 2019)
- Leovita, A., Asmarantaka, R.W. & Daryanto, H.K.S. (2015). Analisis Pendapatan dan Efisiensi Teknis Usahatani Ubijalar di Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 3, (1), 11-24. DOI: <https://doi.org/10.29244/jai.2019.7.1.63-78>
- Manrique, I., & Roca, W. (2007). Potential of Sweetpotato (*Ipomoea batatas*) Biodiversity as a Functional Food in the Tropics. In Workshop "Functional Foods and Medicinal Products Developments from Amazonian Crops" - EULAFF - EMBRAPA WORKSHOP Rio de Janeiro, Brazil, Dec. 3-5, 2007. CIP, Rio de Janeiro, Brazil.
- Mujiburrahmad, M., & Maryamsari, I. (2014). Karakteristik Petani Dan Hubungannya Dengan Kompetensi Petani Lahan Sempit (Kasus: Di Desa Sinar Sari Kecamatan Dramaga Kab. Bogor Jawa Barat). *Jurnal Agrisep*, 15, (2), 58-74. DOI: <https://doi.org/10.31186/agrisep.18.2.235-248>
- Nedunchezhiyan, M., Byju, G. & Jata, S.K. (2012). Sweet potato agronomy. *Fruit, Vegetable and Sereal Science and Biotechnology*, 6, (1), 1-10.
- Nugroho, A. & Widaryanto, E. (2017). Yield response of ten varieties of sweet potato (*Ipomoea batatas* L.) cultivated on dryland in rainy season. *Journal of Degraded and Mining Lands Management*, 4, (4), 919-929. DOI: <https://doi.org/10.15243/jdmlm.2017.044.919>
- Nursan, M. Efisiensi dan Daya Saing Usahatani Jagung Pada Lahan Kering dan Sawah di Kabupaten Sumbawa. [Tesis]. Bogor (ID): Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.
- Rachmat, M. (2016). Kesempatan kerja dan prospek ketenagakerjaan dalam pengembangan tebu di Jawa. *Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 9, (2-1), 30-39. DOI: <http://dx.doi.org/10.21082/fae.v9n2-1.1992.30-39>
- Rusdiana, S. & Maesya, A. (2017). Pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan pangan di Indonesia. *Jurnal Agriekonomika*, 6, (1), 12-25. DOI: <https://doi.org/10.21107/agriekonomika.v6i1.1795>
- Situmorang, H. (2013). Tingkat Efisiensi Ekonomi dan Daya Saing Usahatani Jagung di Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara. [Tesis]. Bogor (ID): Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.
- Soekartawi. (1995). Analisis Usahatani. Jakarta. (ID): Universitas Indonesia Press.
- Zuraida, N., & Supriati, Y. (2011). Usahatani Ubi Jalar sebagai Bahan Pangan Alternatif dan Diversifikasi Sumber Karbohidrat. *Buletin Agrobio*, 4, (1), 13-23.

MODALITAS DINASTI AHMAD HIDAYAT MUS PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI MALUKU UTARA 2018

Marno Wance¹, dan Raoda M.Djae²

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pattimura

²Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara

E-mail: ipmummu@gmail.com

ABSTRAK. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan modalitas dinasti Ahmad Hidayat Mus (AHM) pada pemilihan kepala daerah di Maluku Utara tahun 2018. Modalitas sangat diperlukan kandidat untuk memperoleh kemenangan di arena politik seperti modal ekonomi, sosial, kultural dan politik. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu studi kasus dengan melakukan wawancara mendalam, pengamatan lapangan serta studi literatur. Hasil penelitian ini menemukan bahwa: (1) Dari segi modal ekonomi yang dimiliki oleh AHM ada harta kekayaan sebesar Rp 52.241.112.194,-, terbesar jika dibandingkan dengan modal ekonomi dari pasangan yang lain. (2) Dari segi modal sosial yang dimiliki AHM, didapatinya sejak menjadi Bupati Kepulauan Sula serta memiliki warisan jaringan birokrasi dan basis masa dari Kesultanan Ternate. (3) Dari segi modal politik, AHM telah memilikinya sejak menjadi Ketua DPRD Kepulauan Sula, Bupati Kepulauan Sula serta jaringan partai Golkar Maluku Utara. Secara teoritis, manfaat dari hasil temuan penelitian adalah dapat menambah pengetahuan tentang modalitas, khususnya modalitas dinasti Ahmad Hidayat Mus. Sedangkan, secara praktis penelitian ini bisa menghasilkan bahan kajian dari berbagai pihak yang berkepentingan untuk menganalisis praktek demokrasi daerah di Maluku Utara.

Kata kunci: Kontestasi; Modalitas; Keluarga Politik; Pilkada

AHMAD HIDAYAT MUS'S DYNASTY MODALITY IN REGIONAL HEAD ELECTIONS IN NORTH MALUKU 2018

ABSTRACT. The purpose of this research is to explain the modality of the Ahmad Hidayat Mus (AHM) dynasty in the regional elections in North Maluku in 2018. Modalities are needed by candidates to win in the political arena such as economic, social, cultural and political capital. The method used in research is a case study by conducting in-depth interviews, field observations and literature studies. The results of this study found that: (1) In terms of economic capital owned by AHM there was a wealth of Rp 52,241,112,194, -, the largest compared to economic capital from other candidates. (2) In terms of social capital owned by AHM, he obtained it since becoming Regent of the Sula Islands and has a legacy of the bureaucratic network and the mass base from the Sultanate of Ternate. (3) In terms of political capital, AHM has owned it since becoming Chairman of House of Representative of the Sula Islands, the Sula Islands Regent and the North Maluku Golkar party network. Theoretically, the benefits of the research findings are that they can increase knowledge about modalities, especially the modalities of the Ahmad Hidayat Mus dynasty. Meanwhile, practically this research can produce study material from various interested parties to analyze regional democratic practices in North Maluku.

Key words: Contestation; Modalities; Family Politic; Electio

PENDAHULUAN

Ahmad Hidayat Mus bertarung pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Maluku Utara pada tahun 2018. AHM Berpasangan dengan Rivai Umar sebagai calon gubernur. Karier politik AHM pernah menjadi bupati kepulauan Sula (Periode 2003-2013). Bupati dua periode tersebut AHM menjadi tokoh sentral partai Golkar (Golongan Karya). Selain itu, Rivai Umar merupakan tokoh pendidikan Maluku Utara, pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Khairun Ternate, serta pada periodenya mampu melakukan alih status kampus dari swasta menjadi universitas negeri satu-satunya di Provinsi Maluku Utara. Selain itu, H. Rivai Umar sangat di kenal pada komunitas suku Makian yang mendiami daratan Halmahera Selatan, pulau Makian, daratan soffifi

di kepulauan Tidore Kepulauan serta daratan Halmahera bagian utara Halmahera (Malifut).

Pilkada Maluku Utara 2018, ada dua kandidat dari keluarga Kasuba maju secara bersama-sama yaitu K.H Abdul Gani Kasuba berpasangan dengan M.Ali Yasin Ali (AGK-YA) partai pengusung PDI-Perjuangan, PKPI serta Muhammad Kasuba-Madjid Husen (MK-Madju) yang diusung oleh PKS, Gerindra dan PAN. AGK dan MK merupakan dua kakak beradik yang membesarkan Partai keadilan sejahtera (PKS) Maluku Utara. Pada Pilkada 2013 AGK menjadi pengusung utama PKS yang pada saat tersebut MK Menjabat sebagai Bupati Kabupaten Halmahera Selatan. Namun pada Pilkada 2018 PKS Mengalihkan dukungan kepada MK secara penuh untuk bertarung merebut kursi kekuasaan di Maluku Utara.

Dengan demikian, dalam kontestasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara 2018, ada dua keluarga dinasti yang bertarung merebut kursi kekuasaan, yaitu dinasti keluarga Ahmad Hidayat Mus dan keluarga dinasti Kasuba. Sejak tahap awal sudah terlihat bahwa pertarungan pilkada 2018 merupakan arena pertarungan dua kekuatan dari jaringan pilgub 2013. Di mana, pada pilkada 2013 pasangan ini bertarung sampai menyisihkan tiga putaran pemilihan gubernur (Pilgub) yang menjadikan Maluku Utara melaksanakan pemilihan kepala daerah terlama di Republik ini.

Menarik untuk meneliti modalitas politik yang dimiliki oleh keluarga Ahmad Hidayat Mus (AHM) pada pilgub 2018, disebabkan, bahwa AHM pernah jadi tersangka pada beberapa kasus, misalnya pembangunan masjid raya pada 2010. Kemudian menjelang tahapan Pilgub Maluku Utara 2018 badai politik diterpa oleh pasangan nomor satu, yaitu AHM-RIVAL. Kasus pembebasan lahan bandara Bobong ini langsung di tangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menetapkan mantan bupati kepulauan Sula dua periode dan Zainal Mus bupati Banggai. Dari latar belakang di atas maka sangat menarik serta isu pilkada serentak 2018 untuk menggali dinamika politik terkait dengan modalitas pada salah satu keluarga di Maluku Utara. Menjadi menarik, karena di tengah penetapan AHM sebagai tersangka namun bisa memenangkan Pilgub 2018. Oleh karena, menarik untuk menganalisis modalitas serta jaringan yang dibangun untuk memenangkan kontestasi politik di Maluku Utara.

Maka dari masalah yang terjadi peneliti tertarik untuk menganalisis pengaruh modalitas yang dimiliki oleh Ahmad Hidayat Mus dalam kemenangan Pilkada Maluku Utara 2018. Serta pengaruh modalitas dalam membentuk kekuatan dan jejaring AHM pada konteks pemilihan kepala daerah, serta jaringan dinasti keluarga. Maka sangat penting untuk melakukan penelitian yang mendalam untuk mengetahui pengaruh Modal Politik, modal ekonomi, modal sosial dalam membangun kekuatan politik.

Berdasarkan pada uraian permasalahan pada latar belakang tersebut di atas, maka peneliti membuat suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana model modalitas dinasti Ahmad Hidayat Mus pada yang digunakan pada pemilihan kepala daerah di Maluku Utara tahun 2018?
2. Bagaimana pengaruh modalitas dinasti Ahmad Hidayat Mus terhadap perolehan suara pada pemilihan kepala daerah di Maluku Utara tahun 2018?

Maka tujuan dari dilakukan penelitian ini untuk menganalisa secara mendalam mengenai bagaimana

1. Untuk mengetahui Bagaimana modalitas Ahmad Hidayat Mus pada pemilihan kepala daerah di Maluku Utara 2018.

2. Untuk Bagaimana pengaruh modalitas Ahmad Hidayat Mus pada pemilihan kepala daerah di Maluku Utara 2018.

Modal secara prinsipil dibedakan menjadi empat kategori. Modal yang digunakan kandidat sebagai kekuatan politik dalam meraih kekuasaan serta mempengaruhi basis pemilih terbagi menjadi empat faktor. Faktor modal ekonomi dapat berupa uang/materi, kekayaan yang dimiliki oleh seseorang, kelompok serta perseorangan, properti yang dimiliki atau harta kekayaan yang tidak bergerak. Kekuatan modal ekonomi tersebut dapat digunakan oleh kandidat untuk mempengaruhi pemilih baik yang rasional maupun irasional. Faktor modal sosial dalam bentuk jenis relasi dengan orang lain, elit politik daerah maupun nasional serta jaringan yang kuat dalam partai politik, kelompok kepentingan. Faktor modal kultural dalam bentuk pengetahuan yang mendalam dalam pengelolaan kenegaraan, kualifikasi pendidikan yang dimiliki oleh kandidat, gelar akademik dan pengetahuan bahasa. Serta faktor modal simbolik dapat berupa *prestise* yang sudah ada sejak lama, kehormatan dari orang tua maupun menjadi tokoh tertentu serta memiliki kharisma yang sudah ada sejak lahir dan dapat mempengaruhi orang lain. Empat kekuatan modal tersebut menjadi faktor kemenangan kandidat dalam kontestasi pemilihan.

Kekuatan modalitas yang dimiliki menjadi nilai politik yang fundamental dalam dinamika pemilihan kontemporer. Dalam bukunya *The Forms of Capital* yang ditulis oleh Bourdieu membedakan tiga bentuk modal. Pertama modal ekonomi dalam bentuk materi/uang yang dimiliki baik itu kekayaan bergerak dan tidak bergerak dan memiliki nilai simbolik. Kedua modal budaya dapat bernilai budaya yang sudah terbentuk dalam masyarakat serta pola-pola konsumsi. Modal budaya juga mencakup kekayaan properti yang dimiliki dan menjadi modal yang besar dalam membentuk pola budaya politik seperti pengetahuan pendidikan, bentuk-bentuk bahasa yang terpolarisasi dalam budaya kelompok tertentu. Modal menurut Bourdieu memiliki peran sebagai relasi sosial dalam membangun jejaring yang luas untuk melakukan sistem pertukaran dalam bentuk materi atau simbol untuk merepresentasikan kekuatan modalitas politik dalam formasi sosial tertentu. (Bourdieu, "The Forms of Capital" dalam J.G Richardson (ed) Handbook of Theory and for the Sociology of Education, 1986:6-7).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Leonardo Snafi, dkk tentang Kontestasi politik identitas pada etnis papua dalam pemilihan kepala daerah Kota Sorong menyimpulkan bahwa Politik identitas etnik itu dimanfaatkan sebagai alat untuk mempersatukan kelompok-kelompok etniknya untuk kepentingan merebut kekuasaan dalam pemilihan kepala daerah di Kota Sorong. Maka melibatkan identitas etnik

dari primodialisme, egoisme kampung, marga, budaya, saudara, dan kelompok politik untuk melebur menjadi satu dalam semangat merebut kekuasaan dalam pemilihan kepala daerah di Kota Sorong. (Ferinandus, Muhadjir, Setiadi, & Hakimul, 2018:130).

Dari hasil penelitian ini ditemukan secara signifikan bahwa perilaku pemilih pemula dalam memutuskan pilihan politik pada pilgub Maluku Utara Tahun 2013, bahwa faktor ketokohan seseorang dapat mempengaruhi sikap masyarakat terhadap tokoh kandidat dalam menentukan keputusan memilih terhadap kandidat calon tertentu. Di dibandingkan dengan empat faktor lainnya, ketokohan merupakan faktor yang memiliki pengaruh sangat dominan. Dari hasil penelitian ini juga ditemukan, aspek-aspek yang melekat pada faktor ketokohan yaitu kredibilitas, kemampuan dan kepribadian yang mempunyai peranan sangat penting dalam membentuk sikap pemilih terhadap tokoh partai tertentu. (Wance & Suhu, 2019:113). Sedangkan Hasil penelitian di Pilkada Halmahera Selatan 2015 bahwa Proses pemilihan dari sekian tahapan sudah bisa disebut berjalan efektif. Tetapi perlu dibenahi khususnya pada tahapan rekapitulasi suara hasil pemilihan yang masih menimbulkan rasa ketidakadilan dari sebageian pasangan calon pasangan calon (Karim, Wance, & Taib, 2017: 63).

Kemenangan kandidat dalam pilkada dapat dilihat dari latar belakang seperti tingkat pendidikan, pengalaman pekerjaan serta ketokohan dalam lingkungan masyarakat setempat (tokoh agama, adat, organisasi pemuda serta keprofesian). Menurut Nurasm modal sosial yang dimiliki oleh kandidat sangat berkaitan dengan membangun jejaring kepercayaan dengan masyarakat. (Nurhasmi, 2003:8). Selain itu, pandangan dari pakar ilmu politik membagi modal sosial menjadi dua kelompok besar yaitu pertama jaringan hubungan sosial (*social network*) yaitu membangun jejaring sosial dalam memperkuat kekuatan politik antara kelompok tertentu. Kedua menekan pada karakteristik (*embedded*) pribadi seseorang yang saling berinteraksi antara sesama kelompok maupun pribadi dalam membentuk hubungan serta relasi sosial (Ancok, 2003:11). Sedangkan menurut Fukuyama membedakan teori modal sosial dengan modal manusia (*human capital*). Pertama modal sosial merupakan kemampuan kapabilitas yang muncul dari hasil kepercayaan yang umum dalam lingkungan masyarakat atau bagian kelompok terkecil. Bagian kelompok terkecil terlembaga dalam membentuk jejaring, hubungan sosial untuk mendapatkan kepercayaan dalam hubungan sosial masyarakat untuk di transformasikan dalam hubungan kultural yang ada seperti agama, tradisi dan sejarah (Fukuyama, 2002). Teori modal sosial yang telah diuraikan oleh pakar sosial mempunyai korelasi yang sama dalam mendiskripsikan dimamika demokrasi bahkan melakukan analisis politik yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat.

Sedangkan menurut Robert Putnam modal sosial adalah suatu saling percaya (*mutual trust*) masyarakat terhadap para pemimpinnya yang sudah berada pada institusi Negara. Modal sosial didefinisikan juga sebagai institusi sosial yang melibatkan jaringan (*networks*) yang baik antara masyarakat dengan perangkat kekuatan politik pada lembaga formal yang ada. Sehingga norma-norma (*norms*) menjadi nilai yang terbentuk dan menjadi domain kekuatan politik dalam kehidupan sosial untuk merekat keyakinan sosial antara masyarakat dengan institusi yang ada dalam Negara. Selain itu, kepercayaan sosial (*social trust*) dapat menjadi faktor pendorong untuk kepentingan bersama masyarakat, kelompok dengan melakukan kolaborasi sosial. Aspek modal sosial yang dilihat menurut pendapat ini lebih pada jaringan sosial, ikatan masyarakat dengan lembaga formal yang menjadi norma untuk mendorong produktifitas (Putnam, 1993). Berbeda dengan Bourdieu mendefinisikan modal sosial sebagai kekuatan sumber daya yang sangat potensial yang dimiliki oleh seseorang dan kelompok tertentu dari jaringan sosial yang sudah terlembaga dalam Negara, serta hubungan yang akan berlangsung secara terus menerus dalam bentuk pengakuan antara seseorang dengan kelompok bahkan kelompok bersama dengan Negara. Pengakuan pada jaringan sosial menjadi perkenalan timbal balik baik dalam keanggotaan di dalam kelompok untuk memberikan dukungan secara kolektif dengan tujuan membangun jaringan sosial antara masyarakat dengan Negara (Bourdieu, Outline of A Theory of Practice, 1995: 5). Dalam pelaksanaan rekrutmen politik calon anggota legislatif baik tingkat pusat maupun kabupaten/kota perlu lebih memperhatikan proses mekanismenya, sehingga tahapan-tahapan rekrutmen politik anggota DPR, DPRD sesuai dengan Juklak yang telah ditetapkan DPP. Proses rekrutmen calon anggota legislatif harus benar-benar sesuai dengan keinginan partai dan masyarakat, dan calon anggota legislatif harus dikenal masyarakat dan memiliki kualitas dan kapasitas jikalau menjadi anggota DPR dan DPRD. Dalam proses rekrutmen ini, DPD Partai Golkar Kab. Halmahera Barat juga melakukan survey terhadap para Calon Anggota Legislatif Periode 2014-2019. (Kaunar & Wance, 2017:69).

Arena kontestasi politik tidak bisa dilepaskan dari dukungan modal ekonomi baik kandidat maupun para kartel yang memberikan modal ekonomi kepada kandidat yang terlibat secara langsung di pilkada. Aktor-aktor ekonomi memberikan dana dalam bentuk keuangan kampanye untuk membiayai kegiatan politik kandidat. Menurut Sahdan dan Haboddin bahwa proses pilkada sangat membutuhkan biaya/ongkos yang sangat mahal. Faktor mahalnya ongkos pilkada mengakibatkan kandidat harus mencari aktor donatur keuangan untuk memberikan dana yang besar dalam keperluan kampanye. Tantangan

terbesar perkembangan demokrasi lokal, karena maraknya patronase dan klintalisme yang bekerja sama pada pilkada untuk merebut kekuasaan dengan tujuan kepentingan tertentu.

Ada 3 faktor mahal biaya pilkada yaitu:

- a) Kandidat yang mengikuti kontestasi pilkada diharuskan mendapat dukungan dari partai politik. Partai politik yang menjadi kendaraan politik kandidat dalam pilkada mengharuskan pasangangan calon membeli partai dengan biaya yang mahal.
- b) Model sosialisasi kandidat dalam kampanye untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan visi misi membutuhkan banyak biaya yang mahal. Seperti, pembuatan poster, pemasangan iklan di media massa baik cetak maupun elektronika.
- c) Maraknya praktek politik uang yang terjadi pada pemilu di Indonesia sehingga menjadi catatan buruknya rasionalisme pilihan politik. Politik uang dengan tujuan mendapat imbalan suara yang signifikan dalam pilkada. Untuk membujuk pemilih biasanya menggunakan praktek politik uang. Pemberian uang kepada pemilih sangat menonjol pada saat kampanye dan menjelang pencoblosan di kotak suara (Sahdan, Gregorius, & Haboddin, 2009:124-125).

Ditambahkan Sahdan dan Haboddin, bahwa setiap kontestasi pilkada yang dilaksanakan pada demokrasi lokal maupun nasional membutuhkan "*dana politik untuk biaya kegiatan pilkada*". Istilah dana politik sudah sangat familiar dalam dinamika politik di Indonesia. Biaya politik dapat dibedakan dengan melihat sumber biaya politik dan bagaimana penggunaan dana kampanye, yaitu:

1. Sumber dana politik yang berasal baik dari sumbangan dari para donatur/simpatisan kandidat baik dalam bentuk sumbangan perseorangan maupun perusahaan. Dana politik yang diberikan kepada kandidat dapat diartikan sebagai wujud nyata dari para donatur untuk memberikan partisipasi maupun dukungan masyarakat kepada salah satu kandidat pasangan calon kepala daerah.
2. Dari aspek pengguna, dana politik digunakan oleh kandidat, tim kampanye untuk membiayai aktivitas partai politik, biaya operasional kampanye. Penggunaan dana politik pada pilkada tidak hanya digunakan kandidat untuk pengeluaran kampanye dalam bentuk mencetak brosur/poster, biaya konvoi kandidat, biaya transportasi serta biaya konsumsi dan pemasangan iklan. Namun pengeluaran biaya pilkada juga digunakan pasangangan calon untuk bayar partai politik/mahar politik untuk dijadikan kendaraan politik pada pilkada. (Sahdan, Gregorius, & Haboddin, 2009:124-125)

Modal budaya terbentuk dari individu sejak lahir dan terinternalisasi melalui ajaran orang tua dalam lingkungan

keluarga. Sehingga dapat dikatakan bahwa modal sosial yang multidimensional secara individu dan sangat terpengaruh oleh pendidikan formal serta nilai-nilai yang ada pada warisan keluarga. Pembentukan modal budaya secara sadar dan tidak sadar yang sudah terinternalisasi sejak lahir dan membudaya dalam lingkungan keluarga dan berfungsi sebagai nilai yang baru dalam kehidupan sosial secara efektif (Bourdieu, 2003:5). Menurut Bourdieu membagi modal budaya memiliki beberapa dimensi, antara lain:

- a. Internalisasi nilai-nilai pengetahuan obyektif tentang seni dan budaya baik dalam lingkungan individu maupun keluarga.
- b. Cita rasa budaya (*cultural taste*) pada individu yang dapat termanifestasi dalam lingkungan masyarakat dan preferensi norma yang ada pada individu yang memiliki rasa memiliki budaya yang tinggi.
- c. Kualifikasi-kualifikasi formal (seperti gelar-gelar universitas) yang dimiliki menjadi modal budaya dalam kelembagaan formal Negara dan mendapatkan penghargaan yang tinggi apabila memiliki kualifikasi pendidikan sehingga tingkat kebijakan semakin tinggi.
- d. Kemampuan-kemampuan budayawi dan pengetahuan praktis. Kemampuan budaya sangat penting untuk membentuk nilai yang baik dalam diri individu dan dapat mengartikulasikan etika yang baik dan benar.

Dari konsep modal budaya diatas dapat diuraikan modal budaya ialah nilai yang sudah ada sejak lahir, lingkungan keluarga membentuk ajaran dalam diri yang dapat termanifestasi dalam kehidupan sosial. Tujuan modal budaya menjadi cita rasa yang khas dalam mempertahankan perilaku yang baik, sopan santun antara sesama masyarakat serta menjadi pedoman kehidupan.

Konsep dinasti politik dalam pilkada kontemporer dikenal sebagai sekelompok elit yang mempunyai hubungan pertalian darah atau hubungan perkawinan dan mempertahankan lembaga formal pada keluarga terdekat. Konteks politik dinasti di Indonesia memiliki kemampuan untuk mempertahankan dan mempengaruhi kekuasaan pada kelompok, keluarga terdekat serta membentuk oligarki politik dalam lingkaran keluarga. Sehingga mereka terkadang relatif mudah menjangkau gejala dinasti politik, kelompok elit tersebut diasosiasikan elit partai politik, elit militer, elit pengusaha atau pemodal, elit agama, elit preman atau mafia, elit artis, serta aktifis. (Bathoro, 2011:117). Adapun orientasi terhadap menjaga kelanggengan kekuasaan tersebut sangat erat kaitannya dengan naluri alamiah manusia untuk senantiasa menjaga zona kenyamanan beserta fasilitas keamanan di dalamnya. Hal itulah yang kemudian mendorong penguasa menjaga kekuasaan tetap terpusat dan tidak berpindah ke pihak lain melalui beragam cara. (Djati, 2013:209)

Dalam hal ini, terdapat tiga varian familisme dalam menggambarkan dinasti politik dalam konteks ini. Pertama adalah familisme (*familisme*), yakni dinasti politik yang didasarkan secara murni pada hubungan darah langsung dalam keluarga (*consanguty*) dalam hubungan perkawinan (*marrige*) dengan klan lainnya. Bagi keluarga politik yang lebih lemah posisinya akan menguntungkan dengan keluarga politik yang lebih kuat karena akan menjamin eksistensi keluarga politik lemah tersebut. Di sisi lainnya, keluarga politik mendapatkan jejaring yang lebih besar dengan mampu mengikat keluarga lainnya. Adapun terbentuknya suatu dinasti politik dalam bentuk familisme biasanya didasarkan pada klan untuk menjaga keistimewaan politik yang telah didapat. Loyalitas, kepatuhan, maupun solidaritas keluarga merupakan tiga poin penting familisme mempengaruhi corak dinasti politik. Pola tersebut kemudian dihubungkan melalui komando saudara tua hingga saudara muda dalam pemerintahan (Bathoro, 2011:117).

Kedua adalah quasi-familisme. Model ini didasarkan pada sikap afeksi dan solidaritas dari anggota keluarga dalam struktur kekuasaan. Adapun afeksi yang dimaksudkan secara harfiah tidak dimaknai sebagai kasih sayang, namun sebagai bentuk orientasi politik keluarga didasarkan pada regionalism, lingkungan, maupun tribulisme sama dengan keluarga tersebut. Artinya, dimensi dinasti politik ini tidak lagi berada dalam ranah keluarga inti saja, tetapi juga telah bercabang dengan keluarga lainnya yang tidak satu keturunan darah, namun memiliki sistem kekerabatan berbasis artificial. Oleh karena itu, dalam model quasi-familisme, semua anggota family (keluarga) berusaha mengidentifikasi cirri melalui simbol-simbol tertentu supaya mendapat legitimasi dari keluarga, jalur perkawinan, maupun situ keluarga lainnya. Maka dalam quasi-familisme sendiri yang digalang adalah proses solidaritas bagi anggotanya baik yang berada dalam ranah formal dan informal. Hal inilah yang menjadikan quasi-feminisme berkembang seperti kekuatan politik oligarkis yang mampu memberikan pengaruh disegala lini kehidupan. (Djati, 2013:209)

Ketiga adalah egosime—familisme. Model dinasti didasarkan pada pemunuhan aspek fungsionalisme dibandingkan hanya menuruti garis keturunan maupun ikatan darah. Konteks egoisme dapat dipahami dalam dua hal, yakni dari segi kepala daerah pada dasarnya sama dengan konsepsi teori sebelumnya yakni kecenderungan mendahulukan keluarga dari pada publik dalam pengisian posisi jabatan publik maupun suksesi pemerintahan.

METODE

Jenis Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian Deskriptif kualitatif yaitu ada beberapa definisi mengenai pendekatan ini, (Moleong, 2007: 6). Metode

ini menjelaskan bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati.

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, (Nasir, 1998:64). Adapun informan yang diambil representase dari ketua tim pemenang Ahmad Hidayat Mus, sekretaris tim pemenang, Ketua DPD I Partai Golkar Maluku Utara, KPU Provinsi Maluku Utara, BPK Perwakilan Maluku Utara. Teknik pengumpulan data primer yaitu wawancara secara langsung dengan informan secara langsung yang sifatnya spontan/wawancara, analisis data secara objektif serta tidak melakukan rekayasa dalam penelitian. (Salim, 2006:223). Wawancara mendalam suasana keakraban dengan mengajukan pertanyaan (Bungin, 2005:108). Studi kasus merupakan penelitian yang berusaha untuk memahami fenomena sosial yang terjadi dengan mengali suatu batasan yang jelas pada aspek kasus yang terjadi dan data yang mendalam disertai berbagai sumber informasi yang akurat. Dengan tujuannya untuk mendeskripsikan dengan utuh dan mendalam dari sebuah entitas (Mujahidin, 2014). Data-data dari metode studi kasus bisa menggunakan berbagai sumber data yang bisa menguraikan, dan menjelaskan secara komprehensif berbagai aspek individu, kelompok, suatu program, organisasi atau peristiwa secara sistematis (Kriyantono, 2010). (Cresswell, 2015) bahkan mengutarakan studi kasus memiliki ciri utama yakni dengan memperlihatkan pemahaman mendalam tentang kasus tersebut. Seperti harta kekayaan kandidat pada Pilkada Maluku Utara, perolehan suara pasangan, struktur karier politik pada jabatan partai dan publik, berita acara perolehan suara.

Penelitian ini berlokasi di 2 (dua) tempat yakni Kota Ternate dan ibu kota Maluku Utara (Sofifi), dengan alasan karena kedua daerah tersebut merupakan kediaman keluarga Ahmad Hidayat Mus. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yakni menghasilkan data deskriptif berupa gambaran yang bersumber dari berbagai informan dan modalitas dinasti yang dapat terjadi di lapangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian deskriptif yang tujuannya mempresentasikan sebuah gambaran mengenai detail-detail masalah dari suatu situasi, atau hubungan-hubungan modalitas dinasti dan tindakan pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis modalitas yang digunakan untuk memenangkan arena kontestasi pilkada Maluku Utara Tahun 2018. Pendekatan yang digunakan pada jenis penelitian yaitu deskriptif kualitatif yaitu melakukan analisis data dengan cara mendiskripsikan temuan dalam penelitian ini. Adapun tujuan untuk menguraikan model modalitas keluarga AHM yang digunakan untuk memenangkan arena politik serta bagaimana modalitas digunakan untuk mempertahankan keluarga dinasti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan teori modalitas sosial untuk menganalisis dinamika pemilihan gubernur Maluku Utara tahun 2018. Ada empat modalitas yang akan diuraikan untuk menganalisis modalitas Ahmad Hidayat Mus (AHM) yaitu modal ekonomi, modal sosial, modal kultural dan modal politik. Dari keempat modal tersebut juga akan menguraikan modalitas yang ada pada calon gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara pada tahun 2018 yang bertarung pada kontestasi politik daerah tahun 2018. Sehingga akan mendapatkan faktor kemenangan dan kekalahan dari setiap modal yang dimiliki, baik oleh pasangan Ahmad Hidayat Mus-Rivai Umar (AHM-RIVAI), pasangan Abdul Gani Kasuba-M. Ali Yasin (AGK-YA), Pasangan Burhan Abdurahman-Ishak Djamaludin (BUR-ISHAK) Serta Pasangan Muhammad Kasuba-Madjid Husen (MK-MAJU).

Modal Ekonomi Keluarga Ahmad Hidayat Mus

Modal ekonomi sangat menentukan kemenangan pasangan calon dalam kontestasi politik. Wilayah operasional kampanye yang luas di Provinsi Maluku Utara membutuhkan biaya akomodasi tim ke daerah-dearah pulau yang dijangkau dengan transportasi laut. Sehingga menyebabkan setiap pasangan calon harus memiliki modal keuangan yang banyak. Modal ekonomi sangat menunjang calon kepala daerah untuk memenangkan arena kontestasi pada pemilihan kepala daerah.

Modal ekonomi dalam penelitian ini akan diuraikan terakit dengan harta kekayaan yang dimiliki oleh Ahmad Hidayat Mus dari tahun 2005-2018. Di bawah ini akan diuraikan masing-masing modal ekonomi yang dimiliki oleh salah satu pasangan calon Gubernur Maluku Utara tahun 2018. Kekuatan finansial dalam pilkada menjadi modal yang sangat penting dalam konsolidasi kemenangan pada arena kontestasi pilkada. Modal ekonomi Ahmad Hidayat Mus terakumulasi pada modal-modal yang lain termasuk modal simbolik serta modal kultural. Kekayaan yang dimiliki mampu melengkapi modal-modal yang lain dan faktor kelemahan yang ada pada kandidat. Sehingga kekuatan modal ekonomi yang besar mampu meningkatkan elektabilitas AHM yang sangat signifikan serta kerja-kerja tim dalam kemenangan pada Pilgub Maluku Utara 2018. Hal ini berdasarkan pada modal ekonomi yang dimiliki

dari tahun ketahun mengalami peningkatan sejak menjabat menjadi bupati kepulauan Sula (2005-20115) sehingga kekuatan politik dalam memenangkan kontestasi sangat besar. Berdasarkan pada laporan LHKPN mengalami peningkatan sejak tahun 2005-2018, adapun hasil kekayaan dapat dilihat pada tabel 1.

Semua calon diwajibkan melaporkan harta kekayaan baik dalam bentuk harta tidak bergerak, harta bergerak maupun giro dan setara kas lainnya. Berdasarkan pada data yang didapat dari LHKPN tahun 2005-2010 total harta kekayaan yang dimiliki oleh AHM sejumlah 7.633.906.000. sedangkan pada laporan LHKPN 2010-2013 total kekayaan AHM dengan jumlah 36.725.269.635, dari hasil laporan tersebut harta kekayaan yang dimiliki meningkat. Laporan LHKPN 2013-2018 total kekayaan yang dimiliki meningkat dari tahun sebelumnya dengan jumlah 52.241.112.194.

Modal Ekonomi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur

Sistem pemilihan kepala daerah dengan sistem kampanye serta sosialisasi secara langsung, tatap muka, bertemu dengan masyarakat dengan tujuan mendapatkan suara pemilih. Model kampanye secara tersebut sehingga pasangan calon yang bertarung harus memiliki modal ekonomi yang banyak untuk memaksimalkan peluang dalam kontestasi pemilihan kepala daerah di Maluku Utara. Pada data modal ekonomi dibawah ini akan diuraikan secara detail harta kekayaan yang dimiliki oleh pasangan calon berdasarkan pada LHKPN tahun 2018.

Data harta kekayaan pribadi yang dimiliki oleh Ahmad Hidayat Mus sejumlah 52.241.112.194, ini merupakan harta kekayaan calon gubernur terbanyak dibandingkan dengan pasangan yang lain. Sedangkan harta kekayaan Rivai Umar dengan jumlah 2.373.364.987 dari total kekayaan calon wakil gubernur Maluku Utara yang mendampingi AHM masih sangat rendah. Namun dari harta kekayaan yang dimiliki oleh dua pasangan AHM-RIVAI merupakan pasangan kandidat calon pada pilgub Maluku Utara 2018 yang memiliki harta kekayaan terbanyak, dapat dilihat pada Gambar 1.

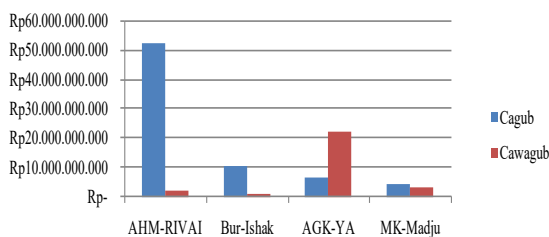
Perbandingan harta kekayaan pribadi diantara keduanya cukup memiliki perbedaan. Ahmad Hidayat Mus memiliki harta kekayaan terbanyak diantara calon lainnya

Tabel 1. Harta Kekayaan Ahmad Hidayat Mus 2005-2018

No	Nama Harta	2005-2010	2010-2013	2013-2018
1	Harta tidak bergerak	4.128.906.000	21.500.227.500	21.500.227.500
2	Harta bergerak	2.455.000.000	4.525.000.000	5.855.000.000
3	Giro dan setara kas lainnya	780.000.000	9.236.483.907	8.236.483.907
4	Hutang piutang		187.746.059	
Total Harta		7.633.906.000	36.725.269.635	52.241.112.194

(Sumber: LHKPN, 2019)

termaksud Rivai Umar yang menjadi calon wakilnya. Namun jika di gabungkan harta kedua pasangan ini maka yang paling terbesar di antara calon lainnya. Dari data harta kekayaan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa faktor keunggulan pasangan AHM-RIVAI pada pemilihan kepala (Pilkada) adalah banyaknya modal ekonomi yang dimiliki. Sehingga dapat disimpulkan keunggulan pasangan AHM-RIVAI adalah memiliki harta kekayaan terbanyak, meskipun bukan menjadi salah satunya faktor keunggulan yang utama.



(Sumber: LHKPN,2018)

Garfik 1. Harta Kekayaan Cagub dan Cawagub Maluku Utara 2018

Keunggulan di modal ekonomi seperti yang diungkapkan oleh Field (2016:81) dipandang sebagai salah satu faktor yang mendorong inovasi dan meningkatkan keunggulan dalam berkompetisi. Termaksud dalam kasus kompetisi politik di provinsi Maluku utara bahwa modal ekonomi menjadi faktor determinan dalam kemenangan pilkada. Akumulasi kekuatan modal yang kuat menjadi variabel kemenangan pada pilkada.

Harta Kekayaan Pasangan Abdul Gani Kasuba dan M. Ali Yasin

Ali Yasin pertama terlibat dalam pemilihan gubernur Maluku Utara 2018. Namun ia pernah menjabat sebagai Bupati Kabupaten Halmahera Tengah selama dua periode (2007-2017), ia kemudian maju menjadi calon wakil gubernur Maluku Utara. Pengalaman menjabat sebagai bupati dua periode menjadikan harta kekayaan Ali Yasin terbanyak setelah Ahmad Hidayat Mus dengan jumlah 22.233.400.134. Sementara itu, Abdul Gani Kasuba sebagai petahana memiliki harta kekayaan yang terbilang sangat berbeda dengan pasangan wakilnya Ali Yasin yaitu sebanyak 6.545.876.657. Dilihat dari data tersebut bahwa jika digabungkan harta kekayaan kedua pasangan maka dapat disimpulkan keduanya memiliki modal ekonomi yang terbesar kedua setelah pasangan Ahmad Hidayat Mus dan Rivai Umar. Sehingga dari modal ekonomi yang dimiliki menjadi faktor penentu kemenangan kedua pasangan ini.

Harta kekayaan Abdul Gani Kasuba tergolong kecil jika dibandingkan dengan Calon Wakil Gubernur yang berpasangan dengannya yaitu M. Ali Yasin Ali. Jika di urutkan dari empat pasangan wakil makan Ali Yasin memiliki posisi yang terbanyak dalam memiliki kekayaan.

Modal ekonomi yang kuat antara kedua pasangan gubernur dan wakil gubernur, tentu akan berimplikasi langsung dengan semangat juang dan kepercayaan tim sukses, relawan dalam menghadapi kontestasi Pilgub Maluku Utara 2018. Setia momen pemilihan *cost* politik yang sangat mahal yang jika memiliki modal ekonomi yang besar akan menunjang modal-modal lain dalam pemenangan serta konsolidasi tim.

Harta Kekayaan Pasangan Burhan Abdurahman-Ishak Djamaludin

Buhan Abdurahman, sebagai calon kepala daerah di Provinsi Maluku Utara wajib untuk melaporkan harta kekayaan yang dimiliki selama menjabat sebagai penyelenggaraan pemerintah. Berdasarkan pada Laporan LHKPN, jumlah kekayaan yang dimiliki oleh Burhan Abdurahman dengan total Rp. 10.741.118.200. sedangkan harta kekayaan wakilnya, Ishak Djamaludin sejumlah Rp. 1.384.369.000. Dari uraian harta kekayaan dua pasangan ini maka pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) tahun 2018 memiliki jumlah kekayaan terbesar ketiga setelah Pasangan AHM-RIVAI, AGK-YA. Pada saat mencalonkan diri menjadi calo Gubernur, Burhan Abdurahman menjabat sebagai Walikota Ternate dua periode (2010-2021). Kepemimpinan selama dua periode tersebut menambah modal ekonomi semakin meningkat sebelum menjabat menjadi Walikota Ternate.

Harta Kekayaan Muhammad Kasuba-Majid Husen

Muhamamd Kasuba putra kelahiran Bibinoi, Bacan Timur Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara pada 24 September 1960. Karir politik berawal dari menjadi Anggota DPRD Provinsi Maluku (1999-2001) Anggota DPRD Provisi Maluku Utara (2001-2005) dari Fraksi Partai Keadailan Sejahtera (PKS) Bupati Halmahera Selatan dua periode (2005-2015). Berdasarkan pada Laporan LHKPN KPK 2018 Harta kekayaan yang dimiliki oleh Muhammad Kasuda Rp 4.556.879.249. Sedangkan Masjid Husen mengawali karier dari seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) karier terakhir setelah menadi purna bakti adalah pernah mendampingi Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuda untuk menjadi Sekretaris Provinsi (2013-2016). Sedangkan karier politik dimulai dari menjadi Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Maluku Utara (2015-Sekarang). Berdasarkan hasil Laporan LHKPN KPK harta kekayaan yang dimiliki oleh Madjid Husen sebesar Rp 3.137.763.816. Sesuai dengan hasil laporan kekayaan dari kedua pasangar Calon Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara 2018, sangat sedikit jika dibandingkan dari 4 pasangan calon yang lain. Sehingga dengan modal ekonomi yang yang kecil juga mampu mempengaruhi kerja-kerja tim pemenangan pada Pilgub Maluku Utara 2018.

Reproduksi Modal Sosial Ahmad Hidayat Mus

Pertama-tama kita harus menentukan posisi masing-masing reproduksi modal sosial Ahmad Hidayat Mus. Dalam analisis Bourdieu, posisi dapat diplotkan di arena dengan mengumpulkan seperangkat data tentang jenis dan volume modal dimiliki oleh agen-agen sosial, tingkat pendidikan dan institusi yang dimasuki, jaringan sosial, keanggota dan afiliasi, pekerjaan, tempat tinggal, dan sebagainya. Setelah itu, profil individu dimasukkan dalam satu kelompok dengan karakteristik *habitus* yang sama dan bertentangan. (Thomson, 2010:72).

Tabel 2. Pengalaman Organisasi/Partai Politik

Jabatan	Institusi	Tahun
Ketua DPD I Partai Golkar Maluku Utara	Golkar-Maluku Utara	2010-2015
Ketua HKST Maluku Utara	HKST-Maluku Utara	2013-2018
Ketua DPP Bapilu Indonesia Timur	DPP Golkar	2015-2018
Salahakan Sultan Ternate	Sultan Ternate	2013 - Sekarang

(Sumber: KPUD, 2019)

Penjelasan pertama adalah posisi politik dari Ahmad Hidayat Mus. Latar belakang sebagai seorang pengusaha dengan pendidikan sarjana Ekonomi lulusan salah satu perguruan swasta di Bandung yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) YPKP (1989-1994), ia memiliki akumulasi modal ekonomi yang cukup signifikan. Selain itu, pada dirinya juga terdapat akumulasi jaringan kesultanan sebagai Salahakan Sultan Ternate. Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa modalitas Ahmad Hidayat Mus baik melalui perangkat sosialisasi, arah orientasi, maupun pengalaman politik. Sehingga arena politik di Maluku Utara menjadi keharusan sebuah korespondensi modalitas (kandidat-pemilih) yang mampu memberikan legitimasi politik melalui afiliasi suara (*Voting behavior*). Melalui modalitas yang menjadi jaringan gerakan pemenangan serta strategi politik, disamping kuasa simbolik yang dimiliki selama menjabat sebagai pejabat daerah.

Posisi politik anggota keluarga dinasti AHM berada pada arena politik dengan memposisikan klan politik pada jabatan kepala daerah serta DPRD. Posisi modal sosial mereka mendekati arena ekonomi secara signifikan. Selain itu, Klan Ahmad Hidayat Mus memiliki modal kultural yang kuat dengan terpilihnya AHM sebagai Ketua Himpunan Kerukunan Keluarga Sulawesi Tenggara (HKST) Maluku Utara (2013-2018). Modal kultural yang dimiliki ini untuk menarik pemilih suara pada beberapa daerah yang mayoritas penduduknya adalah pendatang dari Sulawesi Tenggara ke Maluku Utara, Misalnya penduduk di Kabupaten Kepulauan Taliabo, Pulau Baca, Kepulauan Obi. Ahmad Hidayat Mus memiliki hubungan yang kuat terhadap organisasi paguyuban maupun

salahakan kesultanan Ternate sehingga jaringan serta kekuatan politik sudah terbentuk untuk menjadi modal kultural.

Berdasarkan pada pemetaan tersebut, kekuatan modalitas yang dimiliki oleh klan Ahmad Hidayat Mus berada pada posisi dominasi politik dan kuasa simbolik yang sudah dibangun sejak menjabat menjadi bupati kepulauan Sula serta jabatan politik dinasti yang dibangun bersama keluarnya menjadi modal politik serat modal sosial. Dominan Ahmad Hidayat Mus dalam arena politik serta pengaruhnya pada modal ekonomi yang semakin kuat. *Doxa* berupa *to-panrita* merupakan salah satu sumber reproduksi sosialnya dalam masyarakat menengah hingga kelompok elit intelektual. Sedangkan *doxa to-warani* berpengaruh pada masyarakat bawah dengan karakteristik budaya yang kuat.

Dinasti dan Jaringan: Reproduksi dan Transformasi Modal Politik

Pada bagian ini ada dua hal pokok yang akan diuraikan. Pertama, menyangkut klan politik dari reproduksi kuasa dinasti keluarga Ahmad Hidayat Mus. Dinasti di sini yang berkaitan dengan otoritas politik yang di reproduksi oleh klan keluarga Ahmad Hidayat Mus serta mendapatkan otoritas politik dari masyarakat Maluku Utara kepada masing-masing klan melalui bekerjanya *habitus* dan *doxa*, serta proses reproduksi kekuatan modal ekonomi.

Kedua, berkaitan dengan strategi sebagai cara klan Ahmad Hidayat Mus membangun eksistensinya dalam politik. Strategi tersebut berupa jaringan-jaringan yang dimiliki oleh masing-masing anggota keluarga yang menjadi kepala daerah, anggota DPRD serta Ketua Partai Politik dan jaringan birokrasi. Jaringan tersebut digunakan sebagai alat reproduksi kuasa. Sehingga, reproduksi modal ekonomi, modal kultural yang berkaitan dengan klan Ahmad Hidayat Mus berkaitan dengan jaringan politik. Modal ini kemudian bertransformasi ke modal politik dan modal sosial. Apabila dilihat secara mendetail, tampak bahwa jaringan-jaringan ini berkerja dengan cara yang cenderung modal ekonomi untuk membangun klan dinasti politik.

Ada beragam jaringan yang bekerja dalam reproduksi dinasti Ahmad Hidayat Mus. Jaringan utama terbentuknya dinasti berasal dari modal politik yang dibangun menjadi Bupati Kepulauan Sula dua periode (2005-2015), kemudian ketua DPD I Golkar Maluku Utara (2010-2015). Sejak terbentuknya modal politik yang dimiliki oleh Ahmad Hidayat Mus kemudian terbangun klan dinasti politik yang kuat pada anggota DPRD serta Kepala Daerah di Kabupaten di Maluku Utara. Untuk jaringan yang tampak jelas dalam dinasti politik adalah Zainal Mus Bupati Bangka Kepulauan (2017-2022),

Aliong Mus Bupati Kepulauan Taliabo (2016-2021), Aliong Mus Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara (2014-2019), Hj Nurohmah Ahmad Hidayat Mus Anggota DPRD RI (2010-2014). Ada cukup banyak jaringan baik ekonomi maupun politik yang bekerja dalam proses sosial politik yang melibatkan dinasti Ahmad Hidayat Mus.

Selain jaringan keluarga, terdapat juga jaringan-jaringan lain, yaitu Salahakan Ternate, HKST Maluku Utara, dan partai Golkar Maluku Utara. Pembentukan jaringan ini yang dianggap penting dan sangat signifikan dalam mendukung dinasti politik. Sementara itu yang sangat menonjol dalam mempengaruhi dalam pembentukan jaringan pada masyarakat di Maluku Utara. Kekuatan politik dinasti Ahmad Hidayat Mus terbentuk setelah menjabat sebagai Bupati Kepulauan Sula dua periode (2005-2015) dan berhasil mengantar keluarga politiknya pada jabatan DPRD, DPR RI serta kepala daerah di kepulauan Taliabo dan Bangka Kepulauan. Setelah Menjadi Bupati Kepulauan Sula pada periode kedua, tahun pemilihan legislatif 2009 yang kedua kalinya dilaksanakan secara langsung. Hi Nurohma Ahmad Hidayat Mus terpilih menjadi anggota DPR RI dari Partai Golkar dapil Provinsi Maluku Utara. Kemudian Zainal Mus menjadi anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula dari partai Golkar sekaligus menjadi Ketua DPRD Kepulauan Sula (2009-2014). AHM berhasil memanfaatkan pengalaman dan modal-modal penunjang yang sudah terbentuk dalam diri kepemimpinannya. Karir kepemimpinan AHM baik sebagai Ketua DPRD, Bupati Kepulauan Sula (2005-2015), menjadi pengusaha memunculkan modal politik yang turut berkontribusi dalam membangun keluarga politik di Maluku Utara dan memenangkan Zainal Mus di Kabupaten Bangka Kepulauan.

Kekuatan modal politik Mampu membentuk segitiga akomasi modal dalam mebangun hubungan yang baik dengan unsur-unsur yaitu aparat birokrasi Negara dan politik ditingkat lokal.

Kedekatan AHM dengan Aburizal Bakri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar (2010-2014), Sekretaris Jenderal Idrus Marham, Serta Bendahara DPP Partai Golkar Setya Novanto, kedekatan tokoh-tokoh DPP Partai Golkar begitu baik dalam membangun kekuatan partai Golkar di tingkat pusat. Kontribusi Ahmad Hidayat Mus sebagai Bupati Kepulauan Sula serta pencapaian dalam melakukan pemekaran Kabupaten Taliabo (2013) memberikan dampak modal politik karena dianggap sebagai figur yang memprakarsai terbentuknya Kabupaten Taliabo. Kekuatan AHM sebagai elit lokal tergambar dalam keberhasilan membangun keluarga politik yang kuat, dimana terdapat beberapa keluarga Ahmad Hidayat Mus menjadi elit lokal. Di partai Golkar, hingga saat ini keluarga politik Ahmad Hidayat Mus masih mendominasi kepemimpinan di Maluku Utara. Alien Mus, adik kandung terpilih menjadi ketua DPD I Partai Golkar

Provinsi Maluku Utara, Menggantikan Ahmad Hidayat Mus pada periode (2010-2015), Aliong Mus Ketua DPD II Kabupaten Taliabo. Keluarga Ahmad Hidayat Mus mendominasi jabatan oragnisasi partai sudah sejak masih menjabat Bupati Kabupaten Kepulauan Sula. Adapun dominasi keluarag dinasti Ahmad Hidayat Mus di Partai Golkar sebagai berikut:

Tabel 3. Dinasti Ahmad Hidayat Mus

Dinasti Ahmad Hidayat Mus	Jabatan	Tahun
Zainal Mus	Ketua DPRD Kabupaten Sula	2009-2014,2010-2014
	Bupati Banggai	2017-2022
Aliong Mus	DPRD Provinsi Maluku Utara	2010-2014
	Bupati Kepulauan Taliabo	2015-2021
Alien Mus	Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara	2014-2019
	Ketua DPD I Partai Golkar	2014-2019
Hj.Nurohmah Ahmad Hidayat Mus	Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar	2010-2014

(Sumber KPUD 2019)

Ada beragam jaringan yang bekerja dalam reproduksi dinasti Ahmad Hidayat Mus. Jaringan utama terbentuknya dinasti berasal dari modal politik yang dibangun menjadi Bupati Kepulauan Sula dua periode (2005-2015), kemudian ketua DPD I Golkar Maluku Utara (2010-2015). Sejak terbentuknya modal politik yang dimiliki oleh Ahmad Hidayat Mus kemudian terbangun klan dinasti politik yang kuat pada anggota DPRD serta Kepala Daerah di Kabupaten di Maluku Utara. Untuk jaringan yang tampak jelas dalam dinasti politik adalah Zainal Mus Bupati Bangka Kepulauan (2017-2022), Aliong Mus Bupati Kepulauan Taliabo (2016-2021), Aliong Mus Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara (2014-2019), Hj Nurohmah Ahmad Hidayat Mus Anggota DPRD RI (2010-2014). Ada cukup banyak jaringan baik ekonomi maupun politik yang bekerja dalam proses sosial politik yang melibatkan dinasti Ahmad Hidayat Mus. Selain itu, jaringan keluarga, terdapat juga jaringan-jaringan lain, yaitu Salahakan Ternate, HKST Maluku Utara, dan partai Golkar Maluku Utara. Pembentukan jaringan ini yang dianggap penting dan sangat signifikan dalam mendukung dinasti politik. Sementara itu yang sangat menonjol dalam mempengaruhi dalam pembentukan jaringan pada masyarakat di Maluku Utara. Kekuatan politik dinasti Ahmad Hidayat Mus terbentuk setelah menjabat sebagai Bupati Kepulauan Sula dua periode (2005-2015) dan berhasil mengantar keluarga politiknya pada jabatan DPRD, DPR RI serta kepala daerah di kepulauan Taliabo dan Bangka Kepulauan. Setelah Menjadi Bupati Kepulauan Sula pada periode kedua, tahun pemilihan legislatif 2009 yang kedua kalinya dilaksanakan secara langsung. Selain

itu, Hi Nurohma Ahmad Hidayat Mus terpilih menjadi anggota DPR RI dari Partai Golkar daerah pemilihan Provinsi Maluku Utara. Kemudian Zainal Mus menjadi anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula dari Partai Golkar sekaligus menjadi Ketua DPRD Kepulauan Sulan (2009-2014).

Pengalaman AHM dalam karier politik menjadi kematangan berpolitik dan menjadi modal-modal penunjang yang sudah terbentuk dalam diri kepemimpinannya. Karir kepemimpinan Ahmad Hidayat Mus baik sebagai Ketua DPRD, Bupati Kepulauan Sula (2005-2015), menjadi pengusaha memunculkan modal politik yang turut berkontribusi dalam membangun keluarga politik di Maluku Utara dan memenangkan Zainal Mus di Kabupaten Bangka Kepulauan. Kekuatan modal politik mampu membentuk segitiga akomasi modal politik dalam membangun relasi sosial yang baik dengan berbagai unsur-unsur yaitu aparat birokrasi, elit politik, tokoh agama serta kelompok kepentingan lainnya.

Kedekatan Ahmad Hidayat Mus dengan Aburizal Bakri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar (2010-2014), Sekretaris Jenderal Idrus Marham, serta Bendahara DPP Partai Golkar Setya Novanto, kedekatan tokoh-tokoh DPP Partai Golkar begitu baik dalam membangun kekuatan partai Golkar di tingkat pusat. Kontribusi AHM sebagai Bupati Kepulauan Sula serta pencapaian dalam melakukan pemekaran Kabupaten Taliabo (2013) memberikan dampak modal politik karena dianggap sebagai figur yang memprakarsai terbentuknya Kabupaten Taliabo. Kekuatan AHM sebagai elit lokal tergambar dalam keberhasilan membangun keluarga politik yang kuat, dimana terdapat beberapa keluarga Ahmad Hidayat Mus menjadi elit lokal. Sedangkan dominasi Partai Golkar Maluku Utara hingga saat ini keluarga politik Ahmad Hidayat Mus masih mendominasi kepemimpinan. Alien Mus, adik kandung terpilih menjadi ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Maluku Utara, Menggantikan Ahmad Hidayat Mus pada periode (2010-2015), Aliong Mus Ketua DPD II Kabupaten Taliabo. Keluarga Ahmad Hidayat Mus mendominasi jabatan organisasi partai sudah sejak masih menjabat Bupati Kabupaten Kepulauan Sula. Adapun dominasi keluarga dinasti Ahmad Hidayat Mus di Partai Golkar pada Tabel 3.

Tabel 3. Dominasi Keluarga Ahmad Hidayat Mus di Partai Golkar

No	Keluarga Dinasti	Jabatan
1	Ahmad Hidayat Mus	Ketua DPD I Parta Golkar Maluku Utara Kordinator Bapilu Indonesia Timur DPP Partai Gokkar
2	Alien Mus	Ketua DPD I Partai Golkar Maluku Utara
3	Aliong Mus	Ketua II Partai Golkar Kepulauan Taliabo

Sumber: KPUD, 2019

Pemilihan Kepala Daerah 2018: Peran Modal Politik

Pemilihan Gubernur Maluku Utara merupakan sarana untuk mengukur dukungan rakyat terhadap kandidat yang bertarung. Oleh karena itu pasangan calon akan berupaya sekuatnya untuk meraih suara sebanyak-banyaknya sehingga dapat menang pada Pilgub Maluku Utara Tahun 2018. Semakin besar distribusi suara yang tersebar di kabupaten/kota akan semakin besar peluang memenangkan pemilihan kepada daerah. setiap tim kampanye akan berusaha memperoleh suara sebanyak mungkin supaya peluang lebih besar memperoleh kekuasaan untuk dapat membuat kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.

Mari kita mulai mengingat Pilkada 2018 yang dipilih secara langsung oleh rakyat Maluku Utara. Salah satu syarat penting adalah calon gubernur (Cagub) serta calon wakil gubernur (Cawagub) harus berasal dari gabungan koalisi partai politik maupun calon independen. Pedoman aturan yang sudah ada telah menetapkan kriteria kelayakan bahwa hanya partai dengan minimal tiga persen suara dari total suara yang dapat mengajukan calon. Sedangkan bagi partai yang tidak memenuhi kriteria aturan yang sudah dapat diperbolehkan mengajukan calon jika mampu membentuk koalisi hingga memenuhi ambang batas. Secara prosedural Pilgub Maluku Utara 2018 ini digelar dua putaran. Pada putaran kedua dilaksanakan karena amar putusan Mahkamah Konsitusi untuk melaksanakan PSU di beberapa daerah.

Pada Pilkada Maluku Utara 2018 adalah Pemilihan yang sudah dilakukan beberapa kalinya oleh rakyat Maluku Utara. Pilgub 2018 diadakan dalam suasana yang damai dan sejuk serta diikuti oleh empat pasangan calon. Pasangan calon Nomor urut 1 AHM-Rivai yang diusung oleh Partai Golkar, PPP (9 Kursi), Pasangan Nomor 2 Bur-Jadi yang diusung oleh Partai Hanura, Demokrat, Nasdem, PKB, PBB. Kemudian Pasangan Nomor 3 AGK-YA didukung oleh PDI-Perjuangan, PKPI (9 Kursi) serta pasangan nomor 4 MK- Maju didukung oleh partai Gerindra, PKS dan PAN. Adapun pasangan calon berserta nomor urut berdasarkan tabel berikut ini:

Tabel 4. Partai Pengusung Pada Pilkada Maluku Utara 2018

No.	Nama Kandidat	Partai Pengusung	Jumlah Kursi
1	Ahmad Hidayat Mus-Rivai Umar	Golkar, PPP	9 Kursi
2	Burhan Abdurrahman-Ishak Djamaludin	Hanura, PBB, Demokrat, PKB, Nasdem	16 Kursi
3	Abdul Gani Kasuba-Ali Yasin Ali	PDI-Perjuangan, PKPI	9 Kursi
4	Muhammad Kasuba-Madjid Husen	Gerindra, PKS, PAN	11 Kursi

Sumber: KPUD, 2019

Keberadaan partai politik (parpol) adalah sebuah keniscayaan dalam sebuah negara yang menganut demokrasi seperti di Indonesia. Eksistensi partai politik dituntut untuk mampu menjadi fasilitator antara kepentingan masyarakat dan pemangku kebijakan sebagai wadah dalam menyalurkan aspirasi serta kepentingan masyarakat. Menurut (Al-Hamdi, 2013: 8) salah satu karakteristik dari partai politik yaitu partai politik memiliki orientasi kekuasaan sebagai instrument untuk mengimplementasikan kepentingan rakyat. Selain itu bagi seorang kandidat atau aktor politik, partai politik juga merupakan instrument utama dalam negara demokrasi untuk memobilisasi dan memperoleh dukungan dalam rangka mendapatkan legitimasi untuk menjalankan kekuasaan.

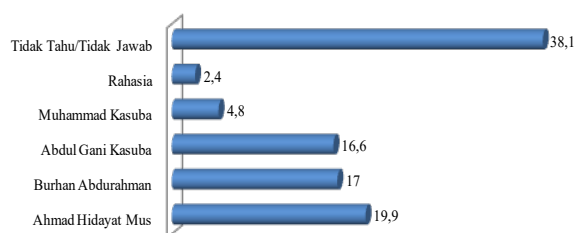
Dukungan partai politik terhadap kandidat pada pilkada Maluku Utara 2018 tidak terlepas dari proses konsolidasi politik ditingkat daerah maupun tingkat pusat untuk melakukan seleksi calon pemimpin daerah melalui kontestasi. Dinamika partai politik yang terjadi di Maluku Utara dalam menentukan arah dukungan sesungguhnya mencerminkan berbagai pertimbangan politik oleh partai politik dalam mengusung kandidat. Beberapa hal yang dijadikan pertimbangan oleh partai politik dalam berkolaborasi atau mengusung kandidat adalah faktor figuritas, visi misi serta kesamaan *platform* partai politik

Survei Elektabilitas Kandidat

Survei elektabilitas (keterpilihan) dari lembaga-lembaga nasional dan lokal dijadikan sebagai referensi kandidat/bakal calon dalam mengukur tingkat kepopuleran pada masyarakat. Bagi kandidat survei sangat penting untuk mengatur lagi strategi kampanye, pola komunikasi serta isu yang harus disampaikan ketika berada di masyarakat pemilik suara. Pada penelitian ini ada dua lembaga yang melakukan survei terhadap empat pasangan calon kepala daerah pada pilgub Maluku Utara 2018 yaitu PRC (25-31 Januari 2018) dan Lembaga Zona Politika Indonesia. Dengan metode dari kedua lembaga yang independen maka ada perbedaan hasil survei namun memiliki perbedaan angka yang tidak signifikan. Hasil analisis data survei yang berbeda tetapi keduanya menempatkan urutan elektabilitas pertama dan AHM dan elektabilitas kedua AGK. Untuk hasil survey PRC menempatkan bakal calon AHM pada urutan pertama dengan 19,9% dan Burhan Abdurrahman urutan kedua teratas dengan elektabilitas mencapai 17,0%. Sedangkan untuk hasil survei Zona Politika Indonesia menempatkan AGK pada posisi pertama dengan perolehan elektabilitas mencapai 29% sedangkan AHM posisi kedua dengan perolehan elektabilitas mencapai 20%.

Sedangkan Lembaga Zona Politika Indonesia melakukan survei terkait elektabilitas bakal Calon Gubernur Maluku Utara 2018 mendatang. Survei ini mencoba

memunculkan Tiga nama sebagai sosok yang paling potensial bersaing pada Pemilihan Gubernur Maluku Utara 2018. Ketiga nama tersebut adalah Calon Gubernur petahana Malut, Abdul Gani Kasuba, mantan Bupati Kepulauan Sula, Ahmad Hidayat Mus, serta Walikota Ternate Burhan Abdurrahman. Berdasarkan hasil survei Zona Politika Indonesia yang dilakukan per 23 Juni-9 Juli 2017 itu menunjukkan, AGK unggul dengan elektabilitas 29%, sementara AHM 22%, BA 19%, dan ada satu lagi RE dengan elektabilitas 7%. Survei ini menggunakan metodologi multi stage random sampling dengan 800 responden, tingkat kepercayaan 95 persen dengan 3,4% *margin off error*. Untuk menjaga tingkat akurasi dan presisi data survei dilakukan respondent check dan *quality control* berlapis. Semua kandidat masih terbuka lebar tergantung kerja strategis tim tiap kandidat, kreativitas kandidat dan relawan menawarkan program pro rakyat ke masyarakat dan waktu pemilihan masih lama sehingga peluang kandidat masih dinamis. Ditambah kekuatan politik masing masing pasangan calon tentu akan menggeser persepsi pilihan pemilih terhadap pasangan calon Gubernur Maluku Utara. Untuk selengkapnya bisa dilihat pada Gambar 2.



Sumber : PRC, 2019

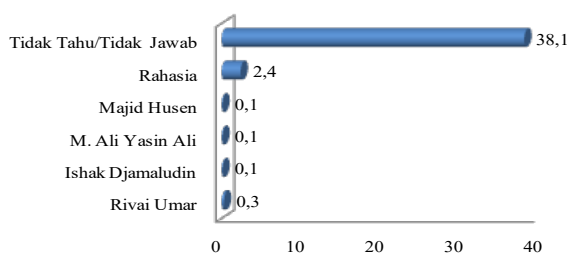
Gambar 2. Elektabilitas Calon Gubernur Maluku Utara 2018

Berdasarkan pada hasil survei kedua lembaga tersebut berbeda, namun keduanya menguntungkan kedua kandidat yaitu pasangan Abdul Gani Kasuba maupun Ahmad Hidayat Mus. Tingginya elektabilitas kedua pasangan tersebut menjadi salah satu aspek dari modal politik yang dapat berpengaruh terhadap kemenangannya. Hasil kajian dari lembaga yang kredibel dengan menggunakan pendekatan akademik. Survei dari lembaga yang mempunyai reputasi yang baik menjadi pedoman bagi kandidat untuk melihat sejauh mana elektabilitas dan tingkat kepercayaan masyarakat untuk menentukan pilihan politik.

Bagi kandidat, hasil survei elektabilitas dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan langkah politik dan menyusun strategi kampanye bersama para tim suksesnya. Bagi masyarakat, hasil survei bisa memberikan pengaruh kepada komposisi masyarakat mengambang atau yang belum menentukan pilihan. Pada dasarnya, hasil survei memberikan pengaruh terhadap pilkada baik bagi kandidat dan tim suksesnya maupun bagi masyarakat untuk menentukan pilihannya.

Sedangkan Lembaga survei independent Lintas Nusantara (Linus) menyatakan, hasil survei kesukaan terhadap bakal calon yang mengikuti kontestasi pilkada Maluku Utara 2018-2023. Hasil survei menempatkan AHM dan AGK di urutan teratas. Menduduki puncak teratas yaitu AHM berada di urutan pertama dengan 37,7 persen suara responden, posisi kedua ditempati petahana Abdul Gani Kasuba dengan suara 34,6 persen, disusul Walikota Kota Ternate Burhan Abdurahman dengan 10,0 persen, Posisi keempat ditempati Bupati Halmahera Timur Rudi Erawan dengan dukungan 8,0 persen disusul anggota DPD-RI asal Malut Basri Salama 1,1 persen dan posisi terakhir ditempati Wali Kota Tidore Kepulauan Cap. Ali Ibrahim 1,0 persen. Responden yang menginginkan AGK kembali menjadi Gubernur sebanyak 42,6 persen sementara yang tidak 45,6 persen. Faktor penyebabnya, turunkan elektabilitas AGK dianggap kurang mampu menunaikan janji politik serta menyediakan lapangan pekerjaan, peningkatan ekonomi masyarakat dan pembangunan infrastruktur. Sementara AHM memiliki peluang lebih baik karena publik menginginkan perubahan dan AHM dianggap dapat mewujudkannya.

Survei dilaksanakan selama dua minggu pada Juni 2017 dan melibatkan 700 responden untuk seluruh masyarakat Maluku Utara dengan margin of error +/- 3,7 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Responden adalah warga Provinsi Maluku yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Penarikan sample dilakukan dengan Metode Multistage Random Sampling. Selain itu, responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. Satu pewawancara bertugas untuk mewawancarai 10 orang responden. Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20 persen dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (*spot check*). Dalam *quality control* tidak ditemukan kesalahan berarti dan 50 persen responden dipilih secara random dengan menelepon setelah wawancara selesai untuk memastikan baru saja telah diwawancarai. (Sumber: ambon.antaranews.com, Selasa 26 Maret 2019). Selain itu, hasil survei untuk mengukur elektabilitas calon wakil gubernur Maluku utara pada Gambar 3.



(Sumber : PRC, 2019)

Gambar 3. Elektabilitas Calon Wakil Gubernur Maluku Utara 2018

Berdasarkan pada hasil survey PRC untuk mengukur elektabilitas calon Wakil Gubernur Maluku Utara dari, Rivai Umar menempati posisi pertama 0.3 Persen sedangkan tiga kandidat M. Ali Yasin, Ishak Djamaludin serta Madjid Husen mempunyai tingkat elektabilitas 0.1 Persen. Dari data tersebut maka calon Wakil Gubernur Maluku Utara 2018 belum diketahui dan masyarakat belum menentukan pilihan. Sedangkan responden yang belum menentukan pilihan sebanyak 39.1 Persen dan masih rahasia 2.4 Persen, dengan angka belum menentukan pilihan yang sangat besar tersebut maka pasangan calon harus meyakinkan lagi dengan visi dan misi serta program pembangunan yang direncanakan setelah terpilih menjadi pemimpin daerah Maluku Utara kedepan

SIMPULAN

Modal ekonomi yang dimiliki oleh Ahmad Hidayat Mus adalah memiliki Harta kekayaan sebesar Rp 52.241.112.194., terdiri dari harta tidak bergerak, harta bergerak, giro dan setara kas lainnya. Harta kekayaan Ahmad Hidayat Mus terbanyak jika dibandingkan dengan kandidat lain pada pilkada Maluku Utara tahun 2018. Modal ekonomi yang sangat besar ini mampu mempengaruhi kekuatan politik untuk memenangkan Pilkada Maluku Utara 2018.

Modal sosial yang dimiliki Ahmad Hidayat Mus adalah sumber daya yang dimiliki sejak menjabat Bupati Kepulauan Sula. Ahmad Hidayat Mus mendapat warisan jaringan birokrasi, basis masa kesultanaan Ternate. Selain itu Ahmad Hidayat Mus pernah menjabat sebagai Salahkhan Kesultanan Ternate, Ketua Himpunan Kerukunan Keluarga Sulawesi Tenggara (HKST) Maluku Utara.

Modal Politik Ahmad Hidayat Mus adalah pengalaman politik pernah menjabat Ketua DPRD Kepulauan Sula, Bupati Kepulauan Sula. Modal politik yang sangat mempengaruhi elektabilitas bahwa Ahmad Hidayat Mus mempunyai dukungan politik di internal partai yaitu Partai Golkar Maluku Utara.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ucapkan banyak terima kasih sebesar-besarnya kepada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang telah mempercayakan serta memberikan hibah dengan skema Penelitian Dosen Pemula (PDP) DRPM 2018. Pendanaan penelitian sangat membantu para dosen untuk meningkatkan publikasi pada jurnal terakreditasi nasional serta memberikan pengalaman penelitian yang baru. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepala Lembaga Penelitian, Pengabdian dan

Publikasi (LP3M) Universitas Muhammadiyah Maluku Utara yang telah membimbing para dosen sejak pengusulan sampai pada pelaporan penelitian akhir. Tak lupa dosen Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan masukan dan mengarahkan pada bidang keilmuan masing-masing dosen.

DAFTAR PUSTAKA

- Ancok, J. (2003). *Modal Sosial dan Kualitas Masyarakat*. Yogyakarta: Pidato Pengukuhan Guru Besar UGM.
- Bathoro, A. (2011). Perangkap Dinasti Politik Dalam Konsolidasi Demokrasi. *Jurnal FISIP UMRAH*, 2, (2), 115 - 125.
- Bourdieu, P. (1986). "The Forms of Capital" dalam J.G Richarson (ed) *Handbook of Theory and for the Sociology of Education*. New York: Greenwood Press.
- Bourdieu, P. (1995). *Outline of A Theory of Practice*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Bourdieu, P. (2003). *Cultural Reproduksi and Social Reproduksi*. London: Routledge.
- Bungin, B. (2005). *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Cresswell, W. J. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset Memilih di antara Lima Pendekatan (Edisi Indonesia)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djati, W. R. (2013). Wasito Raharjo Djati, Revivalisme Keme dalam Demokrasi: Dinasti Politik di Aras Lokal, *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, 18, (2), 203-231.
- Ferinandus, L.S., Muhadjir, D., Setiadi, & Hakimul, I. (2018). Politik Identitas Etnik Asli Papua Berkontestasi Dalam Pemilihan Kepala. *Sosiohumaniora*, 20, (2), 122-131.
- Fukuyama, F. (2002). *Trust, Kebijakan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*. Jakarta: Penerbit Qalam.
- Karim, Z., Wance, M., & Taib, J. (2017). Integritas Kpu Kabupaten Halmahera Selatan Terhadap Pelaksanaan Pilkada Tahun 2015. *Jurnal Kawasa* VII, (4), 63.
- Kaunar, A., & Wance, M. (2017:69). Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Studi Di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Halmahera Barat). *Journal Ilmu Pemerintahan, Unsyiah*, II, (1), 70.
- Kriyantono, R. (2010). *Teknik Praktis Riset Komunikasi (Disertai Contoh Praktis Media, Public Relations Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodelogi Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mujahidin, M. A. (2014). *Panduan Penelitian Praktis untuk Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Nasir, M. (1998:64). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nurhasmi, M. d. (2003:8). *Konflik antar elit politik lokal dalam pemilihan kepala daerah, Pusat Penelitian Politik*. Jakarta: Pusat Penelitian Politik.
- Putnam, R. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Italia: Prinveton University Press.
- Sahdan, Gregorius, & Haboddin, M. (2009). *Sahdan, Gregorius dan Muhtar Haboddin Evaluasi Kritis Penyelenggaraan Pilkada Di Indonesia*. Yogyakarta: IPD.
- Salim, A. (2006:223). *Teori dan Paradigma Penelitian*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- Thomson, P. (2010:72). "Field" dalam M. Grenfell (ed) *Pierre Bourdieu: Key Concepts*. Durham:Acumen.
- Wance, M. (2018). Perilaku Pemilih Pemula Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara 2013. *Jurnal Kawasa*, VIII, (1), 39-40..
- Wance, M., & Suhu, B. L. (2019). Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Menentukan Pilihan Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah Maluku Utara. *Journal Of Government*, 4, (2), 92.
- Wance, M., & Suhu, B. L. (2019:113). Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Menentukan Pilihan Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah Maluku Utara. *Jurnal Of Government-JOG*, 4, (2), 113-114.

PERSEPSI PELAKU USAHA UMKM TENTANG TARIF FINAL 1% MENJADI TARIF FINAL 0,5% DI KOTA BANDUNG

Kasir dan Deni Hamdani

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Membangun, (STIE INABA) Bandung,

Jl. Soekarno Hatta No. 448 Bandung – Indonesia

E-mail: kasir@inaba.ac.id

ABSTRAK. Perkembangan pelaku usaha UMKM di Indonesia saat ini mengalami kemajuan. Ada 59,2 juta UMKM, dan telah menyerap tenaga kerja nasional 97% serta memberikan kontribusi PDB 57%. Juga untuk wilayah Propinsi Jawa Barat, khususnya di Kota Bandung, pelaku usaha sentra UMKM menurut Dinas Perdagangan dan Perindustrian tahun 2017 terdapat 1.235 unit. Dengan jumlah pelaku usaha UMKM yang meningkat tersebut, tentunya berpotensi untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang dalam hal ini adalah berupa pendapatan pajak. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang dikeluarkan berkenaan dengan, semaksimal mungkin harus dapat dipahami oleh para pelaku usaha khususnya UMKM. Karena pelaku usaha UMKM tersebut, biasanya masih minim dalam pemahaman perpajakan. Sehingga, apabila pelaku usaha tersebut paham dan sadar. Maka mereka mau untuk membayar pajak atas usaha yang dilakukannya. Metode yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif melalui metode survey padapelaku usaha sentra UMKM yang tersebar di Kota Bandung. Sampel yang digunakan menggunakan rumus *Slovin* dengan tingkat kepercayaan 90%. Sedangkan metode teknik *sampling* yang digunakan adalah metode *probability sampling*, dancara pengambilan sampel yaitu dengan *carasimple random sampling*. Sehingga dalam penelitian ini menghasilkan sampel sebanyak 93 pelaku usaha sentra UMKM yang tersebar di kota Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian pelaku usaha sentra UMKM di Kota Bandung (daerah Cibaduyut, Sukagalih dan Cihampelas) tidak menyetujui adanya penerapan tarif Final sebesar 0,5% maupun perubahan tarif Final dari 1% menjadi 0,5%. Hal ini terjadi kurangnya respon pelaku usaha sentra UMKM terhadap kebijakan perpajakan yang dikarenakan kurangnya sosialisasi mengenai kebijakan perpajakan yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak.

Kata kunci: Pelaku UMKM; Pemahaman; Tarif; Final

PERCEPTION OF MSME BUSINESS CONCERNING FINAL RATES 1% TO FINAL RATES 0.5% IN BANDUNG CITY

ABSTRACT. The development of SMEs in Indonesia is currently experiencing progress. There are 59.2 million MSMEs, and have absorbed 97% of the national workforce and contributed 57% of GDP. Also for the area of West Java Province, especially in the city of Bandung, according to the Trade and Industry Office in 2017 there are 1,235 units of MSME centers. With the increasing number of MSME entrepreneurs, it certainly has the potential to be used as a source of income for both the central and regional governments, which in this case is in the form of tax revenue. Government policies issued with regard to, as much as possible must be understood by business actors, especially MSMEs. Because these MSME entrepreneurs, usually are still minimal in understanding taxation. So, if the business actor understands and is aware. Then they want to pay taxes on the business they do. The method used is using a quantitative approach through a survey method for MSME business center operators spread across the city of Bandung. The sample used uses the *Slovin* formula with a 90% confidence level. While the sampling technique method used is the *probability sampling* method, and the sampling method is *simple random sampling*. So that in this study produced a sample of 93 entrepreneurs of MSME centers scattered in the city of Bandung. The results showed that some MSME business center operators in the city of Bandung (Cibaduyut, Sukagalih and Cihampelas areas) did not approve of the application of a final tariff of 0.5% or a final tariff change from 1% to 0.5%. This is due to the lack of response of MSME center business actors to tax policies due to lack of socialization regarding tax policies issued by the Director General of Taxes.

Key words: Business Actors; MSME; Understanding; Tariff; The final

PENDAHULUAN

Meningkatnya kebutuhan negara dalam pemenuhan pendanaan pembangunan nasional yang diperoleh dari sektor pajak, maka pajak memegang peranan dan fungsi yang sangat penting dan strategis bagi kehidupan bangsa dan negara. Karena tanpa adanya pajak, maka bisa dipastikan sebagian besar kegiatan negara akan sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak yang diterima dari masyarakat meliputi untuk pengeluaran belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan untuk kepentingan masyarakat

seperti jembatan, sekolah, puskesmas/rumah sakit, jalan-jalan, kantor-kantor pemerintahan. Dan juga pajak bisa digunakan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu dan membantu pelaku usaha UMKM baik dalam pemberian modal kerja termasuk pembinaannya. Pencapaian target penerimaan pajak yang merupakan ukuran kuantitatif kinerja Direktorat Jendral Pajak yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dimana sesuai dengan tugas dan fungsinya berkewajiban untuk melakukan pelayanan, penyuluhan, pembinaan dan pengawasan dalam rangka memaksimalkan penerimaan pajak dari para wajib pajak termasuk wajib pajak UMKM.

UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) merupakan pelaku usaha yang tahan banting saat perekonomian dilanda krisis moneter. Hal ini terlihat saat terjadinya krisis moneter pada tahun 1997-1998, dimana banyak perusahaan-perusahaan menengah ke atas yang bangkrut, hanya UMKM yang mampu tetap berdiri kokoh. Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran penting dan strategi dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan, apalagi dari tahun ke tahun jumlahnya mengalami kenaikan. Menurut data BPS, bahwa saat ini ada sekitar 59,2 juta pelaku UMKM dimana telah menyerap tenaga kerja secara nasional sekitar 97% dan memberikan kontribusi PDB sekitar 57%.

Dengan melihat jumlah pelaku usaha UMKM yang semakin meningkat tersebut, tentunya bisa dijadikan sebagai sumber pendapatan baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang dalam hal ini berupa pendapatan pajak. Dimana nantinya pajak yang diterima negara dapat dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

Sosialisasi sebenarnya merupakan sarana komunikasi antara fiskus dan wajib pajak juga, sehingga segala keluhan wajib pajak dapat ditampung dan dicarikan solusinya. Dan kebijakan terbaru untuk UMKM yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2018 ini adalah jalan keluar terbaik menanggapi keluhan kalangan UMKM terkait tarif pajak yang selama ini kerap terdengar. Karena bagi mereka yang menjalankan usaha dengan modal terbatas dan omset tak lebih dari Rp4,8 miliar setahun, Tarif Pajak Final satu persen itu cukup memberatkan. Dan pemerintah telah merespon segala keluhan itu dengan memangkas Tarif Pajak untuk UMKM kebijakan tarif PPh final yang selama ini menurut pelaku usaha UMKM masih terasa berat. Maka pemerintah saat ini mengeluarkan kebijakan mengenai perubahan tarif pajak final dimana tarif PPh final yang sebelumnya sebesar 1% mulai bulan Juli 2018 menjadi 0,5%.

Untuk kebijakan perubahan tarif PPh final tersebut tentunya sangat direspon dengan baik oleh para pelaku usaha UMK, terlebih yang berada di Kota Bandung khususnya di sentra-sentra usaha. Dimana saat sekarang sesuai dengan data yang berasal dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, bahwa jumlah pelaku usaha sentra UMKM untuk tahun 2017 adalah sebanyak 1.235 pelaku usaha yang tersebar di beberapa kecamatan di Kota Bandung.

Dengan adanya kebijakan perubahan tarif PPh final tersebut, maka para pelaku usaha sentra UMKM di Kota Bandung tentunya bisa untuk mempelajari dan

memahaminya. Sehingga pajak yang nantinya harus dibayar ke kas negara akan lebih kecil dari yang sebelum adanya perubahan tarif.

Dengan melihat latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti persepsi kebijakan perubahan tarif PPh final dari yang sebelumnya 1% menjadi 0,5% pada pelaku usaha sentra UMKM yang tersebar di beberapa kecamatan di Kota Bandung.

Pengertian UMKM menurut Bank Indonesia (2012) menyebutkan:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak lima puluh juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak tiga ratus juta rupiah
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari lima puluh juta rupiah sampai dengan paling banyak lima ratus juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari tiga ratus juta rupiah sampai dengan paling banyak (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan memiliki kekayaan bersih lebih dari lima ratus juta rupiah sampai dengan paling banyak sepuluh milyar rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak lima puluh milyar rupiah.

Berbagai pengertian pajak telah ditulis oleh beberapa ahli, diantaranya menurut Mardiasmo (2016:1) pajak adalah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dan juga menurut Definisi pajak menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (UU KUP) bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Fungsi pajak menurut Waluyo (2014:6) adalah sebagai fungsi penerimaan (budgeter) dan fungsi mengatur (reguler). Sedangkan sistem pemungutan pajak menurut Diana Sari (2013:78) adalah dengan menggunakan *official-assessment system* (besarnya pajak terutang yang menentukan fiskus), *self-sssessment* (fiskus memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang), *withholding* sistem (pajak terutang ditentukan oleh pihak ketiga selain fiskus dan wajib pajak)

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subyek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak tertentu (UU No. 36 tahun 2008).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 menjelaskan peraturan yang mengatur tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dan bersifat final dengan tarif final 0,5% dan berlaku mulai tanggal 1 Juli 2018 dengan kriteria sbb :

1. Sesuai dengan pasal 2 ayat 3 menyatakan bahwa: Tidak termasuk penghasilan dari usaha yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas; b. penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri; c. penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan d. penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.
2. Sesuai dengan pasal 3 ayat 1 menyatakan bahwa :Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan: a. Wajib Pajak orang pribadi; dan b. Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas, yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi empat milyar delapan ratus juta rupiah dalam 1 (satu) Tahun Pajak.
3. Sesuai dengan pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa: Jangka waktu tertentu pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu paling lama:
 - a. 7 (tujuh) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi;
 - a. 4 (empat) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma; dan
 - b. (tiga) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas.

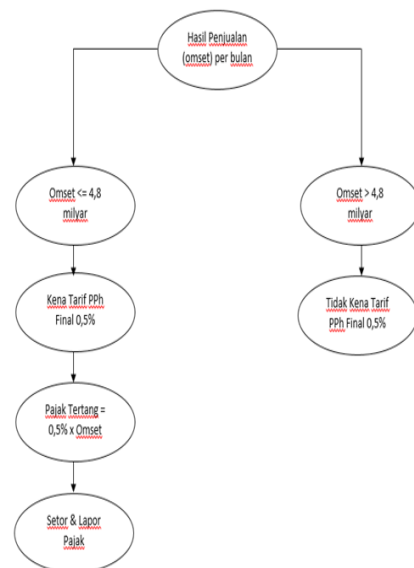
Definisi persepsi dikemukakan oleh Kothler (2013: 179), dimana menjelaskan bahwa persepsi adalah dimana kita memilih, mengatur, dan menterjemahkan masukan informasi untuk menciptakan gambaran dunia yang berarti. Sehingga dari pengertian persepsi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa persepsi yaitu suatu proses dalam menggunakan sesuatu yang dapat diterima oleh individu agar setiap individu dapat memilih, mengatur dan menterjemahkan suatu informasi untuk menciptakan gambaran dunia yang berarti.

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dalam individu adalah faktor internal yaitu faktor yang terdapat dalam individu misalkan fisiologis, perhatian, minat, kebutuhan searah, pengalaman dan ingatan, suasana hati. Sedangkan faktor eksternal yaitu lingkungan dan objek-objek yang terlihat didalamnya misalnya ukuran dan penempatan dari objek, warna dari objek, keunikan dan kontrasan, intensitas dan kekuatan, motivasi atau gerakan

Berikut indikator-indikator dalam mengukur penerapan tarif PPh Final sebagai berikut:

1. Pengetahuan Wajib Pajak terkait ketentuan umum PP No. 23 Tahun 2018 yang meliputi pemberlakuan peraturan dan isi peraturan (objek dan subjek yang dikenai peraturan).
2. Sikap Wajib Pajak terhadap tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan adanya PP No. 23 Tahun 2018
3. Pengetahuan Wajib Pajak terkait ketentuan umum perubahan PP No. 46 Tahun 2013 menjadi PP No. 23 Tahun 2018 yang meliputi pemberlakuan peraturan dan isi peraturan (objek dan subjek yang dikenai peraturan).
4. Kemampuan wajib pajak secara teknis berkaitan dengan peraturan yang baru PP No. 23 Tahun 2018 baik dalam tata cara perhitungannya maupun dalam pelunasannya.

Berikut alur penentuan omset penjualan yang dikenakan sesuai dengan PP Nomor 23 Tahun 2018.



Sumber : Hasil Data Olahan

Beberapa penulis yang menulis tentang UMKM dilakukan oleh Faizara Prabantari, Moh. Didik Ardiyanto (2017), mengemukakan hasilnya bahwa mayoritas UMKM yang berada di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pendapatan kotor hingga Rp 4.800.000.000 per tahun merasa tidak menguntungkan atas PP 46/2013 dan lebih suka menggunakan tarif UU 36/2008. Dan menguntungkan pembayar pajak tetapi akan menurunkan penerimaan pajak dan dapat merugikan pembayar pajak tetapi akan meningkatkan penerimaan pajak. Muhammad Syafiqurrahman, Agus Budiarmanto, Anis Widjajanto, Anas Wibawa, Doddy Setyawan, Rizky Akbar Anwar (2017) hasilnya adalah Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 membawa kemudahan dan penyederhanaan perhitungan pajak wajib pajak, sehingga para wajib pajak UMKM semakin mudah menghitung dan membayar pajaknya.

Fitari Vidia Yanuswari (2016), hasilnya adalah sebagian wajib pajak merasa menguntungkan terhadap pelaksanaan PP No. 46. Sementara itu, beberapa bagian dari wajib pajak merasa dirugikan terhadap pelaksanaan PP No. 46 sehingga mereka tidak tertarik untuk menggunakan PP No. 46. Dan yang dilakukan oleh N. L. Supadmi, D. G Dharma Suputra (2016), hasilnya adalah persepsi wajib pajak pada penerapan nomor regulasi. 46 tahun 2013 dan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Denpasar. Ini berarti persepsi yang lebih baik dari wajib pajak pada penerapan nomor regulasi. 46 tahun 2013, maka para wajib pajak UMKM di Denpasar akan lebih taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya

METODE

Metode penelitian merupakan metode untuk menentukan kebenaran yang merupakan sebuah pemikiran yang kritis. Penelitian tentunya mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu. Melalui penelitian manusia dapat memanfaatkan hasil penelitiannya, secara umum data yang diperoleh dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah yang dihadapi.

Menurut Sugiyono (2017:2) mengemukakan yang dimaksud dengan metode penelitian adalah sebagai berikut: "Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu."

Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan penelitian survey. Menurut Sugiyono (2017:7) Metode kuantitatif adalah: "Metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode positivistik karena berlandaskan pada filsafat positivisme. Metode ini sebagai metode ilmiah/scintific karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit/ empiris, objektif, terukur, rasional, dan sistematis. Metode ini juga disebut metode discovery,

karena dengan metode ini ditemukan dan dikembangkan berbagai iptek baru. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data dan penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik."

Menurut Sugiyono (2017:6) bahwa: "Metode survey merupakan metode yang digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan kuesioner, test, wawancara terstruktur dan sebagainya".

Menurut Sugiyono (2017:11), mengemukakan pengertian kedua penelitian tersebut adalah sebagai berikut: penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel baik satu variabel atau lebih (independent) tanpa membuat perbandingan atau hubungan dengan variabel lain. Sedangkan penelitian verifikatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk menguji teori dan akan mencoba menghasilkan metode ilmiah yakni status hipotesa yang berupa kesimpulan, apakah suatu hipotesa diterima atau ditolak. Penelitian verifikatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan perhitungan statistik.

Dalam penelitian ini metode deskriptif digunakan untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana pendapat pelaku usaha sentra UMKM di Kota Bandung mengenai tarif final 0,5% di Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan perubahan tarif final 1% menjadi 0,5%. Sedangkan metode verifikatif digunakan untuk mengetahui dan mengkaji besarnya pengaruh persepsi pelaku usaha sentra UMKM di Bandung tentang tarif final 0,5% dan perubahan tarif final 1% menjadi 0,5%. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Menurut Sugiyono (2017:13) Data Kuantitatif adalah data yang berwujud angka-angka.

Hal ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang merupakan faktor pendukung terhadap pengaruh antara variabel-variabel yang bersangkutan dengan cara membagikan kuesioner kemudian dianalisis dengan menggunakan alat uji statistik.

Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data primer, yaitu merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti. Data diperoleh melalui kuesioner kepada beberapa pelaku usaha sentra UMKM di Kota Bandung.

Pengertian data primer oleh Anwar Sanusi (2011: 104) menyatakan bahwa, "Data primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti."

Dalam penelitian ini data yang dipergunakan bersumber dari yang langsung diperoleh oleh peneliti yaitu berupa data primer dan data sekunder, untuk lebih jelasnya sebagai berikut: Menurut Danang Sunyoto (2013). Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari

responden (objek penelitian). Data primer dapat diperoleh melalui wawancara, kuisioner dan observasi lapangan berdasarkan jadwal penelitian.

Menurut Danang Suyanti (2013). Data sekunder diperoleh melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh pihak lain yang berkaitan dengan masalah penelitian, seperti: jumlah pemilik UMKM Sentra di setiap Kecamatan di Kota Bandung yang berasal dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, peraturan-peraturan yang berhubungan tarif PPh final untuk UMKM

Teknik Penarikan Sampel

Menurut Sugiyono (2017:80) menyatakan bahwa populasi adalah sebagai berikut: "Wilayah generalisasi yang terdiri atas : objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya."

Berdasarkan pengertian di atas, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah jumlah pelaku usaha sentra UMKM yang tersebar di beberapa kecamatan di Kota Bandung yaitu 1.235 pelaku usaha sentra.

Definisi sampel menurut Sugiyono (2017:81) adalah: "Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut".

Penentuan sampel ditentukan dengan menggunakan ketentuan rumus *Slovin* (Sujarweni, 2016:8) sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N\alpha^2}$$

Keterangan :

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

α = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan, dalam penelitian ini adalah 10%.

Berdasarkan jumlah pelaku usaha sentra UMKM yang tersebar di beberapa kecamatan di Kota Bandung sebesar 1.235 pelaku usaha sentra dengan *margin of error* sebesar 10% adalah:\

$$\begin{aligned} n &= \frac{N}{1 + N(\alpha)^2} \\ n &= \frac{1.235}{1 + 1.235(0,1)^2} \\ n &= \frac{1.235}{1 + 1.235(0,01)} \\ n &= \frac{1.235}{1 + 12,35} \\ n &= \frac{1.235}{13,35} \\ n &= 92,5 \\ n &= 93 \end{aligned}$$

Jadi jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 93 pelaku usaha sentra UMKM di Kota Bandung

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Perusahaan

1. Sentra Sepatu Cibaduyut

Sentra Industri Sepatu Cibaduyut terletak di Jalan Raya Cibaduyut, Kecamatan Bojongloa Kidul, Bandung. Sentra ini terbentuk dari 577 unit IKM yang memproduksi berbagai jenis sepatu seperti Sepatu Keds, Vantofel, sepatu wanita, sepatu anak dll. Kapasitas produksi per tahunnya sebanyak 3.114.022 pasang dengan nilai investasi Rp 19 milyar. Sentra ini telah menyerap 3.008 tenaga kerja. Keunggulan sentra industri ini yaitu teknik pembuatan seputa secara *hand made*. (sentraindustribandung.com, 2012)

2. Sentra Bengkel Las, Bubut Kebon Waru

Sentra Bengkel Las, Bubut Kebon Waru terletak di Jalan Bogor Kecamatan Batununggal. Di sentra tersebut terdapat 104 unit usaha dari berbagai macam industri las maupun bubut, misalkan pembuatan canopi, rolling door, pagar, teralis yang berdiri tahun 1967 dan terkenal dengan nama Pasar Gupeti. Dan jumlah karyawan sebanyak 210 orang.

3. Sentra Boneka Sukamulya

Sentra Industri Boneka Sukamulya terletak di Jalan Sukamulya, Kecamatan Sukajadi, Bandung. Sentra ini terdiri dari kurang lebih 17 pengrajin boneka. Kapasitas produksi per tahunnya sebanyak 768.940 unit dengan nilai investasi Rp 2,691 milyar dan menyerap tenaga pekerja sebanyak 212 orang. Keunggulan sentra industri ini yaitu memiliki kualitas dan harga yang bersaing. (sentraindustribandung.com, 2012)

4. Sentra Boneka Warung Muncang

Sentra boneka di daerah ini sudah berdiri sejak 20 tahun lalu. Endar, salah satu perajin, bilang, membuat boneka merupakan salah satu bentuk keterampilan tangan yang membutuhkan ketelitian dan kerajinan. cara membuat boneka bermacam-macam. Namun pada intinya tetap membutuhkan keterampilan tangan dalam menjahit secara manual. Menurutnya, ada lima langkah sederhana membuat boneka. mengatakan, permintaan bisa naik ketika hari libur atau momen liburan. Pada saat-saat itulah, perajin boneka ketiban berkah, lantaran penjualan bonekanya bisa naik hingga dua kali lipat. Ini lantaran permintaan pasokan boneka dari toko-toko grosir di Bandung meningkat pula. Omset rata-rata dia per bulan sekitar Rp 20 juta sampai Rp 40 juta. Bila liburan tiba, omzet bisa melonjak hingga Rp 50 juta ke atas. Para perajin boneka di sini memang sangat bergantung

pada pesanan toko boneka grosir di wilayah tersebut. Mereka sangat jarang menjual ke pihak lain di luar Kota Bandung.

5. Sentra Gorengan Tempe Leuwi Panjang

Sentra oleh-oleh di Jalan Raya Leuwi Panjang, Bandung, selalu ramai pembeli. Keripik tempe menjadi salah satu panganan khas yang paling banyak diburu pembeli dari pusat oleh-oleh ini. Para pedagang mendapatkan bahan baku tempe dari warung, pasar atau pabrik tempe yang dekat dengan lokasi usaha mereka. Sentra oleh-oleh di Jalan Raya Leuwi Panjang, Kecamatan Bojongloa Kidul, Bandung, sudah sangat kesohor. Letaknya yang strategis dan harganya yang murah membuat pusat oleh-oleh ini selalu ramai diserbupengunjung

6. Jean's Cihampelas

Sentra Industri Perdagangan Jeans Cihampelas terletak di Jalan Cihampelas, Kecamatan Coblong, Bandung. Sentra ini terdiri dari 59 unit IKM yang menjual berbagai jenis jeans dengan omzet penjualan sebesar sebesar Rp 227,55 juta per hari. Sentra ini telah menyerap 352 orang tenaga kerja. Keunggulan sentra industri ini yaitu dikenal menjual jeans dengan model-model yang selalu *up to date*. (sentraindustribandung.com, 2012)

7. Sentra Kaos dan Sablon Suci

Sentra Industri Kaos dan Sablon Suci terletak di Jalan Surapati dan Jalan PHH. Mustofa, Kecamatan Cibeunying Kidul, Bandung. Sentra ini terdiri dari 409 unit IKM yang memproduksi berbagai macam jenis sablon kaos. Kapasitas produksi per tahunnya sebanyak 177.300 lusin dengan nilai investasi sebesar Rp 115,403 milyar. Sentra ini telah menyerap tenaga kerja sebanyak 2.721 orang. Keunggulan sentra industri ini yaitu memiliki jangkauan pasar yang luas dan telah di kenal di seluruh kota di Indonesia. (sentraindustribandung.com, 2012)

Karakteristik Responden

Analisis karakteristik responden digunakan untuk memberikan gambaran terhadap responden apakah dengan karakteristik yang berbeda-beda akan diperoleh penilaian yang sama atau tidak. Pada penelitian ini, sampel yang menjadi responden adalah tujuh sentra UMKM di Kota Bandung. Data pribadi dari keseluruhan responden yang dipandang relevan dengan permasalahan yang diidentifikasi, dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kategori, yaitu jenis kelamin, jenis usaha, omset penjualan, dan jenis perusahaan.

Berikut data responden berdasarkan jenis kelamin, jenis usaha, omset penjualan, dan jenis perusahaan.

1. Data responden berdasarkan jenis kelamin yaitu jenis kelamin laki-laki adalah sebanyak 81 responden atau

87% dan jenis kelamin perempuan sebanyak 12 atau 13%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berdasarkan jenis kelamin adalah jenis kelamin laki-laki yaitu sebesar 87%.

2. Data responden berdasarkan jenis usaha yaitu jenis usaha perdagangan sebanyak 86 responden atau 92% dan jenis usaha jasa sebanyak 7 atau 8%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas pelaku usaha sentra UMKM di Kota Bandung berdasarkan jenis usaha adalah jenis usaha perdagangan yaitu sebesar 92%.
3. Data responden berdasarkan omset penjualan tahunan pelaku usaha UMKM dengan omset penjualan tahunan lebih dari empat milyar delapan ratus juta rupiah adalah sebanyak 7 pelaku usaha sentra UMKM atau 8% dan omset penjualan tahunan sampai dengan empat milyar delapan ratus juta rupiah adalah sebanyak 93 pelaku usaha sentra UMKM atau 92%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas pelaku usaha sentra UMKM di Kota Bandung adalah beromset sampai dengan empat milyar rupiah per tahun atau sebesar 92%.
4. Data responden berdasarkan jenis perusahaan yaitu jenis usaha perusahaan dalam bentuk perorangan sebanyak 80 jenis usaha atau 86% dan jenis usaha dalam bentuk CV adalah sebanyak 13 atau 14%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas pelaku usaha sentra UMKM di Kota Bandung berdasarkan jenis perusahaan adalah jenis usaha dalam bentuk perorangan yaitu sebesar 86%.

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Persepsi Pelaku Usaha Sentra UMKM Tentang Penerapan Tarif Pajak Final 0,5%(X)

Variabel Y	r _{hitung}	r _{tabel}	Signifikansi	Keterangan
1	0,706	0,204	0,000	Valid
2	0,423	0,204	0,000	Valid
3	0,599	0,204	0,000	Valid
4	0,653	0,204	0,000	Valid
5	0,681	0,204	0,000	Valid
6	0,680	0,204	0,000	Valid
7	0,653	0,204	0,000	Valid
8	0,497	0,204	0,000	Valid
9	0,371	0,204	0,000	Valid
10	0,561	0,204	0,000	Valid
11	0,441	0,204	0,000	Valid
12	0,658	0,204	0,000	Valid
13	0,676	0,204	0,000	Valid

Sumber: Data Diolah Menggunakan SPSS

Berdasarkan Tabel 5 diketahui bahwa item kuesioner untuk mengukur persepsi pelaku usaha sentra UMKM mengenai penerapan tarif pajak Final 0,5 (variabel X) mempunyai nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} (0,204) dengan signifikansi $< 0,05$. Hal ini mengindikasikan bahwa item kuesioner tersebut valid dan item kuesioner tersebut dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Persepsi Pelaku Usaha Sentra UMKM Tentang Perubahan Penerapan Tarif Pajak Final 1% Menjadi 0,5% (Y)

Variabel Y	r_{hitung}	r_{tabel}	Signifikansi	Keterangan
1	0,680	0,204	0,000	Valid
2	0,299	0,204	0,000	Valid
3	0,544	0,204	0,000	Valid
4	0,542	0,204	0,000	Valid
5	0,537	0,204	0,000	Valid
6	0,522	0,204	0,000	Valid
7	0,505	0,204	0,000	Valid
8	0,423	0,204	0,000	Valid
9	0,592	0,204	0,000	Valid
10	0,600	0,204	0,000	Valid

Sumber: Data Diolah Menggunakan SPSS

Persepsi Pelaku Usaha Sentra UMKM Tentang Penerapan Tarif Pajak Final 0,5% (PP No. 23 Tahun 2018)

Berdasarkan data yang diolah dapat diketahui skor rata-rata pernyataan kuesioner mengenai persepsi pelaku usaha sentra UMKM tentang Penerapan tarif Pajak Final 0,5% (PP No. 23 Tahun 2018) sebesar 651. Skor terendah terdapat pada pernyataan kuesioner nomor 1 mengenai: **Saya akan berkontribusi kepada Bangsa dan Negara dalam membayar pajak, pada pernyataan tersebut mendapatkan skor terendah sebesar 95.** Skor tertinggi terdapat pada pernyataan kuesioner nomor 13 mengenai: **Dengan Tarif pajak Final yang kecil tersebut, saya akan segera mendaftarkan ke Kantor Pajak setempat untuk memperoleh NPWP (bagi yang belum memiliki NPWP) mendapatkan skor 1,209, hal tersebut dilihat respon akan perubahan tarif Pajak Final 0,5% cukup baik.** Persepsi pelaku usaha sentra UMKM tentang Penerapan tarif Pajak Final 0,5% (PP No. 23 Tahun 2018) sebesar 651 berada pada kategori Sangat Tidak Setuju.

Responden Yang Menyatakan Sangat Tidak Setuju

1. Pelaku usaha sentra UMKM Sepatu Cibaduyut dengan omset kurang dari 4,8 milyar rupiah, jenis usaha adalah 7 jenis usaha perdagangan dan jenis perusahaan adalah sebanyak 7 usaha dalam bentuk usaha perorangan serta berjenis kelamin laki laki berjumlah 5 responden dan berjenis kelamin perempuan berjumlah 2 responden.

2. Pelaku usaha sentra UMKM Jean's Cihampelas dengan omset kurang dari 4,8 milyar rupiah, jenis usaha adalah 4 jenis usaha perdagangan dan jenis perusahaan adalah sebanyak 4 usaha dalam bentuk usaha perorangan serta berjenis kelamin laki laki berjumlah 3 responden dan berjenis kelamin perempuan berjumlah 1 responden
3. Pelaku usaha sentra UMKM Boneka Sukagalih dengan omset kurang dari 4,8 milyar rupiah, jenis usaha adalah 2 jenis usaha perdagangan dan jenis perusahaan adalah sebanyak 2 usaha dalam bentuk usaha perorangan serta berjenis kelamin laki laki berjumlah 2 responden dan berjenis kelamin perempuan tidak ada

Responden Yang Menyatakan Tidak Setuju

1. Pelaku usaha sentra UMKM Sepatu Cibaduyut dengan omset kurang dari 4,8 milyar rupiah, jenis usaha adalah 3 jenis usaha perdagangan dan jenis perusahaan adalah sebanyak 3 usaha dalam bentuk usaha perorangan serta berjenis kelamin laki laki berjumlah 3 responden dan berjenis kelamin perempuan tidak ada
2. Pelaku usaha sentra UMKM Jean's Cihampelas dengan omset kurang dari 4,8 milyar rupiah, jenis usaha adalah 1 jenis usaha perdagangan dan jenis perusahaan adalah sebanyak 1 usaha dalam bentuk usaha perorangan serta berjenis kelamin laki laki berjumlah 1 responden dan berjenis kelamin perempuan tidak ada
3. Pelaku usaha sentra UMKM Boneka Sukagalih dengan omset kurang dari 4,8 milyar rupiah, jenis usaha adalah 1 jenis usaha dalam bentuk CV dan jenis perusahaan adalah sebanyak 1 usaha perorangan serta berjenis kelamin laki laki berjumlah 1 responden dan berjenis kelamin perempuan tidak ada

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa mayoritas responden pelaku usaha sentra UMKM Kota Bandung yang masih minim akan kesadaran dalam mematuhi dan melaksanakan peraturan perpajakan adalah pada UMKM di Setra Sepatu Cibaduyut, Sentra Jean's Cihampelas, Sentra Boneka Sukagalih.

Persepsi Pelaku Usaha Sentra UMKM Tentang Perubahan Penerapan Tarif Pajak Final 1% (PP no. 46 Tahun 2013) Menjadi Tarif Pajak Final 0,5% (PP No. 23 Tahun 2018)

Berdasarkan data yang diolah dapat diketahui skor rata-rata pernyataan kuesioner mengenai kualitas produk sebesar 512. Skor terendah terdapat pada pernyataan kuesioner nomor 1 mengenai: **Pajak Final adalah pajak yang akhir tahun pajak tidak perlu membayara lagi (melapor saja) pada pernyataan ini mendapatkn skor terendah sebesar 93.** Skor tertinggi terdapat pada pernyataan kuesioner nomor 10 mengenai: **setiap adanya kebijakan perubahan dalam perpajakan yang berhubungan dengan usaha saya agar disosialisasikan, memperoleh**

skor 930 hal tersebut menunjukkan bahwa adanya sifat kooperatif dari para pelaku usaha sentra UMKM. persepsi pelaku usaha sentra UMKM tentang perubahan tariff Pajak Final 1% (PP No. 46 Tahu 2018) menjadi tariff Pajak Final) 0,5% (PP No. 23 Tahun 2018) mendapatkan skor sebesar 930 berada pada kategori Sangat Tidak Setuju.

Responden Yang Menyatakan Sangat Tidak Setuju

1. Pelaku usaha sentra UMKM Sepatu Cibaduyut dengan omset kurang dari 4,8 milyar rupiah, jenis usaha adalah 5 jenis usaha perdagangan dan jenis perusahaan adalah sebanyak 5 usaha dalam bentuk usaha perorangan serta berjenis kelamin laki laki berjumlah 4 responden dan berjenis kelamin perempuan berjumlah 1 responden.
2. Pelaku usaha sentra UMKM Jean’s Cihampelas dengan omset kurang dari 4,8 milyar rupiah, jenis usaha adalah 1 jenis usaha perdagangan, 1 jenis usaha jasa dan jenis perusahaan adalah sebanyak 2 usaha dalam bentuk usaha perorangan serta berjenis kelamin laki laki berjumlah 2 responden dan berjenis kelamin perempuan tidak ada
3. Pelaku usaha sentra UMKM Boneka Sukagalih dengan omset kurang dari 4,8 milyar rupiah, jenis usaha adalah 2 jenis usaha perdagangan dan jenis perusahaan adalah sebanyak 2 usaha dalam bentuk usaha perorangan serta berjenis kelamin laki laki berjumlah 2 responden dan berjenis kelamin perempuan tidak ada
4. Pelaku usaha sentra UMKM Kaos dan Sablon Suci dengan omset kurang dari 4,8 milyar rupiah, jenis usaha adalah 1 jenis usaha jasa dan jenis perusahaan adalah sebanyak 1 usaha dalam bentuk usaha perorangan serta berjenis kelamin laki laki berjumlah 1 responden dan berjenis kelamin perempuan tidak ada

Responden Yang Menyatakan Tidak Setuju

1. Pelaku usaha sentra UMKM Sepatu Cibaduyut dengan omset kurang dari 4,8 milyar rupiah, jenis usaha adalah 6 jenis usaha perdagangan, 1 jenis usaha jasa dan jenis perusahaan adalah sebanyak 7 usaha dalam bentuk usaha perorangan serta berjenis kelamin laki laki berjumlah 6 responden dan berjenis kelamin perempuan berjumlah 1 responden

Tabel 4. Hasil Uji Linearitas

ANOVA Table							
			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Perubahan Penerapan Tarif Pajak Final 1% menjadi 0,5% * Penerapan Tarif Pajak Final 0,5%	Between Groups	(Combined)	1007,118	24	41,963	5,118	,000
		Linearity	730,722	1	730,722	89,124	,000
	Within Groups	Deviation from Linearity	276,396	23	12,017	1,466	,114
		Total	557,527	68	8,199		
Total			1564,645	92			

Sumber: Data Diolah Menggunakan SPSS

2. Pelaku usaha sentra UMKM Jean’s Cihampelas dengan omset kurang dari 4,8 milyar rupiah, jenis usaha adalah 3 jenis usaha perdagangan dan jenis perusahaan adalah sebanyak 3 usaha dalam bentuk usaha perorangan serta berjenis kelamin laki laki berjumlah 3 responden dan berjenis kelamin perempuan tidak ada

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa mayoritas responden pelaku usaha sentra UMKM Kota Bandung yang masih minim akan pengetahuan dalam peraturan perpajakan adalah pada pelaku usaha sentra UMKM di Sentra Sepatu Cibaduyut, Sentra Sukagalih, Sentra Jean’s Cihampelas dan Sentra Boneka Sukagalih dan Sentra Kaos dan Sablon Suci.

Tabel 3. Hasil Uji Koefisien Korelasi

Correlations			
		Penerapan Tarif Pajak Final 0,5%	Perubahan Penerapan Tarif Pajak Final 1% menjadi 0,5%
Penerapan Tarif Pajak Final 0,5%	Pearson Correlation	1	,683**
	Sig. (2-tailed)		,000
	N	93	93
Perubahan Penerapan Tarif Pajak Final 1% menjadi 0,5%	Pearson Correlation	,683**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	
	N	93	93

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Data Diolah Menggunakan SPSS

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, dapat diketahui bahwakorelasi antarapersepsi pelaku usaha sentra UMKM tentang peneraoab tarif Pajak Final 0,5% (X1) denganpersepsi pelaku usaha sentra UMKM tentang Perubahan Penerapan Tarif Pajak Final 1% menjadi 0,5% (Y) sebesar 0,683. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif yang kuat antara persepsi pelaku usaha sentra UMKM tentang peneraoab tarif Pajak Final 0,5% (X1) denganpersepsi pelaku usaha sentra UMKM tentang Perubahan Penerapan Tarif Pajak Final 1% menjadi 0,5% (Y).

Berdasarkan hasil uji linearitas pada output tabel "Anova Table" di atas, diketahui bahwa nilai Sig. Deviation From Linearity sebesar 0,114. Karena nilai Sig. $0,114 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya terdapat hubungan linier antara persepsi pelaku usaha sentra UMKM tentang penerapan tarif Pajak Final 0,5% (X1) dengan persepsi pelaku usaha sentra UMKM tentang Perubahan Penerapan Tarif Pajak Final 1% menjadi 0,5% (Y).

Persepsi Pelaku Usaha Sentra UMKM Tentang Penerapan Tarif Pajak Final 0,5% (PP No. Tahun 2018)

Berdasarkan penelitian deskriptif yang telah dilakukan bahwa persepsi pelaku usaha Sentra UMKM mengenai penerapan tarif Pajak Final 0,5% (PP No.23 Tahun 2018) dari sampel yang sudah ditentukan responnya sangat tidak setuju dari hal itu dapat dilihat persepsi para pelaku Usaha UMKM di Kota Bandung tidak setuju dengan adanya penerapan tarif pajak 0,5%, responden yang minim kesadaran akan peraturan perpajakan adalah di sentra Sepatu Cibaduyut, Sentra Boneka Sukagalih dan Sentra Jean's Cihampelas. Akan tetapi sebagian pelaku usaha Sentra UMKM (sampel) kooperatif dengan adanya kebijakan penerapan Tarif Pajak Final 0,5%. Penyebab dari kurangnya respon terhadap kebijakan perpajakan karena kurangnya kesadaran masyarakat/pelaku usaha dalam menaati peraturan perpajakan. Berdasarkan uji koefisien korelasi terdapat korelasi positif yang kuat antara persepsi pelaku usaha sentra UMKM tentang penerapan tarif Pajak Final 0,5% (X1) dengan persepsi pelaku usaha sentra UMKM tentang Perubahan Penerapan Tarif Pajak Final 1% menjadi 0,5% (Y) sebesar 0,683.

Persepsi Pelaku Usaha Sentra UMKM Tentang Perubahan Penerapan Tarif Pajak Final 1% (PP No. 46 Tahun 2018) Menjadi Tarif Pajak Final 0,5% (PP No. 23 Tahun 2018)

Berdasarkan penelitian deskriptif yang telah dilakukan bahwa persepsi pelaku usaha Sentra UMKM mengenai perubahan penerapan tarif Pajak Final 1% menjadi 0,5% dari sampel yang sudah ditentukan mendapatkan respon Sangat Tidak Setuju dari hal itu dapat dilihat bahwa persepsi para pelaku Usaha UMKM di Kota Bandung tidak setuju dengan adanya kebijakan perubahan tarif Pajak Final 1% menjadi tarif Pajak Final 0,5%, responden yang minim pengetahuan mengenai perpajakan adalah di sentra Sepatu Cibaduyut, Sentra Jean's Cihampelas, Sentra Boneka Sukagalih, Sentra Kaos dan Sablon Suci. Akan tetapi sebagian pelaku usaha Sentra UMKM (sampel) kooperatif dengan adanya kebijakan penerapan perubahan Tarif Pajak Final 1% menjadi 0,5%. Penyebab dari kurangnya respon terhadap kebijakan perpajakan dikarenakan

kurangnya sosialisasi mengenai kebijakan dan sanksi yang ketat dalam perpajakan. Berdasarkan uji linearitas bahwa persepsi pelaku usaha sentra UMKM tentang penerapan tarif Pajak Final 0,5% (X1) dengan persepsi pelaku usaha sentra UMKM tentang Perubahan Penerapan Tarif Pajak Final 1% menjadi 0,5% (Y) memiliki hubungan secara linear yaitu karena tingkat signifikansi $0,114 > 0,05$.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

Berdasarkan penelitian deskriptif yang telah dilakukan bahwa persepsi pelaku usaha Sentra UMKM mengenai penerapan tarif Pajak Final 0,5% (PP No.23 Tahun 2018) dari sampel yang sudah ditentukan responnya sangat tidak setuju dari hal itu dapat dilihat persepsi para pelaku Usaha UMKM di Kota Bandung tidak setuju dengan adanya penerapan tarif pajak 0,5%, responden yang minim kesadaran akan peraturan perpajakan adalah di sentra Sepatu Cibaduyut, Sentra Boneka Sukagalih dan Sentra Jean's Cihampelas. Akan tetapi sebagian pelaku usaha Sentra UMKM (sampel) kooperatif dengan adanya kebijakan penerapan Tarif Pajak Final 0,5%. Penyebab dari kurangnya respon terhadap kebijakan perpajakan karena kurangnya kesadaran masyarakat pelaku usaha dalam menaati peraturan perpajakan. Berdasarkan uji koefisien korelasi terdapat korelasi positif yang kuat antara persepsi pelaku usaha sentra UMKM tentang penerapan tarif Pajak Final 0,5% (X1) dengan persepsi pelaku usaha sentra UMKM tentang Perubahan Penerapan Tarif Pajak Final 1% menjadi 0,5% (Y) sebesar 0,683.

Berdasarkan penelitian deskriptif yang telah dilakukan bahwa persepsi pelaku usaha Sentra UMKM mengenai perubahan penerapan tarif Pajak Final 1% menjadi 0,5% dari sampel yang sudah ditentukan mendapatkan respon Sangat Tidak Setuju dari hal itu dapat dilihat bahwa persepsi para pelaku Usaha UMKM di Kota Bandung tidak setuju dengan adanya kebijakan perubahan tarif Pajak Final 1% menjadi tarif Pajak Final 0,5%, responden yang minim pengetahuan mengenai perpajakan adalah di sentra Sepatu Cibaduyut, Sentra Jean's Cihampelas, Sentra Boneka Sukagalih, Sentra Kaos dan Sablon Suci. Akan tetapi sebagian pelaku usaha Sentra UMKM (sampel) kooperatif dengan adanya kebijakan penerapan perubahan Tarif Pajak Final 1% menjadi 0,5%. Penyebab dari kurangnya respon terhadap kebijakan perpajakan dikarenakan kurangnya sosialisasi mengenai kebijakan dan sanksi yang ketat dalam perpajakan. Berdasarkan uji linearitas bahwa persepsi pelaku usaha sentra UMKM tentang penerapan tarif Pajak Final 0,5% (X1) dengan persepsi pelaku usaha sentra UMKM tentang Perubahan Penerapan Tarif Pajak Final 1% menjadi 0,5% (Y) memiliki hubungan secara linear yaitu karena tingkat signifikansi $0,114 > 0,05$.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah membantu terwujudnya penelitian ini

1. Dirjen DIKTI yang telah memberikan dana kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian ini.
2. Ketua dan Pimpinan akademik lainnya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Membangun Bandung
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Membangun Bandung dan jajarannya atas dukungan serta bantuan yang diberikan
4. Para pelaku usaha sentra UMKM di Kota Bandung
5. Berbagai pihak yang telah mendukung dan membantu terlaksananya penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi, C. (2013). *Jutaan UMKM Pahlawan Pajak, Urus Pajak itu Sangat Mudah*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan-Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 Tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan Oleh bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- PP Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
- Prabantari, Faizara & Ardiyanto, D.M. (2017). Implementasi Penghasilan Berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 (Studi Kasus UMKM di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta), *Diponegoro Journal of Accounting*, 6, (4), 1-12.
- Sanusi, A. (2011), *Metode Penelitian Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat.
- Sari, Diana. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sunyoto, D. (2013). *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung: PT Refika Aditama Anggota Ikapi
- Supadmi, N.L & Suputra, D.G.D. (2016), *Persepsi Wajib Pajak Atas Pemberlakuan PP No. 46 tahun 2013 dan Pengaruhnya Pada Kepatuhan (Studi Kasus Pada UMKM di Kota Denpasar)*, *Jurnal Ilmiah Manajemen & Akuntansi*, 22, (2), 95-107.
- Syafiqurrahman, M., Budiatmanto, A., Widjanto, A., Wibawa, A. Setyawan, D. & Anwar, R.A. (2017), *Analisa Pengaruh PP No. 46 Tahun 2013 terhadap Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia Melalui Sektor UMKM*, *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 2, (2), 75-82.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Tentang Pajak Penghasilan
- Waluyo. (2014). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Yanuswari, F.V (2016). Analisis Wajib Pajak Sektor Dagang dan Jasa terhadap Penerapan PP No. 46 Tahun 2013, *Jurnal Akuntansi UBHARA*, ISSN 2460-7762

KONTRIBUSI DUNIA USAHA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM CITARUM HARUM

(Studi kasus pelaksanaan CSR perusahaan listrik dalam mendukung Program Citarum Harum)

Risna Resnawaty, Ishartono, dan Dessy Hasanah

Departemen Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

E-mail: risna.resnawaty@unpad.ac.id,

ABSTRAK. Artikel ini merupakan hasil penelitian mengenai peran perusahaan dalam pelaksanaan program pelestarian Fungsi Sungai Citarum. Sungai Citarum yang tercemar oleh limbah industri, rumah tangga, pertanian dan peternakan, menyebabkan kondisi air sungai menjadi sangat kotor dan mengancam bagi kesehatan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan CSR dari perusahaan terkait dengan pelaksanaan program Citarum Harum yang diinisiasi oleh pemerintah Jawa Barat. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, dengan informasi yang dihasilkan dari wawancara mendalam pada perwakilan perusahaan, Dansektor 9 Pangdam III Siliwangi, serta pada masyarakat sekitar waduk Saguling. Hasil penelitian menunjukkan program pelestarian sungai Citarum memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian target produksi perusahaan, sehingga perusahaan berupaya untuk mengintegrasikan program CSR dengan program Citarum Harum melalui program penertiban Jaring Apung dan Pengalihan mata pencaharian bagi masyarakat penambang pasir di sekitar waduk Saguling. Aktivitas CSR perusahaan selaras dengan target pelestarian fungsi Sungai Citarum agar terbebas dari pencemaran dan membawa manfaat bagi masyarakat Jawa Barat, serta sebagai upaya pemenuhan target produksi listrik sesuai dengan kebutuhan dan target nasional. Untuk mencapai keberhasilan program CSR ini perusahaan harus bekerja sama secara intensif dengan pemerintah daerah, aparat keamanan dan masyarakat setempat.

Kata kunci: Program Citarum Harum; CSR; Sustainable Development; Pelestarian fungsi sungai

THE CONTRIBUTION OF BUSINESS SECTOR IN THE IMPLEMENTATION OF RIVER FUNCTION PRESERVATION PROGRAM

(Case study of CSR implementation by Electric Company in Citarum Harum Program)

ABSTRACT. *This article is result of research about role of the company in implementing the Citarum River Function preservation program. The Citarum River which is polluted by industrial, household, agricultural and livestock waste, causes river water conditions to become very dirty and threatening to health. This study aims to describe the implementation of CSR from companies related to the implementation of the Harum Citarum program initiated by the West Java government. The research method used a qualitative approach with descriptive methods. Information generated from in-depth interviews with CSR staff of the company, Dansektor 9 Commander of Siliwangi III, as well as the community around the Saguling reservoir. The results show that the Citarum river conservation program has a direct link to achieving the company's production targets, so the company seeks to integrate the CSR program with the Citarum Harum program through the floating net control program and the transfer of livelihoods to the sand mining community around the Saguling reservoir. The company's CSR activities are in line with the preservation target of the Citarum River function to be free from pollution and bring benefits to the people of West Java, and as an effort to fulfill the electricity production target according to national needs and targets. To achieve the success of this CSR program the company must work intensively with the local government, security forces and the local community.*

Key words: Citarum Harum; CSR; Sustainable Development; preservation of river's function

PENDAHULUAN

Sungai Citarum menjadi perhatian dunia karena ditetapkan sebagai salah satu dari 10 sungai paling tercemar di dunia dalam *The Worlds Worst 2013 : The Top Ten Toxic Threats* hasil investigasi organisasi lingkungan hidup *green cross Swsis dan Blacksmith Institute* pada tahun 2013. Lahan yang berpotensi kritis di daerah aliran sungai (DAS) Citarum kurang lebih mencapai 200 ribu hektare.

Sedangkan lahan yang agak kritis mencapai 166 ribu lebih hektare, lahan kritis 76 ribu hektar dan sebanyak 2 ribu hektare lebih dalam kondisi sangat kritis. (<https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/11/11/pi15tw409>, akses pada 10 Juni 2019).

Sementara itu Konferensi Air sedunia di stockholm tahun 2010 yang menyebutkan bahwa sungai Citarum menyediakan 805 kebutuhan air di Jakarta, mengaliri 5% irigasi pertanian padi di Indonesia serta sebagai sumber air bagi 2000 perusahaan. Permukiman kumuh dan perilaku membuang sampah ke perairan, pencemaran akibat limbah industri dan peternakan, serta pola tani yang tidak berkelanjutan menjadi sebab-sebab utama pencemaran di Citarum. Kondisi ini menjadi perhatian Internasional sebagai gambaran buruk sungai di Indonesia.

Pencemaran air sungai Citarum ini menyebabkan pencemaran sumber air untuk pertanian dan perikanan, ancaman bagi kesehatan (gangguan pernafasan, penyakit kulit) akibat kandungan logam berat pada ikan, serta banjir tahunan akibat pendangkalan.

yang hidup di masa depan dapat menikmati sumberdaya dan lingkungan dengan kualitas yang kurang lebih sama dengan kondisi pada saat ini. Paradigma ini pada awalnya hanya difahami sebagai paradigma yang berfokus pada penyelamatan lingkungan, seiring dengan industrialisasi yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan pemanasan suhu bumi (*global warming*). Namun (Beder, 1993), mengemukakan bahwa selain isu tentang lingkungan, *sustainable development* merupakan paradigma yang ditujukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan manusia tidak hanya keseimbangan antara pendayagunaan lingkungan dengan aktivitas bisnis, namun juga mempertimbangkan adanya *social justice*, yaitu keadilan sosial. Dengan arti lain berjalannya aktivitas ekonomi yang selaras dengan filosofi ekologis untuk mencapai kesejahteraan sosial. Artinya dengan adanya industri, kondisi kesejahteraan ini bukan hanya milik industri namun juga miliki stakeholder lain; yaitu masyarakat dan lingkungan

Dalam era industrialisasi, *sustainable development* merupakan paradigma yang harus difahami dan dipertimbangkan bersama sebagai pola pembangunan yang sadar akan kewajiban menjaga kelestarian lingkungan, meningkatkan kesejahteraan perusahaan dan juga masyarakat sekitar baik secara sosial maupun ekonomi.

Jenkins (2005) dalam Frynas (2009:102) menegaskan; “*by following socially responsible practices, the growth generated by the private sector will be more inclusive, equitable and poverty reducing*. Yang artinya CSR perusahaan bukan lagi bersifat bagi-bagi bantuan (*charity*) yang hanya berfokus pada kepentingan perusahaan. Namun CSR merambah pada ekspektasi yang lebih tinggi, yaitu melalui CSR perusahaan mampu mendukung pada target pembangunan yang dapat diukur dalam pencapaian pembangunan pada lingkup wilayah yang lebih luas, bukan hanya di sekitar perusahaan. CSR diharapkan mampu mendongkrak target pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Bowwiew (1998); Freeman (1994); Phillips (1997), Vogel (2008) Phillips and Margolis (1999), berpendapat bahwa CSR merupakan bentuk tanggung jawab moral dan etika bagi para pelaku bisnis. Dalam hal ini Bowwiew menekankan bahwa perusahaan merupakan cerminan dari perilaku kapitalis yang mengumpulkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Langkah-langkah yang dilakukan sebagai bentuk CSR merupakan bentuk kepedulian secara moral kepada masyarakat. Sehingga seringkali bentuk dari CSR yang dilakukan adalah kegiatan kebajikan (*Charity/virtue*) pada klien, konsumen, dan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut menjadi menarik untuk dicermati mengenai motive dari pelaksanaan CSR perusahaan yang tentu berpengaruh pada bentuk program maupun implementasi dari program tersebut. Brummer (1991) mengemukakan 6 kriteria pelaksanaan CSR antara

lain: *motive, relation to profit, group affected by decisions, type of act, type of effect, expressed or ideal interest*. Klasifikasi yang diungkapkan oleh Brummer ini memiliki kontribusi yang sangat bernilai terhadap pemahaman CSR, untuk memahami ruang lingkup, pengertian dan penjelasan mengenai hubungan antara sektor bisnis dengan masyarakat.

Zulkifli and Amran (2006) dalam Frynas (2009) menjelaskan bahwa CSR yang dilakukan oleh perusahaan pada negara berkembang memiliki variasi yang sangat berbeda tergantung pada karakteristik negara di mana CSR dilaksanakan. Sebagai contoh, CSR di Malaysia sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai religi dan cara Islam dalam menjalankan bisnisnya; sementara (Newell and Muro, 2006) dalam Frynas (2009) di Argentina CSR yang dilakukan menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mengatasi krisis ekonomi pada Desember tahun 2011; selanjutnya Fig, (2005) dalam Frynas (2009) mengemukakan bahwa pelaksanaan CSR di Afrika sangat kental dengan upaya untuk mengatasi ketidaksetaraan Ras sebagai akibat dari kebijakan Kulit putih (*apartheid*). Hal ini menjadi sebuah dasar yang kuat jika pelaksanaan CSR di Indonesia memiliki keselarasan dengan target pencapaian program pembangunan pemerintah.

Sebagai sebuah unit bisnis, perusahaan kerap memiliki motif berbasis keuntungan dalam pelaksanaan CSR nya. Kottler (2003) mengemukakan salah satu tipe CSR yaitu *Socially Responsible Business Practice*. Tipe CSR ini paling ideal terkait pembangunan berkelanjutan, perusahaan mengadopsi dan mengadakan bisnis yang mendukung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan melindungi lingkungan. inisiatif mengenai permasalahan yang menjadi fokus program berawal dari perusahaan, lalu diimplementasikan dengan cara bekerjasama dengan organisasi terkait, dengan tujuan keberlanjutan dari usaha mereka. Tipe ini dapat menjadi pemahaman mendasar untuk melihat sejauh mana kontribusi dari perusahaan terhadap pembangunan.

CSR yang dilakukan oleh perusahaan diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi perkembangan masyarakat di mana perusahaan tersebut berada. Kontribusi perusahaan terhadap masyarakat dapat dirasakan nyata terutama di negara-negara berkembang. Peran perusahaan menjadi sebuah harapan bagi tumbuhnya ekonomi masyarakat, terutama ketika pemerintah seringkali gagal dalam menyediakan layanan dasar meliputi pembangunan infrastruktur, pendidikan dan sarana kesehatan.

METODE

Proses penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dengan metode deskriptif untuk menangkap fenomena mengenai implementasi program CSR perusahaan

terkait dengan program Citarum Harum secara menyeluruh, mendalam dan rinci. Dengan demikian penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan hasil dari wawancara mendalam dari informan serta observasi pada perilaku maupun objek pelaksanaan CSR yang dapat diamati sehingga memungkinkan peneliti memahami bagaimana implementasi CSR IPUS.

Data dihasilkan dari wawancara mendalam pada 14 orang informan yang terdiri atas perwakilan perusahaan, Dansektor 9 sebagai perwakilan dari pemerintah, perwakilan Bappeda Jawa Barat dan masyarakat sebagai penerima manfaat program. Penelitian dilakukan selama 6 (enam) bulan yaitu mulai pertengahan bulan April dan berakhir pada Nopember 2018.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan program CSR PT. Indonesia Power (UPB) Saguling

Sebagai perusahaan yang penghasil listrik melalui tenaga air, kondisi DAS Citarum secara langsung berpengaruh terhadap proses bisnis Indonesia Power UBP. Saguling. Jika DAS Citarum memiliki kualitas air yang buruk, hal ini akan berdampak pada berkurangnya hasil produksi listrik serta besarnya biaya yang ditanggung oleh perusahaan terkait biaya pemeliharaan dan belanja alat berat yang menjadi mesin produksi perusahaan.

Sebelum Program Citarum Harum digulirkan, sebenarnya IPUS telah melakukan upaya pemeliharaan kebersihan dan ekosistem waduk Saguling tempat di mana proses bisnis dilaksanakan. Waduk Saguling merupakan salah satu sektor dari DAS Citarum dirasakan memiliki manfaat bagi perusahaan, sebab kualitas air yang baik dari aliran sungai yang melewati Waduk Saguling akan semakin baik dan memiliki dampak yang baik bagi Turbin atau mesin penghasil listrik.

Keberadaan Program Citarum Harum yang dimanfaatkan Presiden ditanggapi secara positif oleh perusahaan terkait dengan pengamanan aset dan pencapaian target produksi dari perusahaan. Perusahaan memutuskan untuk ikut terlibat dalam penyelenggaraan program Citarum Harum sebagai upaya untuk mengembalikan fungsi sungai dan mempercepat Pengendalian kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum Perusahaan sangat berpikir bahwa mereka sangat membutuhkan program ini, sebab optimalisasi fungsi sungai sangat terkait dengan *core business* yang dijalankan. Keterlibatan dalam Program Citarum Harum ini kemudian menjadi landasan kebijakan perusahaan yang memfokuskan program CSR di sekitar wilayah waduk Saguling, khususnya bagi unit bisnis perusahaan

Terkait dengan pelaksanaan CSR secara umum dan kontribusinya dalam program pembangunan pemerintah, sebagai perusahaan yang memasok listrik bagi keperluan

negara, Indonesia Power berupaya taat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini menjadi ruh dari kebijakan Internal Perusahaan yang antara lain mengenai: (1) Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan. (2) Pengelolaan Limbah Di Lingkungan Perusahaan. (3) Pedoman Penerapan Green Power. (4) Pengelolaan Limbah Unit Jasa Pembangkitan PLTU Batubara FTP-1 Jawa. (5) Komitmen Menjaga Ekosistem dan Pelestarian dalam Menjaga Keberlanjutan Planet di PT Indonesia Power. (6) Pengelolaan Sedimen Di Lingkungan PT Indonesia Power. (nomor 4, 5, dan 6 dilakukan di unit bisnis di wilayah lain).

Meskipun dalam menjalankan bisnisnya IP Saguling tidak menghasilkan limbah yang membahayakan bagi lingkungan sekitar, namun kebijakan internal tersebut menunjukkan komitmen untuk melindungi lingkungan tempat perusahaan beroperasi termasuk ikut dalam kegiatan program Citarum Harum. Sejalan dengan tujuan tersebut, Indonesia Power memiliki serangkaian kebijakan yang bertujuan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, melalui kegiatan-kegiatan yang bermuara para prinsip berkelanjutan yaitu antara lain dengan kegiatan operasional yang pro lingkungan (*Green Power Plant*) dan pro masyarakat (*In-Power Care & Hijaunesia Power*). *Green Power Plant* dilakukan melalui pengembangan & pemanfaatan energi baru terbarukan, efisiensi energi, efisiensi air dan pengelolaan limbah yang tepat, sedangkan untuk kegiatan pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati dijalankan melalui program *Hijaunesia Power*.

Indonesia Power memahami pendekatan tripple bottom lines yaitu: *people, planet & profit* (Elkington 1997), di mana upaya untuk menjaga lingkungan sekitar (planet) dan menjaga keseimbangan kehidupan sosial (people) sejalan dengan pertumbuhan laba Perusahaan (profit). Dengan pendekatan ini diharapkan keberadaan Indonesia Power tidak hanya bermanfaat bagi para pemegang saham, tetapi juga bagi pemangku kepentingan yang lebih luas yaitu pekerja, pelanggan, vendor, masyarakat sekitar dan Negara.

Dalam menjalankan usahanya Indonesia Power memiliki tanggung jawab sosial terhadap lingkungan terlebih kepada DAS Citarum sebagai sumber utama dalam penggerak produksi listrik. Jika waduk Saguling mengalami penurunan kualitas air, maka akan terjadi penurunan produksi pasokan listrik yang jelas merugikan bagi perusahaan. Oleh Indonesia Power (UPB) Saguling menyatakan komitmen untuk terlibat dalam program Citarum Harum dengan mengintegrasikan program-program CSR yang dimilikinya dengan program tersebut. Hal ini dilakukan sebagai upaya percepatan pelestarian fungsi sungai Citarum, yang artinya jika kualitas air

sungai menjadi baik, maka perusahaan akan mendapatkan manfaat kelancaran bisnis usaha yang dijalankan. Dalam hal ini aspek lingkungan (*planet*) dan keuntungan (*profit*) berjalan secara seimbang dalam kegiatan CSR IPUS yang terintegrasi dengan program Citarum Harum.

Proses keterlibatan Indonesia Power (UBP) Saguling juga dipengaruhi oleh adanya keberadaan “Mitra CSR Provinsi Jawa Barat” yang diinisiasi oleh Bapeda Propinsi Jawa Barat. Forum ini menawarkan kerjasama atas program prioritas yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Barat untuk dilakukan oleh Perusahaan-perusahaan yang jadi mitra termasuk oleh IPUS pada program Citarum Harum. Pihak perusahaan mengakui bahwa pemerintah menawarkan program pembangunan yang tidak didanai APBD untuk diadopsi sebagai program CSR perusahaan. Penawaran tersebut dilakukan secara langsung di setiap awal tahun pada sebuah pertemuan yang dikomandoi oleh Bapeda Jawa Barat. Penawaran ini kemudian dipertimbangkan oleh manajemen perusahaan untuk menentukan seberapa banyak peran yang akan diambil dalam mensukseskan program pembangunan milik pemerintah, serta wilayah mana yang akan diambil sebagai sasaran CSR. Manajemen IPUS menyatakan bahwa besaran dari kontribusi perusahaan serta wilayah mana yang akan digarap sebagai program CSR yang memiliki keterkaitan dengan kelanjutan operasi. wilayah yang akan dipilih memiliki keterkaitan dengan visi, misi dan pencapaian target perusahaan.

Implementasi Program CSR Indonesia Power dalam Program Citarum Harum

Sebelum lahirnya program Citarum Harum, IPUS telah turut serta dalam Program pelestarian lingkungan Propinsi yaitu Citarum Bestari. Indonesia Power menyatakan memiliki komitmen dalam menjaga ekosistem dan pelestarian dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Pelestarian Bantaran Sungai Citarum menjadi perhatian perusahaan sejak tahun 2016. Sebab kualitas dari aliran sungai Citarum memiliki pengaruh terhadap bisnis yang dijalankan oleh perusahaan.

Secara geografis, area kerja dari Indonesia Power (UBP) Saguling terletak di area pegunungan pada hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum di Desa Rajamandala, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung. Area kerja tersebut berada di Waduk Saguling yang menjadi wilayah kerja dari Komandan Sektor 9 Pangdam III Siliwangi sebagai perwakilan pemerintah dalam melaksanakan pelestarian fungsi sungai.

Keterlibatan Indonesia Power (UBP) Saguling secara resmi dalam pengelolaan sungai Citarum dimulai pada tahun 2016 melalui *Memorandum of Understanding* (MoU) yang dilakukan dengan Pemprov Jabar khususnya di bidang perlindungan pengelolaan

lingkungan hidup atau yang dikenal sebagai Forum CSR Jawa Barat. Pada tahun 2016 Program tersebut masih bernama Citarum Bestari, kemudian pada awal tahun 2018 berganti nama menjadi program Citarum Harum. Pada tahun 2016 terdapat 3 program utama yang dilakukan oleh perusahaan, antara lain: bantuan kantong sampah, bantuan sewa truk sampah, serta bantuan penyadaran dan pengelolaan limbah domestik rumah tangga dengan harapan rumah tangga di sekitar bantaran sungai Citarum tidak membuang sampah ke Sungai.

Keterlibatan IPUS dalam Program Citarum Harum merupakan wujud kepedulian Indonesia Power sekaligus apresiasi kepada masyarakat dan pemerintah yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan atas proses bisnis Perusahaan. Indonesia Power secara konsisten melaksanakan kegiatan CSR guna meningkatkan taraf hidup masyarakat di sekitar lokasi operasi Indonesia Power. IPUS memiliki visi untuk bersahabat dengan lingkungan dan menjadikan kegiatan CSR Perusahaan sebagai bagian dari tata kelola Perusahaan dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri dan berkembang secara berkelanjutan.

Setelah bergulirnya Program Citarum Harum, terdapat dua aktivitas CSR unggulan yang dilakukan oleh Indonesia Power di sekitar waduk Saguling yang mendukung pada program Citarum Harum, yaitu program bebek Alih Profesi, dan Program Penertiban Jaring Apung. Program bebek alih profesi ini adalah program pemberdayaan masyarakat melalui usaha ternak bebek bagi masyarakat yang dahulu merupakan penambang pasir di waduk Saguling, serta Program penertiban Keramba Jaring Apung.

Kerjasama Antar Stakeholder dalam Kegiatan Penertiban Keramba Jaring Apung dan “Bebek Alih Profesi”

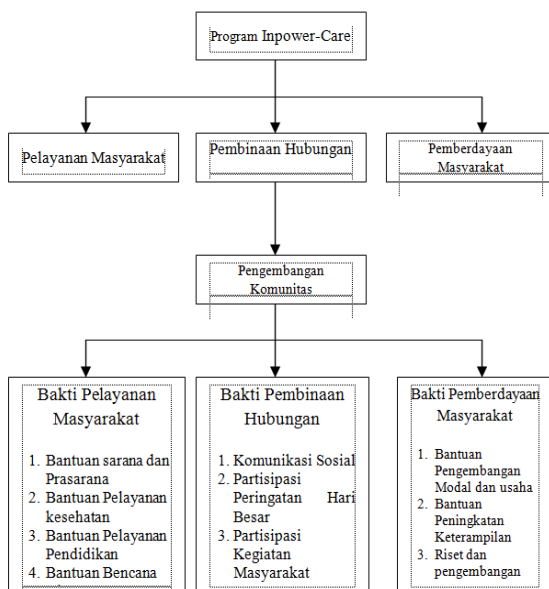
Menurut penuturan warga, sebagian besar keramba Jaring Apung untuk menangkap ikan di waduk Saguling bukan milik masyarakat lokal, namun milik masyarakat luar yang menanam modal di wilayah Saguling. Keberadaan Keramba Jaring Apung yang tidak terawat menyebabkan endapan limbah pakan ikan yang menyebabkan mesin produksi perusahaan menjadi berkarat dan laju air menjadi lebih lambat.

Penertiban Keramba Jaring Apung ini tidak bisa dilakukan oleh perusahaan secara mandiri sebab berhadapan dengan kepentingan dari berbagai pihak, antara lain masyarakat setempat maupun penanam modal. Dengan bergulirnya program Citarum harum ini, perusahaan menjadi sangat terbantu. Dengan berbekal amanat Presiden, pelaksanaan Penertiban Keramba Jaring Apung dilakukan oleh IPUS bermitra dengan Dansektor 9 dan Dinas Lingkungan Hidup.

IPUS berperan dalam merancang teknis pelaksanaan program penertiban keramba Jaring Apung serta menyediakan budget untuk operasional. Sementara teknis pelaksanaan penertiban dilakukan oleh Dansektor 9.

Tahap awal dari penertiban Keramba Jaring Apung (KJA) adalah melalui Sosialisasi pada pemerintah Desa/ Kelurahan dan kepada Warga setempat. Warga yang memiliki Jaring Apung dikumpulkan dan diberikan informasi bahwa Keramba yang tidak layak akan diangkat dan tidak boleh beroperasi lagi di waduk Saguling. KJA yang tidak memiliki ijin operasi dan tidak dikelola dengan baik akan diangkat dari waduk supaya keberadaannya tidak mencemari air waduk Saguling. Perusahaan mengemukakan bahwa KJA yang tidak terawat akan berkarat dan menyebabkan sampah maupun pasir bertumpu pada keramba. Selain itu sisa pakan ikan yang bertumpuk pada KJA menyebabkan turbin milik perusahaan menjadi lebih cepat korosif. Kerusakan turbin akan menyebabkan gangguan produksi listrik, sementara pasokan listrik dari PLTA Saguling ini diperuntukan bagi pasokan listrik nasional.

Sejalan dengan tagline InPower-Care (Indonesia Power-Community Assistance, Relation, and Empowerment), program CSR Indonesia Power berfokus pada 3 (tiga) pilar keberlanjutan Perusahaan yaitu “Pelayanan Masyarakat, Pembinaan Hubungan, dan Pemberdayaan Masyarakat. Untuk lebih jelasnya berikut gambar kerangka program CSR Indonesia Power (UBP) Saguling yaitu:



Sumber: Anuall report Indonesia Power (UBP) Saguling tahun 2017

Gambar 1. Kerangka Program CSR Indonesia Power (UBP) Saguling

Berdasarkan kepada kerangka tersebut, kedudukan Program Citarum Harum termasuk ke dalam tiga skema Pengembangan Komunitas meliputi bakti Pelayanan Kepada masyarakat, bakti pembinaan hubungan dan bakti

pemberdayaan masyarakat. sebab dalam melaksanakan program ini, Indonesia Power berupaya memberikan bantuan secara fisik maupun materil, membina hubungan dengan masyarakat, serta melakukan pemberdayaan pada bidang ekonomi kemasyarakatan.

Untuk mensukseskan program Citarum Harum, selain program penertiban Keramba Jaring Apung, Indonesia Power bersama-sama dengan masyarakat dan Dansektor 9 melakukan pembersihan dan pengangkutan sampah sehingga sampah-sampah yang ada di seputaran sector 9 terutama waduk Saguling. Keberadaan sampah akan menghambat arus air sungai yang berdampak pada putaran turbin air yang dimiliki oleh perusahaan. Kegiatan ini selain mendukung pada revitalisasi aliran sungai, juga memberikan dampak bagi kesehatan lingkungan masyarakat dan memberikan keuntungan bagi perusahaan yaitu meminimalisasi kerusakan mesin. Pihak perusahaan juga memberikan pelatihan pemanfaatan limbah sampah plastik, menyediakan tong sampah. Program ini dilakukan pada warga setempat sebagai upaya reduce-reuse-recycle. Pelatihan pemanfaatan limbah plastik menjadi aneka kerajinan dilatihkan kepada masyarakat agar mereka memiliki keterampilan mengolah limbah yang menghasilkan pendapatan.

Sementara Itu Pelaksanaan Program CSR terkait dengan Citarum Harum ini adalah program pemberdayaan masyarakat diimplementasikan dalam Program Alih Profesi dari Penggali Pasir liar menjadi peternak Itik dan Peternak Domba dibantaran Waduk Saguling. Program alih profesi ini dilakukan di wilayah ring 1 Indonesia Power, di mana masyarakat pada awalnya menjadi penggali Pasir liar yang dapat menyebabkan sedimentasi pada waduk. Program ini memiliki tujuan untuk mengganti mata pencaharian masyarakat melalui program pemberdayaan ekonomi. Program ini dikenal sebagai program “Bebek alih Profesi”.

Perusahaan Indonesia Power (UBP) Saguling membuka ruang komunikasi kepada Dansektor 9, Dinas Lingkungan Hidup serta Bapeda Jawa Barat apabila menginginkan adanya kerjasama antar stakeholder untuk pencapaian tujuan program Citarum Harum. Kerjasama tersebut disesuaikan dengan roadmap CSR yang dimiliki oleh perusahaan Indonesia Power (UBP) Saguling. Perusahaan bersedia menjadi pemberi dana ataupun mengadopsi kegiatan program Citarum Harum menjadi program CSR perusahaan jika terkait dengan road map CSR yang dimiliki oleh perusahaan.

Motif Pelaksanaan Program

Berdasarkan implementasi CSR yang dilakukan oleh Indonesia Power terkait dengan Program Citarum Harum, terdapat dua motif utama yaitu internal dan eksternal. Motif inilah yang menjadi pendorong per-

usaha menentukan bentuk CSR dan mempengaruhi bagaimana aktivitas CSR tersebut dilakukan.

Mengacu pada Brummer (1991), tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan CSR Indonesia Power dirancang untuk memperlancar kegiatan usaha terutama dalam pencapaian target produksi listrik. Dengan demikian motif internal dari perusahaan adalah kelancaran bisnis atau *profit motive*. Hal ini bukan merupakan hal yang keliru sebab berdasarkan identitasnya perusahaan memiliki tujuan utama untuk mendapatkan keuntungan. Jika proses bisnis ini terhambat akan menyebabkan terganggunya keberlanjutan perusahaan secara keseluruhan, yang pada akhirnya akan menghambat dan menghilangkan kegiatan CSR bagi masyarakat.

Selain motif untuk mendapatkan keuntungan, terdapat motif eksternal yang mendorong perusahaan untuk melaksanakan CSR sebagai tanggung jawab perusahaan sebagai entitas bisnis. Indonesia Power melaksanakan CSR berlandaskan kepedulian sosial terhadap masyarakat sekitar, khususnya masyarakat Saguling. Sesuai dengan definisi CSR yaitu "*komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan, termasuk masyarakat setempat dan masyarakat secara keseluruhan, dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan*" (WBCSD, 2000). Artinya peran dari perusahaan bukan hanya wajib untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya namun juga memiliki peran dalam peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sekitar termasuk berkontribusi dalam pembangunan.

Unit pelaksana CSR IPUS terus berinovasi dan berupaya mengintegrasikan antara kepentingan perusahaan dengan pemberdayaan masyarakat sekitar, dan berupaya turut secara aktif berkontribusi dalam program pembangunan yang dimiliki atau ditawarkan oleh pemerintah. Lambat laun para pelaksana lapangan mulai mengenali potensi dan karakter masyarakat, sehingga program menjadi lebih tepat sasaran. Hal menarik dari temuan di lapangan adalah upaya-upaya perusahaan untuk turut mensukseskan dan mendukung penuh Program Citarum Harum, sehingga program CSR diintegrasikan dan diarahkan untuk turut mensukseskan program pemerintah tersebut. Perusahaan berupaya berkontribusi untuk mencapai tujuan pembangunan pemerintah terutama jika selaras dengan tujuan dari kepentingan perusahaan itu sendiri.

SIMPULAN

Program Citarum Harum merupakan program pemerintah yang dalam pelaksanaannya menjadi tanggung jawab seluruh stakeholder dalam masyarakat. Kontribusi perusahaan dalam pelaksanaan Program Citarum Harum selaras dengan tujuan kepentingan dari perusahaan.

Perusahaan Indonesia Power mengintegrasikan aktivitas CSR perusahaan dengan Program Citarum Harum. Pada tahun 2018 Perusahaan membuat kebijakan bahwa aktivitas CSRnya difokuskan pada program Penertiban keramba Jaring Apung dan Program pemberdayaan ekonomi masyarakat bagi bekas penambang pasir ilegal (Program Bebek Alih Profesi). Perusahaan mendapatkan tawaran dari pemerintah untuk berkontribusi dalam program pembangunan di Jawa Barat khususnya Program Citarum Harum. Dalam implementasi Program, perusahaan menjalin kerjasama dengan berbagai stakeholder yaitu: pemerintah daerah terutama aparat keamanan, sebab penertiban KJA ini terkait dengan investor yang berada di luar wilayah Saguling. Perusahaan selain sebagai eksekutor lapangan juga memberikan support sarana dan prasarana bagi stakeholder lain dalam kontribusinya untuk mensukseskan Program Citarum Harum.

Profit motive menjadi pendorong dari kebijakan perusahaan untuk berkontribusi dalam program pembangunan pemerintah. Antara lain sebagai upaya agar aset perusahaan terjaga dengan baik dan target produksi bisa tercapai. Namun demikian perusahaan mencoba untuk melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan yang benar-benar memberi dampak pada peningkatan kualitas hidup manusia tanpa merugikan pihak manapun yang didasari dari kepedulian sosial. Program pelestarian sungai ini dapat terlaksana karena pemerintah dan perusahaan sama-sama memiliki kepentingan, dan memiliki aktivitas yang saling menguntungkan satu sama lain. Hal ini menyebabkan perusahaan dapat berkontribusi penuh dalam pelaksanaan program.

DAFTAR PUSTAKA

- Beder, S. (1993). *The Nature of Sustainable Development*. Newham Vic: Scribe Publication.
- Brummer J.I., (1991), *Corporate Responsibility And Legitimacy: An Inteedisciplinary Analysis*. New York : Greenwood Press.
- Elkington, J. (1997). *Cannibals with forks: The triple bottom line of 21st century*. Philadelphia: New Society.
- Freeman, RE., (1994) *The politics of stakeholder theory: Some future directions*, *Journal Business ethics quarterly*, 10, (1), 409 – 421.
- Frynas, J. G. (2009). *Beyond corporate social responsibility*. New York: Cambridge University Press.
- Frynas, J.G. & Blowfield, M (2005). Editorial: Setting new agendas – critical perspectives on corporate social responsibility in developing world. *International Affairs* 81, (3), 499 -513

- Jenkins, R. (2005). Globalization, corporate social responsibility and poverty. *International Affairs*, 80, (03), 524-540.
- Kapelus, P. (2002). Mining, corporate social responsibility and the “community”: The case of Rio Tinto, Richard Bay Minerals and the Mbonambi. *Journal of Business Ethics*, 39, (3), 275–296.
- Kapelus, R.H. (2004). Corporate social responsibility in mining in Southern Africa: Fair accountability or just greenwash?. *Development*, 47, (3), 85–92.
- Kottler, P.W. & Lee, N. (2005). Corporate social responsibility: doing the most good for your company. United State of America: Wiley
- Mapisangka, A. (2009), Implementasi CSR Terhadap Kesejahteraan Hidup Masyarakat, *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 1, (1), 39 – 47.
- Vogel, D. (2008). *The Market for Virtue: The Potential and Limits of CSR*. Washington DC: THE Brookings Institution.

DAMPAK ERUPSI GUNUNG SINABUNG TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI PETANI HORTIKULTURA DI KABUPATEN KARO

Hotden Leonardo Nainggolan,¹ Albina Ginting,² Jongkers Tampubolon,³
Johndikson Aritonang,⁴ dan Meiliani Hutagalung⁵

^{1234*} Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian, Universitas HKBP Nommensen

⁵ Alumni Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian, Universitas HKBP Nommensen

Jl. Sutomo No. 4A Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia

E-mail: hotdenleonardo76@gmail.com

ABSTRAK. Penelitian bertujuan mengetahui dampak erupsi Gunung Sinabung terhadap kondisi sosial ekonomi petani hortikultura di Kabupaten Karo. Metode analisis data dengan skala *semantic differential* dan deskriptif. Berdasarkan penelitian disimpulkan; a) erupsi menyebabkan memburuknya fasilitas umum meliputi; akses terhadap air bersih, akses energi listrik, layanan kesehatan serta pelayanan rumah ibadah, anak-anak petani terkendala dalam melanjutkan pendidikan. b) petani mengalami keterbatasan dalam mengakses pinjaman untuk pembiayaan usahatani, c) mobilitas pengungsi yang tinggi mengakibatkan menurunnya penawaran tenaga kerja, d) erupsi menyebabkan terjadinya peningkatan rata-rata biaya produksi per petani; usahatani wortel naik 23,01%, usahatani cabai naik 63,60% dan tomat naik 79,86%, e) erupsi mengakibatkan penurunan rata-rata pendapatan per petani; usahatani kol turun 18,34%, usahatani tomat turun 36,31% dan usahatani cabai turun 44,21%. Berdasarkan penelitian disarankan; a) pemerintah harus membantu petani dalam penyediaan; bibit unggul bersertifikat, pupuk subsidi, bantuan modal usahatani dan sarana produksi, b) pemerintah harus melakukan pelatihan dan penyuluhan untuk mengoptimalkan penggunaan faktor-faktor produksi usahatani, c) pemerintah harus melakukan perbaikan fasilitas-fasilitas umum yang mendukung kegiatan usahatani seperti; saluran irigasi, jalan-jalan kesentra usahatani yang telah rusak, d) pemerintah harus melakukan perbaikan atas fasilitas sosial yang mengalami kerusakan seperti; sarana dan prasarana sekolah dan rumah ibadah.

Kata kunci: erupsi, ekonomi, petani, pendapatan, sosial.

IMPACT OF ERUPTION MOUNT SINABUNG ON SOCIO-ECONOMIC CONDITION OF HORTICULTURE FARMERS IN KARO REGENCY

ABSTRACT. The study aims to determine the impact of the eruption of Mount Sinabung on the socio-economic conditions of horticulture farmers in Karo Regency. Methods of data analysis with *semantic differential* and descriptive scales. Based on the research concluded; a) eruption causes worsening of public facilities including; access to clean water, access to electricity, health services and services to houses of worship, children of farmers are constrained in continuing their education. b) farmers experience limitations in accessing loans to finance farming, c) high mobility of refugees resulting in decreased labor supply, d) eruption causes an increase in average production costs per farmer; carrot farming increased 23.01%, chilli farming increased 63.60% and tomatoes increased 79.86%, e) eruption resulted in a decrease in average income per farmer; cabbage farming fell 18.34%, tomato farming fell 36.31% and chilli farming dropped 44.21%. Based on the research suggested; a) the government must assist farmers in the supply; certified superior seeds, subsidized fertilizer, farm capital assistance and production facilities, b) the government must conduct training and counseling to optimize the use of farming production factors, c) the government must make improvements to public facilities that support farming activities such as; irrigation canals, farm centers that have been damaged, d) the government must make improvements to social facilities that have been damaged such as; school facilities and infrastructure and places of worship.

Key words: eruption, economy, farmers, income, social.

PENDAHULUAN

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang mampu memulihkan kondisi perekonomian suatu wilayah. Sektor pertanian berperan sebagai penghasil bahan pangan, sumber bahan baku industri, penyerap tenaga kerja serta sebagai penghasil devisa dan berperan penting dalam menopang pilar perekonomian suatu wilayah. Ginting *dkk* (2015) menyampaikan sektor pertanian memiliki peran strategis bagi pengembangan perekonomian di Kabupaten Karo. Daerah ini merupakan salah satu sentra produksi komoditi hortikultura di Propinsi Sumatera Utara dan berperan sebagai pemasok (*supplier*) pada beberapa

kota di Sumatera Utara, seperti; Kota Medan, Pematang Siantar, Binjai hingga Pekanbaru dan Pulau Jawa.

Erupsi Gunung Sinabung yang terjadi sejak tahun 2010 berdampak pada pengembangan komoditi hortikultura sebagai usahatani andalan di Kabupaten Karo bahkan erupsi tersebut memberikan dampak negatif bagi fasilitas fisik dan pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Erupsi juga menyebabkan penurunan luas panen dan produksi usahatani hortikultura yang dibudidayakan masyarakat di Kabupaten Karo.

Bencana erupsi menyebabkan stagnasi pertumbuhan ekonomi, melemahnya hubungan sosial, meningkatnya angka kemiskinan dan hilangnya mata pencaharian

masyarakat (Olshansky and Chang, 2009) bahkan erupsi menghancurkan sistem infrastruktur dan fasilitas sosial sehingga perlu tindakan perbaikan untuk pemulihan ekonomi dengan peningkatan produktivitas usahatani.

Johrendt (2007) menyampaikan letusan vulkanik di Guatemala, memberikan dampak buruk bagi kondisi pertanian di wilayah itu, tanaman sereal, gandum dan tanaman jagung mengalami kerusakan berat akibat tutupan abu vulkanik. Abu vulkanik yang jatuh menghambat pertumbuhan vegetatif tanaman sehingga mempengaruhi produksi usahatani. Pada radius yang terdekat dengan letusan gunung api, abu vulkanik mengubur tanaman dan mengubah karakteristik tanah sehingga menurunkan produksi tanaman.

Hutabarat (2014) menyampaikan akibat erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, terjadi penurunan produktifitas lahan dan kerusakan komoditi pertanian serta menyebabkan terjadinya fluktuasi harga produksi (*output*) di tingkat petani. Data BPS Kabupaten Karo (2016) menunjukkan perkembangan luas panen (ha) dan produksi (ton) usahatani hortikultura di Kecamatan Simpang Empat mengalami perubahan. Tahun 2010 luas panen komoditi tomat tercatat 42 ha, kemudian tahun 2012 menjadi 11 ha atau turun 76,6% dari tahun sebelumnya. Demikian juga dengan luas panen cabai, wortel dan kentang. Tahun 2010 luas panen komoditi wortel adalah 1.216 ha dan mengalami penurunan 5,1% tahun 2011 menjadi 1.154 ha, kemudian tahun 2014 menjadi 1,125 ha atau turun 7,0% dari tahun 2013.

Disamping perubahan luas panen, data BPS Kabupaten Karo (2016) juga menunjukkan adanya perubahan produksi usahatani hortikultura di Kecamatan Simpang Empat. Tahun 2010 produksi usahatani tomat tercatat 863 ton, kemudian tahun 2012 menjadi 219 ton atau turun 74,6% dari tahun sebelumnya. Demikian halnya dengan produksi usahatani cabai, wortel dan kentang. Tahun 2010 produksi usahatani wortel 23.347 ton dan mengalami penurunan 5,1% tahun 2011 menjadi 22.157 ton. Kemudian tahun 2014 menjadi 21.600 ton atau turun 7,0% dari tahun 2013.

Produksi usahatani kol juga mengalami fluktuasi sejak terjadinya erupsi Gunung Sinabung. Data BPS Kabupaten Karo (2016) menunjukkan tahun 2010 produksi usahatani kol tercatat 41.904 ton, kemudian naik 0,9% menjadi 42.300 ton pada tahun 2012. Dan tahun 2013 mengalami penurunan 7,4% menjadi 40.500 ton dari tahun 2012 dan mengalami penurunan 0,2% dari 2013 menjadi 40.428 pada tahun 2014.

Erupsi Gunung Sinabung yang terjadi mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat dan perekonomian wilayah Kabupaten Karo. Sektor pertanian memiliki kontribusi yang signifikan yaitu 60-70% bagi pembentukan produk

domestik bruto (PDRB) Kabupaten Karo (BPS Karo Dalam Angka, 2015). Erupsi Gunung Sinabung secara umum telah menyebabkan gangguan pada aspek sosial (morfologi sosial) yang didasarkan atas kondisi lingkungan (sifat kepemilikan lahan, kondisi iklim, penentuan tanaman pertanian berdasarkan potensi komoditas pertanian) merupakan bentuk kehidupan ekonomi sosial masyarakat (Sutopo, 2017) akibat terjadinya erupsi. Serta dampak ekonomi secara khusus bagi masyarakat yang menggantungkan aktivitas ekonominya dari usahatani hortikultura, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dampak erupsi Gunung Sinabung terhadap kondisi sosial ekonomi petani hortikultura di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo.

METODE

Penelitian dilakukan di Kecamatan Simpang Empat Kawasab Gunung Sinabung Kabupaten Karo. Lokasi penelitian ditentukan secara sengaja (*purposive*) (Soekartawi, 1995), disamping karena kecamatan ini merupakan lokasi pertanian yang potensial bagi pengembangan usahatani hortikultura yang berada di kawasan Gunung Sinabung.

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei s/d Agustus 2017 di Kecamatan Simpang Empat. Sampel dalam penelitian adalah masyarakat yang mengelola usahatani hortikultura yang berada di Kecamatan Simpang Empat sebanyak 30 responden yang ditentukan secara *purposive sampling* dari 4.748 kk populasi petani hortikultura (BPS Karo Dalam Angka, 2016) di wilayah penelitian.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari lapangan dengan teknik wawancara dengan responden. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Karo, dan publikasi resmi lainnya yang berkaitan.

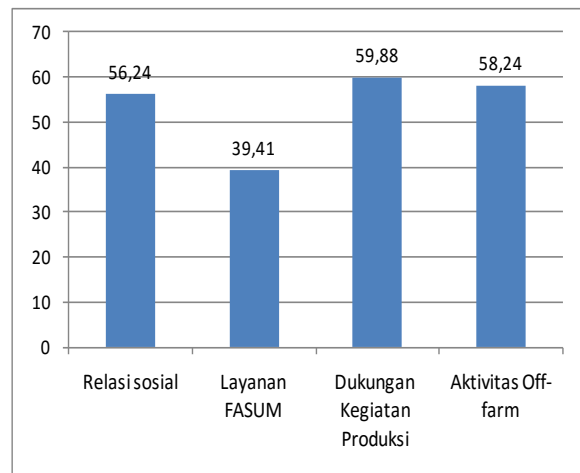
Data yang diperoleh dianalisis untuk mengetahui dampak erupsi Gunung Sinabung terhadap kondisi sosial dan ekonomi petani hortikultura. Untuk mengetahui dampak erupsi Gunung Sinabung terhadap aspek sosial dianalisis dengan menggunakan skala *semantic differential* (dengan nilai skor 1-100). Prihadi (2007) mengatakan *semantic differential* merupakan salah satu bentuk instrumen pengukuran yang berbentuk skor (skala) yang dapat digunakan untuk mengukur reaksi terhadap stimulus dan konsep-konsep yang dapat disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat. Kemudian untuk mengetahui dampak erupsi Gunung Sinabung terhadap aspek ekonomi adalah dengan metode deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Erupsi Gunung Sinabung Terhadap Kondisi Sosial Petani

Erupsi Gunung Sinabung yang terjadi tahun 2010 menimbulkan berbagai dampak terhadap masyarakat sekitar, khususnya petani hortikultura di Kecamatan Simpang Empat yang berada di kawasan Gunung Sinabung. Hasil wawancara dengan 30 petani responden yang mengelola usahatani hortikultura yaitu; komoditi wortel, kol, tomat dan cabai, diketahui erupsi Gunung Sinabung menimbulkan berbagai dampak negatif bagi kondisi sosial petani yang meliputi aspek; a) relasi sosial, b) layanan fasilitas umum (FASUM) bagi masyarakat petani, c) dukungan kegiatan produksi pertanian, d) *income generating* melalui aktivitas *off farm*, yang ditunjukkan dengan nilai skor (dalam skala 1–100) pada Tabel 1.

Tabel 1 menunjukkan erupsi Gunung Sinabung memberikan dampak terburuk bagi kondisi sosial masyarakat petani hortikultura dalam hal aspek layanan fasilitas umum (FASUM), dimana petani sebagai responden memberikan rata-rata skor 39,41 atas layanan fasilitas ini. Erupsi Gunung Sinabung juga berdampak buruk bagi relasi sosial dengan nilai skor 56,24, dan disusul dengan *income generating* melalui aktifitas *off farm* serta dukungan kegiatan produksi dengan skor masing-masing atas aspek ini adalah 58,24 dan 59,88. Untuk lebih jelasnya tentang dampak erupsi Gunung Sinabung terhadap kondisi sosial petani di Kecamatan Simpang Empat dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Grafik skor kondisi sosial petani hortikultura (relasi sosial, layanan fasilitas umum, dukungan kegiatan produksi, aktivitas *off farm*) akibat erupsi Gunung Sinabung.

Dampak Erupsi Terhadap Layanan Fasilitas Umum (FASUM)

Hasil penelitian pada Tabel 1 menunjukkan bahwa erupsi Gunung Sinabung menyebabkan terjadinya kerusakan terhadap fasilitas fisik dilokasi penelitian. Analisis data menunjukkan masyarakat petani di Kecamatan Simpang Empat terkendala dalam mengakses layanan fasilitas umum (FASUM) akibat erupsi. Tabel 1 menjelaskan erupsi Gunung Sinabung menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat di daerah penelitian yaitu rusaknya sarana dan prasarana fisik yang sangat

Tabel 1. Dampak erupsi Gunung Sinabung terhadap kondisi sosial petani hortikultura di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo.

No	Indikator kondisi sosial petani hortikultura di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo	Nilai skor berdasarkan skala <i>semantic differential</i> (antara 1-100).	Kondisi
1	Layanan fasilitas umum (FASUM)	39,41	<i>buruk</i>
	• Akses air bersih	35,29	<i>buruk</i>
	• Akses listrik (PLN)	38,24	<i>buruk</i>
	• Layanan kesehatan	31,18	<i>buruk</i>
	• Fasilitas pendidikan	25,88	<i>buruk</i>
	• Layanan rumah ibadah	66,47	<i>cukup baik</i>
2	Relasi sosial	56,24	<i>buruk</i>
	• Komunikasi antar tetangga	75,29	<i>baik</i>
	• Komunikasi antar kerabat	80,00	<i>baik</i>
	• Kegiatan adat istiadat	38,24	<i>buruk</i>
	• Aktivitas keagamaan	52,94	<i>buruk</i>
	• Aktifitas organisasi (lembaga kemasyarakatan)	34,71	<i>buruk</i>
3	<i>Income generating</i> melalui aktivitas <i>off farm</i>	58,24	<i>buruk</i>
	• Perjalanan ke tempat kerja (usahatani)	64,12	<i>cukup baik</i>
	• Ketersediaan pekerjaan <i>off farm</i>	47,65	<i>buruk</i>
	• Akses terhadap informasi kerja	56,47	<i>buruk</i>
	• Jumlah hari kerja <i>off farm</i>	66,47	<i>cukup baik</i>
	• Pendapatan dari kegiatan <i>off farm</i>	56,47	<i>buruk</i>
4	Dukungan kegiatan produksi	59,88	<i>buruk</i>
	• Ketersediaan sarana produksi	68,82	<i>cukup baik</i>
	• Ketersediaan tenaga kerja upahan	42,94	<i>buruk</i>
	• Akses pinjaman modal (kredit)	25,88	<i>buruk</i>
	• Informasi harga produksi	72,35	<i>baik</i>
	• Pemasaran hasil pertanian	89,41	<i>baik</i>

Sumber : Data Primer, diolah (Tahun 2018).

Keterangan: skor < 60 = buruk; skor 61-70 = cukup baik; skor > 71 = baik.

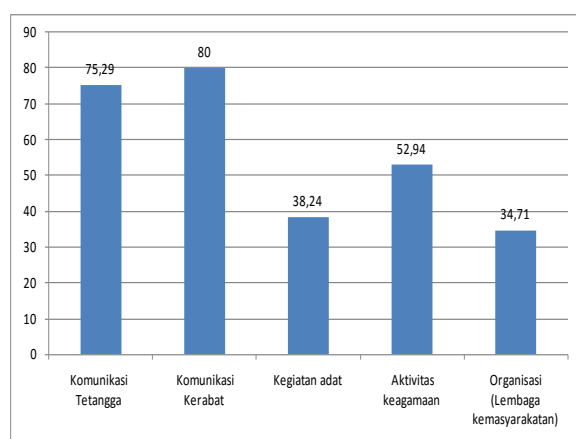
penting bagi aktifitas masyarakat dan keluarganya serta mendukung kegiatan usahatani dan pengembangan ekonomi masyarakat di Kecamatan Simpang Empat.

Kondisi yang paling buruk adalah rusaknya fasilitas fisik bidang pendidikan yang ditunjukkan dengan nilai skor 25,88, hal ini menyebabkan terganggunya akses bagi anak-anak keluarga petani untuk mendapatkan pendidikan, sebab pendidikan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia tidak terkecuali di daerah pedesaan.

Tabel 1 juga menunjukkan erupsi yang terjadi berdampak buruk bagi layanan fasilitas kesehatan, dengan nilai skor sebesar 31,18, kondisi ini menyebabkan layanan kesehatan bagi masyarakat menjadi menurun. Kemudian layanan air bersih juga terdampak erupsi sehingga akses masyarakat terhadap air bersih menjadi sangat terbatas yang ditunjukkan dengan nilai skor 35,29. Akses masyarakat terhadap listrik dari perusahaan listrik negara (PLN) juga mengalami keterbatasan akibat rusaknya jaringan listrik dan adanya keraguan pemerintah untuk memperbaiki sebab erupsi tidak dapat dipastikan kapan berakhir, yang ditunjukkan dengan nilai skor 38,24. Demikian dengan fasilitas rumah ibadah turut mengalami dampak akibat terjadinya erupsi dengan nilai skor yang diberikan petani responden sebesar 66,47.

Dampak Erupsi Terhadap Aspek Relasi Sosial

Hasil analisis data sebagaimana pada Tabel 1, menunjukkan bahwa erupsi Gunung Sinabung berdampak buruk bagi aspek relasi sosial sebagai salah satu indikator kondisi sosial petani hortikultura di daerah penelitian dengan nilai skor 56,24 (dalam skala 1-100) dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Grafik skor aspek relasi sosial (komunikasi antar tetangga dan kerabat, kegiatan adat, aktivitas keagamaan, organisasi/ lembaga kemasyarakatan) akibat erupsi Gunung Sinabung.

Gambar 2 menunjukkan dampak erupsi Gunung Sinabung terhadap petani hortikultura pada aspek relasi sosial. Dampak yang paling buruk adalah bidang organisasi

sosial/ lembaga kemasyarakatan seperti; kegiatan gotong royong menjadi terbatas, aktifitas koperasi usaha tani (*credit union*) terhenti, yang ditunjukkan dengan nilai skor 34,71.

Tabel 1 juga menunjukkan bahwa erupsi Gunung Sinabung juga berdampak negatif terhadap aktivitas adat-istiadat masyarakat setempat. Erupsi yang terjadi menyebabkan penurunan aktifitas adat istiadat sebagai salah satu aspek penting dalam hal relasi sosial yang ditunjukkan dengan dengan nilai skor 38,24. Demikian juga dengan aktifitas keagamaan juga terpengaruh akibat terjadinya erupsi dengan nilai skor 52,94.

Sementara dalam hal komunikasi antar tetangga berjalan dengan baik dengan skor 75,29 demikian juga halnya dengan komunikasi dengan kerabat berlangsung dengan baik yang ditunjukkan dengan nilai skor 80, hal ini menunjukkan pasca erupsi Gunung Sinabung kedua aspek ini relatif berjalan dengan baik ditengah-tengah masyarakat.

Dampak Erupsi Terhadap *Income Generating* Melalui Aktifitas *off Farm*

Hasil analisis data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa erupsi Gunung Sinabung juga berdampak buruk pada *income generating* melalui aktivitas *off farm* sebagai salah satu indikator kondisi sosial petani hortikultura di daerah penelitian dengan nilai skor 58,24.

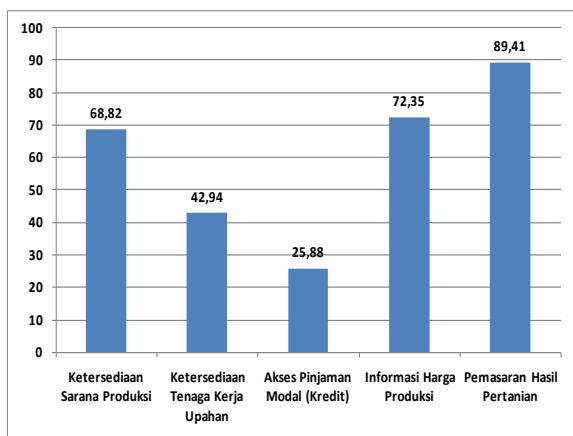
Tabel 1 menunjukkan bahwa *income generating* melalui kegiatan *off farm* yang merupakan fenomena umum di komunitas masyarakat tani di Kabupaten Karo, juga terkena dampak negatif erupsi Gunung Sinabung. Hasil penelitian menunjukkan ketersediaan pekerjaan *off farm* semakin langka akibat terjadinya erupsi yang ditunjukkan dengan nilai skor sebesar 47,65. Demikian juga dengan akses terhadap informasi kerja dan pendapatan petani dari kegiatan *off farm* semakin berkurang dengan masing-masing nilai skor 56,47. Sulitnya mendapatkan informasi tentang pekerjaan *off farm* selanjutnya bermuara pada berkurangnya jumlah hari kerja, hal tersebut menyebabkan pendapatan petani dari kegiatan *of farm* menjadi kecil.

Dampak Erupsi Terhadap Dukungan Kegiatan Produksi Usahatani

Hasil penelitian sebagaimana pada Tabel 1, menunjukkan erupsi Gunung Sinabung berdampak negatif atas dukungan kegiatan produksi pertanian sebagai salah satu indikator kondisi sosial petani hortikultura di daerah penelitian dengan nilai skor 59,88 (dalam skala 1-100), hal ini menunjukkan kegiatan produksi pertanian dikategorikan menurun sebagaimana pada Gambar 3.

Gambar 3 menunjukkan adanya gangguan erupsi Gunung Sinabung terhadap aktivitas usahatani di lokasi penelitian. Dampak yang paling buruk terjadi pada aspek

akses pinjaman modal (kredit) pembiayaan usaha tani masyarakat dengan nilai skor 25,88, hal ini mengindikasikan sumber pendanaan petani untuk mengembangkan usaha taninya yang berasal dari lembaga keuangan non-formal juga mengalami dampak negatif akibat terjadinya erupsi Gunung Sinabung.



Gambar 3. Grafik skor dukungan kegiatan produksi pertanian (ketersediaan sarana, tenaga kerja upahan, akses pinjaman, informasi harga dan pemasaran hasil pertanian) akibat erupsi Gunung Sinabung.

Tabel 1 menunjukkan bahwa erupsi mempengaruhi ketersediaan tenaga kerja di lokasi penelitian yang ditunjukkan dengan nilai skor 42,94. Terbatasnya ketersediaan tenaga kerja tersebut disebabkan karena masyarakat mengungsi ke tempat saudara/ famili atau mencari lokasi yang aman sesuai dengan rekomendasi Pemerintah Kabupaten Karo dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) setempat. Kondisi ini mengakibatkan menurunnya penawaran tenaga kerja sebagai buruh tani, yang mengakibatkan sulitnya mendapatkan tenaga kerja upahan. Sedangkan aspek informasi harga dan pemasaran hasil produksi pertanian relatif terhindar dari gangguan yang ditunjukkan dengan nilai skor masing-masing 72,35 dan 89,41.

Hasil penelitian pada Tabel 1 menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonomi petani dengan berbagai indikator diantaranya; terganggunya layanan fasilitas umum, terganggunya fasilitas pendidikan dan kesehatan, terganggunya relasi sosial, tidak efektifnya aspek kelembagaan, terganggunya kegiatan adat-istiadat masyarakat dan kerohanian, terbatasnya akses pinjaman modal usaha, serta terbatasnya ketersediaan pekerjaan *off farm* merupakan akibat dari terjadinya erupsi Gunung Sinabung di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo, hal ini sesuai dengan penelitian Rahayu (2014) menyatakan bahwa erupsi gunung berapi dapat dikatakan menyentuh semua lapisan meskipun tidak secara langsung, akan tetapi dampaknya meluas baik dari segi ekonomi, pertanian, peternakan, pemukiman, kesehatan dan pendidikan.

Penelitian Hafni (2016) di Desa Suka Meriah Kecamatan Payung Kabupaten Karo menyatakan erupsi

Gunung Sinabung berdampak negatif bagi petani, yaitu mereka mengalami permasalahan sosial menyangkut kesulitan untuk mendapatkan tempat tinggal, sementara bantuan perumahan yang diberikan BNPB tidak tepat sasaran. Sterling (2015) menyampaikan erupsi Gunung Saint Helens memberikan dampak sosial bagi masyarakat setempat, pada saat erupsi terjadi, lima puluh tujuh orang masyarakat tewas akibat terjadinya letusan.

Sterling (2015) menyatakan letusan Gunung Saint Helens yang terjadi merupakan salah satu letusan terbesar yang terjadi di Amerika, sehingga memberikan efek jangka pendek dan jangka panjang terhadap kondisi masyarakat. Erupsi yang terjadi juga menyebabkan berkurangnya kunjungan wisatawan di daerah tersebut, sehingga kinerja sektor pariwisata terganggu. Penelitian Ayala (2015) juga menyampaikan letusan gunung berapi yang terjadi di beberapa negara seperti; Islandia, Italia dan Yunani secara signifikan berdampak kepada kondisi masyarakat bahkan kondisi pemerintahan yaitu mempengaruhi sekitar 10 juta wisatawan dan menyebabkan kerugian mencapai US\$ 1,7 milyar di wilayah Eropah. Letusan gunung berapi yang menyemburkan awan panas dan gas mengganggu penerbangan dan abu yang jatuh serta aliran lahar panas dan lava dapat menyebabkan kerusakan lingkungan serta tanaman dan pepohonan pada lokasi terjadinya gempa.

Dampak Erupsi Gunung Sinabung Terhadap Kondisi Ekonomi Petani

Dampak Erupsi Terhadap Rata-rata Luas Panen Usahatani

Selain dampak sosial, erupsi Gunung Sinabung juga memberikan dampak negatif bagi kondisi ekonomi petani di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo.

Hasil wawancara dengan 30 petani responden yang mengelola usahatani hortikultura menunjukkan bahwa erupsi Gunung Sinabung berdampak secara ekonomi bagi petani yang diukur dengan menggunakan indikator; a) rata-rata luas panen usahatani, b) rata-rata produksi usahatani, c) tingkat penerimaan rata-rata, d) biaya produksi usahatani, e) tingkat pendapatan petani, f) tingkat efisiensi usahatani (dengan indikator R/C) hortikultura, sebagaimana pada Tabel. 2.

Tabel 2 menunjukkan dampak yang paling buruk akibat erupsi Gunung Sinabung terjadi pada usahatani tomat. Berdasarkan hasil analisis data diketahui sebelum erupsi, rata-rata luas panen usahatani tomat per petani adalah 0,35 ha dan setelah erupsi rata-rata luas panen turun 4,3% menjadi 0,34 ha per petani. Erupsi juga berdampak buruk terhadap usahatani cabai, rata-rata luas panen cabai per petani sebelum terjadinya erupsi adalah 0,29 ha dan setelah erupsi terjadi penurunan 3,5% menjadi 0,28 ha.

Tabel 2 juga menunjukkan terjadinya penurunan rata-rata luas panen komoditi wortel dan komoditi

Tabel 2. Dampak erupsi Gunung Sinabung terhadap kondisi ekonomi petani hortikultura di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo.

No	Indikator kondisi ekonomi petani hortikultura di daerah penelitian	Sebelum erupsi Gunung Sinabung	Setelah erupsi Gunung Sinabung	Perubahan (%)
1	Rata-rata luas panen (ha) per petani:			
	• Usahatani wortel	1,08 ha	1,05 ha	(-1,9 %)
	• Usahatani kol	1,14 ha	1,13 ha	(-0,9 %)
	• Usahatani tomat	0,35 ha	0,34 ha	(-4,3 %)
	• Usahatani Cabai	0,29 ha	0,28 ha	(-3,5 %)
2	Rata-rata produksi (ton) per petani:			
	• Usahatani wortel	20,47 ton	18,48 ton	(-9,72 %)
	• Usahatani kol	44,79 ton	42,57 ton	(-4,95 %)
	• Usahatani tomat	9,77 ton	8,97 ton	(-8,19 %)
	• Usahatani Cabai	2,45 ton	2,37 ton	(-3,26 %)
3	Rata-rata biaya produksi (Rp.Juta/ha) per petani:			
	• Usahatani wortel	Rp. 24,89 juta	Rp. 30,61 juta	23,01 %
	• Usahatani kol	Rp. 27,08 juta	Rp. 43,08 juta	59,08 %
	• Usahatani tomat	Rp. 9,93 juta	Rp. 17,87 juta	79,86 %
	• Usahatani Cabai	Rp. 8,86 juta	Rp. 14,49 juta	63,60 %
4	Rata-rata penerimaan (Rp. Juta) per petani:			
	• Usahatani wortel	Rp. 60,38 juta	Rp. 24,51 juta	(-9,72 %)
	• Usahatani kol	Rp. 156,77 juta	Rp. 149,00 juta	(-4,95 %)
	• Usahatani tomat	Rp. 41,03 juta	Rp. 37,67 juta	(-8,19 %)
	• Usahatani Cabai	Rp. 23,28 juta	Rp. 22, 54 juta	(-3,17 %)
5	Rata-rata pendapatan (Rp. Juta) per petani:			
	• Usahatani wortel	Rp. 35,49 juta	Rp. 23, 90 juta	(-32,65 %)
	• Usahatani kol	Rp. 129,71 juta	Rp. 105, 92 juta	(-18,34 %)
	• Usahatani tomat	Rp. 31,10 juta	Rp. 19,81 juta	(-36,31 %)
	• Usahatani Cabai	Rp. 14,42 juta	Rp. 8,04 juta	(-44,21 %)
6	Rata-rata tingkat efisiensi usahatani (berdasarkan nilai R/C) per petani:			
	• Usahatani wortel	1,43	0,78	(-42,26 %)
	• Usahatani kol	4,79	2,46	(-48,71 %)
	• Usahatani tomat	3,13	1,11	(-64,59 %)
	• Usahatani Cabai	1,63	0,55	(-69,90 %)

Sumber: Data Primer, diolah (Tahun 2018).

kol per petani, sebelum erupsi Gunung Sinabung rata-rata luas panen usahatani wortel 1,08 ha dan kol 1,14 ha per petani. Terjadinya erupsi menyebabkan terjadinya penurunan rata-rata luas panen komoditi wortel 1,9% dan komoditi kol sebesar 0,9% menjadi 1,06 ha komoditi wortel per petani dan 1,13 ha komoditi kol per petani. Hal yang sama Wisnabrata (2019) menyampaikan bahwa erupsi yang terjadi bahkan mengakibatkan kerusakan lahan pertanian akibat dampak abu vulkanik Gunung api Sinabung. Lahan pertanian yang terpapar abu vulkanik pasca erupsi mengalami kerusakan yang sangat signifikan sehingga berdampak pada aspek ekonomi petani.

Dampak Erupsi Terhadap Rata-rata Produksi Usahatani

Hasil analisis data pada Tabel 2 menunjukkan erupsi Gunung Sinabung memberikan dampak pada kondisi ekonomi petani yang dapat dilihat melalui indikator rata-rata produksi per petani. Berdasarkan hasil analisis data diketahui dampak yang paling buruk terjadi pada usahatani wortel dan tomat. Rata-rata produksi usahatani wortel per petani sebelum erupsi adalah 20,47 ton dan turun hingga 9,72% setelah erupsi dengan rata-rata produksi menjadi 18,48 ton per petani. Demikian juga dengan usahatani

tomat, hasil analisis data menunjukkan rata-rata produksi usahatani tomat sebelum erupsi adalah 9,77 ton per petani dan setelah erupsi menjadi 8,97 ton atau mengalami penurunan hingga 8,19% per petani.

Demikian juga dengan usahatani kol dan cabai juga mengalami dampak negatif akibat erupsi Gunung Sinabung. Hasil analisis data pada Tabel 2, menunjukkan rata-rata produksi usahatani kol sebelum terjadinya erupsi adalah 44,79 ton dan mengalami proses penurunan sebesar 4,95% setelah erupsi menjadi 42,57 ton, kemudian rata-rata produksi usahatani cabai per petani sebelum erupsi adalah 2,45 ton dan setelah erupsi menjadi 2,37 ton atau turun 3,26%,

Dampak Erupsi Terhadap Rata-rata Penerimaan Petani

Hasil analisis data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa erupsi Gunung Sinabung juga berdampak buruk bagi kondisi ekonomi petani hortikultura di daerah penelitian dan dapat dilihat berdasarkan rata-rata penerimaan usahatani hortikultura per petani sebagai salah satu indikator.

Analisis data menunjukkan dampak terburuk terjadi pada penerimaan usahatani wortel. Sebelum terjadinya erupsi rata-rata penerimaan usahatani wortel per petani

adalah Rp. 60,38 juta, kemudian mengalami penurunan 9,72% akibat terjadinya erupsi dengan nilai rata-rata penerimaan Rp. 54,51 juta per petani. Hal yang sama juga terjadi pada petani yang mengusahakan komoditi tomat. Analisis data menunjukkan, sebelum terjadinya erupsi penerimaan rata-rata usahatani tomat adalah Rp. 41,03 juta per petani dan akibat erupsi penerimaan rata-rata turun sebesar 8,19 % menjadi Rp. 37,67 juta per petani.

Tabel 2 menunjukkan erupsi juga berdampak buruk bagi petani yang mengelola usahatani cabai. Hasil analisis data menunjukkan bahwa rata-rata penerimaan usahatani cabai sebelum erupsi adalah Rp. 23,28 juta per petani, dan akibat terjadinya erupsi, rata-rata penerimaan dari usahatani ini menjadi Rp. 22,53 juta per petani, artinya terjadi penurunan rata-rata penerimaan petani usahatani cabai 3,17%.

Dampak Erupsi Terhadap Rata-rata Biaya Produksi Usahatani

Hasil analisis data menunjukkan erupsi Gunung Sinabung berdampak pada peningkatan rata-rata biaya produksi usahatani hortikultura sebagai salah satu indikator kondisi ekonomi petani di daerah penelitian sebagaimana disajikan pada Tabel 2. Dampak yang paling buruk adalah terjadinya peningkatan rata-rata biaya produksi usahatani tomat dan cabai per petani. Hasil analisis data menunjukkan rata-rata biaya produksi usahatani tomat per petani sebelum erupsi adalah Rp. 9,93 juta dan mengalami peningkatan yang sangat tajam hingga 79,86% setelah erupsi menjadi Rp. 17,87 juta per petani. Kemudian rata-rata biaya produksi usahatani cabai sebelum erupsi adalah Rp. 8, 86 juta per petani dan setelah erupsi menjadi Rp. 14,49 juta per petani atau naik 63,60%.

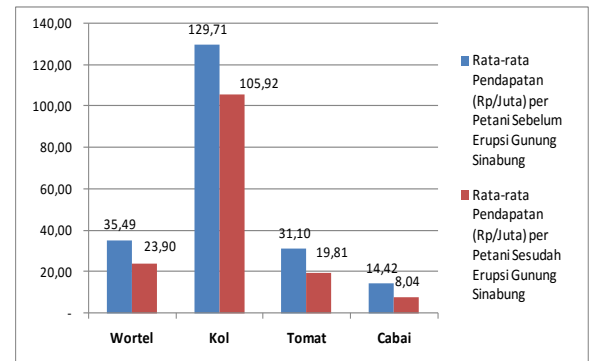
Hasil analisis data pada Tabel 2 juga menunjukkan kenaikan rata-rata biaya produksi untuk usahatani wortel 23,01% akibat erupsi Gunung Sinabung dari Rp. 24,89 juta per petani menjadi Rp. 30,61 juta.

Dampak Erupsi Terhadap Rata-rata Pendapatan Petani Hortikultura

Hasil analisis data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa erupsi Gunung Sinabung yang terjadi memiliki dampak negatif bagi kondisi ekonomi petani hortikultura di Kawasan Gunung Sinabung, hal ini dapat dilihat melalui beberapa indikator, salah satunya adalah tingkat pendapatan per petani dan untuk lebih jelasnya disajikan pada Gambar 4.

Gambar 4 menunjukkan erupsi Gunung Sinabung memiliki dampak buruk bagi kondisi ekonomi petani hortikultura di lokasi penelitian yang dilihat dengan indikator rata-rata pendapatan per petani. Hasil analisis menunjukkan dampak terburuk terjadi pada usahatani cabai. Rata-rata pendapatan dari usahatani cabai sebelum erupsi adalah Rp. 14,42 juta per petani dan mengalami

penurunan yang sangat derastis hingga 44,21% setelah erupsi dengan rata-rata pendapatan Rp. 8,04 juta per petani.



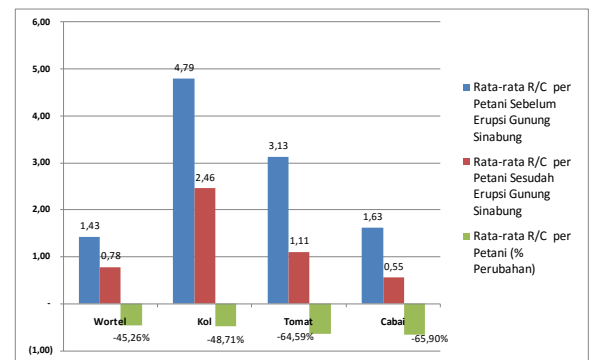
Gambar 4. Grafik rata-rata pendapatan usahatani hortikultura per petani sebelum dan sesudah erupsi Gunung Sinabung.

Tabel 2 juga menunjukkan bahwa erupsi Gunung Sinabung juga berdampak bagi petani yang mengembangkan usahatani tomat. Analisis data menunjukkan rata-rata pendapatan usahatani tomat sebelum erupsi adalah Rp. 31,10 juta per petani dan setelah erupsi mengalami penurunan 36,30% menjadi Rp. 19,81 juta per petani.

Selain berdampak bagi usahatani cabai dan tomat, erupsi Gunung Sinabung juga memberikan dampak yang serius terhadap usahatani wortel dan kol. Pendapatan rata-rata petani wortel sebelum erupsi terjadi, rata-rata pendapatan petani yang mengembangkan usahatani ini adalah 35,49 juta dan mengalami penurunan 32,65 % setelah terjadi erupsi menjadi 23,90 juta per petani. Demikian juga dengan usahatani wortel, pendapatan rata-rata sebelum erupsi adalah Rp. 129,71 juta per petani dan setelah erupsi mengalami penurunan hingga 18,34% menjadi Rp. 105,92 per petani.

Dampak Erupsi Terhadap Tingkat Efisiensi Usahatani Hortikultura

Salah satu indikator untuk menganalisis dampak erupsi Gunung Sinabung adalah tingkat efisiensi usahatani dengan melihat nilai R/C usahatani tersebut sebagaimana pada Gambar 5.



Gambar 5. Grafik tingkat efisiensi berdasarkan rata-rata R/C ratio usahatani hortikultura sebelum dan sesudah erupsi Gunung Sinabung.

Gambar 5 menunjukkan erupsi Gunung Sinabung berdampak buruk pada tingkat efisiensi usahatani hortikultura di daerah penelitian. Analisis data menunjukkan dampak terburuk terjadi pada usahatani cabai, dengan tingkat efisiensi yang mengalami penurunan drastis yang ditunjukkan dengan rata-rata R/C usahatani cabai sebelum erupsi adalah 1,63 per petani dan turun menjadi 65,90% setelah erupsi menjadi 0,55 per petani.

Tabel 2 juga menunjukkan bahwa erupsi Gunung Sinabung yang terjadi juga berdampak pada tingkat efisiensi usahatani tomat, sebelum erupsi diketahui rata-rata R/C komoditi ini adalah 3,13, dan mengalami penurunan hingga 64,59% menjadi 1,11 per petani. Demikian juga dengan tingkat efisiensi usahatani kol dan wortel juga mengalami dampak yang buruk. Tingkat efisiensi usaha tani kol yang ditunjukkan dengan rata-rata nilai R/C 4,79 per petani sebelum erupsi Gunung Sinabung dan mengalami penurunan sebesar 47,71 % dengan rata-rata nilai R/C 2,43 per petani. Kemudian komoditi wortel juga mengalami dampak negatif atas terjadinya erupsi Gunung Sinabung, hasil analisis data menunjukkan nilai rata-rata R/C komoditi ini adalah 1,43 sebelum terjadinya erupsi, kemudian setelah erupsi nilai rata-rata R/C komoditi ini mengalami penurunan 45,45% menjadi 0,78 per petani.

Hasil penelitian menunjukkan erupsi Gunung Sinabung memberikan dampak negatif bagi kondisi ekonomi petani di Kecamatan Simpang Empat, yaitu menurunnya tingkat pendapatan petani, yang diakibatkan oleh penurunan produksi dan peningkatan biaya produksi yang sangat signifikan. Nainggolan *et al.*, (2019), menyampaikan bencana erupsi Gunung Sinabung menyebabkan terjadinya penurunan luas panen dan produksi komoditi pangan seperti; padi sawah, komoditi jagung dan hortikultura. Sejak 2012-2014 lahan jagung menurun rata-rata 14,5% dan rata-rata penurunan produksi 12,4%, demikian dengan produksi usahatani jeruk turun hingga 32,4%, kondisi ini menyebabkan penurunan tingkat pendapatan petani. Khaswarina (2017) menyampaikan penurunan tingkat efisiensi usahatani berpengaruh terhadap aktivitas produksi bahkan konsumsi petani. Menurut Tain (2013) menyampaikan penurunan tingkat efisiensi usahatani dapat menyebabkan peningkatan angka kemiskinan dalam suatu wilayah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Sugeng (2014) di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah yang menunjukkan nilai ekonomi total (*total economic value*) kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) mengalami penurunan 6,15% dari Rp 7.669.888.981,12 menjadi Rp 7.197.234.952,28/ tahun.

Listya (2011) menyampaikan bencana dapat menyebabkan peningkatan inflasi atau peningkatan harga secara umum akibat kerusakan tanaman dan barang yang diproduksi oleh petani serta kerusakan sarana transportasi.

Pada sisi makro ekonomi bencana dapat menyebabkan perubahan pada struktur lapangan kerja, akibat kerusakan dan kehancuran kapasitas produksi, infrastruktur sosial dan perubahan kondisi selama proses rekonstruksi dan rehabilitasi. Sinaga (2015) juga menyampaikan akibat letusan gunung berapi, terjadi penurunan daya dukung lingkungan khususnya lahan pertanian sehingga berdampak pada penurunan produktifitas dan termasuk perencanaan tata ruang, terutama faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas lahan. Kondisi ini bahkan dapat menyebabkan pelaku aktifitas pertanian memilih untuk meninggalkan lahan pertaniannya dan memilih lokasi baru, bahkan akan beralih pada sumber penghasilan lain di luar sektor pertanian.

Penelitian lain menunjukkan terjadinya letusan gunung berapi menyebabkan penurunan kualitas dan daya dukung wilayah sehingga menghambat proses pemulihan dan pertumbuhan wilayah tersebut. Kondisi tersebut akan menimbulkan kekhawatiran bagi para pelaku aktifitas pembangunan terutama di bidang pengelolaan lahan pertanian di kawasan rawan bencana gunung berapi. Huta-barat (2014) dampak erupsi Gunung Sinabung terhadap sosial ekonomi masyarakat dirasakan melalui penurunan produktivitas lahan pertanian, kerusakan komoditi pertanian yang menyebabkan terjadinya fluktuasi harga di tingkat petani.

SIMPULAN

Kesimpulan penelitian adalah; a) erupsi Gunung Sinabung mengakibatkan memburuknya fasilitas umum meliputi; 1) akses masyarakat terhadap air bersih, 2) akses masyarakat terhadap energi listrik dari perusahaan listrik negara, 3) layanan kesehatan yang memburuk, 4) kualitas pelayanan rumah ibadah menurun, 5) anak-anak petani terkendala dalam melanjutkan pendidikan, b) Petani mengalami keterbatasan dalam mengakses pinjaman (kredit) untuk pembiayaan usaha tani, hal ini mengindikasikan sumber pendanaan usahatani dari lembaga keuangan non-formal mengalami kerugian akibat erupsi, c) Mobilitas (pengungsi) yang tinggi mengakibatkan penurunan penawaran tenaga kerja pertanian (buruh tani), sehingga kegiatan usahatani mengalami kesulitan mendapatkan tenaga kerja upahan, d) Erupsi menyebabkan terjadinya peningkatan rata-rata biaya produksi usahatani wortel 23,01% per petani, peningkatan rata-rata biaya produksi usahatani cabai 63,60% per petani, rata-rata biaya produksi usahatani tomat meningkat sampai 79,86% per petani, e) Erupsi mengakibatkan penurunan rata-rata pendapatan usahatani kol sebesar 18,34% per petani, penurunan rata-rata pendapatan usahatani tomat 36,31% per petani dan penurunan rata-rata pendapatan usahatani cabai 44,21% per petani.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kepada Fakultas Pertanian Universitas HKBP Nommensen Medan yang mendukung proses publikasi naskah ini dan kepada Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemristekdikti Republik Indonesia yang telah mendanai kegiatan penelitian (Produk Terapan) ini untuk Tahun 2017.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayala, I.A., Altan, O., Baker, D., Briceño, S., Cutter, S., Gupta, H., Holloway, A., Ismail, Z.A., Jiménez, D.V., Johnston, D., McBean, G., Ogawa, Y., Paton, D., Porio, E., Silbereisen, R., Takeuchi, K., Valsecchi, G., Vogel, C., Wu, G., & Zhai, Panmao. (2015). *Disaster risks research and assessment to promote risk reduction and management*. International Social Science Council (ISSC). ICSU-ISSCAD-Hoc Group on Disaster Risk Assessment.
- BPS. (2016). *Kabupaten Karo Dalam Angka*. Kabanjahe.
- BPS. (2015). *Kabupaten Karo Dalam Angka*. Kabanjahe.
- Ginting, A., Nainggolan, H.L., & Aritonang, J. (2015). *Analisis daya saing komoditi pertanian di Kabupaten Karo*. Hasil Penelitian. Lembaga Penelitian dan Pengabdian (LPPM). Universitas HKBP Nommensen Medan.
- Hafni, R., Lubis, L.S. (2016). Dampak erupsi Gunung Sinabung terhadap kondisi sosial ekonom petani di Desa Suka Meriah Kecamatan Payung Kabupaten Karo. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*. 16, (1), 17-31.
- Hutabarat, R.C. (2014). Dampak erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo terhadap fluktuasi harga sayur mayur. *Jurnal Saintek*, 06, (04), 83-87.
- Johrendt, B. (2007). The impact of volcanoes on Guatemala and its people. UW-L. *Journal of Undergraduate Research X*. 1-7.
- Khaswarina, S. (2017). Faktor dominan yang mempengaruhi ekonomi rumah tangga petani karet di Desa Koto Damai Kabupaten Kampar. *Sosiohumaniora*. 19, (3), 199-205.
- Listya, E.A. (2011). Dampak ekonomi makro bencana: Interaksi bencana dan pembangunan ekonomi nasional. Seminar Nasional Informatika (SEMNAS IF) ISSN: 1979-2328. Yogyakarta: UPN "Veteran".
- Nainggolan, H.L., Ginting, A., Tampubolon, J., Aritonang, J. & Saragih, J.R. (2019). Model of socio-economic recovery of farmers in erupted areas of mount Sinabung in Karo Regency. IOP Conf. Series: *Earth and Environmental Science* 314, (2019), 1-11. doi:10.1088/1755-1315/314/1/012065.
- Olshansky, R & Chang, S. (2009). Planning for disaster recovery: Emerging research needs and challenge. *Progress in Planning Journal*. 4, (72), 200-209.
- Prihadi, B. (2007). Semantic differential sebagai alat ukur respons estetik siswa. <http://staffnew.uny.ac.id/upload/131662618/penelitian/artikel+bambangpri.pdf>, diakses 20 Juli 2019.
- Rahayu., Aryanto. D.P., Komariah, Hartati. S., Syamsyiah, J., & Dewi, W.S. (2014). Dampak erupsi gunung merapi terhadap lahan dan upaya-upaya pemulihannya. *Caraka Tani-Jurnal Ilmu-ilmu Pertanian*, 29 (1), 61-72.
- Sinaga, Beatrix. I.L.J., Mariani, S., & Alida, L. (2015). Dampak ketebalan abu vulkanik erupsi Gunung Sinabung terhadap sifat biologi tanah di Kecamatan Naman Teran Kabupaten Karo (The impact of volcanic ash thickness from Sinabung Mount Eruption about the biological characteristic of the soil in the Naman Teran Sub District, Karo District). *Jurnal Online Agroekoteknologi*, 3 (3): 1159 – 1163.
- Soekartawi, (1995). Analisis Usahatani. Jakarta: Universitas Indonesia. UI Press.
- Sterling, J. (2015). Social Implication of The Eruption of Mount Sant Helens. Departmen of History. Western Oregon University.
- Sugeng, W., Sriwidodo, I., Angkung, J, & Handoyomulyo. (2014). Dampak erupsi gunung merapi terhadap kawasan taman nasional Gunung Merapi (TNGM) di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. *Jurnal SEPA*. 11, (1), 130-141.
- Sutopo, Dhanny. S. (2017). Kemiskinan di Perdesaan Dalam Tinjauan Morfologi Sosial (Studi Kasus Kemiskinan di Desa Sumber Salak Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso Jawa Timur). *Sosiohumaniora*. 19, (3), 268 – 273.
- Tain, A. (2013). Faktor dominan penyebab kemiskinan rumah tangga nelayan motor tempel di Wilayah Tangkap Lebih Jawa Timur. *Sosiohumaniora*. 15, (1), 35-44
- Wismabrata, M.H. (2019). Fakta Dampak Erupsi Gunung Sinabung, Petani Terancam Gagal Panen hingga Tanggap Darurat. Diperpanjang. [https:// regional.kompas.com/read/2019/06/13/21005871/fakta-dampak-erupsi-gunungsabung-petani-terancam-gagal-panen-hingga? page=all](https://regional.kompas.com/read/2019/06/13/21005871/fakta-dampak-erupsi-gunungsabung-petani-terancam-gagal-panen-hingga?page=all), diakses 6 Agustus 2019.

GREEN BUILDING POLICY FORMULATION IN THE MUNICIPALITY OF BANDUNG INDONESIA

Engkus

Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences,
State Islamic University Sunan Gunung Djati Bandung.
E-mail: engkus@uinsgd.ac.id

ABSTRACT. Land use that is not based on spatial planning based on green building concepts. This study aims to find out how the formulation of Bandung Mayor Regulation Number 1023 of 2016 concerning Green Buildings tested the system model (David, 1981). This study uses a qualitative approach with actual problems that occur in life (Engkus E, 2017). Policy formulation uses 5 (five) dimensions, namely input, process, output, environment, feedback. The results show that there are problems: a more complex green building policy, imposed on all buildings including housing; lack of community knowledge and understanding of the concept of green buildings, so that the community participates less; limited green building policy dissemination.

Key words: policy formulation; bandung mayor regulation; green building; community understanding.

FORMULASI KEBIJAKAN BANGUNAN HIJAU DI KOTA BANDUNG INDONESIA

ABSTRAK. Penggunaan lahan yang tidak didasarkan pada perencanaan tata ruang yang berbasis konsep bangunan hijau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana rumusan kebijakan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1023 Tahun 2016 tentang Bangunan Hijau yang diuji model sistem (David, 1981). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan masalah aktual yang terjadi dalam kehidupan (Engkus E, 2017). Perumusan kebijakan menggunakan 5 (lima) dimensi, yaitu input, proses, output, lingkungan, umpan balik. Hasil menunjukkan bahwa ada masalah: kebijakan bangunan hijau yang lebih kompleks, dikenakan pada semua bangunan termasuk perumahan; kurangnya pengetahuan masyarakat dan pemahaman tentang konsep bangunan hijau, sehingga masyarakat kurang berpartisipasi; penyebaran kebijakan bangunan hijau terbatas.

Kata kunci: perumusan kebijakan; peraturan walikota bandung; bangunan hijau; pemahaman komunitas

INTRODUCTION

Population growth in the last two centuries shows an exponential, very rapid and uncontrolled especially at the end of this century, giving rise to various kinds of problems, both problems for humans themselves and for the earth as their place of residence. Humans to make ends meet, that is by utilizing natural resources on earth. Uncontrolled development and lifestyles have increased the need for electricity, water and other resources, especially in urban areas.

In Scientific American Magazine on October 27, 2011 published a report that said that the larger population also needed more resources, starting from water, food, minerals, to energy and the availability of land for agriculture (Wilmoth, 2011). Therefore electricity production also increased tremendously while releasing CO₂ which is the biggest contribution as a greenhouse gas. Over the past hundreds of thousands of years the concentration of CO₂ in the atmosphere was almost constant at 230 ppm, but since the industrial revolution in the 18th century, it has risen sharply and is currently at the level of 400 ppm in just 150 years. This resulted in an increase in the earth's global temperature by 10 C. If the pattern of energy consumption is still as it is now, then by 2050, global temperatures will increase to 2oC,

and that will cause polar ice to melt, causing sea level rise that will sink many areas such as Manhattan in New York, Shanghai, and Mekhong river delta.

In addition, such an increase in electricity consumption can lead to petroleum scarcity. Nearly half of electricity in Indonesia comes from petroleum, and only 5% of renewable energy. Indonesia, which was once famous as a petroleum-producing country, has now become a "net importer of country oil" and has oil reserves for only 20 years, less than a generation.

Those are some of the problems caused by greed and human negligence. However, if humans can change their patterns of life then all fears of natural resource crises can be overcome. The whole world is now focused on finding solutions to various natural problems that arise. One solution is to apply the concept of green building.

This is one form of responsibility from professionals in the building industry in relation to the environmental impact it causes. Green building is a building that since planning, construction during construction and operation and maintenance during its utilization period uses natural resources to a minimum, uses the land wisely, reduces environmental impacts and creates air quality in a healthy and comfortable room. The green building concept will reduce energy consumption significantly through several passive design methods and active designs. Using the

concept of green building does not need to sacrifice comfort and productivity due to energy savings. Green building is not only saving energy but also saving water, preserving natural resources, and improving air quality and good waste management. In anticipating the clean water crisis, the concept of reducing water use has been developed by producing sanitary ware that saves water, reuse water for various purposes at the same time (reuse), recycles recycled water, and utilizes rainwater that falls on the roof building (rain water harvesting). Indonesian Engineers Association, (Subijono E, 2016).

Recognition of a building as green building is obtained after being certified based on the appraisal device (rating tools). Green Building Council Indonesia (GBCI) developed an assessment device called Greenship. Other countries that have followed the movement of green buildings also have their own rating system, for example the United States has Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), Singapore has a Green Mark, and Australia has a Green Star, a Green Building Council Indonesia (Recognition, 2018) the following in table 1.

Table 1. Green Building Value Device in Indonesia

Greenship Type	Greenship Category
1 <i>Greenship New Building</i>	1 <i>Appropriate Site Development (ASD)</i>
2 <i>Greenship Existing Building</i>	2 <i>Energy Efficiency and Conservation (EEC)</i>
3 <i>Greenship Interior Space</i>	3 <i>Water Conservation (WAC)</i>
4 <i>Greenship Homes</i>	4 <i>Material Resource and Cycle (MRC)</i>
5 <i>Greenship Neighbourhood</i>	5 <i>Indoor Air Health and Comfort (IHC)</i>
	6 <i>Building and Environment Management (BEM)</i>

Source: <http://gbcindonesia.org/>.

On 18 February 2015, the Central Government through the Ministry of Public Works and Housing established a green building policy based on Regulation Number 2 of 2015 concerning Green Buildings whose policy coverage included: (1) disseminating the Ministerial Regulation policy; (2) disseminating the Green Building Management Strategy Concept 2015-2019 focuses on strengthening local government institutions, (3) priorities are Metropolitan Cities, districts/ cities in the National Strategic Area, (4). The Central and Local Governments can be the initial motors for implementing the ministerial regulation, (5) collaborating with government strategic partners such as the Research Center and GBCI, (6) the Ministry of Public Works and Public Housing is the leading building construction sector. This policy is intended to ensure the realization of sustainable development in urban

areas. This is in line with national commitments in 2011, to reduce Green House Gase (GHG) emissions voluntarily by 26% in 2020 from Business as Usual (BAU) conditions and reach 41% if assisted by international funding support, (Equipment Indonesia Magazine) This shows Indonesia's seriousness to participate in safeguarding the life of the world as a whole, which is a real action from the goal of the state that will interfere in efforts to control the world. The Municipality of Bandung is one of the national strategic areas, which is also the first city/district in Indonesia to establish a green building policy, through the Mayor's Regulation Number 1023 concerning Green Building which was set on August 26, 2016. This policy is motivated by the density of Bandung Municipality with the increasing number of buildings, which is an improvement, but on the other hand there are also negative sides related to the environment and climate change. The Bandung Municipality Government has a target to reduce the Carbon Footprint (CO2). This regulation is led by the Office of Spatial Planning and Human Settlements, and facilitated by IFC (International Financial Corporation) which has concern for urban development throughout the world, which focuses on sustainable development especially environmentally friendly. This principle basically wants to realize environmentally friendly development, save energy, always put forward sustainable or sustainable aspects, (Mayor of Bandung Press Conference on Greetings and Expectations on the issuance of the Green Building). the following in table 2. But in the formulation of policies is still not optimal, because it is faced with several obstacles: (1) The Mayor of Bandung Regulations are still top down which is more manifesting the policies of the central government; Mayor Regulation Number 1023 of 2016 concerning Green Buildings is an embodiment of the Minister of Public Works Public Housing Regulation Number 2 of 2015 concerning Green Buildings which makes the duty of sectoral tasks of public works from the center to the regions, so that the policy formulation is based on internal manuscripts in the preparation of mayor regulations the city of Bandung with limited related institutions; (2) Community participation is still limited, and stakeholder involvement is still not optimal, both for citizens, local NGOs, other related agencies and regional institutions, and universities; in the preparation of policy formulations the mayor's regulations are usually technical in nature, with more immediate handling, so that the formulation rarely / does not involve the wider community. Program implementation is often less successful due to: low participation, the program is not well targeted because the information is less accurate, technology is not as needed, information and innovation (Banuwa & I.S, 2018).

(3) The level and capacity of regional head regulations, namely the regulations of the Mayor, are still limited, they cannot yet be more legally binding on the community as regional regulations. In accelerating the implementation of policies in technical and sectoral executors that are driven by community dynamics and the complexity of problems with the level of demand for handling urgent actions, require regulations that are formulated at the technical level, so that in addition to being more flexible these rules can be immediately used as an operational basis in implementation in the field. Therefore it is necessary to integrate development policies directed at controlling (Achdiat & M, 2017). Furthermore, complete and clear understanding, direction, and instructions are needed to be able to interpret correctly (Suyatna U, 2019). Author based on these various considerations and descriptions, then use a theoretical basis based on the complexity of the object of research with a suitable theory, namely the theory of David Easton's system model.

Table 2. Number of Customers, Connected Power and Sold Energy State Electricity Company in Bandung Municipality, 2016

Year	Customers	Connected Power (KVA)	Sold Energy (MWh)
2012	672153	1934675	3850
2013	713236	2080149	4033
2014	735446	2184155	4163
2015	806187	2287234	4091
2016	844224	2421751	4180

Source: The Statistical Agency of Bandung Municipality, 2016

Based on the data above (Pusat & Statistik, 2016), it can be seen that over the past 5 years the number of electricity users in Bandung has always increased, indicating that Bandung is a city that has more buildings, from year to year. Over the past 5 years, the average number of electricity users has increased to 43,017 users every year, with an increase in connected power of 121,769 KVA. In other words, the addition of connected power means that buildings will increase, while Bandung's land area decreases as green open space decreases, so it needs to be escorted by the mayor's regulation. The following in table 3.

Based on the data above (Pusat & Statistik, 2016), we can know that the biggest electricity user in the city of Bandung in 2016 was the type of household tariff of 772,062 users. The use of electricity by households, or especially occupancy of 1,051,625 KVA, reaches 43.5% of the total electricity consumption of Bandung Municipality in 2016. This is one reason why the Bandung Municipality Government applies the green building policy to residential. The following in table 4.

Table 3. Customers, Connected Power and PLN Sales Revenue based on Tariff Types in Bandung Municipality in 2016

No	TARIF TYPE	CUSTOMERS	POWER (Kva)	POWER SELL (Mwh)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SOCIAL	11572	111815	164
2	HOUSES	772062	1051625	1588
3	COMMERCIAL	54152	694260	1055
4	PUBLIC	3632	68270	110
5	INDUSTRY	2764	495605	1261
6	T/C/L	22	175	2
TOTAL		844224	2421751	4180

Source: The Statistical Agency of Bandung Municipality, 2016

Table 4. Data on Drinking Water Distributed by Type of Consumer in Bandung Municipality in 2016

No.	Customer Type	Distributed Drinking Water (m3)
(1)	(2)	(3)
1	Social	1212760
2	Houses	26826291
3	Government institution	6217340
4	Business	8171014
5	Industry	101042
Total 2016		42528447

Source: The Statistical Agency of Bandung Municipality, 2016

Furthermore, in terms of household drinking water consumption, it is also the largest consumer in the city of Bandung in 2016, which is as much as 26,826,291 m3, or 63.1% of all drinking water consumption in Bandung Municipality which reaches 42,528,447 m3 (Pusat & Statistik, 2016).

The Mayor of Bandung Regulation Number 1023 concerning Green Building is intended as a reference for applicants and implementing officers in fulfilling the requirements of green buildings, with the aim of realizing building management to save, maintain and use resources efficiently, (Article 2 of Bandung Mayor regulation Number 1023 Years 2016 concerning Green Building). The target is where in the next five years it is estimated that there will be more than 2.7 million square meters of buildings that have complied with the provisions in the regulation, or almost equal to 100 times the building area of satay, and in the next ten years can save more electricity from 140 thousand MWh which is equivalent to more than USD 1 million, which is half a trillion rupiah and reduces 260 tons of CO2 which is equivalent to planting 90 thousand adult mahogany trees.

In this case, the Bandung Municipality Government collaborated with IFC, part of the World Bank group in partnership with the Governments of Switzerland and Hungary. Under the Indonesia Green Building Program, IFC promotes energy and water efficiency in buildings

through the implementation of green building policies. The program is also in line with the Indonesian Government's agenda to reduce the greenhouse gas effect by 29% by 2030.

Based on the Building Construction Permit application data as of 2010, 90% of buildings in the city of Bandung are 1-4 store buildings, and 10% are above 4 floors. From the 90% figure, 80% of the land is residential and 20% of it is corporate, office and industrial buildings. The following in table 5 (Pusat & Statistik, 2016).

Table 5. Building Data in Bandung Municipality

(Based on Application for IMB from 2010-2016)		
Building 1-4 floors		Building above 4 floors
90%		10%
Occupancy	Not residential	
80%	20%	

Source: The Statistical Agency of Bandung Municipality, 2017

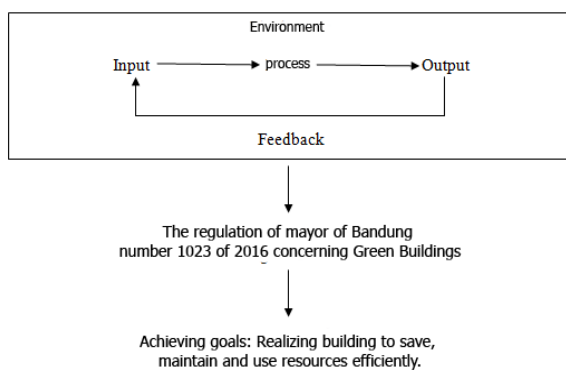
Basically the policy is an effort or action taken to solve a problem. As according to Abidin who stated that policy is a decision made by the government or an authorized institution to solve problems or realize the desired goals of the community. However, when referring to the definition of policy according to Robert R. Dye, policy is not always a real effort from the government, even the silence of the government in dealing with a problem is already a policy. (Choose the government to do or not do something, (Abidin Z, 2012). In the public policy process is the formulation of the policy. But before all, the basic thing that needs to be learned in the process of policy formulation is how policy analysts can recognize public problems that are distinguished from private problems. According to Dunn, the formulation of the problem will greatly help policy analysts to find hidden assumptions, diagnose the distribution of public problems, map out possible goals, integrate conflicting / conflicting views, and design policy opportunities that new. Therefore, according to Dunn further, there are phases that must be carried out carefully in formulating problems, so that the final result of the policy set can at least resolve the problems at hand. These phases consist of; problem search, problem definition, problem specification (problem solving), and problem sensing/problem recognition, (Agustino L, 2016).

The process of policy formulation is the next step after identifying and formulating the problem. At this level, various alternative strategies are calculated using criteria based on the values that exist in society. The calculation of these values is very dependent on the approach used. There are approaches that use rational models, there are approaches to incremental models, group models, game theory, and so on. These approaches have different judgments in looking at the nature of public policy which in itself has an influence on the process of policy

formulation. The extent to which a policy is successful in society is largely determined by the formulation of this policy. Many policies that are generally seen by experts are quite good, but are not successfully implemented in the community, so that they do not succeed in achieving the expected goals. On the contrary, there is a policy that seems to be of less quality seen from the substance, but accepted by the community because it represents their aspirations. Even though in achieving goals there are many shortcomings, (Abidin Z, 2012). In this era of regional autonomy, any program including green buildings programs with community service dimensions is required to be of high quality (Suparman N, 2017) states that public services are actually expected by the service user community in prime form and delivery in the sense that services are easy, fast, precise and safe characterized by convoluted services, well-informed, responsive, accommodating services, consistent, and there is certainty (time, cost, law) and unofficial levies are not found. that is, the application of the principle of excellent service in methods and procedures that are closely related to public policy.

Bandung Mayor Regulation Number 1023 of 2016 concerning Green Building is a strategic policy, which basically aims to save in the use of resources to address global problems, the benefits of which will be felt by all levels of society both present and future generations. In the formulation of Bandung Mayor Regulation Number 1023 of 2016 concerning Green Building, it is necessary to pay attention to a policy formulation model (Triastuti & MRH, 2003), offer a model of the policy-making process referring to the system model developed by David Easton. This model according to Paine and Naumes is a descriptive model because it is more trying to describe what actually happens in policy making. According to Paine and Naumes, this model is structured only from the perspective of policy makers. In this case the policy makers are seen as having a role in planning and coordinating to find a problem solving that will calculate the opportunity and reach or use internal and external support, satisfy environmental demands, and specifically satisfy the desires or interests of the policy makers themselves. This model assumes that in policy making consists of open and dynamic interactions between policy makers and their environment. Interactions that occur in the form of outputs and inputs (inputs and outputs). Output produced by the organization will eventually become part of the environment and so will interact with the organization. Paine and Naumes modified this approach by applying directly to the policy-making process. According to the system model, political policy is seen as a response from a political system to these demands seen as outputs of the political system. Political systems are a set of structures for and interrelated processes that function authoritatively to allocate values for a society. The outputs of the political system are authoritative value

allocations of the system and these allocations constitute political policy. In the relationship between the two, in time there will be feedback between the output produced as part of the next input. The explanation, this model provides benefits in helping organize an investigation of policy formation. In addition, this model also realizes some important aspects of the policy formulation process, such as how environmental inputs influence the substance of public policy and the political system and how public policies affect the environment and the following demands as actions, strengths or what factors only in the environment that plays an important role to encourage the emergence of demands on the political system (Amanda & F, 2012) According to Thomas R. Dye in (Agustino L, 2016) a policy cannot be tangible in a vacuum space but it becomes a policy because of its interaction with the surrounding environment. Therefore, the policy offered by this model is a policy formulation model that departs from the output of an ongoing environment or system. In this approach five important instruments are known to understand the decision making process of a policy, namely: input, process, output, feedback, and the environment itself. Input of public policy in the context of the system model is not only in the form of demands and support but also the influence of the surrounding environment which can suppress it. The following in figure 1. Policy Formulation model from Easton, Easton in (Agustino L, 2016) policy formulation model: System model; this model is a development of David Easton's system theory. Where according to him that a policy cannot be tangible in vacuum space but it becomes a policy because of its interaction with the surrounding environment. The policy offered by this model is a policy formulation model that departs from the output of an ongoing environment or system. In this approach five important instruments are known to understand the decision making process of a policy, namely: input, process, output, feedback, and the environment itself. Input of public policy in the context of the system model is not only in the form of demands and support but also the influence of the surrounding environment which can suppress it.



Source: Research Results, 2018.

Figure 1. Framework

Green Building. According to Article 1 Paragraph 7 of the Mayor of Bandung Regulation No. 1023 of 2016 concerning Green Buildings, green buildings are buildings that are responsible for the environment and efficient resources from the planning, implementation of construction, utilization, maintenance, to deconstruction (P. Bandung, 2016) to Article 1 Paragraph 2 of the Minister of Public Works and Public Housing Regulation No. 2 of 2015 concerning Green Buildings, green buildings are buildings that meet the building requirements and have a significant measurable performance in saving energy, water, and other resources through the application of green building principles in accordance with their functions and classifications in each stage of implementation (Kementerian PUPR, 2015). Green buildings in the city of Bandung are organized based on the following principles: (1). Does not overload the environment carrying capacity. The environment here consists of water, air and soil (2). Prioritizing the efficient use of natural resources for the purpose of building construction.

Referring to the two juridical definitions above, we can understand that green building is a concept which states that a building must pay attention to the future, by paying attention to the effective use of energy and resources and so on, in other words green building is an environmentally friendly building or environmentally friendly building.

METHOD

The qualitative research method used in this study is based on reasoning where the writer as a research instrument uses the five senses that he has and writes the results of his research into a research paper on the formulation of Bandung Mayor Regulation Number 1023 of 2016 concerning Green Building. While the descriptive design was chosen because the authors describe the theory of policy formulation with actual facts (Engkus E, 2017) related to Bandung Mayor Regulation Number 1023 of 2016 concerning Green Building. Data collection techniques used in the form of observation techniques, interviews and documentation studies (Rachmawati T, 2017). Observation techniques are used to ascertain the true state of the field. Interview techniques were used to obtain in-depth data from informants, research informants consisting of 8 people consisting of the Legal Section of the Regional Secretariat, the Head of Spatial Planning and staff, the head of the Cibiru sub-district, public policy observers, and the general public. The documentation study technique was used to obtain documents relating to green building policies, as well as to implement the realization of national development at the executive level (Engkus & E, 2017) .Data analysis techniques using the theory of Miles and Huberman, namely data reduction, data presentation and conclusion drawing.

RESULT AND DISCUSSION

The municipality of Bandung is the first city in Indonesia to implement a green building policy after in 2015 the Ministry of Public Works and Housing issued Ministerial Regulation No. 2 of 2015 concerning Green Buildings. The green building policy in the city of Bandung is based on the Mayor Regulation Number 1023 of 2016 concerning Green Building. The policy formulation of the Mayor's regulation as previously explained that the regulations of the regional head, in this case the mayor's regulations are operational, sectoral, and more as an embodiment of vertical regulations from above or top down design. (P. Bandung, 2016). In its formulation is internal, which sometimes does not involve stakeholders externally both politically and with the community. So that the authors choose a suitable theory, namely David Easton which was introduced by Paine and Naumes in which this model is a development of the system theory put forward by David Easton. According to Paine and Naumes, this system model is a descriptive model because it tries to describe what actually happens in policy making. This model only consists of the perspective of policy makers. In this case policy makers are seen as having a role in planning and coordinating to find solutions to problems that will, calculate opportunities to achieve or use internal and external support; meet environmental demands; and specifically satisfy the desires or interests of policy makers themselves, (Winarno, 2016).

According to Easton, there are 5 factors or dimensions contained in a system and then this by Paine and Naumes is applied in policy formulation, namely **input, process, output, feedback, and the environment** in which the system is located (Agustino L, 2016). (a) **Inputs**, Paine and Naumes describe models of policy formation as interactions that occur between the environment and policy makers in a dynamic process. According to the system model, public policy is seen as a response from the political system to demands arising from the environment which are conditions or conditions that are outside the boundaries of the political system, where the input received is in the form of requests and support.. Claims arise when individuals or groups outside the political system play a role in influencing public policy (Febrianto, 2018). These groups actively try to influence public policy. Whereas support can be in the form of financial resources owned by the political system, and political support from individuals or groups or by the way they receive the results of elections, comply with laws, pay taxes and generally comply with policy decisions. The input which is the background for the formulation of green building policy in the city of Bandung is a global condition that is starting to be considered in terms of efficiency in the

use of electricity, clean water and other energy. The United Nations Development Program (UNDP) which is an extension of the United Nations formulates the conditions of the city. Various countries in the world began to apply the concept of buildings that pay attention to energy efficiency, which is called green building. In a green building there are many parameters that must be applied in a building. With the implementation of regional autonomy, this policy began to be followed by various districts / cities throughout Indonesia. Next Mr. Irfan Febrianto as Urban Building and Architecture Staff said:

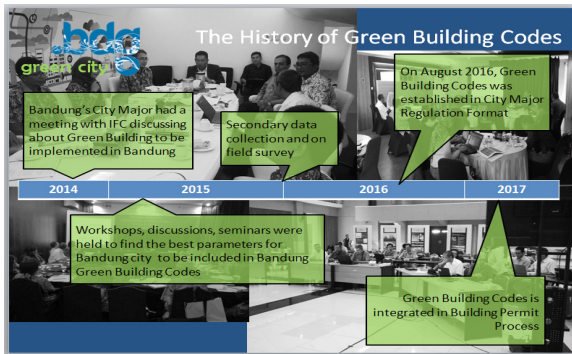
"The formula for green building is what is wanted from Mr. Ridwan Kamil (RK) and also the UNDP program, green building, he is one of the sustainable development programs. So in fact all cities in the world are again running together in this way, only by depends on what they are like and what their characteristics are" (Febrianto, 2018).

The Bandung City Government is assisted by the IFC, which is an institution under the auspices of the United Nations as the implementer of the Green Building Program from UNDP, as expressed by senior informants: Yes, IFC is part of the United Nations, so the green building has left the corridor to become e-shop, now I forget to remember, your wallet. Just browsing, there must be a UNDP program that has dozens of programs, right, program number 24, a building built in a sustainable building, there is green fermentation, green is when it comes to green building, so what number is there, there are many others. Right, IFC is an institution that helps what ... invites, right, now we help, because the City Government doesn't have a budget, there are people who have a budget and don't always want to worry, I said at the outset is good intentions, those intentions good is the leader, yesterday RK because he is an architect that he understands, he needs it. Try if, for example, who is who does it, don't you think about green building, do you think about other matters more, for example, (Febrianto, 2018). (b) **Process**, The process is the transition stage from the beginning in the form of input / input in the form of demands and the support becomes policy decisions. The process of formulating the Mayor's Regulation of Bandung Number 1023 of 2016 concerning Green Building is a legal procedure that begins with the submission of a draft by the relevant agencies where in this case the Office of Spatial Planning to the Mayor of Bandung through the Regional Secretariat passes through to the Legal Section, which is then formulated policy, as expressed by Mrs. Veti Rutmawan as General Functional staff, Legal Section of the Regional Secretariat of the Municipality of Bandung:

..after that .. has already entered the letter here we are the new process, the legal part of the process. By official,

regional apparatus. For example the green building. Spatial Planning Office, right Official. His letter to the Mayor through regional secretary was copied in the Legal Department. Later it will be processed in the Legal Department, (Rutmawan, 2018)

Meanwhile, the Bandung Municipality Spatial Planning Office as the main actor in this policy, passed various processes to establish the Bandung Mayor's Regulation Number 1023 of 2016 concerning Green Building, which can be explained in the picture below.



Source: The Municipality of Bandung Spatial Planning Office, 2018

Figure 2. Chronology of Bandung Green Building Policy

The Regulations of the Mayor of Bandung regarding Green Building are formulated for approximately 2 years. Where began in mid-2014, the Mayor of Bandung, Ridwan Kamil held a meeting with IFC to later become input into policy formulation. (D. T. R. K. Bandung, 2017) As explained earlier, each country has its own parameters of implementing green building in accordance with the country's conditions. Where in Indonesia, which is sheltered by the GBCI sets 5 types of green building with 6 categories. At the end of 2015, data collection and field surveys were conducted to get an accurate picture of the current conditions. Finally, in August 2016, the Bandung Mayor Regulation Number 1023 of 2016 was established on Green Building.

(c) **Output**, output is the result of a process that changes demands into policy outcomes/policy outputs, a system must be able to regulate conflict or conflict resolutions and enforce these resolutions on the parties concerned. Because a system is built on the elements that support the system and this depends on the interaction between various subsystems, a system will protect itself through three things, one of which is to produce outputs that are reasonably satisfying, (Winarno, 2016). But in this policy these resolutions were not carried out against the intended conflict or conflict, but rather the solution to global environmental problems. Bandung Mayor Regulation Number 1023 of 2016 concerning Green Building is the result of ongoing processes (policy outputs), which

are formulated based on the characteristics discuss the concept of green building that will be applied in the city of Bandung. Furthermore, at the beginning of 2015, various workshops, discussions and seminars were held to find the best green building parameters in accordance with the real conditions of Bandung Municipality, which of Bandung Municipality itself, which consists of 10 chapters, 85 articles and 12 attachments. The following in figure 3.



Source: The Municipality of Bandung Spatial Planning Office, 2018

Figure 3. The aspects of the Bandung Green Building Policy

But from the many aspects contained in the green building principle formulated by the World Green Building Council, not all were adopted by the Bandung Municipality Government, only 4 aspects were included in the principle of implementing green building policies in Bandung, namely: (1) Energy efficiency, which includes layers of buildings, ventilation, air conditioning, lighting systems, transportation systems in buildings, and electrical systems. (2) Water management, which consists of water use, water saving sanitation equipment, water reservation and waste management. (3) Setting the air quality of the room, which includes monitoring room air circulation and monitoring the surface of air circulation, and (4) Arrangement of land use, which consists of green open space and solid waste management, (Processed Author, 2018) (d) **Feedback**, in a system is a continuation of the output or output produced. In the context of policy formulation, feedback can be seen how the policies set are the basis or the basis for other policies, the shortness of output from this system becomes input for other systems. In its implementation, the Mayor of Bandung Regulation Number 1023 of 2016 concerning Green Building will at least be the basis for policies that are planned to be formulated by the Bandung Municipality Government, which include:

(1) **Building Data Collection Program**, namely data collection on existing buildings for the future to be used as a database of green building, as expressed by Mr. Irfan Febrianto;

“Well, if that was the case in 2017, then I was already , we are already in the second year, how do I learn the language, how do we make green building really implemented in the field. In 2017, the nature of socialization was yesterday, we are the ones who are important people know first, now we are starting to look for the results like what. Be the first one through building data activities, we know what data on the field are like” (Febrianto, 2018)

- (2) **Partner Program (Field Project)**; collaboration with construction associations and others, which are intended to monitor buildings that are to be erected to meet the principles of green building, so that in the future the building will be used as an example of green buildings in the city of Bandung. The second one, through what is called partner, a failed project, the filed project who was looking for developers who we think is capable of being trusted can build it according to the plan, so that later on it will be a failed project, the project is clear evidence Yeah, if asked about the example, for example, there are developers who you see, for example, the building, like this, the standard is what we use, yes, 2 of them. (3) **Policies that govern Planner’s Licensing Work, which are intended so that building developers have professional responsibility in applying the principles of green building.** Now the third will be released at the end of the year the mayor of Bandung regulations, the name of the regulation regarding the Work Planner License, the same as in Jakarta the Planner Work Permit. So all this time the licensing process is asking for a Certificate of Work Expertise, for next year we will apply a Work Planner License, so people who have a Certificate of Work Expertise must have a Work Planner License that functions like a Driving License, if for example that is, so ... that’s the fact that it’s not just an architect planner, so there is construction there is a Main Contractor and there are supervisors, basically from the planning stage, construction and even later the Main Contractor has supervision to Mechanical Engineering, but at the initial stage wants to launch; planning first; the architect first because it will relate to professional associations. We have talked to the association to plan the launch of the Work Planner License, which then if the construction entrepreneur wants to have a project in Bandung must have a Work Planner License, that is the mechanism that the association must recommend for obtaining a permit (System 2019, 2019) The association will then send the name of the construction company and we will be selecting, which is unique is one of the requirements in the extension of permits that construction entrepreneurs

must submit project reports for three years carrying out projects in the city of Bandung.(Febrianto, 2018). (4) **Policy on Building Function Worthy Certificate to control all buildings including buildings that have already been established so as to begin applying the principles of green building.** Fourth, the last through green building Eligibility Certificate. the steps are data collection; pilot project selection (the building does not yet exist), the possibility of existing residential buildings. This was done because the licensing began in 2017.(D. T. R. K. Bandung, 2018). The focus of the work on large buildings, but the stages of recommendations and others have not been completed. In general, understanding licensing means building a building based on the concept of green building which is a new building rule in the city of Bandung. The city government of Bandung controls all buildings, both public and residential buildings, which must be based on the concept of green building, which will be given a certificate of eligibility with a format that is appropriated. The point is that Building Permit is a control tool, not Regional Original Revenue, not for local income. So inviting the public to make a permit to build a building is essentially the application of rules for broader purposes (Febrianto, 2018).

- (5) **Collaboration with the GBCI by recruiting it into the membership of the Building Building Expert Team.** Fifth point, So the point is that in Bandung the biggest energy user is his home. The use of this energy is the result of the Green Building Council Indonesia count done by the Building Construction Team, through a Standard Operating Procedure, so that when we ask for certificates to the Intellectual Property Rights, proper certificates and building permits and reports for the last three years must be present. Thus all institutions understand and lock in the concept of green buildings in the city of Bandung.(Febrianto, 2018). (e) **Environment.** Within the policy environment there are two known parts, namely the Internal environment and the external environment. Where both of these environments influence public policy. This is in agreement with Anderson in (Agustino L, 2016). which states that policy formulation in practice will involve a variety of actors, both those from state and non-state actors, as official policy-makers and non-governmental participants (non-governmental participants). The influence of the external environment on the agency is influenced institutionally both vertically and horizontally in the bureaucracy(Engkus E, 2017).Thus the green building policy besides the city of Bandung which acts as an implementor, also externally, the business world and the general public.

CONCLUSION

The policy formulation of Bandung Mayor Regulation Number 1023 of 2016 concerning Green Building is a manifestation of the sectoral and top down public ministerial regulation on public works. Although it produces policy products in accordance with the characteristics of the City of Bandung itself and has responded to global conditions, but at the design level the policy formulation is still not optimal. The contribution of stakeholders, from people who do not understand it, as well as institutional both related and territorial, this is due to the limited involvement in policy formulation. The complexity of the problem cannot yet be formulated into green building policies. So that the regulations of the mayor in order to be implemented should be improved to be a regional regulation.

REFERENCES

- Abidin Z, S. (2012). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Achdiat, & M, Y. (2017). Model Kebijakan Peningkatan Laporan Kematian Dalam Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Bandung Barat. *Sosiohumaniora*, 19, (2), 140-148.
- Agustino L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Amanda, & F. (2012). *Analisis Formulasi Kebijakan Pemberlakuan Helm SNI (Standar Nasional Indonesia) Secara Wajib bagi Pengendara Motor*. Universitas Indonesia.
- Bandung, D.T.R.K. (2017). *Data Pembangunan Kota Bandung*. B.
- Bandung, D.T.R.K. (2018). *Kebijakan Bangunan Hijau Kota Bandung*. Bandung.
- Bandung, P. *Peraturan Walikota Bandung Nomor 1023 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung Hijau*. , Pub. L. No. Nomor 1023 (2016).
- Banuwa, & I.S, E. (2018). Strategi Implementasi Kebijakan Hutan Tanaman Rakyat di KPH Gedong Wani. *Sosiohumaniora*, 20, (1), 29-38.
- David, E. (1981). The Political System Besieged by the State. *JSTOR*, 9, (3), 303-325. Retrieved from <http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp>
- Engkus E. (2017). Administrasi Publik dalam Perspektif Ekologi. *JISPO: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 7, (1), 91-101.
- Engkus, (2017). Implementasi Undang-undang Perdagangan: Implikasinya Dalam Kebijakan Pengendalian Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat. *Litigasi*, 18, (1), 1-144.
- Febrianto, I. (2018). *Personal Interview*. Bandung.
- Kementerian PUPR. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung Hijau*. Pub. L. No. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung Hijau. (2015).
- Pusat Badan Statistik. (2016). *Kota Bandung Dalam Angka*. Bandung.
- Rachmawati T. (2017). Metode Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif. In S. Ulbert (Ed.), *UNPAR Press*. Bandung.
- Recognition. (2018). Green Buiding Council Indonesia.
- Rutmawan, V. (2018). *Personal Interview*. Bandung.
- Subijono, E. (2016). Perancangan Bangunan Hijau. Retrieved September 20, 2018, from <https://pii.or.id/perancangan-bangunan-hijau>
- Suparman N. (2017). Kualitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Cianjur. *Jurnal Borneo Administrator. Jurnal Borneo Administrator*, 13, (1), 41-56.
- Suyatna, U. (2019). Kebijakan Ekspor di Indonesia. *Sosiohumaniora*, 21, (2), 173-183.
- System 2019. (2019). Rating Tools. Greenship. Retrieved January 17, 2019, from <http://tificatiogbcindonesia.org/greenship/cern>
- Triastuti, M.R.H. (2003). Analisis Formulasi Kebijakan Kenaikan Tarif Listrik, Telepon dan BBM di Tahun 2003: Disintegrate System Model of Public Policy Toward Organizational Learning and Policy Change. *Center For Policy and Management Studies Bandung Parahyangan Catholic University*, 2 (1), 71-86.
- Wilmoth. (2011). *Water and Other Resources, Especially in Urban Areas*. Retrieved from <https://www.google.com/h?q=Wilmoth+in+Scientific+American+Magazine+on+October+27%2C+2011&aqs=chrome..69i57j3269j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8>
- Winarno, B. (2016). *Kebijakan Publik; Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

KINERJA IMPLEMENTASI TATA KELOLA HUTAN TAMAN NASIONAL GUNUNG HALIMUN SALAK

Rita Rahmawati¹, Denny Hernawan¹, Djoyo Sektiono¹, dan Dudung Darusman²

¹Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Djuanda

²Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor

E-mail: rita.rahmawati@unida.ac.id

ABSTRAK. Salah satu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dalam kaitannya dengan kebijakan tata kelola hutan di Indonesia adalah SK Menteri Kehutanan No.175 Tahun 2003. Namun, kebijakan tersebut tidak memperhatikan klaim dan persetujuan masyarakat yang sudah sejak lama tinggal dan bermukim di dalam/dekat dan disekitar kawasan hutan sehingga menimbulkan banyak permasalahan. Penelitian ini menggunakan indikator kinerja implementasi dari Bappenas (2007) dan metode penelitian deskriptif analisis. Hasilnya menunjukkan bahwa kebijakan perluasan tersebut cukup kompleks karena menimbulkan kerugian bagi pengelolaan maupun bagi masyarakat. Kerugian bagi pengelola terkait konflik dengan masyarakat lokal menyebabkan tidak semua program taman nasional dapat dijalankan, sedangkan masyarakat lokal mengalami kerugian yang nyata karena kehilangan hak akses untuk menggarap lahan pertanian yang masuk ke dalam kawasan hutan. Namun demikian, kebijakan perluasan taman nasional tersebut memberi manfaat bagi pengelolaan dan masyarakat disekitar kawasan. Manfaat bagi pengelola adalah semakin luasnya kawasan taman nasional sedangkan bagi masyarakat kaitannya dengan banyaknya program baru yang ditawarkan oleh pemerintah sebagai pengganti nafkah baru.

Kata kunci: Tata Kelola Hutan; Kinerja Implementasi; Kebijakan

PERFORMANCE OF FOREST GOVERNANCE IMPLEMENTATION MOUNTAIN HALIMUN SALAK NATIONAL PARK

ABSTRACT. One of the homeworks that must be completed in relation to forest governance policies in Indonesia is the Ministerial Decree of the Indonesian Forestry Ministry No.175 Year of 2003. However, the policy does not seem to consider the claims and to comply with actual community agreements of the people living in and near the forest area. This has caused a few problems. This research refers to theory from the National Planning Board (Bappenas, 2007), and used a descriptive analysis method. The result showed that the expansion policy turns to be quite complex because it has both some disadvantages and also some advantages in forest management and for people living nearby. The disadvantages of forest management are related to conflict with local people. It has caused the national park programs were not to be run well, whereas local communities suffer significant losses due to less access to rights to cultivate agricultural land into forest areas. Nevertheless, the park's expansion policy has an advantage in forest management and people living nearby. The benefit for forest managers is the expansion of the national park area, while for local people, they have had a connection with many programs offered by the government as a replacement for a new livelihood.

Key words: Forest Administering Policies; Park Expansion Policy; Policy Performance

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki beragam ekosistem yang salah satunya adalah hutan. Salah satu kawasan hutan di Indonesia yang merupakan hutan pelestarian alam adalah Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS). Hutan TNGHS masih menyisakan masalah Kebijakan dalam tata kelola hutan dengan adanya SK Menteri Kehutanan No.175 Tahun 2003. Surat Keputusan ini menjadi dasar perluasan kawasan Gunung Halimun Salak, dengan merubah fungsi hutan, dari kawasan hutan lindung, hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas menjadi kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, sehingga luas kawasan TNGHS menjadi seluas ±113.357 (seratus tiga belas ribu tiga ratus lima puluh tujuh) hektar yang berkedudukan di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten.

Perubahan fungsi hutan tersebut didasarkan atas adanya kekhawatiran akan nasib hutan di kelompok pegunungan Halimun Salak yang ditandai adanya aktivitas

masyarakat lokal di sekitar hutan, yang dituduh menjadi penyebab deforestasi. Harapan berbagai pihak untuk menyelamatkan kekayaan ekologi wilayah TNGHS ini menjadi salah satu pendorong terbitnya SK 175/2003.

Kebijakan perluasan dan perubahan fungsi hutan yang berubah menjadi hutan konservasi ini tentunya memberikan dampak terhadap pengelolaan hutan karena pada kawasan tertentu yang ditunjuk terdapat masyarakat lokal yang hidup dekat atau sekitar hutan, baik masyarakat adat maupun non adat.

Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Kehutanan adalah pelaku kebijakan yang mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 175/Kpts-II/2003 tanggal 10 juni 2003, namun implementasinya ada pada Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak (Balai TNGHS).

Surat Keputusan 175/2003, menyebabkan pengelolaan Taman Nasional Gunung Halimun Salak yang berada di bawah Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak mengalami penambahan luas, dari tadinya seluas

±40.000 Ha menjadi ±113.357 Ha. Hal ini berdampak pada permasalahan di Taman Nasional, terutama yang berkaitan dengan masalah kebijakan dan masalah-masalah lainnya. Permasalahan yang dihadapi Taman Nasional adalah sebagai berikut:

Kompleksitas Kebijakan. Perluasan dan perubahan fungsi hutan pada tataran implementasinya mengandung dimensi yang sangat kompleks. Ditinjau dari sisi kompleksitas suatu kebijakan, dalam proses implementasi SK Menteri Kehutanan No.175 Tahun 2003 ditemukan beberapa hal sebagai berikut: (1) Kebijakan perluasan Taman Nasional dan perubahan fungsi kawasan hutan lindung, hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas menjadi hutan konservasi ini tidak memperhatikan masalah yang akan timbul dan mengabaikan klaim atas hutan oleh masyarakat adat (2) Kebijakan perluasan dan perubahan fungsi TNGHS ini juga tidak memperhatikan masyarakat kurang mampu yang sudah sejak lama tinggal dan menggantungkan hidupnya di kawasan TNGHS tersebut. Sepintas kebijakan perluasan taman nasional ini menuai masalah baru, dibandingkan mengatasi masalah yang ada.

Kebijakan mestinya merupakan tindakan untuk mengatasi masalah, sebagaimana dikemukakan oleh Asep Tapip (2012) bahwa Kebijakan merupakan serangkaian keputusan yang dirumuskan untuk mengarahkan tindakan dalam memecahkan masalah agar memenuhi tujuan tertentu yang telah ditetapkan. (Yani, 2012)

Tujuan perluasan dari Taman Nasional adalah untuk melestarikan hutan dengan merubah status hutan produksi menjadi hutan konservasi, namun tidak dapat dipungkiri bahwa di kawasan tersebut hidup masyarakat yang turut menggarap hutan produksi, sehingga kebijakan untuk mengatasi masalah pelestarian hutan menuai masalah baru dalam kehidupan masyarakat lokal.

Persepsi Tentang Manfaat Kebijakan. Persepsi tentang manfaat kebijakan yaitu harapan terhadap semua bentuk keuntungan dan nilai-nilai positif yang akan dirasakan langsung maupun tidak langsung, sebagai dampak dari pelaksanaan kebijakan pengelolaan hutan dengan sistem zonasi yang mengalami perluasan dan perubahan fungsi hutan. Persepsi tersebut berhubungan dengan manfaat kebijakan bagi stakeholders dan masyarakat yang berada di wilayah sampel studi (Desa Simaresmi dan Desa Cipeteuy). Dalam hal ini, stakeholder diwakili oleh pegawai balai TNGHS. Pegawai balai TNGHS adalah stakeholder yang pertama terkena dampak kebijakan disamping masyarakat lokal. Selain itu, Pegawai balai TNGHS harus berhadapan dengan masyarakat dalam menjalankan kebijakan Pemerintah.

Kebijakan Menteri Kehutanan tentang perluasan dan perubahan fungsi ini diharapkan mampu menyelamatkan fungsi, kekayaan sumber daya alam dan kekayaan ekologi

yang ada di wilayah TNGHS. Namun, munculnya persepsi negatif terhadap kebijakan tata kelola hutan yang mengalami perluasan dan perubahan fungsi ini tentunya menjadi masalah bagi Balai TNGHS dalam mengelola hutan TNGHS.

Masalah pengelolaan TNGHS muncul mengingat masyarakat lokal yang tadinya berada diluar kawasan menjadi berada di dalam kawasan. Ada dua jenis masyarakat yang tinggal di dalam kawasan, yaitu masyarakat adat Kasepuhan dan masyarakat non adat. Masyarakat adat mengklaim bahwa kawasan tersebut merupakan hutan milik adat. Mereka sudah ada di lokasi sebelum TNGHS ada. Perjuangan masyarakat adat untuk memperoleh pengakuan hak ulayat ini dilakukan melalui Pemerintah Daerah dan mendorong Pemerintah Daerah untuk mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda).

Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM). Kemampuan SDM Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak dianalisa dari komitmen dan kemampuan Balai TNGHS dalam melaksanakan tugas, serta bentuk dukungan yang dimilikinya untuk menjalankan tugas tersebut. Bentuk komitmen Balai TNGHS diamati dari ada atau tidaknya program instansi terkait dalam tata kelola hutan sesuai tugasnya, sedangkan bentuk kemampuan Balai TNGHS diamati dari pengaruh ketepatan / efektifitas pelaksanaan tugasnya atau tingkat pencapaian optimalitas dalam pelaksanaan tugas.

Kemampuan Sumber daya manusia yang belum siap dengan mengelola hutan yang mengalami perluasan dan perubahan fungsi tentunya menghambat proses tata kelola hutan. Hal ini ditunjukkan bahwa jumlah hutan Taman Nasional seluas 113.357 ha hanya diawasi oleh 42 orang polisi kehutanan yang bertugas mengawasi hutan dan 105 orang yang bertugas di berbagai urusan kehutanan.

Otoritas dan Diskresi. Otoritas adalah kewenangan dan keleluasaan yang dimiliki Balai TNGHS dalam mengimplementasikan keputusan yang telah dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan. Hutan TNGHS, sesuai dengan UU No.5 Tahun 1990 tentang tata ruang, TNGHS termasuk kategori kawasan lindung. Sebagai kawasan lindung, TNGHS mestinya bebas dari aktivitas masyarakat. Meskipun demikian, kawasan TNGHS juga masuk ke dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah Pro-vinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa, dimana di daerah ini hidup masyarakat. Keberadaan masyarakat di TNGHS diatur melalui regulasi pemerintah daerah dan memperoleh pengakuan legal dengan kepemilikan KTP. Ada 314 kampung yang masuk dalam kawasan TNGHS. Keberadaan masyarakat dan kampung-kampung dalam kawasan TNGHS ini berpotensi menjadi penghambat dan pendukung keberadaan TNGHS.

Masyarakat yang hidup di wilayah TNGHS menghadapi dua otoritas, otoritas legal melalui Pemerintahan

Daerah (Desa) dan otoritas adat. Otoritas kepala adat ini juga menjadi kendala tata kelola hutan di kawasan TNGHS. Otoritas dan diskresi kepala adat membuat kewenangan dalam memanfaatkan sumber daya hutan sehingga proses tata kelola hutan oleh pemerintah terhambat oleh otoritas kepala adat.

Geografis. Penelitian ini dilakukan di kawasan hutan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Istilah “Kawasan Hutan”, sudah diperkenalkan dan dibakukan sejak diundangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok kehutanan (LNRI-1967-8, TLN-2823). Tepatnya dalam pasal 1 ayat 4 yang memberi batasan bahwa: “kawasan hutan” ialah wilayah-wilayah tertentu yang oleh Menteri ditetapkan untuk dipertahankan sebagai hutan tetap”. (Subadi, 2010).

Namun setelah Undang-Undang tersebut diganti dengan Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (LNRI-1999-167, TLNRI-3587). Batasan mengenai pengertian kawasan hutan ini telah mengalami sedikit perubahan sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 3 yang menyatakan; “kawasan hutan” adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap”(Subadi, 2010).

Berdasarkan pembatasan tersebut, maka ada beberapa unsur yang melekat pada pengertian kawasan hutan yaitu: a. Wilayah tertentu, maksud dari wilayah ini adalah daerah/areal baik yang telah berhutan atau yang belum/tidak berhutan dan bahkan termasuk yang telah mengalami deforestasi maupun degradasi; b. Ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah; c. Dipertahankan sebagai hutan tetap (Subadi, 2010).

Kawasan hutan yang dimaksud dalam tulisan ini menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (LNRI-1999-167, TLNRI-3587), dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Hutan produksi; b. Hutan lindung; c. Hutan konservasi; d. Kawasan hutan suaka alam; e. Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Taman nasional Gunung Halimun Salak adalah Taman nasional yang merupakan kawasan hutan pelestarian alam.

Budaya. Masyarakat lokal yang tinggal di sekitar dan dalam kawasan TNGHS, salah satunya adalah masyarakat adat Kasepuhan. Masyarakat ini hidup dalam tradisi budaya yang khas. Keberadaan masyarakat adat ini menjadi tantangan tersendiri bagi TNGHS, mengingat kebiasaan hidup masyarakat yang sangat tergantung dari wangsit. Wangsit adalah instruksi dari roh nenek moyang yang diterima melalui mimpi. (Rahmawati, Salbiah, &

Pratidina, 2016). Berdasarkan wangsit tersebut, masyarakat adat berpindah-pindah dan menetap di suatu lokasi, sehingga terdapat beberapa kampung adat kasepuhan yang berada di dalam kawasan TNGHS.

METODE

Pendekatan penelitian ini adalah Deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel yang lain. (Sugiyono, 2013).

Metode penelitian deskriptif digunakan untuk mengetahui permasalahan dengan cara menguraikan secara rinci dan jelas serta dilakukan untuk menganalisis data mengenai gejala-gejala yang berhubungan dengan Implementasi Kebijakan oleh Balai TNGHS dalam mengelola hutan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, sehingga dapat diketahui masalahnya dan berusaha mencari solusinya.

Populasi penelitian ini berasal dari dua sumber yaitu pegawai Balai TNGHS (Kantor Pusat dan Kantor Seksi Wilayah III Sukabumi) yang berjumlah 45 orang dan masyarakat lokal yang tinggal di sekitar kawasan TNGHS yang mewakili masyarakat adat dan non adat yaitu Desa Adat Sirnaresmi (Kasepuhan Sinarresmi) dan Desa Cipeutey (Kp. Sukagalih). Adapun untuk sampling yang diambil dari pegawai Balai TNGHS digunakan *Disproportionate Stratified Random Sampling*. Untuk penentuan jumlah sampel digunakan rumus Yamane dalam Sukandarrumidi (2012-56) dengan tingkat kesalahan (*margin error*) 10% maka dengan populasi 45 orang diperoleh ukuran sampel 31 orang.

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, dengan pertimbangan bahwa masyarakat lokal yang berada di dalam dan sekitar kawasan TNGHS terbagi dalam dua karakteristik yaitu masyarakat Kasepuhan dan non Kasepuhan. Setiap kelompok masyarakat memiliki karakter nilai budaya, sikap, persepsi dan keputusan yang sama yang digerakkan oleh pemimpin adat mereka. Namun pengetahuan dari setiap anggota kelompok masyarakat tersebut berbeda. Pemilihan teknik purposive dilakukan kepada anggota masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang tata kelola hutan dan bisa mewakili seluruh karakteristik anggota masyarakat yang ada.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui: (a) Studi Kepustakaan, (b) Studi Lapangan melalui (1) Observasi, (2) Wawancara (Pegawai Balai TNGHS dan Masyarakat Desa Sirnaresmi dan Desa Cipeutey), (3) Kuesioner (31 orang Pegawai Balai TNGHS, 40 Masyarakat Adat Kasepuhan Sinar Resmi, dan 40 Masyarakat Non Adat Kp.Sukagalih Desa Cipeutey).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) Data primer (data yang diperoleh secara langsung dari Balai TNGHS dan Masyarakat), (2) Data sekunder (data yang diperoleh dari dokumen dan arsip-arsip Balai TNGHS). Selanjutnya data diolah berdasarkan hasil jawaban responden melalui kuesioner dengan menggunakan rumus WMS (Weight Mean Score). (Siregar, 1993)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS)

Secara administratif wilayah kerja TNGHS berada pada tiga wilayah administratif Pemerintahan Kabupaten yaitu Bogor, Sukabumi dan Lebak, yang terdiri dari 28 Kecamatan dan 114 desa: Kabupaten Bogor (9 Kecamatan), Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Lebak (11 Kecamatan).

Lokasi penelitian berada di dua desa, terdiri dari desa yang mewakili desa adat yaitu Desa Sirnaresmi (Kasepuhan Sinarresmi) dan desa yang mewakili desa non adat yaitu Desa Cipeutey (Khususnya Kampung Sukagalih).

Kondisi Kelembagaan

Kelembagaan yang ada di wilayah taman nasional TNGHS terdiri atas: kelembagaan Balai TNGHS, kelembagaan masyarakat lokal, kelembagaan Perusahaan yang berdomisili dan atau melakukan aktivitas di TNGHS antara lain Perusahaan dengan sarana sutetnya, kelembagaan pembangkit listrik panas bumi, kelembagaan aktivitas pertambangan emas, kelembagaan perkebunan. Namun kelembagaan perusahaan (baik tambang maupun perkebunan) sudah memiliki MOU tersendiri dengan BTNGHS, sehingga kebijakan perluasan taman nasional tidak berdampak secara signifikan terhadap perusahaan perusahaan tersebut. Peran kelembagaan yang paling signifikan dalam menjalankan kebijakan perluasan taman nasional adalah Balai TNGHS. Kelembagaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Balai TNGHS.

Balai TNGHS mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan Taman Nasional Gunung Halimun Salak sesuai dengan prinsip-prinsip konservasi dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.03/Menhut-II/2007 tanggal 1 Februari 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional, Balai TNGHS adalah organisasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. Balai TNGHS (BTNGHS) mempunyai fungsi sebagai berikut: (1) Melakukan penyusunan program pengembangan TNGHS, (2) Melakukan pemangkuan kawasan, perlindungan, pengawetan dan pelestarian flora fauna dan

ekosistemnya, (3) melaksanakan pemanfaatan dan promosi serta memberikan informasi mengenai TNGHS, (4) melakukan urusan tata usaha (Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak, 2014).

BTNGHS adalah taman nasional tipe B yang memiliki 1 (satu) orang kepala balai setingkat eselon III.a ditambah 1 (satu) orang kepala sub bagian tata usaha setingkat eselon IV.a serta 3 (tiga) orang kepala seksi wilayah setingkat eselon IV.a, serta kelompok jabatan fungsional yang terdiri dari polisi kehutanan (Polhut), Pengendali Ekosistem Hutan, dan Penyuluh Kehutanan.

BTNGHS selaku pengelola TNGHS memiliki kegiatan-kegiatan pengelolaan yang dapat dibagi dalam tiga kelompok, yaitu manajemen kawasan; manajemen sumberdaya alam; serta manajemen kelembagaan. BTNGHS sebagai badan pelaksana taman nasional memberikan keuntungan dan pembatasan pada masyarakat local. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Winarno (2014) bahwa badan pelaksana memberikan keuntungan atau pembatasan kepada para pelanggan atau kelompok-kelompok target. Mereka juga memberikan pelayanan atau pembayaran atau batasan-batasan tentang kegiatan atau apapun lainnya yang bisa dipandang sebagai wujud dari keluaran yang nyata dari suatu program (Winarno, 2014). Dengan begitu BTNGHS tidak dapat melepaskan diri dari keberadaan masyarakat tersebut, bahkan beberapa program BTNGHS dijalankan dengan melibatkan keberadaan masyarakat.

Kondisi Sosial, Budaya dan Ekonomi Masyarakat

Menurut Balai TNGHS (2014), Masyarakat lokal yang tinggal dan bermukim di dalam dan disekitar TNGHS pada umumnya adalah suku sunda, yang terbagi ke dalam masyarakat kasepuhan (adat) dan bukan kasepuhan (Non adat). Masyarakat adat yang tinggal di kawasan TNGHS merupakan menganut tradisi kasepuhan; suatu tradisi masyarakat yang bertumpu pada ekoreligi padi (Adimiharja, 1992).

Masyarakat kasepuhan memiliki susunan organisasi secara adat yang terpisah dari struktur organisasi pemerintahan formal (desa). Komunitas kasepuhan dipimpin oleh seorang "sesepuh" yang dipanggil dengan sebutan abah, olot atau ama. Komunitas yang ada di TNGHS Antara lain: Kasepuhan Ciptagelar, Sirnaresmi, Ciptamulya, Cisitu, Cisungsang, Ciusul, Cibedug, Citorek, Urug, Cicacurub, Bayah dan Giri Jaya (Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak, 2014).

Masyarakat Kasepuhan dicirikan dengan masih kuatnya tradisi bergotong royong termasuk dalam pengelolaan pertanian. Sawah memiliki nilai penting dalam kehidupan masyarakat. Dalam system pertaniannya dikenal ada beberapa tradisi adat, salah satunya adalah tradisi seren tahun (pesta panen tahunan) setiap tahunnya. Keberadaan

jenis-jenis padi khas Masyarakat Kasepuhan menandai pentingnya beras bukan hanya sebagai bahan makanan pokok tetapi bagian dari tradisi dan rasa syukur kepada Tuhan penguasa padi.

Ada beberapa cara yang dilakukan oleh Masyarakat lokal dalam pemanfaatan hutan TNGHS, yaitu sebagai huma/ladang; sawah; kebun; talun dan kebun campuran. Masyarakat kasepuhan mempunyai nilai-nilai kearifan lokal yang diwariskan secara turun temurun dalam pemanfaatan dan konservasi hutan. Masyarakat Kasepuhan membagi wilayah hutan dalam beberapa zonasi/ wewengkon, yaitu: leuweung titipan, leuweung tutupan, leuweung cawisan dan leuweung garapan. (Rahmawati, 2013). Masyarakat Kasepuhan juga memiliki pengetahuan tentang berbagai jenis tanaman obat. (Rahmawati, Rita et al., 2016).

Kemampuan ekonomi masyarakat sekitar TNGHS cenderung rendah, namun sebagian besar tidak termasuk dalam kategori rumah tangga (RT) miskin. Kehidupan rumah tangganya bergantung pada mata pencaharian pertanian padi sebagai mata pencaharian utama. Disamping pertanian padi, masyarakat local juga menanam tanaman palawija dan tanaman lainnya. Tanaman padi tidak boleh dijual, hanya untuk dikonsumsi sendiri, sedangkan tanaman lainnya boleh dijual. Hasil penjualan tanaman lainnya inilah yang menjadi sumber keuangan untuk membeli kebutuhan lauk pauk maupun kebutuhan lainnya.

Masyarakat lokal adalah masyarakat yang hidup di lingkungan dan di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak baik yang termasuk masyarakat adat Kasepuhan maupun non adat kasepuhan. Rata-rata masyarakat yang tinggal di Kawasan Gunung Halimun merupakan masyarakat miskin. Karakteristik ini terlihat dari sebagian besar rumah yang terbuat dari bilik dan berlantai tanah. Sekalipun demikian, melihat dari beberapa kondisi keluarga seperti kebiasaan makan, ketersediaan pakaian, pendidikan anak, masyarakat di kawasan ini telah memiliki kondisi yang baik, yaitu makan minimal 2 kali sehari dan tercukupi pakaian serta anak-anak dapat bersekolah. Hal ini menggambarkan masyarakat yang aktif dan produktif. Tingkat Aktifitas masyarakat dibuktikan dengan lebih dari 90% responden ikut aktif dalam kegiatan sosial masyarakat. (Rahmawati, Pratidina, dan Muarif, 2011).

Dalam Zonasi TNGHS Tahun 2012 disebutkan bahwa degradasi ekosistem hutan yang dilakukan masyarakat banyak terjadi di desa-desa yang berada di dalam dan sekitar kawasan TNGHS dan diduga terkait erat dengan rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat. Sumber kehidupan masyarakat sangat didominasi dari sektor pertanian dan perkebunan sedangkan sumber kehidupan sebagian masyarakat lainnya dari kegiatan pertambangan ilegal (PETI) serta penyadapan pinus dan damar.

Kinerja Implementasi Kebijakan Tata Kelola Hutan Taman Nasional Gunung Halimun Salak

Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh berbagai aktor khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan (Winarno, 2014).

Implementasi mencakup banyak macam kegiatan. Pertama badan-badan pelaksana yang ditugasi oleh undang-undang dengan tanggung jawab menjalankan program harus mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan agar implementasi berjalan lancar. Sumber-sumber ini meliputi personil, peralatan, lahan tanah, bahan-bahan mentah, dan diatas semuanya. Kedua, badan-badan pelaksana mengembangkan bahasa anggaran dasar menjadi arahan-arahan konkret, regulasi, serta rencana-rencana desain program. Ketiga, badan-badan pelaksana harus mengorganisasikan kegiatan-kegiatan mereka dengan menciptakan unit-unit birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi beban kerja. Akhirnya, badan-badan pelaksana memberikan keuntungan atau pembatasan kepada para pelanggan atau kelompok-kelompok target. Mereka juga memberikan pelayanan atau pembayaran atau batasan-batasan tentang kegiatan atau apapun lainnya yang bisa dipandang sebagai wujud dari keluaran yang nyata dari suatu program (Winarno, 2014).

Sementara itu Grindle (1980) memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implemetasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah (Grindle, 1980). Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya "*a policy delivery system*", dimana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan.

Apa yang disampaikan Grindle tersebut juga disampaikan kembali oleh Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti (2012:21) bahwa Implementasi adalah "kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan". (Purwanto & Sulistyastuti., 2012).

Dengan demikian sebuah kebijakan baru dapat diimplementasikan setelah tujuan dan sasaran ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap. Implementasi dilakukan untuk mendistribusikan kebijakan. William N. Dun (2003: 44) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu (Dunn, 2003).

Artinya pendistribusian kebijakan tersebut dibatasi oleh waktu dan koridor pengendalian, untuk memastikan kebijakan berhasil diimplementasikan.

Berhasil tidaknya sebuah kebijakan diimplementasikan dapat diukur melalui kinerja implementasi kebijakan. Selanjutnya menurut Merille S.Grindle (1980) bahwa faktor penentu kinerja implementasi kebijakan ditentukan faktor penentu seperti: kepentingan yang dipengaruhi, tipe keuntungan yang diharapkan, cakupan perubahan yang diupayakan, situs pembuatan keputusan, implementor program, dan sumberdaya yang tersedia (Bappenas, 2007).

Menurut Bappenas (2007) ada 3 poin penting dalam memahami kinerja implementasi kebijakan, yaitu: faktor kebijakan, kapasitas organisasi dan faktor lingkungan (Bappenas, 2007). Ketiga faktor tersebut dijadikan pedoman untuk menilai kinerja implementasi kebijakan tata kelola hutan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Oleh karena itu, dalam mengkaji kinerja implementasi kebijakan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, dibagi kedalam tiga kelompok variabel: (A) Faktor Kebijakan, (B) Kapasitas Kelembagaan, (C) Lingkungan. Tiga kelompok variabel tersebut dijelaskan ke dalam beberapa sub variabel seperti berikut:

- (A) Faktor Kebijakan, terdiri dari: Kompleksitas Kebijakan dan Persepsi Manfaat Kebijakan
- (B) Kapasitas Kelembagaan, terdiri dari: Kapasitas SDM dan Otoritas dan Diskresi
- (C) Lingkungan, terdiri dari: Geografis dan Sosial Budaya

Adapun Hasil Rekapitulasi pada setiap dimensi variabel Implementasi Kebijakan dari setiap tanggapan Pelaksana maupun masyarakat adat dan non adat yang dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :

Tabel 1. Penilai Pelaksana Atas Tata Kelola Hutan TNGHS

Dimensi	M	Kriteria Penilaian
Faktor Kebijakan	3,41	Cukup Baik
Kapasitas Organisasi	3,35	Cukup Baik
Faktor Lingkungan	3,16	Cukup Baik
Rekapitulasi Dimensi	3,32	Cukup

Sumber: Hasil Penelitian 2015

Dari perolehan angka penilaian dalam tabel 4.41 menunjukkan skor 4.90 maka dapat dilakukan penafsiran bahwa Implementasi Kebijakan Tata Kelola Hutan TNGHS pada dimensi faktor kebijakan, kapasitas organisasi dan faktor lingkungan berada pada kategori cukup baik. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang mengatakan bahwa dalam mengimplementasikan kebijakan tata kelola hutan taman nasional yang mengalami perluasan bukanlah hal yang mudah karena setelah dikeluarkannya SK Menteri Kehutanan tersebut, Balai TNGHS mengemban tugas yang cukup berat dalam pengelolaan hutan.

Sistem pengelolaan hutan seharusnya memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya, sebagaimana dikemukakan oleh Feni Rosalia dan Yuni Ratnasari (2016) bahwa system pengelolaan hutan bertujuan untuk memberdayakan masyarakat (meningkatkan nilai ekonomi, nilai budaya, memberikan manfaat/benefit kepada masyarakat pengelola, dan masyarakat setempat), tanpa mengganggu fungsi pokoknya (meningkatkan fungsi hutan dan fungsi kawasan, pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dengan tetap menjaga fungsi kawasan hutan). (Rosalia & Ratnasari, 2016).

Namun faktanya justru di Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Sistem pengelolaan hutan taman nasional dengan merujuk pada kebijakan Menteri Kehutanan No. 175 Tahun 2003, justru menimbulkan permasalahan. Permasalahan ini terjadi dikarenakan perbedaan tupoksi antara Balai TNGHS dengan PERUM PERHUTANI. Kebijakan tersebut bisa dikatakan cukup kompleks karena terdapat cukup banyak permasalahan dan kurang memperhatikan kapasitas organisasi dan lingkungan sekitar sehingga menurut pelaksana, dalam mengimplementasikan kebijakan tata kelola hutan yang mengalami perluasan sejauh ini sudah cukup baik namun masih ada permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan.

Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa perolehan angka penilaian menunjukkan skor 2,59, dengan penafsiran bahwa Implementasi Kebijakan Tata Kelola Hutan TNGHS pada dimensi faktor kebijakan, kapasitas organisasi dan faktor lingkungan menurut masyarakat non adat berada pada kategori kurang baik.

Tabel 2. Penilaian Masyarakat Adat Atas Tata Kelola Hutan TNGHS

Dimensi	M	Kriteria Penilaian
Faktor Kebijakan	2,41	Kurang Baik
Kapasitas Organisasi	2,53	Kurang Baik
Faktor Lingkungan	2,92	Cukup Baik
Rekapitulasi Dimensi	2,59	Kurang Baik

Sumber: Hasil Penelitian 2015

Diperkuat dengan hasil wawancara dengan masyarakat adat yang mengatakan bahwa Balai TNGHS belum mampu mengimplementasikan kebijakan tata kelola hutan taman nasional yang mengalami perluasan tersebut dengan baik. Hal ini dikarenakan terdapat banyak permasalahan yang terjadi sampai saat ini diantaranya kurang harmonisnya hubungan Balai TNGHS dengan Masyarakat adat. Hal ini dikarenakan kurang adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antara kedua pihak. Hal tersebut dikarenakan perbedaan pendapat dimana

aturan yang berlaku dalam pengelolaan hutan menurut aturan negara khususnya aturan konservasi dan menurut aturan adat.

Tabel 3. Penilaian Masyarakat Non Adat Atas Tata Kelola Hutan TNGHS

Dimensi	M	Kriteria Penilaian
Faktor Kebijakan	3,56	Baik
Kapasitas Organisasi	3,44	Baik
Faktor Lingkungan	3,86	Baik
Rekapitulasi Dimensi	3,58	Baik

Sumber: Hasil Penelitian 2015

Dari perolehan angka penilaian dalam tabel menunjukkan skor 3,58 maka dapat dilakukan penafsiran bahwa Implementasi Kebijakan Tata Kelola Hutan TNGHS pada dimensi faktor kebijakan, kapasitas organisasi dan faktor lingkungan menurut masyarakat non adat berada pada kategori baik. hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang mengatakan bahwa sejauh ini Balai TNGHS dapat mengimplementasikan kebijakan tata kelola hutan yang mengalami perluasan dengan baik. menurut mereka, Balai TNGHS memberikan alternatif lain terhadap kerugian yang mereka terima yaitu seperti program Model Kampung Konservasi (MKK). Program ini diluncurkan setelah adanya kebijakan perluasan sehingga memberikan manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat seperti banyak peneliti dan wisatawan yang datang ke kampung mereka sehingga memberikan tambahan penghasilan. Adapun kondisi hutan yang semakin lebat membuat kondisi air bagus dan tidak kekeringan. Adapun rata-rata rekapitulasi variabel implementasi kebijakan:

Tabel 4. Rata-Rata Skor Penilaian Tata Kelola Hutan TNGHS

Menurut Pelaksana	Menurut Masyarakat Adat	Menurut Masyarakat Non Adat
3,32	2,59	3,58

Sumber : Hasil Penelitian 2015

Adapun Dari perolehan angka penilaian menurut pelaksana, masyarakat adat dan masyarakat non adat dalam tabel 4.93 menunjukkan perbedaan skor dimana hasil rekapitulasi implementasi kebijakan menurut pelaksana menunjukkan skor 3,32, sedangkan masyarakat adat menunjukkan skor 2,58 dan adapun masyarakat non adat yang menunjukkan skor 3,58 maka dapat dilakukan penafsiran bahwa titik kelemahan dari implementasi kebijakan tata kelola hutan TNGHS terletak pada (1) kerugian kebijakan bagi masyarakat, (2) jumlah SDM Balai TNGHS, (3) kemampuan Balai TNGHS dalam mengatasi otoritas lembaga lokal, dan (4) Hambatan Geografis.

Titik kelemahan dari implementasi kebijakan yang pertama terletak pada faktor kebijakan yang merugikan masyarakat, khususnya masyarakat yang sudah sejak

lama tinggal dan bermukim di dekat dan sekitar kawasan hutan yang memiliki ketergantungan pada hutan. Adapun jumlah SDM Balai TNGHS yang belum sesuai dengan kebutuhan menyebabkan tidak efektifnya kinerja implementasi kebijakan tata kelola hutan TNGHS. Lebih lanjut, kemampuan Balai TNGHS dalam mengatasi otoritas lembaga lokal juga menjadi hambatan karena saat ini implementator belum mampu mengatasi otoritas / kewenangan kepala adat. situasi geografis yang berada di tiga wilayah administratif pemerintahan juga menjadi salah satu titik kelemahan dalam mengimplementasikan kebijakan.

Faktor-Faktor Yang Menentukan Kinerja Implementasi Kebijakan

Ditinjau dari dimensi Faktor Kebijakan yang terdiri dari Kompleksitas Kebijakan, dan Persepsi Manfaat Kebijakan, dimana dimensi Kapasitas Organisasi terdiri atas indikator SDM & Otoritas dan Diskresi, sedangkan dimensi Faktor Lingkungan terdiri atas indikator Geografis dan Budaya, diketahui ada beberapa faktor pendukung dan penghambat kinerja implementasi kebijakan TNGHS. Faktor pendukung dari kinerja implementasi kebijakan adalah:

1. Indikator kompleksitas kebijakan: Pemberian Kewenangan kepada Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak dengan tujuan untuk menekan angka kerusakan hutan dengan merubah cara pengelolaan hutan menjadi pengelolaan hutan konservasi
2. Indikator persepsi manfaat kebijakan: bagi pengelolaan memberi manfaat untuk mencegah kerusakan hutan dan memulihkan kembali kawasan hutan yang mengalami kerusakan.

Kesamaan persepsi ini akan memberikan interpretasi yang sama akan tujuan dan manfaat kebijakan. Selanjutnya interpretasi yang benar akan mengarah pada adanya kesadaran bersama mengenai pentingnya kebijakan tersebut dan dianggap bahwa kebijakan memberi manfaat bagi semua pihak. Temuan ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Diah Fatma Sjoraida (2015) bahwa intepretasi yang benar dari tujuan kebijakan (dalam hal ini kebijakan keterbukaan informasi publik) seharusnya dapat menghasilkan kesadaran bersama mengenai urgensi pencapaian tujuan pelaksanaan kebijakan. Kesadaran bersama di kalangan pemerintah akan menghasilkan suatu bentuk konsensus dan komitmen yang mempengaruhi konsistensi dalam bersikap, dan pada akhirnya membentuk budaya yang akan memperkuat organisasi pemerintah dan terlaksananya kebijakan secara efektif.(Sjoraida, Diah Fatma, 2015).

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, konsensus yang dimaksud adalah consensus untuk menjaga

dan mengamankan ekosistem sumberdaya hutan dan menyelamatkan hewan-hewan langka dari perburuan liar. Dalam penelitian ini bedanya consensus bukan hanya dibangun diantara organisasi Pemerintah, melainkan Pemerintah dan Masyarakat.

Bagi Masyarakat kesadaran untuk mendukung program Pemerintah melahirkan manfaat lain, antara lain adanya bantuan untuk peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat lokal berupa pelatihan dan bantuan kambing untuk mewujudkan nafkah baru yang tidak merusak hutan, pembangunan MCK, penyediaan pupuk, bibit padi dll. Adapun manfaat lain yang diberikan adalah diikutsertakan MOU antara Balai TNGHS dan Pihak Swasta. Selain itu kebijakan tersebut juga memotivasi masyarakat untuk berpendidikan tinggi dikarenakan banyak peneliti yang datang ke kawasan hutan yang mengalami perluasan. Para peneliti tersebut memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Adapun manfaat lain berupa penghasilan tambahan dari rumah-rumah mereka yang dijadikan homestay dan disewa oleh peneliti maupun wisatawan. Manfaat yang paling terasa adalah kondisi air yang bagus dan tidak kekeringan sehingga sawah mereka subur.

3. Indikator SDM: Balai TNGHS memiliki kualitas pemahaman dalam pengelolaan hutan yang cukup baik dan juga kompetensi yang cukup baik.
4. Indikator otoritas dan diskresi: Memiliki kewenangan dan cukup memiliki diskresi dalam pengelolaan hutan
5. Indikator Geografis: menyelamatkan lebih banyak ekosistem sumberdaya hutan berupa flora dan fauna
6. Indikator Budaya: kondisi sosial budaya masyarakatnya yang memiliki keunikan dan ciri khas dari masyarakat suku sunda menjadi daya tarik pariwisata konservasi.

Adapun faktor penghambat kinerja implementasi kebijakan tata kelola hutan dapat dikemukakan, sebagai berikut:

1. Indikator kompleksitas kebijakan, dilihat dari faktor internal: Jumlah SDM Polisi Kehutanan, Penyuluh dan PEH serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan belum memadai, sedangkan dari faktor eksternal: Masyarakat di disekitar TNGHS masih melakukan perambahan dalam bentuk penggarapan lahan/ pemanfaatan lahan (untuk pemukiman, lahan pertanian, kebun campuran), Illegaloging, PETI (pertambangan emas tanpa izin), dan perburuan liar (satwa dan fauna yang berekonomi tinggi), ada banyak villa yang sudah berdiri sejak kawasan hutan dikelola oleh pengelola sebelumnya. Adapun masalah lain seperti kurangnya komunikasi dan kordinasi yang baik antara Balai TNGHS dengan Masyarakat
2. Indikator Persepsi Manfaat kebijakan, dilihat dari kerugian bagi pengelolaan: menambah beban dalam

pengelolaan hutan karena hutan yang mengalami perluasan tersebut terdapat masyarakat yang sudah sejak lama tinggal dan bermukim di kawasan hutan. sedangkan kerugian bagi masyarakat: adalah tidak diizinkan lagi menebang pohon/kayu untuk membuat rumah/ tempat ibadah dan tidak diizinkan merambah lahan, melakukan perburuan flora dan fauna sehingga mereka kehilangan mata pencaharian tambahan.

3. Indikator SDM: Jumlah SDM yang belum sesuai dengan kebutuhan. Terutama jumlah pegawai lapangan seperti polisi kehutanan, Pengendali Ekosistem Hutan, dan Penyuluh yang masih kurang
4. Indikator Otoritas Dan Diskresi: adanya tumpang tindih kewenangan dengan tiga pemerintah daerah dan kewenangan kepala adat.
5. Indikator Geografis: berada di tiga wilayah administratif pemerintahan dan terdapat masyarakat yang sudah sejak lama tinggal dan bermukim di kawasan tersebut khususnya masyarakat adat yang berjumlah kurang lebih ada 11-12 kasepuhan.
6. Indikator Budaya: Kondisi sosial budaya yang masyarakat adat yang mengikuti wangsit untuk menggarap lahan di kawasan hutan.

Dengan demikian, tata kelola hutan dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu kompleksitas, persepsi, otoritas dan diskresi, faktor geografis dan faktor budaya. Jika keenam faktor itu dijalankan dengan baik dan dipandang menjadi faktor pendukung, maka tata kelola hutan akan berjalan dengan baik.

Proses Monitoring dan Evaluasi Hasil Kebijakan Perluasan TNGHS

Dalam proses pemantauan dan evaluasi hasil kebijakan perluasan TNGHS, Balai TNGHS selaku pelaksana melakukan proses pemantauan dan evaluasi hasil kebijakan perluasan dan Perubahan fungsi hutan TNGHS dengan dilaksanakannya monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan yang dalam penelitian ini dibatasi kegiatannya yaitu monitoring dan evaluasi masyarakat daerah penyangga dan monitoring dan evaluasi kelembagaan maupun sarana dan prasarana Balai TNGHS.

Berdasarkan hasil observasi (pengamatan) dokumen/laporan tahunan BTNGHS diketahui bahwa kegiatan pertama yang termasuk ke dalam strategi Balai TNGHS dalam mengimplementasikan kebijakan perluasan dan perubahan fungsi TNGHS adalah memonitoring dan mengevaluasi masyarakat daerah penyangga. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi perkembangan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam kelompok (MDK) atau Masyarakat Kampung Konservasi (MKK) TNGHS.

Ruang lingkup kegiatan ini adalah monitoring aktivitas pemberdayaan masyarakat dan perkembangannya

yang meliputi peningkatan kapasitas SDM (sumberdaya manusia), pengembangan usaha ekonomi produktif dan pengembangan bina cinta alam dan lingkungan serta evaluasi mengenai dampak dan keberlanjutan kegiatan pemberdayaan masyarakat bagi kelompok/ masyarakat dan kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi ini adalah dengan melakukan pertemuan kelompok serta melakukan cek lapangan.

Sasaran pelaksanaan monitoring evaluasi masyarakat desa penyangga adalah:

1. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I Lebak; MKK Lebak Sangka dan MKK Cikuning
2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Bogor: MKK Cisangku dan Kelompok Tani Mandiri
3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III Sukabumi: Kelompok Kampung Konservasi Cililin dan MKK Sukagalih

Kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan MKK di nilai cukup berhasil dan perlu di kembangkan di tempat lainnya. Khususnya dalam penelitian ini kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan MKK di Kampung Sukagalih sebagai salah satu kelompok kampung konservasi di TNGHS. Berdasarkan pengamatan pada kelompok MKK, program yang di kembangkan memiliki pengaruh positif terhadap upaya pelestarian TNGHS karena dapat menimbulkan peran serta dan keterlibatan masyarakat secara aktif. Program MKK secara langsung maupun tidak langsung memiliki dampak positif secara ekonomi yang telah dirasakan oleh masyarakat atau pun anggota kelompok (Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak, 2014).

Berdasarkan hasil kegiatan monitoring dan evaluasi di kelompok MKK kampung sukagalih secara kelembagaan, pengelolaan kawasan hutan dan pemberdayaan masyarakat sudah berjalan dengan baik, namun masih diperlukan penguatan dan pembinaan terhadap kelompok. Program MKK secara langsung maupun tidak langsung memiliki dampak positif secara ekonomi yang telah dirasakan oleh masyarakat atau anggota kelompok (Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak, 2014).

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi maka beberapa saran yang diperlukan adalah peningkatan sistem dukungan dan intervensi dari berbagai pihak harus ditingkatkan dalam rangka mengatasi permasalahan yang dihadapi kelompok seperti informasi pasar, peningkatan kapasitas masyarakat, selain itu perlu dilakukan pembinaan kelompok dan keberlanjutan program terhadap kelompok MKK yang sudah berjalan. Pemberian sanksi juga diperlukan terhadap kelompok MKK yang tidak konsisten yang hanya mengharapkan bantuan ekonominya saja tanpa ada kepedulian dan tanggung jawab terhadap

kelestarian kawasan hutan. Diperlukan kegiatan peningkatan kapasitas terhadap anggota kelompok seperti pelatihan keterampilan dan budidaya. Keberlanjutan kegiatan pendampingan terhadap kelompok MKK dan rutinitas kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala dimaksudkan untuk mengetahui semua kendala dan permasalahan yang terjadi di kelompok (Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak, 2014).

Selanjutnya kegiatan monitoring dan evaluasi hasil kebijakan perluasan dan perubahan fungsi TNGHS yang berupa memonitoring capaian pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan Balai TNGHS dalam melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi kelembagaan maupun sarana dan prasarana. Kegiatan tersebut menghasilkan informasi bahwa kuantitas dan kualitas personil yang ada hingga saat ini belum mencukupi kepentingan pengelolaan taman nasional, bila dibandingkan dengan kawasan dan permasalahan pengelolaan yang dihadapi. Apabila dilihat dari jumlah resort pengelolaan Taman Nasional yaitu sebanyak 17 resort dan pada masing-masing resort baru berkisar 2-3 orang sementara untuk mengelola kawasan secara optimal dibutuhkan minimal 5-6 orang pegawai (Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak, 2014).

Lebih lanjut kualitas dan kuantitas SDM yang memadai terkait dengan keahlian, keterampilan, dedikasi dan berjiwa kepeloporan diperlukan untuk meningkatkan optimalisasi pengelolaan taman nasional. Bahkan upaya pengelolaan taman nasional memerlukan ilmu dan teknologi yang tepat sesuai dengan keragaman potensi sumber daya alam dan ekosistem. Dengan demikian maka diperlukan peningkatan kuantitas dan kualitas SDM TNGHS untuk menunjang pengelolaan sehingga pengelolaan TNGHS dapat berjalan dengan optimal (Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak, 2014).

Adapun pembangunan dalam rangka memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana (sarpras) pengelolaan dan pemanfaatan taman nasional saat ini masih belum memenuhi kebutuhan. Sarpras merupakan alat penunjang dalam pelaksanaan pengelolaan kawasan TNGHS. Namun demikian secara kualitas dan kuantitas masih belum memadai secara optimal. Dari segi kualitas beberapa sarana dan prasarana dimaksud sudah tidak layak pakai sehingga perlu perbaikan dan atau pergantian. Sementara dari segi kuantitas penambahan jumlah sarpras yang ada diharapkan mampu mendukung kinerja pengelolaan. Sarpras yang dirasakan perlu adalah pengadaan kantor resort, peralatan pengolahan data yaitu PC untuk kantor Balai dan seksi, printer untuk di resort. Selain itu, pengadaan peta kerja juga diperlukan untuk menunjang aktifitas para personil di lapangan. Hal ini terkait pengolahan dan alur data/ informasi dari lapangan ke kantor balai dan sebaliknya. Selain itu beberapa kendaraan yang kemampuannya tidak maksimal mengingat kondisi medan yang

harus dilewati di kawasan TNGHS dan sekitarnya (Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak, 2014)

SIMPULAN

Berdasarkan Implementasi Kebijakan Tata Kelola Hutan Taman Nasional Gunung Halimun Salak jika dilihat dari faktor kebijakan tergolong cukup baik/ sedang, hal ini berkaitan dengan proses implementasi kebijakan yang belum optimal dan masih ada masalah-masalah yang harus diselesaikan diantaranya permasalahan internal Balai TNGHS yaitu minimnya jumlah SDM khususnya jumlah polisi kehutanan dan belum memadainya jumlah sarana dan prasarana. Adapun masalah eksternal yang dihadapi Balai TNGHS yaitu masyarakat yang bermukim di dekat, didalam maupun disekitar TNGHS masih melakukan perambahan dalam bentuk penggarapan lahan baik untuk pemukiman, lahan pertanian, kebun campuran dan kebutuhan lainnya, illegal logging, PETI (Pertambangan Emas Tanpa Izin), dan Perburuan Liar (Perburuan satwa dan flora yang berekonomi tinggi), serta masih berdirinya banyak villa di gunung bunder yang sudah berdiri sejak kawasan hutan dikelola oleh PERUMPERHUTANI.

Kebijakan Perluasan TNGHS memberikan manfaat pada pengelolaan TNGHS yaitu mencegah kerusakan hutan dan memulihkan kembali kawasan hutan yang mengalami kerusakan. Adapun manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat diantaranya masyarakat ikut serta dalam hubungan kemitraan dengan pihak lain, masih diizinkan mengelola HHBK, adanya bantuan kepada masyarakat berupa kambing, bangunan MCK (mandi cuci kakus), pupuk, bibit padi, dll. Adapun manfaat lain yaitu mendapatkan penghasilan tambahan dari rumah-rumah mereka yang dijadikan homestay, disewa oleh peneliti/ wisatawan yang hendak berkunjung ke kawasan TNGHS. Kebijakan perluasan TNGHS juga memotivasi masyarakat untuk berpendidikan tinggi. Namun kebijakan perluasan tersebut juga memberikan kerugian bagi pengelolaan dan masyarakat. Kerugian itu berupa menambah beban dan tanggung jawab Balai TNGHS dalam mengelola hutan sehingga pengelolaan yang dilakukan saat ini belum seoptimal sebelum adanya kebijakan perluasan, dan kebijakan perluasan TNGHS juga cukup merugikan masyarakat karena masyarakat dilarang untuk merambah hutan lagi sebagai mata pencaharian dan masyarakat dilarang menebang kayu/pohon untuk membuat dan memperbaiki rumah mereka serta cukup membuat resah masyarakat dalam menjalankan aktivitas atau kegiatan.

Implementasi kebijakan tata kelola hutan Taman Nasional Gunung Halimun Salak jika dilihat dari Kapasitas Organisasi juga tergolong cukup baik/ sedang. Hal ini berkaitan dengan kualitas pemahaman SDM yang sudah baik, namun jumlah SDM nya masih kurang .Adapun

kompetensi SDM yang masih perlu ditingkatkan lagi kompetensi pendidikan dan keterampilan SDM-nya. Adapun kemampuan Otoritas dan diskresi Balai TNGHS yang sejauh ini bisa dikatakan cukup mampu mengatasi permasalahan kebijakan karena ada program pengelolaan yang telah mereka lakukan namun masih perlu dievaluasi kembali komunikasi dan kordinasi secara keseluruhan yang dijalin dengan pemerintah daerah maupun masyarakat khususnya masyarakat adat yang sampai saat ini hubungannya kurang harmonis dengan Balai TNGHS sehingga sampai saat ini bisa dikatakan belum terjalinnnya kerjasama yang baik antara Balai TNGHS dengan pemerintah daerah maupun masyarakat dalam pengelolaan hutan.

Implementasi kebijakan tata kelola hutan Taman Nasional Gunung Halimun Salak jika dilihat dari faktor lingkungan juga tergolong cukup baik / sedang. Hal ini berkaitan dengan situasi geografis dan kondisi sosial budaya yang cukup menghambat pengelolaan TNGHS dikarenakan adanya jumlah pemerintah daerah yang lebih dari 1 sehingga belum optimalnya kordinasi yang baik dengan ketiga pemerintah daerah tersebut. Situasi geografis yang meliputi tiga kabupaten ini juga memiliki banyak kampung dengan masyarakat dengan latar belakang/kepribadian berbeda-beda dari setiap daerah yang berdekatan dan berinteraksi langsung dengan kawasan TNGHS. Adapun hambatan lain yaitu kondisi sosial budaya masyarakat, khususnya masyarakat adat yang mengikuti wangsit untuk menggarap lahan di kawasan hutan. Namun, situasi geografis dan kondisi sosial budaya juga cukup mendukung dan berkontribusi terhadap pengelolaan TNGHS hal ini dikarenakan situasi geografis tersebut mampu menyelamatkan dan melindungi lebih banyak keanekaragaman hayati yang ada di kawasan hutan yang berada di tiga kabupaten tersebut. Adapun kondisi sosial budaya masyarakat TNGHS yang cukup berkontribusi terhadap pengelolaan hutan TNGHS.

DAFTAR PUSTAKA

- Adimiharja, K. (1992). Kasepuhan Yang Tumbuh di Atas yang Luruh. Bandung: PT. Tarsito.
- Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak. (2014). Laporan Tahunan, Tahun 2014. Sukabumi.
- Bappenas (2007). Laporan Akhir Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan nasional.
- Dunn, W. N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Grindle, M. S. (1980). Politics and Policy Implementation in The Third World. New Jersey: Princnton University Press.

- Purwanto, E.A. & Sulistyastuti., D.R. (2012). Implementasi Kebijakan Publik.Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media.
- Rahmawati, R., Salbiah, E. & Pratidina, G. (2016). Pedoman Pariwisata Budaya: Mengenal Masyarakat Kasepuhan Sinar Resmi Taman Nasional Gunung Halimun Salak (II). Bogor: Unida Press.
- Rahmawati, R. (2013). Konflik-Konflik Sumberdaya Hutan Di Jawa Barat Dan Kalimantan Barat, Indonesia. IPB University.
- Rahmawati, R., Pratidina, G. & Muarif. (2011). Strategi Adaptasi Ekologis Dan Pengentasan Kemiskinan Pada Masyarakat Sekitar Taman Nasional Gunung Halimun Salak. *Sosial Humaniora*, 2, (1), 26-43.
- Rosalia, F. & Ratnasari, Y. (2016). Analisis Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Di Sekitar Kawasan Hutan Lindung Register 30 Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung Tahun 2010. *Sosiohumaniora*, 18, (1), 32-36.
- Siregar, B. (1993). Metode Riset Sosial. Jakarta: CV Kurnia.
- Sjoraida, D.F. (2015). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Pada Pemerintah Provinsi Jawaformasi Publik Pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. *Sosiohumaniora*, 18, (3), 213-220.
- Subadi. (2010). Penguasaan dan penggunaan Tanah Kawasan Hutan. Jakarta: PT.Prestasi Pustaka Karya.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Administrasi. Bandung: ALFABETA.
- Winarno, B. (2014). Kebijakan Publik : Center Of Academic Publishing Service (CAPS). Jakarta: PT.Buku Seru.
- Yani, A. T. (2012). Wajar Kebijakan Publik. Bandung: Humaniora.

KESANTUNAN BAHASA JAWA CERAMAH EMHA AINUN NADJIB GREBEG SURA KE 4000 DI COLOMADU TAHUN 2018

Rizka Rahma Pradana

Program Studi Magister Pengkajian Bahasa, Program Sekolah Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Surakarta
E-mail rizka_pradana.pbsidums@yahoo.com

ABSTRAK. Tujuan penelitian menganalisis kesalahan berbahasa Indonesia dalam bidang sintaksis, morfologi, fonologi, dan sosiolinguistik, serta menemukan potensi yang dimiliki penutur. Teknik simak dan catat untuk mengkaji kesalahan bahasa Indonesia terhadap tokoh ulama Emha Ainun Nadjib saat ceramah “Grebeg Sura ke 4000 di Colomadu Karanganyar”. Jenis penelitian kualitatif. Metode padan digunakan untuk menganalisis data. Teknik pengujian data menggunakan triangulasi. Ditemukan kesalahan berbahasa bidang sintaksis berupa kemubadziran kata dan ketidakefektifan kalimat, kesalahan bidang morfologi berupa konfiks, dan bidang fonologi terdapat penggunaan bahasa tidak baku. Secara sosiolinguistik terdapat campur kode dan alih kode. Kesalahan yang mendominasi adalah campur kode. Campur kode merupakan potensi untuk menarik perhatian mitra tutur.

Kata kunci: sosiolinguistik; budaya Jawa; kesantunan berbahasa

LANGUAGE PERSONNEL JAVA, EMHA AINUN NADJIB GREBEG SURA TO 4000 IN COLOMADU IN 2018

ABSTRACT. The purpose of the study was to analyze errors in Indonesian in the fields of syntax, morphology, phonology, and sociolinguistics, and to discover the potential of speakers. The technique is to see and note to examine the errors of the Indonesian language towards the ulama leader Emha Ainun Nadjib during the lecture “Grebeg Sura to 4000 at Colomadu Karanganyar”. Type of qualitative research. The matching method is used to analyze data. Data testing techniques using triangulation. Found language errors in the field of syntax in the form of word slippage and sentence ineffectiveness, morphological errors in the form of confixes, and phonological fields using non-standard language. Sociolinguistically, there is code mixing and code switching. The dominating error is code mixing. Mixing code is the potential to attract the attention of speech partners.

Keywords: sociolinguistics; Javanese culture; language politeness

PENDAHULUAN

Kesalahan berbahasa dipengaruhi oleh kompetensi atau daerah pengetahuan yang dimiliki penutur. Penyimpangan yang sering terjadi bersifat sistematis, konsisten, dan menggambarkan kemampuan peserta didik pada tahap tertentu (yang biasanya belum sempurna) temuan Markhamah dan Sabardila (2011:54-55).

Astuti (2012:445) mengutarakan bahwa bahasa adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi dan menunjukkan identitas masyarakatnya. Hidup dan berkembangnya bahasa ada pada masyarakat karena bahasa digunakan oleh masyarakat.

Fitriyani (2012:136) menyatakan bahwa kebudayaan dan agama sebagai satu rangkaian nilai dan simbol yang saling berhubungan. Kebudayaan agama merupakan ketaatan perilaku manusia terhadap Tuhan. Perilaku manusia yang baik dapat mempengaruhi lingkungannya.

Temuan Gusriani (2012:288) adalah kesantunan berbahasa guru diduga dapat meredakan situasi yang kurang nyaman saat terjadi permasalahan dengan siswa. Bahasa yang santun diduga dapat meredakan amarah dan rasa kecewa guru pada siswa, dan dapat membuat situasi tetap terkendali.

Hanafi (2014:405) menjelaskan orang menggunakan jauh lebih banyak bentuk standar kepada mereka yang

tidak dikenalnya dengan baik dan lebih banyak bentuk vernakuler kepada teman-teman mereka. Hubungan penutur dengan lawan tutur sangatlah penting dan menentukan gaya bertutur yang sesuai.

Mislikhah (2014:295) menyatakan kesantunan merupakan aturan perilaku yang ditetapkan dan disepakati bersama oleh suatu masyarakat tertentu sehingga menjadi prasyarat yang disepakati bersama. Aturan bahasa Jawa disebut tatakrama. Tatakrama itu tercermin dalam tanda verbal.

Menurut Muridan (2007:9) menjelaskan penyebaran Islam di Jawa dengan dua pendekatan. Pendekatan yang dilakukan dengan Islamisasi kultur dan Jawanisasi Islam. Pendekatan tersebut dilakukan untuk menginternalisasikan nilai-nilai Islam di Jawa.

Dikatan oleh Nurfamily (2015:1) bahwa penutur bahasa Indonesia sekarang kurang memperhatikan mak-sim sopan santun dalam berbahasa. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya pengetahuan penutur terhadap prinsip sopan santun dalam berbahasa, prinsip kerja sama dalam berbahasa, dan konteks penggunaan bahasa.

Dalam kaitan dengan kesopanan kedudukan PSS dalam aktivitas berbahasa tidak saja perlu, tetapi sangat penting. Hal itu berkaitan dengan realisasi etika berbahasa. Kesantunan berbahasa dapat direalisasikan

melalui tindak bahasa memberitahukan, mendeklarasikan, mengekspresikan, menanyakan, dan memerintah (Prayitno, 2011:206).

Dinyatakan Room (2013:225) bahwa berbicara dengan lemah lembut merupakan prinsip Alquran tentang santun berbahasa. Kesantunan bahasa berporos pada suara yaitu bertutur dengan lemah lembut.

Setiyadi (2012:145) mengungkapkan bahwa bahasa dan masyarakat tidak pernah bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Di mana ada masyarakat, di situ ada bahasa, dan sebaliknya.

Peneliti Jaya (2013:8) menyatakan kemunculan kebudayaan Islam berasal dari Tuhan. Kebudayaan terbentuk melalui adat istiadat daerah. Kebudayaan semakin berkembang mengikuti perkembangan zaman. Landasan kebudayaan bersumber dari tuntunan ajaran Tuhan.

Penelitian ini menganalisis kesalahan berbahasa Indonesia dalam bidang sintaksis, morfologi, fonologi, sosiolinguistik, dan kata interogatif serta menemukan potensi yang dimiliki penutur pada "Kesantunan Berbahasa Jawa dalam Ceramah Emha Ainun Nadjib Grebeg Sura ke 4000 di Colomadu Tahun 2018".

METODE

Jenis data berupa kualitatif yang diteliti berhubungan secara langsung dengan narasumber tanpa merubah hasil yang ditemukan di lapangan. Pendapat Sugiyono (2012:14) menjelaskan jenis kualitatif berupa penelitian yang alamiah tanpa mengurangi atau menambah dari sumbernya. Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Baturan lapangan Colomadu, Kabupaten Karanganyar. Penggunaan teknik simak dan catat pada analisis data ini bertujuan untuk memperoleh hasil objek secara langsung. Objek penelitian berupa penggunaan bahasa lisan oleh Ustadz Emha Ainun Nadjib. Mahsun (2013:92-93) menyatakan untuk memperoleh data menggunakan teknik simak dan catat. Metode padan digunakan untuk menganalisis kata, frasa, klausa, dan kalimat yang terdapat dalam tuturan informan (kesalahan berbahasa Ustadz Emha Ainun Nadjib). Triangulasi untuk menguji keabsahan data. Peneliti juga mentransformasikan hasil rekaman data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan data analisis kesalahan berbahasa pada penelitian ini diklasifikasikan dari beberapa bidang, yakni bidang sintaksis, morfologi, fonologi, sosiolinguistik, dan kata interogatif. Berikut penjelasan kesalahan berbahasa masing-masing bidang.

Analisis Kesalahan Berbahasa

Sintaksis merupakan cabang linguistik yang membahas susunan kata-kata dalam suatu kalimat (Verhaar,

2012:11). Analisis kesalahan berbahasa dalam sintaksis berupa struktur kalimat, kelogisan, urutan kata, kohorensi (kepaduan), kevariasian, dan keserasian antar kalimat. Temuan penelitian kesalahan bidang sintaksis dinyatakan berikut ini.

- (1) *Bapak ibu hadirin dan jamaah rahmatulloh, acara selanjutnya yaitu **sinau** bareng bersama Cak Nun dan Kyai Kanjeng... (MC.GS.40)*
- (2) *...**tepek tangan untuk Desa Baturan** yang pertama tahun 2014 Cak Nun dan Kyai Kanjeng persis di lapangan ini dan alhamdulillah pada ke dua kalinya di tahun 2018 genap 4000 pergelaran cak Nun dan Kyai Kanjeng juga ada di sini. (MC.GS.40)*
- (3) ***Saya** nyatakan cinta **saya** dunia akhirat kepada semua yang bisa **saya** pandang wajah anda maupun yang tidak bisa saya lihat di belakang-belakang,... (mubazir dan ambigu) (CN.Ust.60)*
- (4) *...**kalau** memang kalian cinta kepadaku maka caranya untuk bercinta padaku adalah ikutilah jejakku begitulah kata Rosullah Sholallahu Alaihi Wassalam. (CN.Ust.60)*
- (5) *Jadi malam hari ini kita sinau bareng, termasuk awal tadi kita menyanyikan Indonesia Raya **kemudian** kita membaca Pancasila **kemudian** kita melaksanakan grebeg sura satu Muharom awal dari Tahun Hijriah setiap tahun dan ini sudah 14 kalinya di Batur Colomadu Alhamdulillahirobilalamin inggih Baturan. (CN.Ust.60)*
- (6) ***Wes ana** kyai aku ura lulus sebagai kyai dadi aku ura nduwe ketepatan atau mahkom untuk ngulang njenenganwes onosarjana, **wes ana** dokter, **wes ana** sekolah pesantren lak aku ora karone wami ngulang karena aku tidak punya ilmu yang unggul dari anda semua mulane aku wanine sinau bareng, nduk koe sakturengi rabi lak mbok sinauni to wong lanang kae? (CN.Ust.60)*
- (7) *wes rapopo sing penting wes ngerti prinsip-prinsipe aku ngerti cah lanang kae nasab **oke**, akhlak **oke** ibadah **oke** yo lumayan dute ora banget-banget kerene ya gitukan ya. (CN.Ust.60)*
- (8) *Mengke kula aturi bapak-bapak sedaya para kyai, para pengurus NU, para sesepuh, pak Kapolsek, pak Danramil dan semuanya untuk melu nata kendurene ilmu. (CN.Ust.60)*

Kesalahan berbahasa pada nomer (1), (2), (3) merupakan kesalahan kemubaziran dan ketidakefektifan kalimat. Pada nomer (1) *Bapak ibu hadirin dan jamaah* termasuk kalimat mubazir seharusnya menggunakan salah satu kata berupa hadirin karena mencakup semua peserta yang hadir. Sedangkan nomer (2) *tepek tangan untuk Desa Baturan* seharusnya tepuk tangan untuk warga Desa Baturana karena tepuk tangan ditujukan

untuk warga yang tinggal di Desa Baturan. Pada nomer (3) kata *Saya* nyatakan cinta *saya* dunia akhirat kepada semua yang bisa *saya* pandang terdapat kemubaziran kalimat, seharusnya penggunaan kata saya cukup satu kali di awal kalimat menjadi saya nyatakan cinta dunia akhirat kepada semua yang bisa dipandang. Pada nomer (4) penulisan ku mengalami kemubaziran terjadi pada kalimat ini seharusnya cukup satu menjadi *Kalau memang kalian cinta kepada Rosulloh Sholallahu Alaihi Wassalam maka ikutilah jejakku*. Pada nomer (5) Penggunaan kata kemudian berkali-kali mengakibatkan kalimat ini menjadi tidak efektif. Seharusnya *Jadi malam hari ini kita sinau bareng termasuk awal tadi kita menyanyikan Indonesia Raya kemudian kita membaca Pancasila lalu kita melaksanakan grebeg sura satu*. Pada nomer (6) pada kalimat tersebut kata *wes ana* merupakan bahasa Jawa yang artinya sudah ada. Kata *wes ana* tidak perlu ditulis sampai tiga kali sehingga membuat kalimat ini menjadi mubadzir. Pada nomer (7) *wes rapopo sing penting wes ngerti prinsip-prinsipe aku ngerti cah lanang kae nasab oke, akhlak oke ibadhe oke yo lumayan duite ora banget-banget kerene ya gitukan ya*. Terjadi kemubadziran pada kalimat ini karena kata oke berulang sampai tiga kali dan kata ya dua kali. Seharusnya cukup satu kata oke dan ya. Pada nomer (8) para yang terdapat pada kalimat di atas mengakibatkan kalimat menjadi mubadzir seharusnya kata para cukup di awal kalimat karena kata para lebih dari satu. Selain kemubaziran terdapat singkatan NU yang memiliki arti Nadatul Ulama merupakan kelompok atau golongan majelis dzikir dan sholawat.

Temuan Mutiadi (2016:7) menjelaskan kesalahan sintaksis berupa kesalahan penyusunan struktur kalimat, penggandaan subjek, campur kode, dan alih kode. Kesalahan sintaksis tersebut mendominasi pada penelitian. Persamaan dengan penelitian ini membahas mengenai kesalahan dibidang sintaksis ketidakefektifan kalimat. Perbedaan terhadap penelitian ini mengenai kesalahan pada penggandaan subjek.

Morfologi

Morfologi sebagai cabang ilmu bahasa yang membahas mengenai struktur pembentuk kata atau morfem. Kesalahan pada bidang morfologi berupa analisis kesalahan yang penggunaan morfem, kata, dan proses penambahan afiks (berupa prefiks, infiks, surfixs, dan konfiks), proses duplikasi atau perulangan, dan penggabungan kata. Adapun temuan mengenai kesalahan bidang morfologi di bawah ini.

(9) *Maka Allah kemudian titip pesan pada kekasihnya Kanjeng Nabi Muhammad Sholallahu Alaihi Wassalam yang ditulis dalam Al-Quran inkuntum tuhibil yuhtikumulloh fatabiuni yuhkibumulloh*. (CN. Ust.60)

Kesalahan pada nomer (9) kata *titip* secara morfologi belum tepat seharusnya mendapat imbuhan konfiks awalan meN- dan akhiran -kan menjadi *menitipkan*.

Peneliti Mutiadi (2016:7-8) menjelaskan kesalahan dibidang morfologi banyak terjadi karena menghilangkan imbuhan pada suatu kata dan penyingkatan morfem. Kesalahan penggunaan bahasa daerah berupa pembentukan kata kerja yang disingkat. Hal ini menimbulkan kesalahan dalam bidang morfologi. Persamaan dengan penelitian ini membahas mengenai kesalahan morfologi pada penyingkatan morfem karena bahasa daerah yang mempengaruhi. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini penyingkatan penggunaan bahasa daerah.

Fonologi

Fonologi sebagai salah satu cabang ilmu bahasa yang membahas mengenai bunyi bahasa tertentu berdasarkan fungsinya. Kesalahan berbahasa pada fonologi meliputi penggunaan huruf yang tidak baku. Adapun temuan mengenai kesalahan bidang fonologi di bawah ini.

- (10) *cambuk yang membuat jiwamu menjadi hantu suami dan istri tak saling mengabdikan tak mengalahkan atau memenangkan keduanya adalah sahabat bergandengan tangan bersama-sama mengarungi jejak*. (CN.Ust.60)
- (11) *nduk koe sakdurengi rabi lak mbok sinauni to wong lanang kae?* (CN.Ust.60)
- (12) *Kita sudah punya tema beberapa tapi kita sinau bareng*. (CN.Ust.60)
- (13) *Ketika kita sudah berumahtangga masih mempelajari suami dan istri ndak?* (CN.Ust.60)

Kesalahan penulisan pada nomer (10) dan (11) kata *istri* dan *koe* secara fonemis [isteri] dan [kowe]. Pada nomer (12) dan (13) kata *tapi* dan *ndak* termasuk kata tidak baku dalam bahasa Indonesia penulis memerhatikan kaidah kebahasaan terutama bahasa baku. Jadi penulisan yang baku kata *tetapi* dan *tidak*.

Hasil analisis Nuryadi (2010:80) menjelaskan ragam bahasa dipengaruhi oleh situasi pemakaian bahasa yang digunakan oleh masyarakat secara berdampingan. Ragam pokok bahasa berupa ragam tinggi (*formal style*) dan kesusasteraan yang berasal dari masyarakat. Persamaan dengan peneliti mengkaji ragam bahasa daerah. Perbedaan dengan hasil penelitian peneliti menganalisis situasi ragam pokok bahasa.

Sosiolinguistik

Rohmadi (2010:12) menjelaskan sosiolinguistik adalah ilmu bahasa yang membahas mengenai kebahasaan dengan hubungannya dengan faktor-faktor sosial, situasional, dan kultural. Kesalahan bidang sosiolinguistik

meliputi alih kode dan campur kode. Peralihan bahasa daerah ke bahasa Indonesia atau sebaliknya yang dipengaruhi oleh situasi tertentu disebut alih kode. Sedangkan campur kode yaitu penggunaan dua bahasa secara bersamaan dipengaruhi oleh latar belakang penutur.

Kesalahan tersebut pada penggunaan kata yang dicampurkan antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah atau bahasa Inggris. Kesalahan bidang sosiolinguistik ditemukan di bawah ini.

- (14) *Bapak Ibu hadirin **rahmatulloh** memecah mengutuhkan kerja dan fungsi memecah manusia sujud sembahyang mengutuhkannya.* (CN.Ust.60)
- (15) *Tuhan kala hari esok jangan di makan cinta di kandungan cakrawala kalau cemas di **iming-imingi** tetangga berkacalah pada sunyi 1987 oleh Emha Ainun Nadjib atau Cak Nun.* (CN.Ust.60)
- (16) *Bapak ibu hadirin dan jamaah **rahmatulloh**, acara selanjutnya yaitu **sinau bareng** bersama Cak Nun dan Kyai Kanjeng... .* (CN.Ust.60)
- (17) *Untuk itu yang terhormat Cak Nun dan Kyai Kanjeng waktu sepenuhnya kita **haturkan sumonggo**.* (CN.Ust.60)
- (18) *Maka Allah kemudian titip pesan pada kekasihnya Kanjeng Nabi Muhammad **Sholallahu Alahi Wassalam** yang ditulis dalam Al-Quran **inkuntum tuhibul yuhtikumulloh fatabiuni yuhkibumulloh**.* (CN.Ust.60)
- (19) *Kangenan pengen ketemu maka Allah mengatakan **famayyanju niko arobi falmayyakmal amalan sholika** barang siapa yang menginginkan pertemuan denganku maka berbuatlah baik.* (CN.Ust.60)
- (20) *Nek tresna mesti **outputnya** kengen inggih boten?*(CN.Ust.60)
- (21) *Jare biyen arep brontak arep melu gabung Solo apa Sukoharjo saiki dalane wes didadani ora sida **alhamdulillahirobilalamiin inggih alhamdulillah pokoke bengi iki muga-muga iki mau aku lewat kono ya Allah wong sakmeneki akahi jan-jane dorene ki sing diparani sapa ?*** (CN.Ust.60)
- (22) *Insyallah berkahnya lebih tinggi daripada yang tinggal di kabupatennya sendiri **ngoten inggih kira-kira**.* (CN.Ust.60)
- (23) ***Mengke kula aturi** bapak-bapak sedaya para kyai, para pengurus NU, para sesepuh, pak Kapolsek, pak Danramil dan semuanya untuk **melu nata kendurene** ilmu pada malam hari ini.* (CN.Ust.60)
- (24) *Tuhan kala hari esok jangan dimakan cinta di kandungan cakrawala kalau cemas di **iming-mingi** tetangga berkacalah pada sunyi 1987 oleh Emha Ainun Nadjib atau Cak Nun.* (CN.Ust.60)
- (25) *tapi jangan khawatir ilmu **kuwi** bermacam-macam ada yang tumbuh cepat, ada yang langsung tumbuh.* (CN.Ust.60)
- (26) *Ketika kita sudah kawin perak 25 tahun isi **sinau ora?*** (CN.Ust.60)
- (27) *Ketika **uwes seket** tahun masih belajar dan **soyo suwe angel** dipelajari **jebul wong lanang wedok ngonten inggih**.*(CN.Ust.60)
- (28) *Pulau Colomadu pulau ya la kabupatene **neng kidul e la ki neng kene dewe gih ta?*** (CN.Ust.60)
- (29) *Jare biyen arep brontak arep melu gabung Solo apa Sukoharjo saiki dalane wes didadani ora sida **alhamdulillahirobilalamiin inggih alhamdulillah pokoke bengi iki muga-muga iki mau aku lewat kono ya Allah wong sakmeneki akahi jan-jane dorene ki sing diparani sapa ? Apa ta?*** (CN.Ust.60)
- (30) ***Nek tresna** mesti **outputnya** kengen inggih boten?* (CN.Ust.60)
- (31) *Bangsa Indonesia umat manusia dan setiap manusia merindukan sesuatu yang sejati dan tidak akan pernah bertemu itu namanya **asshirot almustakim** anda melalui sabil kemudian anda menempuh **syarik** kemudian anda juga menjalankan **thorik** ya untuk mencapai **shirot almustakim**.* (CN.Ust.60)
- (32) *Masalahnya adalah **we ki kangen kara sapa?** cinta **nanng sapa?*** (CN.Ust.60)
- (33) *Jadi aku adalah tetanggamu, kalau aku mengatakan kau cantik, engkau hebat, itu sungguh-sungguh karena engkau cantik dan hebat **ngono** ya.* (CN.Ust.60)
- (34) *Ya Allah malam ini kita berkumpul untukmu **fasaha bi ma fisama watiwalard wahual azizulkhakim ojo ana** siang yang kita lewat tanpa bertasbih kepada Allah, **ojo ana bengi** yang bertasbih kepada Allah, **ojo nyekel apa-apa yen ora mbok jak** bertasbih kepada Allah.* (CN.Ust.60)
- (35) *Aku **lak meng** tanggamu tangga **kuwikan kowe luweh percaya ngene nak enek cah ayu ki jare sabrange nek ana cah ayu wes ana wong loro seng ngarani cah iki ayu.*** (CN.Ust.60)

Data (15) dan (24) ditemukan campur kode pada kata *iming-imingi* memiliki arti sesuatu untuk membujuk (memikat hati). Data (16) *sinau bareng* artinya memiliki arti belajar bersama. Jadi *sinau bareng* memiliki arti belajar bersama. Pada data (17) ditemukan campur kode *haturkan sumonggo*. *Haturkan* memiliki arti memberikan, *sumonggo* memiliki arti mempersilahkan. Jadi kata *haturkan sumonggo* berarti memberikan waktu atau mempersilahkan pembicara. Data (20) temuan alih kode dan campur kode, alih kode berupa *Nek tresna mesti, kengen inggih boten?* memiliki arti apabila cinta pasti, rindu ya tidak? pertanyaan untuk perasaan yang terdapat di hari, sedangkan campur kode bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia berupa *outputnya* berarti keluarnya.

Pada data (21) ditemukan campur kode, berupa *Jare*

biyen arep brontak arep melu gabung Solo berarti katanya dahulu ingin melawan ingin ikut, *lewat kono* berarti melalui sana, *wong sakmeneki akahi jan-jane dorene ki sing diparani sapa?* berarti manusia sebanyak ini sebenarnya mau kesini siapa yang didatangi?, sedangkan campur kode dengan *alhamdulillahirobilalamiin* berarti ungkapan rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah. Temuan campur kode pada data (22) berupa *ngoten inggih kira-kira* berarti begitu ya kira-kira sebagai ungkapan memperkirakan. Data (23) temuan campur kode berupa *Mengke kula aturi* berarti nanti saya persilahkan. Data (25) temuan campur kode kata *kuwi* berarti itu. Data (26) temuan campur kode kata *sinaw ora* berarti belajar tidak beratnya terhadap mitra tutur. Pada data (27) temuan campur kode berupa *uwes seket tahun* menjelaskan umur lima puluh tahun, *soyo suwe angel* memiliki arti semakin lama sulit dipelajari, *jebul wong lanang wedok ngonten inggih* data ini berarti ternyata orang laki-laki perempuan sama ya. Data (28) temuan data campur kode pada kalimat *kabupatene neng kidul e la ki neng kene dewe gih ta?* berarti kabupatennya berada di selatan la ini berada disini sendiri ya?

Temuan alih kode pada data (14) dan (16) pada kata *rahmatulloh* memiliki arti mendapat rahmat dari Allah SWT. Temuan data (18) *Sholallahu Alahi Wassalam* sebagai gelar untuk sanjungan nabi Muhammad dan *inkuntum tuhibul yuhtikumulloh fatabiuni yuhkibumulloh* termasuk alih kode menjelaskan doa yang terdapat di Al Quran yang dimaksud untuk kalau memang kalian cinta kepada ku maka ikutilah jejak yang diajarkan rosullah. Pada data (19) terdapat alih kode bahasa Arab yang ditafsirkan ke bahasa Indonesia berupa *famayyanju niko arobi falmayyakmal amalan sholika* diartikan barang siapa yang menginginkan pertemuan denganku maka berbuatlah baik. Data (31) temuan berupa alih kode *asshirot almustakim, syarik, dari thorik* penggunaan bahasa Arab. Analisis campur kode data (32) berupa *we ki kangen kara sapa? cinta nang sapa?* berarti kamu itu rindu dengan siapa? cinta dengan siapa? ditujukan kepada mitra tutur bertanya mengenai rindu dan cinta terhadap siapa setiap orang. Pada data (33) merupakan campur kode berupa kata *ngono* ya berarti begitu ya. Data (35) termasuk campur kode berupa *ngene nak enek cah ayu ki jare sabrange nek ana cah ayu wes ana wong loro seng ngarani cah iki ayu* berarti begini apabila ada wanita cantik yang menyampaikan *sabrange (bahasa daerah penutur)* apabila ada yang menyatakan dua orang wanita ini cantik.

Penelitian Suryadi (2015:2) menjelaskan bahasa di Semarang dipengaruhi oleh masyarakat multilingual. Situasi ini selain berdampak pada posisi bahasa Jawa juga berdampak pada warna penggunaan tuturan Jawa. Sedangkan temuan Marmanto (2017:143) menjelaskan pada umumnya masyarakat dalam berkomunikasi menggunakan dua bahasa atau lebih (*bilingual*) sesuai

dengan partisipan, topik, dan situasinya. Fenomenanya saat ini banyak dari mereka yang menguasai dua bahasa bahkan lebih, yakni bahasa pertama (bahasa ibu) dan bahasa kedua. Persamaan dengan peneliti penggunaan bahasa Jawa yang melatarbelakangi. Perbedaan analisis data peneliti tidak mengkaji alih kode.

Kata Interogatif

Semua bahasa mempunyai cara khusus untuk menyampaikan informasi. Penyampaian informasi dapat dilakukan melalui pertanyaan. Dalam ilmu bahasa bentuk pertanyaan itu berkaitan dengan perihal konstruksi interogatif. Temuan Tarmini (2009:77) meneliti mengenai konstruksi interogatif tertutup hanya ditemukan tiga kata tanya, yaitu kata tanya *apa, apakah, dan bagaimana*. Letak urutan kata tanya di dalam kalimat cenderung menempati posisi di depan atau di awal kalimat. Kata tanya dalam konstruksi interogatif tertutup tidak mengisi atau menggantikan fungsi sintaksis. Oleh karena itu, pelepasan kata tanya dengan intonasi tertentu dapat dilakukan tanpa mengubah informasi yang ditanyakan. Berikut kata interogatif yang terdapat penelitian ini.

- (36) *Ketika kita sudah kawin perak 25 tahun isi sinaw ora?* (CN.Ust.60)
- (37) *pulau Colomadu pulau ya la kabupatene neng kidul e la ki neng kene dewe gih ta?*(CN.Ust.60)
- (38) *Jare biyen arep brontak arep melu gabung Solo apa Sukoharjo saiki dalane wes didadani ora sida alhamdulillahirobilalamiin inggih alhamdulillah pokoke bengi iki muga-muga iki mau aku lewat kono ya Alloh wong sakmeneki akahi jan-jane dorene ki sing diparani sapa ? apa ta?*(CN.Ust.60)
- (39) *lo sapa seng pengen ketemu kajaba wong seng kangen inggih boten? sapa seng kangen kajaba wong seng tresna betul nggak?*(CN.Ust.60)
- (40) *Masalahnya adalah we ki kangen kara sapa? cinta nang sapa?*(CN.Ust.60)
- (41) *karo pemimpinmu kowe yo wes mantep gari aku meng kancamu meng tetanggamu kan gitu inggih boten?* (CN.Ust.60)

Temuan data pada nomer (36), (37), (38), (39), (40), dan (41) sebagai temuan kata interogatif berupa kalimat tanya. Pada data nomer (36) berupa kata *sinaw ora?* berarti menanyakan belajar tidak?. Data nomer (37) berupa *kene dewe gih ta?* berarti menanyakan berada ada disini sendiri ta (keberadaan). Data nomer (38) berupa kata *sapa ? apa ta?*berarti menanyakan siapa (nama orang) apa (kegiatan yang dilakukan). Data nomer (39) dan (41) *inggih boten?* berarti menanyakan kepastian, sedangkan *betul nggak?*berarti menanyakan kebenaran. Data nomer (40) berupa *kangen kara sapa? cinta nang sapa?* berarti menanyakan rindu dan cinta.

Peneliti Suparjo (2008:2-50) menjelaskan kesalahan kata interogatif mengenai strategi kebudayaan Walisongo menggunakan instrumen kebudayaan lokal tersebut untuk mempromosikan nilai-nilai Islam. Persamaan dengan peneliti mengenai analisis instrumen budaya lokal dan agama. Perbedaan dengan peneliti menganalisis mengenai tatanan sosial Masjid.

Potensi yang dimiliki penutur

Potensi sebagai kelebihan yang dimiliki oleh penutur dan merupakan ciri khas seseorang.

1. Bahasa yang digunakan pembicara dapat menghidupkan suasana dengan interaktif dengan mitra tutur.
2. Penyajian materi yang dibawakan pembicara dapat membawa mitra tutur atau pendengar memahami maksud penutur karena mayoritas berasal dari Jawa.
3. Penutur merendahkan hati atas kemampuan yang dimiliki dengan bahasa mengajak mitra tutur untuk belajar bersama.

Gunawan (2013:18) mengungkapkan bahwa kesantunan berbahasa berkaitan dengan kesopanan perilaku. Kesantunan saling berkaitan antara bahasa dan perilaku. Kesantunan berbahasa merupakan hal mutlak yang dibutuhkan dalam berkomunikasi. Persamaan dengan penelitian ini potensi diri dari penutur melalui kesantunan bahasa yang digunakan untuk berinteraksi sosial. Perbedaan terhadap peneliti pada analisis penggunaan bahasa.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis ditemukan kesalahan berbahasa pada bidang sintaksis, morfologi, fonologi, sosiolinguistik, dan kata interogatif. Kesalahan bahasa bidang sintaksis meliputi kemubaziran dan ketidakefektifan kalimat yang disampaikan penutur. Kesalahan bahasa bidang morfologi pada penelitian ini penggunaan imbuhan *konfiks* awalan (meN-) dan akhiran (-kan). Kesalahan bahasa bidang fonologi berupa kaidah penggunaan bahasa baku. Kesalahan bidang sosiolinguistik menyangkut pemilihan kata yang dicampurkan antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah atau campur kode. Kesalahan kata interogatif, penutur tidak menggunakan kata tanya diawal tuturan seperti kata tanya *apa*, *apakah*, dan *bagaimana*.

Potensi yang dimiliki penutur bahasa yang digunakan dapat menarik lawan tutur untuk memperhatikan ceramah yang disampaikan. Penggunaan bahasa penutur dan mitra tutur dapat berlangsung secara baik karena kesamaan budaya. Selain hal tersebut potensi yang dimiliki penutur tidak ingin menunjukkan kelebihan yang dimiliki. Penutur merasa dirinya sebagai orang biasa unagkapan berupa *tetanggamu* sebagai bentuk bahwa derajatnya sama dengan mitra tutur.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, R (2012). Kesantunan Berbahasa dalam Talkshow “Neo Democracy” di Metro TV. *Jurnal MARKAH (Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia)*, 1, (1), 426-514.
- Fitriyani. (2012). Islam dan Kebudayaan. *Jurnal Al- Ulum*, 12, (1), 129-140.
- Gunawan, F. (2013). Wujud Kesantunan Berbahasa Mahasiswa Terhadap Dosen di Stain Kendari: Kajian Sosiopragmatik. *Journal Arbitrer*, 1, (1), 8-18.
- Gusriani, N. (2012). Kesantunan Berbahasa Guru Bahasa Indonesia dalam Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 2 Lintau Buo. *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 1, (1), Seri B 87.
- Hanafi, M. (2014). Kesantunan Berbahasa dalam Perspektif Sosiolinguistik. *Jurnal Ilmu Budaya*, 2, (2), 399-406.
- Jaya. (2013). Islam dan Kebudayaan Islami. *AT-TA'LIM*, 4, Diakses Jurnal Indonesian Publication Index (IPI) diakses 16 Oktober 2018
- Mahsun. (2013). Metode Penelitian Bahasa Tahapan Strategi, Metode, dan Teknik. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Markhamah & Sabardila, A. (2011). Analisis Kesalahan dan Karakteristik Bentuk Pasif. Solo: Jagat Abjad.
- Marmanto, S. (2017). Alih Kode dalam Interaksi di Lingkungan Pondok Pesantren Ulil Albaab: Kajian Sosiolinguistik”. *Cendekia*, 11, (2), 143-158.
- Muridan. (2007). Islam dan Budaya Lokal: Kajian Makna Simbol dalam Perkawinan Adat Keraton. *P3M STAIN Purwokerto: Ibdā` (Jurnal Studi Islam dan Budaya)*, 5, (1).
- Mutiadi, A.D. (2016). Analisis Kesalahan Morfologis dan Sintaksis Pada Pidato Presiden Joko Widodo Periode Januari 2015. *Jurnal Fon*, 6, (1), 1-8
- Mislikhah, ST. (2014). Kesantunan Berbahasa. *Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies*. 1, (2), 285-296.
- Nurjamily, W.O. (2015). Kesantunan Berbahasa Indonesia dalam Lingkungan Keluarga (Kajian Sosiopragmatik). *Jurnal Humanika*, 3, (15), 1-18
- Nuryadi. (2010). Bahasa dalam Masyarakat: Suatu Kajian Sosiolinguistik. *Jurnal Makna*, 1, (2), 75-84.
- Prayitno, H.J. (2011). Teknik dan Strategi Tindak Kesantunan Direktif di Kalangan Andik SD Berlatar Belakang Budaya Jawa. *Jurnal Kajian Linguistik dan Sastra*, 23, (2), 204-218

- Rohmadi, M. (2010). *Pragmatik: Teori dan Analisis*. Surakarta: Yuma Pustaka.
- Room, R. (2013). Konsep Kesantunan Berbahasa dalam Islam. *Jurnal Adabiyah*, XIII, (2), 223-234
- Setiyadi, D. (2012). Peranan Sociolinguistik dalam Pengajaran Bahasa: Sebuah Kajian Teoretis dan Penerapannya (Temuan Linguistik Untuk Pengajaran Bahasa). *Premiere Educandum: Jurnal Pendidikan Dasar dan Pembelajaran*, 20, (02), 145-157.
- Sudaryanto. (2013). *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa: Pengantar Penelitian Wahana Kebudayaan secara Linguistik*. Yogyakarta: Sanata Dharma University Press.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suparjo. (2008). Islam dan Budaya: Strategi Kultural Walisongo dalam Membangun Masyarakat Muslim Indonesia. *KOMUNIKA*, 2, (2), 178-193.
- Tarmini, W. (2009). Kata Tanya dalam Konstruksi Interogatif Bahasa Indonesia: Kajian Sintaktis dan Semantis". *Sosiohumaniora*, 11, (1), 77-92.
- Verhaar, J.W.M. (2012). *Asas-Asas Linguistik Umum*. Yogyakarta: Gadjah mada University Press.

THE GOOD GOVERNANCE IMPLEMENTATION AT VILLAGE IN EAST NUSA TENGGARA PROVINCE

Ella Wargadinata¹, dan Ika Sartika²

¹IPDN, Jl. Ir. Soekarno, Jatinangor, ³IPDN, Jl. Ir. Soekarno KM 20, Jatinangor,

²IPDN, Jl. Ampera Raya Cilandak Timur, Jakarta Selatan, Indonesia,

E-mail: ella@upm.ipdn.ac.id

ABSTRACT. The Government of Indonesia has implemented a progressive policy on rural development since 2015 through distributing enormous budget that has never been given so far, called as village fund policy. This policy is intended to empowering of poor people in the village throughout the development of village infrastructure to eliminate poverty or for poverty alleviation. In the period of 2015-2018, the budget increased significantly, reach one billion IDR for each village across the country. From the national spending recorded that in 2015, the village fund reaches IDR 20.7 trillion, increased to 47 trillion in 2016, 60 trillion in 2017 and 60 trillion in 2018. The research tries to reveal the implementation of Village Fund Policy in East Nusa Tenggara Province, as the third poorest in Indonesia. Research conducted in five villages in Ende and East Timor Tengah Regency, based on random purposive sampling method, involved 204 respondents. Research used quantitative approach through Discriminant analysis and good governance concept used as a basic framework. The result from data analysis showed that people participation and village official's responsiveness came as the success factor for village fund policy management in East Nusa Tenggara Province. This research implies that the Village Fund policy will only succeed if good collaboration is created between the community as the subject of development and the village government as the manager of development policies at the lower levels.

Key words: village fund; poverty alleviation; participatio; responsiveness

IMPLEMENTASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA YANG BAIK DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

ABSTRAK. Pemerintah Indonesia melakukan kebijakan pembangunan perdesaan yang sangat progresif sejak tahun 2015 dengan mengucurkan dana besar yang belum pernah dilaksanakan sebelumnya, disebut dengan dana desa. Kebijakan ini digunakan untuk memberdayakan masyarakat perdesaan dengan tujuan akhir untuk mengentaskan kemiskinan. Periode 2015-2018, anggaran dana desa terus naik secara signifikan, hampir satu milyar/desa. Catatan APBN menunjukkan pada tahun 2017 mencapai 20,7 Triliun, pada tahun 2017 naik menjadi 47 triliun dan mencapai 60 triliun pada tahun 2018. Penelitian ini berusaha mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan kebijakan dana desa di Provinsi NTT yang tercatat sebagai provinsi termiskin ketiga di Indonesia. Penelitian dilakukan di lima Desa dari Kabupaten Ende dan Kabupaten Timor Tengah Utara berdasarkan teknik sampel acak bertujuan, melibatkan 204 responden. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif melalui analisis diskriminan untuk melihat faktor penentu pelaksanaan kebijakan Dana Desa di Provinsi NTT, dengan menggunakan konsep good governance sebagai pisau analisis. Hasil analisis data memperlihatkan bahwa variabel partisipasi masyarakat dan daya tanggap pemerintah desa muncul sebagai faktor kunci keberhasilan kebijakan dana desa di perdesaan Provinsi NTT. Penelitian ini berhasil menyiratkan bahwa kebijakan Dana Desa hanya akan berhasil apabila tercipta kolaborasi yang baik antara masyarakat sebagai subjek pembangunan dan pemerintah desa sebagai pengelola kebijakan pembangunan di tingkat bawah.

Kata kunci: Dana desa; Pengentasan kemiskinan; Partisipasi; Daya tanggap

INTRODUCTION

Despite the fact of increasing macro economic indicators in Indonesia, however, the gap between cities and rurals are still wide. In the year 2014, The Government of Indonesia released Village law which put Village as a development machine to reach the poor at the rural level. Along with this law, The GOI has a development shifting policy paradigm called "Building from the periphery". The GOI put village and underdeveloped areas as a top priority on the development agenda. The rural-based development in Indonesia will directly accelerate poverty alleviation, reduce regional gap and strengthen the country's economy. Village fund policy is

one of the progressive rural development agenda under a new development paradigm. This policy is intended to empowering of poor people in the village throughout the development of village infrastructure to eliminate poverty or for poverty alleviation. In the period of 2015-2018, the budget increased significantly, reach one billion IDR for each village across the country. From the national spending recorded that in 2015, the village fund reaches IDR 20.7 trillion, increased to 47 trillion in 2016, 60 trillion in 2017 and 60 trillion in 2018. Each village will receive national fund one billion Indonesia currency as long as the village government fulfill the national's report standard. Beside village fund policy which budget transfer directly from national revenue, The village also receives

local fund from municipality budget called as Village Fund Allocation. The differences between both schemes are on the utilization, if national transfer used for infrastructure and rural economic empowerment, the municipal budget will go for village official cost. However, both are intended to boost rural economy development.

Some research revealed interesting findings on village fund implementation, the program succeed to strengthen social cohesion among rural people (Faisal & Nain, 2018). The village fund policy found has a strong relation with rural people participation (Daraba, 2017); (Mustanir & Darmiah, 2016). Some paper shows the contradictive result as found in Bogor. It exposed that village fund policy was prone to corrupt since the participation and control were low and lack of capacity from village officials to manage the budget was the crucial factors of this program (Subandi, 2017). Research in a poor remote village in Majene Regency, West Sulawesi presented another fact of rural development in Indonesia. The village fund program was not adequate to enhance rural people welfare. Lack of infrastructure, lack of clean water were found in this village (Akbar & Prabawati, 2018). Due to the nature of the policy and the diversity of villages in Indonesia, the village fund policy is salient subject to explore.

Good Governance is a concept which guarantees the implementation of responsible development management in line with democratic principles. The implementation of good governance principles will prevent bias of government activity and prevent political and administrative abuse. Research from Bangladesh was convincingly proved that practices good governance concept will reduce corruption (Saha, 2014). The principle of good governance gives a paradigm shift in government and public relation. By now, the government act as a public servant. Good governance is considered as a new management paradigm or administration development. This role assigns the government as an agent of change from society development, particularly in developing countries. The government is also called as an agent of development because the shift is desired (Rustiarini, 2016). Others opinion said that poverty can decrease through good governance implementation (King, 2015).

Good governance was initially applied to companies throughout the world with the aim to formulate concepts that must be applied by creating inherent supervision of the company and its internal management. Therefore, the Good Corporate Governance was formed with the main principles: transparency, accountability, equity, responsibility and responsiveness (Wijoyo, Salman, & Abrianto, 2018). Corporate Governance concept was proposed in order to achieve a more transparent corporate management for all utilization of financial statements. If

this concept is implemented well, the transparent corporate management will be getting better and It is expected that economic growth will continue to increase and will benefit many parties (Astuti & Yulianto, 2016). Basically, good corporate governance is implemented to achieve company goals by looking at organizational experiences in the past (OBE, 2017).

The village governments as an instrument of state power which is at the forefront of serving the interests of the community while realizing national ideals must be able to translate the principles of good governance of the government (Dungga, Tome, & Moha, 2014). The village government requires to take notice of the implementation of good governance (Rosielita, Sulindawati, & Sinarwati, 2017). Nowadays, good governance is not only dominated by the government. Societies start showing the capacity in terms of development. Societies and governments components should work together to create good governance, particularly in terms of village funds management (Rustiarini, 2016). The concept of good governance is used as an institutional framework to strengthen village autonomy. The implementation of good governance principles then is more popular as good village governance (Antlöv, Wetterberg, Dharmawan, & Antlöv, 2016).

Many research about good governance have been carried out from local government level (Lastiar Hutapea & Widyaningsih, 2017), (Napitupulu, Hakim, & Noor, 2016), (Utoyo, 2017), (Sasundame, Tulusan, & Kalangi, 2016) and (Parapat & Yuliani, 2017) to village level (Maria Fransisca Vina Febriani Manaana, 2017), (Astuti & Yulianto, 2016), (Rustiarini, 2016), (Futra, 2016), (Richardo Juniaster Tampubolon, 2014), and (Dungga et al., 2014), event NGO level (Kanagaretnam, Lobo, & Whalen, 2007). We examine the relationship between the quality of corporate governance and information asymmetry in the equity market around quarterly earnings announcements. We use the change in market liquidity (i.e., bid-ask spreads and depths). Considering that villages in Indonesia have distinctive features and based on previous research, it can be concluded that the implementation of good governance principles in village level is still open to be developed. The law which has passed the 7-year discussion process regulates the source of funding for 73 thousand villages originating from central government donations and regional cash injections. Based on the law, each village receives a substantial amount of funds and can even reach one billion rupiahs per village. The Village Law provides a more certain guarantee that each village receives funding from the government through the state and regional budgets which are multiplied, far above the amount that has been available in the village budget (Rustiarini, 2016). Based on these reasons, this paper

specifically would analyze the implementation of good governance principle in managing village funds.

Villages development in East Nusa Tenggara (NTT) Province has differences compared to other villages. NTT Province pioneers holistic, integrative village-based development policies including supports climate change adaptation as well. The budget for village funds will be greatly meaningful for the development of NTT Province, it can be seen from the value of the HDI of NTT Province still at a moderate level with a value of 63.13 far below the national average which has reached 70.18

Meanwhile, the number of poor people in NTT is the third largest in Indonesia, after the provinces of Papua and West Papua (Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2018). In addition, the position of NTT in the border region with developing countries of Timor Leste and developed countries in the Australia Continent has good potential in terms of natural resources (Matondang, 2017). Village funds are expected to alleviate poverty in NTT Province through the use of natural resources. Based on the above description mentioned, this study would try to see the implementation of some principles of good governance in managing village funds and analyze the determinants of the success of managing village funds in NTT Province.

The good governance principles which would be used as analysis materials in this study are four of the nine principles that have been published by UNDP. The nine principles which have been implemented in APBD forming in Padang Sidempuan City: (1) Participation; (2) Rule of Law, (3) Transparency, (4) Responsiveness, (5) Efficiency and Effectiveness, (6) Accountability, (7) Strategic Vision, (8) Consensus Orientation, and (9) Equity (Parapat & Yuliani, 2017). Other studies did not use nine principles as indicators, but according to the needs and problems to be addressed. Other researchers used six indicators (Rosielita et al., 2017), five indicators (Napitupulu et al., 2016), four indicators (Utoyo, 2017) and (Richardo Juniaster Tampubolon, 2014), three indicators (Ultafiah, 2017) and (Hamsinar, 2017), two indicators (Maria Fransisca Vina Febriani Mana'an, 2017) and (Widyanti, 2017), and even one indicator (Irma, 2015). From previous research, it can be seen that indicators that are often used to analyze governance are: participation, transparency, accountability, and responsiveness. Therefore, the research on village fund management in the NTT Province will use these four indicators.

METHOD

Research conducted during March-August 2017. Research location selected through purposive sampling. Two municipalities are selected: Ende and East Timor Tengah. The research located in three districts in Ende:

Maurole, Detusoko, and Wewaria. Two Districts in East Timor Tengah: Biboki, and South Boboki. The total number of sample is 204 respondents. The sampling technique used is random sampling. Following are the number of respondents in each village. This research was conducted with a quantitative approach which consists of two analyzes, namely: descriptive statistics to see the respondent's response to the four aspects of good governance, and discriminant analysis to determine the determinants of the successful of village fund management. Primary data was obtained from the results of a survey of stakeholders in the village fund management consisted of village communities, sub-district, district officials who deal directly with village funds. There are 204 samples and using discriminant analysis. The research questionnaire as the main instrument in this study was compiled based on four determining variables for the successful of village fund management, namely: Participation (X1); Accountability (X2); Transparency (X3); Responsiveness (X4); and the Successful of Village Fund Management (Y).

The steps in the research analysis based on Rahman, Wiedartini, & Sari (2018) framework: (1) Conducting survey data collection on the success of village fund management viewed from four dimensions; (2) Conducting descriptive analysis; (3) Testing the assumption of normal multivariate distribution on predictor variable data; (4) Testing the assumption of homogeneity. (5) Performing discriminant analysis to get linear functions. The variables used in this study are one response variable (Y) and six predictor variables (X).

RESULT AND DISCUSSION

Descriptive Analysis of Participation

In public administration, the meaning of public participation is the willingness of public officials to participate in community citizens both individually and in groups (NGOs/Interests Group) in various public administration/government activities and actions. In a centralized government, public participation is greatly overlooked because the overall actions and policies of the government are determined by the authorities in the central government. However, in a decentralized government system, public participation is important because the goal of decentralization is basically the participation of local government and citizens in various stages of government work. The participation of citizens is getting important because they are being an integral part of development activities, this is also a feature of democratic government (Silalahi & Syafri, 2015).

Based on Table 3 above, it can be analyzed that the actual society participation in managing village funds is still not optimal. The societies are usually mobilized and

directed by the apparatus to get involved in working on projects whose funds come from village funds. Society participation in overseeing the village funds utilization is good, but in its formulation, not all communities are involved in planning the fund's allocation. The village community participation in planning development activities, planning the development finance activities, also providing advice and opinions are still relatively weak. This happens because the level of education is still low and the culture of asking or giving input directly is still difficult because it is not common. The relatively good participation is in terms of physical willingness. Most people are not difficult to be asked to attend various activities carried out by the village government. They are even willing to provide makeshift material in order to make the activities run smoothly. This is due to the nature of mutual cooperation that is still inherent in some parts of Indonesian society. Not only the materials, but they are also even ready to provide moral support for the activities. This is a very valuable social aspect and must be maintained for all time. Rural communities in NTT Province generally have high participation in utilizing development results and maintaining development outcomes, even improving if there is damage. This can not be separated from the habits of rural communities who highly uphold peace and comfort so that the results of development that have been given by the government will be maintained as well as possible. There are some development results which are maintained properly, especially the results of physical development, such as roads, bridges, dams, toilets, and other physical buildings. The phenomena of participation from local people for their development was inline with (Widiyanti, 2017) result which showed that participation through rural local wisdom context will enhance rural people in village fund actively.

Table 1. Descriptive Analysis of Participation

Indicator	Response			
	Yes	%	No	%
Participate on devt. planning	22	11	182	89
Participate in budget planning	29	14	175	86
Give advice and suggestion	39	19	165	81
Physical participation	39	19	165	81
Financial participation	55	27	149	73
Thought Participation	83	41	121	59
Utilize development result	159	78	45	22
Preserve development result	149	73	55	26
Maintain development result	166	81	38	19

Research 2017

Descriptive Analysis of Accountability

Accountability is essentially the delivery of reports from government officials to related parties regarding activities carried out in a certain period of time (Silalahi & Syafri, 2015). Accountability can be interpreted as an

obligation of public administrator/government officials to account for and explain to the principals what they have done, decisions and actions taken regarding the implementation of the main tasks and functions that they hold for the public interest. In public administration, public administrators require the bureaucracy to act in "public interest". In this study, accountability would be measured through routine budget use report activities as well as accountability for the rights that have been given in the form of reports to supra organizations and organizations in the village. Accountability came up as one of the important indicators in good governance context (Khotami, 2017).

As general, rural accountability will be delivered through institutional management, social organizations and local cultures (Nurlinah, Haryanto, & Musdah, 2018). And in terms of village fund, accountability can be seen from making a report on the use of a budget that is made routinely as well as accountability for the rights given in the form of reports to supra organizations and village organizations. When it comes to administrative, reporting and responsibility have been carried out routinely, even though there are still some villages that have some difficulties due to limited human resources in the villages. However, this can be solved with assistance from the Community and Village Empowerment (PMD) Service in the district. The discipline of reporting and responsibility is also caused by many parties who oversee the management of village funds. Thus, the village apparatus cannot play games, especially with the case of two villages in North Timor Tengah District which were criminalized because it was alleged that there were frauds in the use of village funds which were used to build the physical condition of the village. Lack of accountability on the village fund will be lead to corruption among the village head and officials (Ash-shidiqqi & Wibisono, 2018).

Table 2. Descriptive Analysis of Accountability

Indicator	Response			
	Yes	%	No	%
Report for community	188	92	16	8
Report for Local Govt	172	84	32	16

Research 2017

Basically, village officials always try to report on the use and responsibility of village fund management according to a predetermined schedule. The district government through the PMD Service always attempts to assist village officials so that they can prepare reports and accountability for the use of the budget that comes from village funds properly and on time. The problem faced is the quality of reporting that is still not good and does not meet the standards. Online application-based reporting is also a problem in the village, related to limited

human resources in the village and network difficulties, particularly when the distance is far from cities. Reporting and responsibility of village fund management are always routinely and regularly delivered to PMD Service. All villages have poured everything into the legal basis for managing village funds in the form of village regulations.

It is also revealed that village officials always attempt to fulfill the obligation to report and account for the village funds management to the central government through the district government. Village officials have tried to be proactive to the district government through the PMD Service to look for various regulations that must be adhered to in managing village funds. Changes to regulations that often suddenly make village devices confused to follow the rules. The weakness is the quality of human resources to prepare accountability reports that must be in accordance with the rules and application-based. There is fear among the village officials regarding the procurement of goods and services that has to be in accordance with the rules, because there are several villages affected by the case, and the village head is dealing with the law. The obedience of village's officials to make progress and finance report also recorded in several areas, in Sragen (Prasetyo, Suharno, & Widarno, 2016) and in Sambas (Yuliansyah & Munandar, 2017),

Descriptive Analysis of Transparency

Transparency is considered as access to information. It allows citizens to gather information about government policies and behavior (Alom, 2018). It is also considered to increase public trust in the government (Nunkoo, Ribeiro, Sunnassee, & Gursoy, 2018). Whereas transparency in finance can be divided into transparency at the budgeting stage, implementation phase, and the examination and reporting stages (Salle, 2016). Transparency has become an inseparable part of the implementation of modern democratic regional government nowadays, especially in the provision of public services, including in the management of village funds. In this study, transparency was made more operational by observing information access on the amount of budget received, the use of budget, reporting, complaints, and to get an explanation.

Transparency is a village government responsibility for reporting and presenting the village fund activities that have been planned to the local people. Transparency on village fund management basically applied in a similar way in every village. Mostly it is displayed on a big screen/billboard which everyone will notice on it. The board contains detailed data on how much money received in the current year, program planning and budget. Billboard put in the village office. This transparency mechanism aimed to gain direct control from the villagers. Reseachs show that transparency through billboard was common and

already implemented well (Desico & Purnomo, 2018). The interview results with all the informants and from the observation results made, it was found that the established cooperative relationships are good, all of them have worked together to support each other. It is just that sometimes problems occur because usually not all activities can be informed to the community so that news seems negative to society. In supporting the realization of good governance, society is one of the tools to encourage the implementation of good governance principles. Everything related to society must be made openly. Moreover, the average village communities have a low level of education, so that in matters of village funds, of course, it must be opened and explained openly so that the communities can support the running of the village government instead of thinking badly about the funds that have been entered.

Table 3. Descriptive Analysis of Transparency

Indicator	Response			
	Yes	%	No	%
Budget received	110	54	94	46
Budget utilization	110	54	94	46
Access on information	149	73	55	27
Access for complaints	126	62	78	38
Question and Answer pool	138	68	66	32

Research 2017

Budget Government efforts to make the village funds management have been maximized. Access to information is relatively easier, especially for villages that already have an internet network, publications about the use of village funds have been transparent. For villages in the remote districts in NTT Province, transparency has been seen as well. The village government displays information needed by the community in the village office and is open to all village communities. Even village officials are very open to providing answers to village community questions regarding village funds. Information that can be accessed by the community includes the amount of the budget received, the use of budget, reporting, and complaints.

Almost all villages publish their budget in the village office so that people could access them easily. Head of Sub-district with the district government and sub-district forums always try to provide important information to village officials and the community. Village officials always display the Regional Budget in the village office with the expectation that the community and other parties can easily access it. The village apparatus also always facilitate people who want to know everything about village funds. Online publications continue to be sought by the village government with the help of assistants and staff at the district PMD Service. The communities also feel that access to information is easier, but they want

something more important than just the budget publication. The communities can find out about the Regional Budget easily, which shows the source and use of the budget in the village, one of which comes from village funds.

Descriptive Analysis of Responsiveness

Responsiveness literally means quick to respond or react appropriately or sympathetically in answering. In the field of public administration, the public response shows how fast and accurate an administrator can recognize and track the fluctuations in the citizen's needs, and provide everything needed by citizens (Liao, 2018). The increase of public responsiveness towards the needs and preferences of local residents is also a goal of decentralization in democratic countries. Public responsiveness in the local context refers to the ability of local bureaucrats to respond quickly and precisely to the needs and demands of community members. The meaning of responsiveness in question on this matter is the responsiveness of public services (public service responsiveness). In this study, the responsiveness that would be seen is the responsiveness of the village apparatus in managing village funds towards stakeholder input and complaints and responsiveness to the wishes and aspirations of the community.

Responsiveness is an absolute requirement for the initial steps of implementing good governance. It is useless to promise to implement good governance if criticism or suggestions for progress in various matters of law enforcement, performance, accountability, and equal rights and obligations of a person/society, always slow or not responded to by the government. A responsive government to community problems is a dream of good governance. The role of the government must understand the objective needs of its people, do not wait for them to convey those desires, the government is expected to be proactive in studying and analyzing their needs, to then produce strategic policies to meet the public interests that are pro-society, without discrimination against groups. Excellent service is one form of business or activity that is expected to be able to improve the performance of an agency or institution for a better condition than before. Excellent service is the best service that can be called very good or the best due to the accordance with the service standards that are in effect or owned by service providers. The essence of public service is the provision of excellent service to the communities which is the embodiment of the obligations of government officials including village officials as community servants. In line with this, excellent service is also expected to motivate other service providers to carry out their duties diligently and competently. (Sutiyo & Maharjan, 2017) shows that responsiveness in Indonesia rural areas already existed and held by the village head. Regarding village fund management, the

indicator of responsiveness addressed to the village head and it's officials to respond at the need or suggestion of the village community.

Table 4. Descriptive Analysis of Responsiveness

Indicator	Response			
	Yes	%	No	%
Quick actions on people complaints	56	27	148	73
Open mind for suggestion	44	22	160	78

Research 2017

Table 6 above showed that responsiveness to input and complaints from stakeholders, as well as responsiveness to the wishes and aspirations of the community, is still not optimal. This is understandable because the quality and quantity of human resources in the village are also limited. It is not easy to follow the wishes of the central government delivered through the district government through the PMD Service, particularly regarding reporting requirements that must be online. Many obstacles faced by village officials related to this necessity. Not only competencies must be improved, but also internet networks that involve other parties need to be addressed.

People's complaints or aspirations are sometimes difficult to execute immediately concerning community needs are varied, but the budget was limited. In addition, the increasing needs of rural communities also cause difficulties in determining priorities in the use of village funds. The village apparatus has tried to respond to all input and complaints from stakeholders, but it is still not optimal because there are many interested parties with different desires. The desires and aspirations of the people also still have not been well netted because the village apparatus is busy with various administrative matters.

Village officials still need to be fostered so that they can improve their performance in managing village funds. The PMD Service always tries to help village officials to be able to respond to the parties involved in managing village funds including the community. Interventions from parties that are increasing make it difficult for village officials to respond to their input and desires.

The efforts of village officials to respond to input and complaints from stakeholders still need to be improved, especially those relating to the procurement of goods and services and financial report examiners, in this case, the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK). Efforts to capture people's aspirations are also not optimal, because village officials are too preoccupied with administrative matters, while community initiatives cannot be expected.

Village officials find it difficult to follow the government's willingness to manage village funds,

moreover, regulations often change. Application-based financial reports still make it difficult for village officials, so the examiners are often not satisfied. Suppliers are also one of the parties who are sometimes troublesome with various requirements and price changes, sometimes quality is also low.

The communities feel that the village apparatus must be more proactive in capturing the aspirations of the village communities. Village officials must continue to improve their performance in meeting stakeholders' wishes.

Determinant Factors

Descriptive analysis of the four dimensions of good governance above has not been able to show which dimension most strongly determines the success of managing village funds in NTT Province. Therefore, the next analysis uses discriminant analysis. Discriminant analysis is one of the statistical techniques that can be used in the relationship of dependencies (relationships between variables where it can be distinguished which response/dependent variables and which explanatory/independent variables). More specifically, discriminant analysis is used in cases where the response variable (Y) is in the form of qualitative data and explanatory variables (X) in the form of quantitative data. The discriminant analysis aims to classify an individual or observation into mutually exclusive and exhaustive groups based on a number of explanatory variables.

The first step in discriminant analysis is the normality test of the data using graphs and the Pearson correlation test between the Mahalanobis distance and the chi square value. The mahalanobis result shows that the data are normally multivariate distribution because these scatterplots tend to form a straight line and more than 50% the value of the Mahalanobis distance is less or equal to the q value. In addition to paying attention to the scatterplot, it can be done through the Pearson correlation test. Correlation result is 0.987 which shows a very high correlation coefficient. Sig value (0,000) < 0.05 means that there is a significant correlation. In this scatterplot, the data comes from samples that are normally multivariate distributed. The second step is the multicollinearity test, with the results show that there are no numbers that reach 0.5 or above. It concluded that there is no multicollinearity in the data. The third step is to test the equality of the variance-covariance matrix (homoskedasticity). Statistical data revealed the null hypothesis accepted because the p value (Sig.) is more than 0.05 (in 95% confidence level). Meaning, research data comes from populations that have similar variance-covariance matrix (homoskedasticity). Moreover, the analysis process can proceed. Table 5 describes the results of discriminant analysis through an average vector similarity test.

Table 5. Tests of Equality of Group Means

	Wilk's Lambda	F	df1	df2	Sig.
Participation (X ₁)	.825	42.842	1	202	.000
Accountability (X ₂)	.999	.140	1	202	.709
Transparency (X ₃)	.996	.835	1	202	.362
Responsiveness (X ₄)	.853	34.872	1	202	.000

Research, 2017

The results of data processing concluded that the variables X₁ and X₄ have different averages for both groups, namely the management of village funds is good and not good. This shows that there are differences between respondents who assess good and bad for the management of village funds related to Participation (X₁) and Responsiveness (X₄). While variables X₂ and X₃ have an average that is not different/the same for the two groups, namely the management of village funds is good and not good. This shows that there is no difference between respondents who rate good and bad management of village funds related to Accountability (X₂) and Transparency (X₃). Thus, there are two variables that differ significantly for the two discriminant groups namely Participation (X₁) and Responsiveness (X₄). The results of the discriminant analysis are in accordance with the results of research on the application of the principles of good governance in urban planning (Utoyo, 2017). That is, indicators of participation and responsiveness are the two main indicators as key success factors in the administration of government in Indonesia. Meanwhile, based on the results of the formation of linear functions as shown in the table below, the shape of the linear function as is: $Y = -9,569 + 0,068X_1 + 0,058X_4$.

Table 6. Canonical Discriminant Function Coefficients

	Function	
	1	
Participation (X1)		.068
Responsiveness (X2)		.058
(Constant)		-9.569

Research 2017

CONCLUSION

Basically, the four principles of good governance have been applied in managing village funds in the NTT Province. Most of the village communities already knew of the existence of this village fund, but in participation, there still needed to be hard work from village officials to invite the community to play an active role in managing village funds. Initiatives from the community are still low. From the aspect of accountability, it has been relatively

good, assessing from the reporting and accountability of the use of the budget sourced from village funds. Access to information is getting easier. All parties have tried to make the management of village funds more transparent. The response to stakeholder input and desires is still not well implemented. This is due to the large number of stakeholders that must be fulfilled by village officials. The determining factor for the success of village funds is participation and responsiveness. It means that the management of village funds will succeed if active participation from the community has taken place in all villages, and the responsiveness of the authorities to the demands of the government and the aspirations of the people is quite high.

ACKNOWLEDGMENT

Cordially, we sincere to the IPDN Rector and the Head of the Research and Strategic Study which provide financial, technical and moral support for lecturer to do research.

REFERENCES

- Akbar, M. & Prabawati, I. (2018). Implementasi Kebijakan Dana Desa di Desa Seppong Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene. *Publika*, 6, (8), 1-9.
- Alom, M. M. (2018). Proactive transparency and outward accountability of frontline public bureaucracies: An integrated model. *International Journal of Productivity and Performance Management*, 67, (4), 611-628. <https://doi.org/10.1108/IJPPM-08-2016-0169>
- Antlöv, H., Wetterberg, A., Dharmawan, L., & Antlöv, H. (2016). Village Governance, Community Life, and the 2014 Village Law in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 49, (18 March), 1–42. <https://doi.org/10.1080/00074918.2015.1129047>
- Ash-shidiqqi, E. A., & Wibisono, H. (2018). Corruption and Village : Accountability of Village Fund Management on Preventing Corruption (Problems and Challenges). *Journal of Indonesian Legal Studies*, 3, (02), 195–212.
- Astuti, T. P., & Yulianto. (2016). Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang Nomor .6 Tahun 2014. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 1, (6), 1–14.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2018). *Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Angka 2017*. (Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik, Ed.). Jakarta: CV. Nario Sari, Jakarta.
- Daraba, H. D. (2017). Pengaruh Program Dana Desa Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. *Sosiohumaniora*, 19, (1), 52–58.
- Desico, Z., & Purnomo, E. P. (2018). Transparansi dalam pengelolaan dana desa. *ResearchGate*, (December), 1–19.
- Dungga, W. A., Tome, A. H., & Moha, A. (2014). Penerapan Prinsip Good Governance dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa di Kecamatan Telaga Jaya Kabpaten Gorontalo. *Maksigama Jurnal Hukum*, 11, (1), 1–10.
- Faisal, M., & Nain, U. (2018). Implikasi Pelaksanaan Program Dana Desa Terhadap Kohesi Sosial di Desa Tamalate Kabupaten Takalar. *Sosiohumaniora*, 20, (3), 222–230. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v20i3.16070>
- Futra, H. (2016). *Implementasi Good Governance dalam Bidang Administrasi Desa, Studi Kasus Dana Desa di Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember*. Universitas Muhammadiyah Jember.
- Hamsinar. (2017). *Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas, dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderat*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Retrieved from <http://ejournal.upi.edu/index.php/aset/article/view/5446>
- Irma, A. (2015). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi. *E-Jurnal Katalogis*, 3, (1), 121–137. Retrieved from <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/katalogis/article/view/4254>
- Kanagaretnam, K., Lobo, G.J., & Whalen, D.J. (2007). Does good corporate governance reduce information asymmetry around quarterly earnings announcements? *Journal of Accounting and Public Policy*, 26, (4), 497–522. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2007.05.003>
- Khotami. (2017). The Concept of Accountability in Good Governance. In *Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)* 163, pp. 30–33. ATLANTIS PRESS.

- King, S. (2015). Political capabilities for democratisation in Uganda : good governance or popular organisation building ? *Third World Quarterly*, 36, (4), 744–760. <https://doi.org/10.1080/01436597.2015.1024436>
- Lastiar H. & Widyarningsih, A. (2017). Pengaruh Good Government Governance Dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia). *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 9, (1), 173. <https://doi.org/10.17509/jaset.v9i1.5446>
- Liao, Y. (2018). Toward a Pragmatic Model of Public Responsiveness: Implications for Enhancing Public Administrators' Responsiveness to Citizen Demands. *International Journal of Public Administration*, 41, (2), 159–169. <https://doi.org/10.1080/01900692.2016.1256305>
- Maria Fransisca Vina Febriani Manaana. (2017). *Penerapan Prinsip Good Government Governance Dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa; Studi Kasus Desa Wijirejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul*. Universitas Sanata Dharma.
- Matondang, E. (2017). Finding Out the Potential of Nusa Tenggara Timur in Poverty Alleviation: The Effect of Local Government ' s Policies. *Jurnal Bina Praja*, 9, (2), 231–242. <https://doi.org/10.21787/jbp.09.2017.231-242>
- Mustanir, A., & Darmiah. (2016). Implementasi Kebijakan Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Politik Profetik*, 04, (2), 1–14.
- Napitupulu, M.Y., Hakim, A. & Noor, I. (2016). Penerapan Prinsip Good Governance Dan Pengaruhnya Terhadap Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dalam Perencanaan Tata Ruang Daerah. *Wacana*, 19, (4), 196–205.
- Nunkoo, R., Ribeiro, M. A., Sunnassee, V., & Gursoy, D. (2018). Public trust in mega event planning institutions: The role of knowledge, transparency, and corruption. *Tourism Management*, 66, 155–166. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2017.11.010>
- Nurlinah, H. & Musdah, E. (2018). The Problem of Public Accountability in Village Governance in Rural Enrekang, Indonesia. *Mimbar*, 34, (2), 332–340.
- OBE, H. B. (2017). *Tenets of good corporate reporting*.
- Parapat, N., & Yuliani, F. (2017). Penerapan Good Governance Dalam Penetapan Apbd. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 14,(3), 310–316.
- Prasetyo, D., Suharno. & Widarno, B. (2016). Kepatuhan Pemerintah Desa dalam Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 22 Tahun 2015. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 12, (4), 417–427.
- Rahman, F., Wiedartini, & Sari, D.P. (2018). Penerapan Discriminant Analysis Untuk Mengetahui Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepuasan Pengguna Jasa Unit Layanan PPNS. *SEMINAR MASTER 2018 PPNS, 1509*, 51–54.
- Richardo Juniaster Tampubolon. (2014). *Pelaksanaan Prinsip Good Governance dalam Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Teluk Bakau Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan Tahun 2013*. Tanjungpinang.
- Rosielita, F., Sulindawati, N. L. G. E., & Sinarwati, N. K. (2017). Implementasi Good Governance pada Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi Kasus pada Desa Telaga, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng). *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8, (2), 1–12.
- Rustiarini, N. W. (2016). Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa. In *Simposium Nasional Akuntansi* (pp. 1–18).
- Saha, S. K. (2014). Corruption and Good Governance : The Case of Bangladesh Corruption and Good Governance : The Case of Bangladesh. *SUST Journal of Social Sciences*, 22, (2), 45–52.
- Salle, A. (2016). Makna transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 1, (1), 1–19.
- Sasundame, R. G., Tulusan, F., & Kalangi, J. (2016). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pembuatan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 1, (043), 1–18.
- Silalahi, U., & Syafri, W. (2015). *“Desentralisasi dan Demokrasi Pelayanan Publik” Menuju Pelayanan Pemerintah Daerah Lebih Transparan, Partisipatif, Responsif dan Akuntabel*. Jatinangor: IPDN Press.
- Subandi, A. (2017). *Implementasi Kebijakan Dana Desa di Desa Neglasari Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor*. Universitas Islam Negeri.
- Sutiyo, & Maharjan. (2017). Decentralization and Rural Development in Indonesia. Springer.
- Ultafiah, W. (2017). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa*

Untuk Mewujudkan Good Governance pada Desa di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat. Universitas Muhammadiyah Palembang.

- Utoyo, B. (2017). Analisis Kebijakan Prinsip Governance dan Aktor Melalui Analytical Hierarchy Process (AHP) dalam Perencanaan Kota. *Spirit Publik*, 12, (1), 45–56.
- Widiyanti, A. (2017). *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan)*. Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, 51, (11), 1188-1197. <https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2010.02280.x>
- Widiyanti, A. (2017). Implementation of Local Participation as Part of Good Governance Principles : Galengdowo Village Wonosalam Sub-District, Jombang. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 19, (2), 59–66. <https://doi.org/10.9744/jak.19.2.59-66>
- Wijoyo, S., Salman, R., & Abrianto, B. O. (2018). Making Model of Village Regulation based on Good Village Governance in Indonesia. *Advance in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)*, 98, (Icpsuas 2017), 71–77.
- Yuliansyah, & Munandar. (2017). Kepatuhan Aparatur Desa dalam Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 di Wilayah Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 5, (2), 181–192.

INDONESIA DAN ANCAMAN TERORISME: DALAM ANALISIS DIMENSI IMATERIAL

Ardli Johan Kusuma, Tulus Warsito, Surwandono, dan Ali Muhammad

Program Doktorat Politik Islam - Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia,

Jl. Brawijaya, Bantul, Yogyakarta 55183, Indonesia.

E-mail: ardli.johan@yahoo.com

ABSTRAK. Pasca peristiwa 9/11, isu terorisme di dunia internasional menjadi isu penting. Bahkan di Indonesia pasca peristiwa serangan terhadap gedung WTC tersebut direspon dengan membuat instrumen kontra terorisme dalam konteks nasional yang kemudian dalam proses pelaksanaannya dianggap melanggar HAM. Padahal fenomena terorisme di Indonesia sebenarnya sudah ada jauh sebelum Indonesia membuat kebijakan-kebijakan kontra terorisme seperti: pembuatan UU anti terorisme, pembentukan BNPT, serta pembentukan pasukan khusus Densus 88. Tulisan ini ingin menjelaskan adanya pengaruh dari dimensi ide yang mempengaruhi persepsi pemerintah Indonesia dalam memaknai ancaman terorisme yang dibangun dalam konteks konstruksi sosial dalam pergaulan internasional, yang kemudian memberikan pengaruh bagi pemerintah Indonesia untuk membuat kebijakan represif dan cenderung melanggar HAM dalam kontra terorisme karena terorisme dipersepsikan sebagai ancaman nasional yang luar biasa.

Kata kunci: Terorisme; Keamanan Nasional; Ide; Persepsi

INDONESIA AND THE THREAT OF TERRORISM: IN THE ANALYSIS OF THE IMATERIAL DIMENSIONS

ABSTRACT. After the 9/11 incident, the issue of terrorism in the international world became an important issue. Even in Indonesia after the attack on the WTC building, it was responded by making counter-terrorism instruments in the national context which were later considered as violating human rights. Even though the phenomenon of terrorism in Indonesia actually existed long before Indonesia made counter-terrorism policies such as: the making of anti-terrorism laws, the establishment of BNPT, and the formation of special forces Detachment 88. This paper wants to explain the influence of ideas that influence the Indonesian government's perception the threat of terrorism that is built in the context of social construction in international relations, which then gives an influence to the Indonesian government to make repressive policies and tend to violate human rights in counter-terrorism because terrorism is perceived as an extraordinary national threat.

Keywords: Terrorism; National Security; Ideas; Perception

PENDAHULUAN

Setelah tahun 2000-an, salah satu ancaman yang menjadi perhatian negara-negara di dunia internasional adalah ancaman aksi terorisme. Berbagai aksi terorisme yang terjadi di dunia membuat masyarakat internasional memandang serius masalah terkait terorisme, meskipun pada dasarnya fenomena terorisme sudah ada sejak lama. Pemaknaan ancaman yang diakibatkan oleh terorisme tidak terlepas dari konstruksi sosial yang terjadi dalam dunia internasional, sehingga hampir setiap negara di dunia memberikan label teroris kepada kelompok tertentu yang kemudian dimaknai sebagai ancaman terhadap kemanusiaan (Hülse & Spencer, 2008). Salah satu pemicu perkembangan tersebut adalah terjadinya aksi teror di Amerika Serikat pada tahun 2001, dimana waktu itu gedung WTC menjadi sasaran teror.

Teror yang terjadi di gedung WTC pada 11 September 2001, menjadikan dunia internasional semakin gencar melawan terorisme, bahkan aksi terorisme dianggap sebagai suatu aksi kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*). Tindak pidana terorisme dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa atau *extraordinary crime*, maka dari itu diperlukan instrumen khusus untuk menanggulangi kejahatan yang dianggap tidak biasa ini.

Pemaknaan atas kejahatan terorisme yang dianggap sebagai tindakan kejahatan luar biasa, pertama kali dimunculkan dalam forum PBB ketika diadakan kongres di Wina Austria, pada Tahun 2000, dimana saat itu tema yang diambil adalah "*The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*". Untuk itu banyak negara di dunia termasuk Indonesia, merasa perlu membuat suatu perlakuan khusus terhadap aksi-aksi penyerangan yang masuk kedalam kriteria terorisme (Muhtar, 2014).

Dalam menanggapi ancaman terorisme, pemerintah Indonesia telah merespon dengan beberapa kebijakan, diantaranya pemerintah membuat UU anti terorisme pada tahun 2003 yang kemudian diamandemen pada tahun 2018, kemudian pemerintah juga membentuk BNPT sebagai badan nasional yang khusus menangani masalah terorisme. selain itu pemerintah Indonesia juga telah membentuk pasukan khusus yang terjun langsung di lapangan guna menangani masalah terorisme tersebut. Pemerintah melalui POLRI, membentuk pasukan Detasemen Khusus 88 (Densus 88), yang memiliki kewenangan yang cukup besar. Kewenangan dari Densus 88 diantaranya adalah diperbolehkan untuk melakukan penangkapan, terhadap para terduga teroris, meskipun hanya berbekal bukti awal yang bersumber dari laporan intelijen. Selain itu Densus

88 juga dapat melakukan penangkapan terhadap terduga teroris selama 7 x 24 jam yang dikenal sebagai “*Anti-Terrorism Act*”. Lama penangkapan terhadap terduga teroris ini lebih lama dibandingkan dengan penagkapat terhadap pelanggar hukum pidana selain terorisme.

Selanjutnya dalam pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat untuk menanggapi ancaman terorisme tersebut, Indonesia cenderung menggunakan pendekatan yang represif. Densus 88 yang dibentuk sebagai pasukan anti teror di bawah naungan POLRI, lebih banyak menggunakan pendekatan yang bersifat menekan dalam menangani para terduga teroris. Hal ini dapat dilihat ketika densus 88 seringkali melakukan penggerebekan atau penyerangan terhadap para teroris di tempat persembunyian atau markas mereka dengan menggunakan pendekatan kekerasan, bahkan tidak jarang penangkapan terduga teroris berujung pada kematian dan tanpa mendapatkan keadilan (Kusuma, 2018b). Dampak dari penggunaan kekerasan tersebut mengakibatkan banyaknya terjadi dugaan pelanggaran dalam proses penangkapan, dimana dalam kurun waktu 10 tahun (2006-2016), setidaknya ada 120 orang yang diduga sebagai teroris telah tewas ketika menjalani proses penangkapan, dan ada 40 orang menjadi korban salah penangkapan. Disamping itu, terdapat lebih dari 80 persen dari jumlah terduga teroris yang ditangkap telah mengalami tindakan kekerasan dan penyiksaan” (Almas, 2016).

Menurut komnas HAM, melalui pernyataan Wakil Ketuanya, Dianto Bachriadi menyatakan bahwa Densus 88 telah melakukan pelanggaran HAM dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam rangka penanganan terorisme. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan diantaranya: penghilangan nyawa oarang, melakukan penyiksaan, melakukan tindakan-tindakan yang kejam, perampasan hak beribadah, perampasan hak penggunaan penasihat hukum, perampasan hak komunikasi, perampasan hak beribadah, serta yang lainnya (Fajar, 2013).

Penggunaan pendekatan represif yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini melalui densus 88 dalam penanganan terorisme, memperlihatkan pemerintah Indonesia telah mengorbankan nilai HAM yang seharusnya dijamin keberadaannya (Haryadi, 2014). Indonesia yang memilih sistem demokrasi yang berlandaskan hukum dalam penyelenggaraan negara telah menanggukkan tugasnya dalam rangka menjamin penegakan HAM atas nama perang melawan ancaman terorisme. Hal itu menunjukkan bahwa kedudukan isu terorisme dipersepsikan telah memberikan ancaman terhadap keamanan nasional Indonesia. Untuk itu tulisan ini akan membahas terkait pembentukan persepsi pemerintah Indonesia dalam memaknai ancaman terorisme.

Para peneliti terdahulu sudah melakukan penelitian dengan tema serupa. Berbagai temuan dan kesimpulan

sudah dipaparkan dalam karya ilmiah yang ditulis oleh para peneliti terdahulu. Misalnya Christian J. Tams, Endi Haryono, Hery Firmansyah, serta Erwin Yusup Sitorus yang telah menggunakan paradigma realisme dalam melihat kebijakan keamanan nasional dalam rangka melawan terorisme yang diambil oleh negara, yang hanya bertumpu pada faktor keamanan nasional yang bersifat materialisme (Tams, 2009) (Haryono, 2010) (Firmansyah, 2010) (Sitorus, 2016). Kemudian ada juga Ali Muhammad yang juga menggunakan paradigma realisme yang berpendapat bahwa kebijakan Indonesia dalam perang melawan terorisme telah dipengaruhi oleh kepentingan untuk perang melawan terorisme oleh negara-negara yang memiliki *power*, dalam hal ini Amerika Serikat dan Australia melalui bantuan-bantuan ataupun tekanan-tekanan terhadap pemerintah Indonesia (Muhammad, 2015).

Selain para peneliti yang menggunakan paradigma realis tersebut, ada juga beberapa peneliti terdahulu yang telah menggunakan paradigma konstruktivisme, di antaranya adalah Daniel Benjamin, Ahmad Zahid Hamidi, N.S. Jamwal, Sidratahta Mukhtar. Namun para peneliti tersebut hanya menggunakan pendekatan konstruktivisme untuk melakukan kritik atas kebijakan represif yang dianggap kurang tepat. Mereka lebih merekomendasikan untuk melawan terorisme dengan pendekatan *soft power* (Benjamin, 2008) (Hamidi, 2016) (Jamwal, 2003) (Mukhtar, 2016).

Sementara dalam tulisan ini ingin menjelaskan terkait adanya relasi antara ide atau gagasan yang kemudian menjadi persepsi dan pada akhirnya mempengaruhi pilihan sikap suatu negara. Dalam hal ini ide dan gagasan tentang terorisme telah mempengaruhi persepsi pemerintah Indonesia dalam memaknai ancaman terorisme yang kemudian menuntun pemerintah Indonesia untuk membuat kebijakan-kebijakan kontra terorisme yang bersifat represif dan melanggar HAM.

METODE

Tulisan ini bertujuan untuk melihat pengaruh dari dimensi ide atau gagasan terhadap pemerintah Indonesia dalam mempersepsikan ancaman terorisme, yang kemudian menuntun pemerintah Indonesia untuk membuat kebijakan-kebijakan yang bersifat represif dan cenderung melanggar HAM. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan paradigma konstruktivisme.

Dalam hal metodologi aliran konstruktivisme telah menjadi penengah atau berada di antara aliran *positivist* dan *post-positivist*. Aliran *positivist* berpendapat jika dunia ilmu sosial bisa dipelajari dengan menggunakan pendekatan objektif dan sifatnya baku seperti ilmu alam. Sementara *post-positivist* menolak hal tersebut dan berpendapat

sebaliknya yaitu dunia ilmu sosial bisa dipelajari dengan cara-cara atau pendekatan yang tidak baku, dan sifatnya subjektif.

Untuk memahami dan menafsirkan makna inter-subjektif, dalam paradigma konstruktivis menggunakan metode penelitian yang umum, diantaranya termasuk analisis wacana, penelusuran proses, silsilah, perbandingan terfokus terstruktur, wawancara, pengamatan partisipan, analisis konten, analisis konten kualitatif sumber utama (memoar, arsip), studi statistik. Menurut Finnemore dan Sikkink tidak ada metode atau desain penelitian tunggal di dalam paradigma konstruktivisme (Finnemore & Sikkink, 2001).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa posisi metodologi paradigma konstruktivisme berada di antara aliran positivisme dan post-positivisme. Dengan demikian kaum konstruktivisme bisa mengeksplorasi dunia sosial dengan lebih leluasa dan fleksibel.

Dalam upaya membangun obyektivitas dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui beberapa tahap. **Pertama**, studi dokumen terhadap naskah-naskah akademik atau dokumen resmi, ataupun sumber dari jurnalistik baik cetak ataupun daring, yang berkaitan dengan tema yang diangkat. Kemudian, data dalam tulisan ini juga didapatkan dari jurnal dan juga buku. **Kedua**, data dikumpulkan dengan mewawancarai beberapa pihak yang kompeten. Wawancara dilakukan terhadap beberapa pihak diantaranya, Deputy Kerjasama Internasional BNPT, anggota parlemen (anggota Komite Khusus Amandemen Undang-Undang Anti-terorisme), dan mantan kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS). Setelah data terkumpul kemudian penulis melakukan analisis dan interpretasi terhadap data yang terkumpul untuk mendukung argumentasi yang dibangun. Tahap akhir yang dilakukan kemudian adalah penulisan laporan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wacana Tentang Terorisme Sebagai Ancaman di Dunia Internasional dan Pengaruhnya Terhadap Persepsi dan Sikap Pemerintah Indonesia: Sebuah Analisis

Paradigma konstruktivisme dalam konteks studi keamanan, memiliki ciri khas tersendiri, di mana para pemikir paradigma ini tidak terlalu memfokuskan pemikirannya untuk menggali definisi dari keamanan, tetapi mereka lebih mencoba untuk memberikan makna terhadap apa yang dimaksud dengan keamanan itu sendiri. Para pemikir konstruktivis, memaknai keamanan sebagai “arena” negosiasi antar aktor. Hal tersebut dinyatakan oleh Matt McDonald sebagai berikut (McDonald, 2008):

that security is a site of negotiation (between the political leaders and domestic audiences in particular)

and contestation (between different actors, elaborating different visions of “our” values and how “we” should act).

Pada intinya kaum konstruktivis membangun argumen bahwa ketika berbicara tentang keamanan maka realitas dari keamanan yang ada tidak dapat dipisahkan dari proses interaksi antar aktor yang kemudian membangun persepsi tentang keamanan itu sendiri. Dalam hal ini penjerumahan atas ancaman sangat dipengaruhi oleh persepsi dari masing-masing aktor dan juga atas konseptualisasi dari identitas dari masing-masing aktor. Ted Hopf telah memberikan ilustrasi bahwa tindakan suatu negara dalam konteks keamanan akan sangat dipengaruhi oleh persepsi yang terbangun dari interaksi sosial. Dalam hal ini persepsi dipengaruhi oleh identitas yang terbentuk. Jadi suatu negara akan mempersepsikan negara ataupun aktor lain sebagai “teman” atau “musuh”, tergantung dari persepsi atas identitas-identitas dari masing-masing aktor yang terbentuk dari konstruksi sosial (Hopf, 1998).

Alexander Wendt juga telah menjelaskan bagaimana paradigma konstruktivis memahami ancaman yang sangat berbeda tentunya dari pemahaman pemikiran realis maupun liberal yang masih berbasis material. Misalnya saja memaknai kekuatan militer atau kekuatan persenjataan yang dimiliki oleh negara lain yang bagi kaum realis, kepemilikan senjata atau militer oleh negara lain itu secara material bisa dimaknai sebagai ancaman. Tetapi argumentasi tersebut dipatahkan oleh Alexander Wendt, bahwa instrumen material di dalam struktur sosial (sistem internasional) tidak akan bermakna apapun tanpa pengaruh suatu ide. Instrumen material dalam struktur hanyalah sebagai alat untuk penunjang aksi yang akan dilakukan oleh manusia. Kemudian untuk memudahkan pemahaman kita, Wendt memberikan suatu analogi yang menarik, bahwa 500 senjata nuklir yang dimiliki Inggris, dianggap lebih kecil pengaruh ancamannya bagi Amerika Serikat jika dibandingkan dengan 5 senjata nuklir milik Korea Utara. Fenomena ini disebabkan karena, bagi Amerika Serikat, Inggris bukanlah musuh, melainkan dimaknai sebagai negara sahabat. Sementara Korea Utara, meskipun jumlah senjata nuklir yang dimilikinya jauh di bawah Inggris, tetapi akan dimaknai lebih mengancam bagi Amerika Serikat, karena Korea Utara tidak dikategorikan sebagai negara sahabat oleh Amerika Serikat (Wendt, 1995). Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa dalam berbicara mengenai isu keamanan, kaum konstruktivis lebih melihat pada variabel ide gagasan tentang persepsi terhadap aktor yang dianggap mengancam atau dianggap tidak mengancam, yang kemudian para sub-unit dalam suatu unit utuh akan saling mempengaruhi dalam memutuskan suatu tindakan dalam konteks mengamankan komunitas atau unit mereka

secara utuh. Dalam bahasa lain jika unitnya adalah negara, maka ketika berbicara mengenai konteks keamanan maka di dalam negara akan terjadi pertarungan kepentingan (Interaksi yang sifatnya saling mempengaruhi tentang ide atau gagasan) antar aktor di dalam negara tersebut, untuk kemudian memutuskan suatu aksi untuk mengamankan negara. Jika dalam konteks unitnya adalah dunia internasional, maka negara-negara adalah sub unit (agen) yang akan saling mempengaruhi.

Tindakan dari aktor dipengaruhi oleh adanya persepsi atau pemaknaan terhadap suatu obyek atau aktor yang lain, sebagaimana diargumentasikan oleh Alexander Wendt bahwa:

“a fundamental principle of constructivist social theory is that people act toward objects, including other actors, on the basis of the meanings that the objects have for them.” (Wendt, 1992)

Dengan jelas Wendt menyatakan bahwa tindakan aktor terhadap obyek atau aktor lain sangat ditentukan oleh persepsi atau pemaknaan terhadap obyek atau aktor lain tersebut, di mana persepsi atau pemaknaan tersebut terbentuk dari hasil konstruksi sosial.

Fenomena terorisme yang berkembang di dunia internasional saat ini, tidak dapat dipisahkan dengan adanya wacana yang dibentuk untuk membangun ide bersama terkait pemaknaan tentang terorisme. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Rainer Hülse dan Alexander Spencer bahwa terorisme dihasilkan dari konstruksi sosial. Lebih lanjut mereka menjelaskan bahwa realitas yang terjadi terkait terorisme merupakan hasil dari pembentukan wacana dari musuh para teroris tersebut yang kemudian membentuk motivasi, strategi, serta struktur organisasi dan juga tujuan dari para aktor teroris itu sendiri. Ilustrasi yang mudah untuk memahami pendekatan ini dapat dilihat dalam kasus konstruksi “metafora” Al-Qaeda oleh pers populer Jerman setelah serangan teroris di New York dan Washington pada tahun 2001, Madrid pada tahun 2004 dan London pada tahun 2005. Kasus-kasus tersebut pada awalnya dimaknai sebagai bentuk “perang” antar aktor dalam lingkup dunia internasional. Tetapi sejak tahun 2004 dan seterusnya telah muncul wacana yang kemudian secara pasti menggeser makna bahwa serangan Al-Qaeda yang semula dianggap sebagai bentuk perang menjadi sebuah tindakan yang dipandang sebagai kejahatan. Hal tersebut berdampak pada pembangunan makna tentang Al-Qaeda sebuah institusi kriminal yang saat ini kita kenal sebagai lembaga teroris. Pergeseran ini juga telah mengubah Al-Qaeda dari yang semula dianggap ancaman eksternal menjadi ancaman internal, yang mensyaratkan pergeseran praktek kontra-terorisme dari perang antar militer ke respon instrumen yudisial (Hülse & Spencer, 2008).

Fenomena tentang terorisme menjadi isu arus utama pasca serangan 11 September 2001 di gedung WTC oleh kelompok Al-Qaeda, yang kemudian memunculkan norma bersama dalam dunia internasional dalam memaknai terorisme.

Wacana perang melawan terorisme (*war on terror*) disosialisasikan untuk dijadikan norma internasional agar memiliki legitimasi dan memudahkan AS untuk mengajak negara-negara lain untuk melakukan perang melawan terorisme. Amerika Serikat telah menyebarkan nilai-nilai kepada dunia internasional dengan klaim bahwa nilai yang mereka tawarkan adalah nilai kebenaran universal. Misalnya saja dalam berbagai kesempatan presiden Bush mengaitkan perjuangan perang melawan terorisme sebagai perjuangan atas nilai kebebasan dan kemanusiaan. Selain itu pembangunan persepsi terkait siapa yang “baik” dan siapa yang “jahat” juga dilakukan untuk melegitimasi wacana perang melawan terorisme yang mereka perjuangkan. Dalam hal ini pihak-pihak yang turut serta dalam melakukan perang melawan terorisme adalah pihak yang baik dan kelompok seperti Al-Qaeda yang dijastifikasi sebagai kelompok teroris adalah pihak yang jahat (Kedang, 2017). Bahkan secara terbuka pasca peristiwa serangan 11 September, Bush telah mengaskan bahwa:

Our enemy is a radical network of terrorists, and every government that supports them. Our war on terror begins with al Qaeda, but it does not end there. It will not end until every terrorist group of global reach has been found, stopped and defeatedThis is not, however, just America's fight. And what is at stake is not just America's freedom. This is the world's fight. This is civilization's fight. This is the fight of all who believe in progress and pluralism, tolerance and freedom. We ask every nation to join us. We will ask, and we will need, the help of police forces, intelligence services, and banking systems around the world (Bush, 2001).

Dalam pernyataan Bush sebagai presiden AS waktu itu yang disampaikan pada 20 September 2001 telah menunjukkan bahwa Amerika Serikat telah menjastifikasi bahwa kelompok radikal dan kelompok teroris merupakan musuh bagi mereka. Bahkan negara yang memberikan dukungan kepada kelompok-kelompok yang telah dijustifikasi sebagai kelompok teroris maka juga akan dianggap sebagai musuh yang akan diperangi oleh Amerika Serikat. Selain itu, dengan mengatasnamakan nilai-nilai pluralisme, toleransi serta kebebasan (kemerdekaan), Amerika Serikat telah meminta kepada seluruh negara di dunia untuk turut serta dalam wacana perang melawan terorisme tersebut. tidak hanya itu, sebagai negara super power, AS telah melakukan *share idea* kepada komunitas internasional untuk kemudian dijadikan norma dalam bentuk konvensi

atau perjanjian internasional yang menjadi instrumen hukum internasional di bawah naungan PBB yang mengatur persoalan terkait kegiatan perang melawan terorisme.

Sharing idea yang dilakukan oleh Amerika Serikat tersebut mampu mempengaruhi sistem pemikiran mayoritas masyarakat internasional dalam memaknai terorisme. Dengan kata lain pemahaman terhadap terorisme yang saat ini ada merupakan hasil dari sebuah *share idea* atau “framing” yang dilakukan Amerika Serikat (Bartolucci & Gallo, 2015). Dalam hal ini Amerika Serikat adalah negara yang menjadi *norms entrepreneurs*, karena AS merupakan negara yang paling gencar menawarkan wacana “*war on terror*” kepada komunitas internasional. Melalui wacana tersebut kemudian Amerika Serikat secara masif mengkampanyekan kejahatan terorisme, dengan menggunakan momentum serangan 9 September 2001, sebagai simbol kejahatan terorisme (Kusuma, 2018a).

Secara terminologi, terorisme memiliki definisi yang beragam. Misalnya definisi dari Muladi yang mengutip dari *Black Laws Dictionary* (Muladi, 2002):

“tindak pidana terorisme merupakan tindakan yang melibatkan adanya unsur kekerasan atau sesuatu yang menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia yang melanggar hukum pidana, dan jelas dimaksudkan untuk mengintimidasi masyarakat sipil; mempengaruhi kebijakan pemerintah; mempengaruhi proses penyelenggaraan negara, dengan cara pembunuhan dan pembunuhan”.

Selain itu ada beberapa definisi tentang terorisme yang berasal dari beberapa sumber yang menjelaskan tentang definisi dari terorisme, seperti yang telah dikutip oleh Ijzen. Pol. Drs. Arsyad Mbai, yang mengutip beberapa definisi terorisme, diantaranya adalah (Mbai, 2003) :

- a. *Terrorism is an act carried out to achieve on in “human and corrupt objective and involving threat to security of mankind, and violation of rights acknowledge by religion and mankind”* (Ayatullah Sheikh Muhammad AI Taskhiri).
- b. *Terrorism is the unlawful use of force or violence “against persons or property to intimidate or coerce a government, civilian populations, or any segment threat, in furtherance of political or social objective”* (FBI).

Kemudian definisi terorisme menurut Walter Reich, sebagaimana dikutip oleh A.M. Hendropriyono yang menyatakan bahwa terorisme adalah: suatu strategi kekerasan yang telah dirancang untuk mencapai atau meningkatkan hasil-hasil yang diinginkan, dengan cara menyebarkan atau menanamkan rasa ketakutan dikalangan masyarakat secara umum (Hendropriyono, 2009).

Selain itu dari sebuah forum curah gagasan (*brainstorming*) yang dihadiri oleh para akademisi, para profesional, para pakar, para pengamat politik serta para diplomat terkemuka yang diselenggarakan di kantor Menko Polkam pada tahun 2001, dapat disimpulkan mengenai pemahaman terkait terorisme yang *diartikan sebagai suatu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang (yang biasa disebut sebagai ekstrimis, separatis, suku bangsa) sebagai pilihan jalan terakhir untuk memperoleh keadilan bagi mereka yang tidak dapat dicapai atau diperoleh melalui cara resmi atau jalan hukum*” (Mbai, 2003).

Terorisme umumnya dipahami untuk merujuk kepada tindakan kekerasan untuk menciptakan rasa takut yang meluas dalam mencapai tujuan politik atau ideologi tertentu. Jika merujuk pada pengertian terorisme secara material, maka pada dasarnya serangan yang dilakukan oleh Al-Qaeda tidak berbeda dengan perang-perang yang terjadi di dunia internasional selama ini. Bahkan jika kita bandingkan dengan operasi militer yang dilakukan oleh pasukan NATO (militer Perancis, Inggris dan AS) ketika melakukan serangan ke Libya dengan alasan intervensi untuk alasan kemanusiaan, meskipun negara-negara tersebut berdalih ketika melancarkan serangan hanya menargetkan pangkalan-pangkalan militer yang diduga sebagai loyalis Muammar Gaddafi, namun pada faktanya serangan yang dilakukan tersebut mengakibatkan ribuan masyarakat dari kalangan sipil telah menjadi korban dari serangan yang dilakukan oleh pesawat-pesawat tempur pasukan NATO (Indrawan, 2013).

Selain itu, invasi dan serangan Israel terhadap Palestina yang juga mengakibatkan banyaknya korban jiwa dari masyarakat sipil, serta menimbulkan ketakutan yang luar biasa bagi warga Palestina juga tidak dimaknai sebagai fenomena terorisme bagi sebagian masyarakat internasional, utamanya Amerika Serikat yang telah menggunakan standar ganda dalam memaknai terorisme (Fanani, 2011).

Antara fenomena serangan Al-Qaeda, serangan NATO terhadap Libya, Serangan Israel terhadap Palestina, jika ditinjau dari sisi materialisme, maka ketiganya sudah memenuhi unsur-unsur yang secara terminologi dapat diklasifikasikan kedalam aksi terorisme. Hanya saja yang terjadi adalah terkait ide dan persepsi terhadap fenomena-fenomena tersebut, yang menyebabkan dunia internasional memaknai tiga fenomena itu secara berbeda. Sehingga kesimpulannya masalah pemaknaan terorisme terletak pada level ide dan gagasan.

Sementara untuk dinamika perkembangan terkait tentang isu terorisme di Indonesia sendiri, sebenarnya sudah ada hampir sama usianya dengan usia negara Indonesia. Artinya sejak Indonesia merdeka tahun 1945, sudah ada gerakan-gerakan yang dapat dimasukkan

kedalam kategori konsep terorisme secara terminologi. Bahkan perjuangan kemerdekaan Indonesia, boleh jadi bagi pemerintah kolonial Belanda bisa dikategorikan sebagai aksi teror dengan landasan nasionalis.

Peristiwa-peristiwa yang pada dasarnya masuk dalam kategori tindakan teror, sudah ada jauh sebelum Indonesia memiliki instrumen hukum tentang anti terorisme. Misalnya saja kasus Pemberontakan PKI Madiun (1948), Pemberontakan oleh DII/TII di Jawa Barat Tahun 1949, Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA pada tahun 1950, Republik Maluku Selatan (1950), Pemberontakan DI/TII Sulawesi Selatan (1952), Pemberontakan DI/TII Aceh (1953), Organisasi Papua Merdeka (1960-an), PRRI/PERMESTA (1958), Pemberontakan PKI (1965), pemberontakan Fretelin's Timor-Timur (1975) (Muradi, 2012). Namun peristiwa-peristiwa tersebut ketika itu dipersepsikan sebagai kelompok gerakan pemberontakan oleh pemerintah Indonesia. Indonesia sendiri waktu itu belum memiliki instrumen hukum yang khusus untuk memaknai kelompok-kelompok tersebut sebagai kelompok terorisme.

Ancaman terkait isu terorisme, bagi pemerintah Indonesia memunculkan persepsi atau pemaknaan yang berbeda, jika dilihat dari waktu ke waktu. Perbedaan persepsi atau pemaknaan tersebut, terjadi akibat dari perbedaan jenis teror yang terjadi. Dalam melihat sikap dan cara pandang pemerintah Indonesia terhadap fenomena terorisme, dapat dibagi menjadi dua dimensi waktu. Yang pertama fenomena terorisme di era sebelum terjadinya peristiwa 9/11 dan fenomena terorisme di era pasca terjadinya peristiwa 9/11.

Peristiwa-peristiwa teror yang terjadi di era sebelum tahun 2000-an dianggap sebagai suatu ancaman yang bersifat nasional. Karena memang waktu itu isu terorisme yang muncul adalah berupa aksi teror yang dilandasi alasan tuntutan untuk merdeka ataupun landasan ideologi yang dianggap oleh pemerintah Indonesia waktu itu bukan masuk kategori tindakan terorisme, melainkan dianggap sebagai tindakan pemberontakan dalam negeri yang mengancam keamanan nasional, dan bukan dilakukan oleh jaringan terorisme internasional seperti yang terjadi saat ini (Wuryandari, 2014).

Akibat dari persepsi dari pemerintah yang seperti itu, maka tidak heran jika penanganan terorisme di Indonesia di era sebelum terjadinya peristiwa 9/11 masih didominasi oleh pasukan militer dalam hal ini TNI, dan dilakukan secara domestik dan tidak melakukan kerjasama dengan negara lain, karena masalah tersebut dianggap sebagai masalah domestik (urusan dalam negeri).

Persepsi Indonesia dalam melihat isu terorisme mulai berubah di awal era 2000-an. Hal tersebut terjadi seiring dengan perubahan konstelasi politik internasional yang juga dipengaruhi oleh isu terorisme internasional yang menjadi

isu aktual. Isu terorisme menjadi isu penting di dunia internasional sejak terjadinya peristiwa teror yang dialami Amerika Serikat (9/11).

Pasca terjadinya serangan terhadap gedung WTC yang terjadi pada 11 September tahun 2001, Amerika Serikat memunculkan pemahaman atau pemaknaan baru tentang terorisme, termasuk pemahaman bagi pemerintah Indonesia. Dari yang awalnya terorisme dilihat sebagai kejahatan luar biasa yang sifatnya nasionalistik dan dalam konteks teritorial tertentu, berubah menjadi tindakan kejahatan yang beririsan dengan karakter ideologi tertentu serta memiliki ikatan dengan agama, serta sifatnya melintasi batas negara. Eksistensi dari hegemoni Amerika Serikat terhadap peta politik internasional juga semakin terasa pasca serangan 9/11. Kebijakan AS terkait *Global War om Terror* telah menuntut dukungan dari dunia internasional. Amerika Serikat seolah-olah hanya memberikan dua pilihan bagi komunitas internasional yaitu bergabung dengan AS untuk memerangi terorisme, atau menjadi bagian dari terorisme dan menjadi musuh dari AS. Kebijakan tersebut langsung direspon oleh pemerintah Indonesia yang waktu itu di bawah kepemimpinan Megawati dengan sikapnya yang mendukung penuh dan memilih menjadi bagian dari AS untuk memerangi terorisme (Wuryandari, 2014).

Serangan terhadap gedung WTC tersebut ditambah adanya beberapa peristiwa yang terjadi di dalam negeri yang kemudian dimaknai sebagai tindakan terorisme telah merubah paradigma pemerintah Indonesia dalam memandang fenomena terorisme. Pemerintah Indonesia kemudian memiliki persepsi atau pemaknaan terhadap terorisme yang kemudian dianggap sebagai ancaman yang nyata terhadap keamanan nasional. Ketika penulis mengajukan pertanyaan kepada mantan kepala Badan Intelijen Strategis yaitu Soleman B. Ponto terkait pemaknaan terhadap ancaman dari terorisme bagi Indonesia dia menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia memiliki persepsi bahwa terorisme dimaknai sebagai ancaman fisik terutama ancaman bagi keselamatan warga negara Indonesia yang dalam banyak kasus telah menjadi korban dari aksi para teroris (Ponto, 2018). Isu terorisme yang berkembang, baik dalam level internasional maupun dalam level nasional tersebut telah menjadi titik perubahan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam konteks memaknai dan menghadapi isu terorisme baik dalam level nasional maupun internasional.

Merujuk pada pandangan filosofis kaum konstruktivisme, maka dapat dilihat bahwa isu ancaman terorisme terhadap keamanan baik pada level internasional ataupun nasional tergantung dari ide yang dimunculkan untuk memaknai dari fenomena terorisme itu sendiri. Penjelasan sederhananya adalah, bahwa fenomena yang terjadi yang saat ini kita klasifikasikan sebagai fenomena terorisme

sejatinya tergantung dari ide dalam melihat fenomena tersebut karena memang dari awal pengertian terkait terorisme memiliki banyak arti. Dalam hal ini bisa jadi fenomena yang dipandang oleh seseorang sebagai fenomena terorisme, namun ternyata dari sudut pandang orang lain fenomena tersebut dimaknai sebagai perjuangan kemerdekaan.

Sebagai contoh, jika orang Indonesia ditanya terkait siapa Diponegoro, maka mayoritas akan menjawab dia adalah seorang pahlawan pejuang kemerdekaan. Tetapi jika kita bertanya pada orang Belanda bisa jadi mereka menjawab bahwa Diponegoro adalah seorang penjahat perang atau bahkan mereka memaknai Diponegoro sebagai teroris. Karena strategi perang gerilya yang dilakukan oleh Diponegoro dalam menghadapi Belanda, merupakan salah satu strategi dalam perang asimetris yang memiliki esensi yang sama dengan strategi teror yang juga menjadi salah satu pilihan strategi dalam perang asimetris.

Perang asimetris adalah perang yang melibatkan antara dua belah pihak atau lebih yang memiliki sumber daya atau kekuatan yang berbeda, sehingga seringkali dalam perang asimetris muncul cara-cara atau metode-metode yang baru dan sama sekali berbeda dengan strategi perang konvensional. Hal ini biasanya dilakukan oleh pihak yang lebih lemah untuk mengimbangi kekuatan lawannya yang lebih besar (Sudhir, 2008). Strategi perang gerilya atau strategi teror merupakan pilihan-pilihan yang bersifat *unconventional* yang dipilih oleh pihak yang lemah untuk mengimbangi kekuatan lawannya.

Dalam melihat dan memaknai fenomena serangan Al-Qaeda terhadap AS, serangan NATO terhadap Libya, Serangan Israel kepada Palestina, bahkan terkait strategi perlawanan Diponegoro kepada Belanda, tergantung dari ide atau gagasan dalam memaknai fenomena-fenomena tersebut. Itu artinya suatu tindakan itu bermakna sebagai tindakan terorisme atau bukan, tergantung dari ide dalam melihat tindakan tersebut. Sementara ide untuk memaknai terorisme sebagai ancaman, dapat disebarluaskan dengan wacana yang dibangun untuk mengkonstruksi ide yang ada pada masyarakat secara umum.

SIMPULAN

Fenomena yang masuk dalam klasifikasi tindakan terorisme, sudah ada di Indonesia jauh sebelum pemerintah Indonesia memiliki instrumen kontra terorisme. Beberapa peristiwa seperti Pemberontakan PKI Madiun (1948), Pemberontakan yang dilakukan oleh DII/TII di Jawa Barat tahun 1949, Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA tahun 1950, Republik Maluku Selatan (1950), Pemberontakan DI/TII Sulawesi Selatan (1952), Pemberontakan DI/TII Aceh (1953), Organisasi Papua Merdeka (1960-an), PRRI/PERMESTA (1958), Pemberontakan PKI

(1965), pemberontakan Fretelin's Timor-Timur (1975) merupakan peristiwa-peristiwa yang dapat dikategorikan ke dalam tindakan terorisme. Pemerintah Indonesia banyak menggunakan kekuatan militer ketika menangani peristiwa-peristiwa tersebut.

Pada waktu itu pemerintah Indonesia mempersesipkan peristiwa-peristiwa tersebut sebagai peristiwa pemberontakan dan ditangani secara mandiri. Karena waktu itu segala bentuk pemberontakan yang terjadi dianggap sebagai ancaman nasional dan menjadi urusan dalam negeri. Namun setelah tahun 2000-an, tepatnya pasca terjadinya peristiwa serangan di gedung WTC di Amerika Serikat, isu terorisme menjadi isu yang kuat dalam pergaulan di dunia internasional. Berkembangnya isu terorisme di dunia internasional tersebut ternyata memberikan dampak terhadap kebijakan keamanan di Indonesia. Pasca peristiwa 9/11 tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan-kebijakan dan membuat instrumen kontra terorisme. Terorisme yang dipersepsikan sebagai tindakan kejahatan luar biasa dan memberikan ancaman dalam pergaulan internasional, telah mempengaruhi pemerintah Indonesia. Ide tentang terorisme di dunia internasional tersebut membentuk persepsi pemerintah Indonesia hingga akhirnya pemerintah Indonesia membuat kebijakan yang represif dan cenderung melanggar HAM. Dapat disimpulkan bahwa ide (persepsi) pemerintah Indonesia yang terbentuk dari konstruksi sosial (pergaulan internasional) menjadi pengaruh yang cukup besar ditunjukkan dengan adanya perubahan cara atau strategi untuk menghadapi peristiwa yang cenderung memiliki tipe yang sama baik pada masa sebelum tahun 2000-an dan setelah tahun 2000-an. Perubahan ide (persepsi) yang kemudian menuntun pemerintah Indonesia dalam mengambil sikap dalam menghadapi terorisme.

Pemerintah Indonesia harus lebih teliti dalam memaknai terorisme itu sendiri. sehingga suatu tindakan atau kelompok yang dimaknai sebagai teroris, harusnya adalah tindakan atau kelompok yang benar-benar memenuhi kriteria sebagai teroris, dan yang benar-benar memberikan ancaman terhadap keamanan Indonesia secara umum. Selain itu penegakan hukum anti terorisme yang sudah dibuat di Indonesia harus bisa dijalankan dengan prinsip-prinsip keadilan, dan tidak ada pihak-pihak tertentu yang merasa diperlakukan tidak adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Almas, P. (2016, March). Kinerja Densus 88 Dinilai Bisa Gagalkan Upaya Kontra Terorisme _ Republika Online. *Republika.co.id*. Retrieved from <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/03/29/04svuw361-kinerja-densus-88-dinilai-bisa-gagalkan-upaya-kontra-terorisme>

- Bartolucci, V., & Gallo, G. (2015). Terrorism , System Thinking and Critical Discourse Analysis. *Systems Research and Behavioral Science*, 32, (1), 15–27. <https://doi.org/10.1002/sres.2206>
- Benjamin, D. (2008). Strategic Counterterrorism. *Foreign Policy at Brookings*, 7, (October), 1–21.
- Bush, G. W. (2001). Address to a Joint Session of Congress and the American People. Retrieved July 11, 2018, from <https://2001-2009.state.gov/coalition/cr/rm/2001/5025.htm>
- Fajar. (2013, November 26). Ini 10 Tindakan Pelanggaran Densus 88 Menurut Komnas HAM - Kiblat. *Kiblat.net*. Retrieved from <https://www.kiblat.net/2013/11/26/ini-10-tindakan-pelanggaran-ham-densus-88-menurut-komnas-ham/>
- Fanani, A. F. (2011). The global war on terror, American foreign policy, and its impact on Islam and Muslim societies. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 1, (2), 205–255. <https://doi.org/10.18326/ijims.v1i2.205-255>
- Finnemore, M., & Sikkink, K. (2001). TAKING STOCK : The Constructivist Research Program in International Relations and Comparative Politics. *Annual Reviews of Political Science*, 4, (June), 391–416. <https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.4.1.391>
- Firmansyah, H. (2010). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. *Mimbar Hukum*, 23, (2), 237–429. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jmh.16193>
- Hamidi, A. Z. (2016). Malaysia's Policy On Counter Terrorism And Deradicalisation Strategy. *Journal of Public Security and Safety*, 6, (2), 1–19.
- Haryadi, D. (2014). Pemberantasan Terorisme Berorientasi HAM, 42, (2), 247–254.
- Haryono, E. (2010). Kebijakan Anti-Terorisme Indonesia: Dilema Demokrasi dan Represi. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 14, (2), 229–246.
- Hendropriyono, A.M. (2009). *Terorisme Fundamental Kristen, Yahudi, Islam*. Jakarta: Kompas.
- Hopf, T. (1998). The Promise of Constructivism in International Relations Theory. *International Security*, 23, (1), 171–200. <https://doi.org/10.2307/2539267>
- Hülse, R., & Spencer, A. (2008). The Metaphor of Terror: Terrorism Studies and the Constructivist Turn. *Security Dialogue*, 39, (6), 571–592. <https://doi.org/10.1177/0967010608098210>
- Indrawan, J. (2013). Legalitas dan Motivasi NATO (North Atlantic Treaty Organization) dalam Melakukan Intervensi Kemanusiaan di Libya. *Jurnal Kajian Wilayah*, 4, (2), 127–149.
- Jamwal, N. S. (2003). Counter Terrorism Strategy. *Strategic Analysis*, 27,(1), 1–29. Retrieved from https://idsa.in/system/files/strategicanalysis_jamwal_0303.pdf
- Kedang, A. Y. (2017). Internasionalisasi dan Internalisasi Wacana War on Terror. *Sosial Politik*, 3, (2), 21-42. <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/sospol.v3i2.4883>
- Kusuma, A. J. (2018a). *Isu Terorisme: Dalam Dimensi Material Dan Imaterial*. (Danang Trijayanto and Iqbal Aidar Idrus, Ed.). Jakarta: Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.
- Kusuma, A. J. (2018b). The Allegation of Human Rights Violation in the Process of Counter-Terrorism Acts in Indonesia by Densus 88 Force. *Advanced Science Letters*, 24, (5), 3394–3398. <https://doi.org/https://doi.org/10.1166/asl.2018.11384>
- Mbai, A. (2003). Terorisme dan penanggulangannya. In *Seminar Tentang Penegakan Hukum Terhadap Terorisme* (p. 124). Bandung: BPHN Departemen Kehakiman dan HAM bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.
- McDonald, M. (2008). Security Studieas An Intriduction. In P. D. Williams (Ed.), *Security Studieas An Intriduction* (pp. 59–73). New York: Routledge.
- Muhammad, A. (2015). *Indonesia's Experience In The War on Terror*. Yogyakarta: The Phinisi Press.
- Muhtar, Z. (2014). Eksistensi Densus 88: Analisis Evaluasi Dan Solusi Terkait Wacana Pembubaran Densus 88. *SUPREMASI HUKUM*, 3, (1), 123–138.
- Mukhtar, S. (2016). Strategi Pemerintah Indonesia Menghadapi Terorisme Dalam Era Demokratisasi. *Reformasi*, 6, (2), 143–153.
- Muladi. (2002). *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indoesnaia*. Jakarta: Habibie Center.
- Muradi. (2012). *DENSUS 88 AT Konflik, Teror dan Politik*. Bandung: Dian Cipta.
- Ponto, S. B. (2018). *Public Discussion and Personal Interview to Soleman B. Ponto (Head of Strategic Intelligence Agency)*. Jakarta: Imparsial.
- Sitorus, E. Y. (2016). The Philippine National Security Policy In The Counter Terrorism. *Jurnal Prodi Peperangan Asimetris*, 3, (2), 25–38.

- Sudhir, M. R. (2008). Asymmetric War : A Conceptual Understanding. *Journal of the Center for Land Warfare Studies*, 58–66. Retrieved from https://www.claws.in/images/journals_doc/742067376_MBSushir.pdf
- Tams, C. J. (2009). The Use of Force against Terrorists. *The European Journal of International Law*, 20, (2), 359–397. <https://doi.org/10.1093/ejil/chp031>
- Wendt, A. (1992). Anarchy is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics. *International Organization*, 46, (2). <https://doi.org/10.1017/S0020818300027764>
- Wendt, A. (1995). Constructing International Politics. *International Security*, 20, (1), 71–81. <https://doi.org/10.2307/2539217>
- Wuryandari, G. (2014). Politik Luar Negeri Indonesia Dalam Menghadapi Isu Terorisme Internasional. *Jurnal Penelitian Politik*, 11, (2), 71–83. <https://doi.org/https://doi.org/10.14203/jpp.v11i2.202>

WILLINGNESS TO PAY MASYARAKAT TERHADAP SUMBERDAYA TERUMBU KARANG DI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN PULAU BIAWAK

Iwang Gumila

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran

E-mail: iwanggumilar1@gmail.com atau iwang@unpad.ac.id

ABSTRAK. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi *willingness to pay* (WTP) masyarakat dalam menentukan besarnya nilai sumberdaya terumbu karang di Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Pulau Biawak Provinsi Jabar. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dan dianalisis secara deskriptif menggunakan perangkat statistik regresi linier berganda. Unit analisis adalah wisatawan (6 orang) dan masyarakat nelayan (37 orang) yang berkunjung ke KKP Pulau Biawak. Data dikumpulkan melalui proses wawancara dan diskusi kelompok secara mendalam (*focus groups discussion*). Beberapa faktor sosial ekonomi yang diduga berpengaruh terhadap WTP adalah profesi (X_1), gender (X_2), usia (X_3), pendidikan (X_4), penghasilan (X_5), dan pengalaman kerja (X_6). Berdasarkan hasil penelitian menindikasikan bahwa berdasarkan *P-value* variabel pendidikan (0,6%) dan penghasilan (4,3%) secara parsial berpengaruh terhadap WTP (*P-value* < 5%), sementara untuk variabel profesi (65,4%), gender (57,7%), usia (89,7%), dan pengalaman kerja (85,3%) secara parsial tidak berpengaruh terhadap WTP (*P-value* > 5%). Koefisien determinasi (R^2) dari hasil analisis diperoleh nilai sebesar 80%. Nilai ini menunjukkan bahwa WTP dapat dijelaskan 80% oleh variabel-variabel X_1 , X_2 , X_3 , X_4 , X_5 , dan X_6 sedangkan sisanya 20% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak disebutkan dalam model. Berdasarkan Uji F, nilai F tabel ($df = 24,31$, $\alpha 0,005$) sebesar 2,36. $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka keseluruhan variabel signifikan berpengaruh terhadap WTP.

Kata kunci: *willingness to pay*; kawasan konservasi perairan; sosial ekonomi; terumbu karang; Biawak.

WILLINGNESS TO PAY THE COMMUNITY TO CORAL REEFS VALUE IN BIAWAK MARINE CONSERVATION AREA

ABSTRACT. This study aims to analyze the socio-economic factors that influence the willingness to pay (WTP) of the community in determining the value of coral reef resources in the Marine Conservation Area (MCA) of Biawak Island, West Java Province. This study used a case study method and analyzed descriptively using multiple linear regression statistical tools. The unit of analysis is tourists (6 persons) and fishermen (37 persons) who visit the Biawak Island. Data is collected through an interview process and focus groups discussion. Some of the socio-economic factors that are thought to influence WTP are profession (X_1), gender (X_2), age (X_3), education (X_4), income (X_5), and work experience (X_6). Results of the research indicate that *P-value* of the education variable (0.6%) and income (4.3%) partially influence the WTP (*P-value* < 5%), while for the professional variable (65.4%), gender (57.7%), age (89.7%), and work experience (85.3%) but partially did not affect WTP (*P-value* > 5%). The coefficient of determination (R^2) from the regression test results from the summary model the results are 80%, this indicates that the WTP can be explained 80% by variables X_1 , X_2 , X_3 , X_4 , X_5 , and X_6 while the remaining 20% is explained by other variables not mentioned in the model. Based on Test F, the value of F table ($df = 24.31$, $\alpha 0.005$) is 2.36, because $F_{count} > F_{table}$, then the overall variables significantly influence WTP.

Keywords: *willingness to pay*; marine conservation area; social economy; coral reef

PENDAHULUAN

Provinsi Jabar secara geografis terletak di antara $5^{\circ}50' - 7^{\circ}50' LS$ dan $104^{\circ}48' - 104^{\circ}48' BT$ serta memiliki luas laut 18.860,04 Km² (UU NO. 23 tahun 2014) dan memiliki garis pantai sepanjang 848,63 km yang terbagi menjadi 416,31 km garis pantai di wilayah Jabar bagian selatan dan 432,32 km garis pantai di wilayah Jabar bagian utara (Dinas Perikanan dan Kelautan, Provinsi Jabar. 2005). Salah satu wilayah perairan yang ada di Jabar yang memiliki potensi sumberdaya terumbu karang penting adalah wilayah Perairan Pulau Biawak. Perairan Pulau Biawak ini telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah Provinsi Jabar Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jabar sebagai kawasan konservasi perairan laut daerah.

Terumbu karang mempunyai fungsi yang sangat penting sebagai tempat memijah, mencari makan, daerah asuhan bagi biota laut dan sebagai sumber plasmanutfah.

Terumbu karang juga merupakan sumber makanan dan bahan baku substansi bioaktif yang berguna dalam farmasi dan kedokteran. Selain itu terumbu karang juga mempunyai fungsi yang tidak kalah pentingnya yaitu sebagai pelindung pantai dari degradasi dan abrasi (Dahuri, 2001). Kondisi terumbu karang di wilayah perairan Pulau Biawak diduga dari waktu ke waktu mengalami perubahan sesuai dengan perubahan lingkungan yang ada di sekitarnya. Perubahan kondisi terumbu karang pada akhirnya akan berdampak terhadap kondisi sumberdaya lainnya yang berasosiasi dengan terumbu karang (Pet-Soede, 2000). Terumbu karang sebagai salah satu sumberdaya pesisir dan laut sangat rentan terhadap kerusakan, baik itu yang disebabkan karena faktor bio fisik maupun karena faktor sosial, ekonomi maupun budaya. Kerusakan ekosistem seperti terumbu karang merupakan salah satu indikasi rendahnya apresiasi masyarakat terhadap layanan dan jasa dari suatu ekosistem. Dengan kata lain, masyarakat masih 'undervalue' terhadap nilai sesungguhnya yang dihasilkan

ekosistem terumbu karang. Akibatnya adalah terjadinya degradasi dan kerusakan lingkungan lainnya.

Salah satu instrumen lingkungan yang digunakan untuk menilai sumberdaya terumbu karang diantaranya valuasi ekonomi dengan menggunakan metode *Contingensi Valuation Method (CVM)* dengan parameter *willingness to pay (WTP)* dan *willingness to accept (WTA)*. “WTP adalah pengukuran jumlah maksimum seseorang ingin mengorbankan sejumlah nilai moneter tertentu untuk memperoleh barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumberdaya alam dan lingkungan. WTA adalah pengukuran jumlah maksimum moneter yang dapat diterima untuk memperoleh barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumberdaya alam dan lingkungan. Valuasi ekonomi merupakan instrument yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa besar apresiasi masyarakat memberikan nilai atau harga terhadap layanan barang dan jasa dari ekosistem terumbu karang dibandingkan dengan nilai seutuhnya dari ekosistem tersebut” (Fauzi,2007). Kesediaan membayar untuk perbaikan kualitas terumbu karang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan ekonomi individu atau masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, sangat penting untuk dikaji sejauhmana faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap kesediaan membayar masyarakat untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas ekosistem terumbu karang di Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Pulau Biawak.

METODE

Riset ini telah dilakukan di KKP Pulau Biawak, Provinsi Jabar pada pada bulan April dan Mei 2018. Metode yang digunakan dalam riset ini adalah metode studi kasus. Metode studi kasus sebagai salah satu jenis pendekatan deskriptif, adalah riset yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu organisme (individu), lembaga atau gejala tertentu dengan daerah atau subjek yang sempit (Arikunto, 1986). Pengambilan sampel dalam penelitian ditentukan berdasarkan teknik *accidental sampling*. Dalam teknik sampling ini, yang diambil sebagai anggota sampel adalah responden yang mudah ditemui atau yang berada pada waktu yang tepat, mudah dijangkau. *Accidental sampling* didasarkan pada ketersediaan elemen dan kemudahan mendapatkannya (Amirullah, 2015).

Metode secara umum yang digunakan dalam pengumpulan data terkait dengan riset ini adalah metode Triangulasi, yaitu metode pengumpulan data melalui pendekatan observasi lapangan, data instansional dan interview dengan masyarakat. Dalam observasi lapangan dilakukan pengamatan dan pengukuran kondisi objek yang akan diteliti. Data instansional digunakan untuk

menjelaskan mengenai permasalahan yang diteliti. *Interview* dengan masyarakat dilakukan untuk menggali data dan informasi melalui diskusi kelompok kelompok (*Foccus Groups Discussion*) dengan menggunakan kuesioner atau panduan pertanyaan yang telah dipersiapkan.

Metode analisis yang digunakan secara umum adalah analisis deskriptif, yaitu metode analisis yang bersifat menjelaskan objek kajian secara rinci dan komprehensif untuk memberikan gambaran menyeluruh dari objek yang diteliti. “Metode analisis deskriptif adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah ataumemusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya” (Sugiyono, 2009).

Analisis WTP masyarakat dilakukan dengan metode *contingent valuation method (CVM)*, yaitu suatu metode valuasi yang menanyakan secara langsung kepada masyarakat tingkat kesanggupan membayar masyarakat (Adrianto, 2007). Langkah-langkah dalam CVM adalah sebagai berikut :

- Identifikasi karakteristik target populasi: menentukan target kelompok populasi dan identifikasi apakah target homogen atau heterogen
- Mendesai kuisisioner: disesuaikan dengan tujuan survey CVM, disesuaikan dengan biaya dan waktu yang tersedia
- Analisis dan pengolahan data hasil survei: data sesuai dengan parameter penting yang telah ditetapkan, melakukan analisis deskriptif terhadap parameter penting yang telah ditetapkan.
- Menghitung *willingnes to pay (WTP)* menggunakan Regresi Linier Berganda:

$$y = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6)$$

$$y = \alpha + \beta1D1 + \beta2D2 + \beta3X3 + \beta4X4 + \beta5X5... + \beta6X6 + \epsilon$$

dimana :

y	: WTP
α	: Konstanta
$\beta1D1$: Profesi
$\beta2D2$: Gender
$X3$: Usia
$\beta4X4$: Pendidikan
$X5$: Penghasilan
$X6$: Pengalaman Kerja
$\beta1- \beta6$: Koefisien Regresi
ϵ	: Error

- Pelaporan hasil survei CVM: Penyusunan laporan survey CVM dan penyajian hasil survei CVM]

f. Nilai keberadaan di masyarakat dengan meratakan WTP dari responden yang diwawancarai

Variabel *Dummy* :

1. Profesi :
 - a. Nelayan (1)
 - b. Non nelayan (0)
2. Gender :
 - a. Laki-laki (1)
 - b. Perempuan (0)

Uji statistik yang digunakan adalah R^2 , Uji F dan Uji t. Koefisien determinasi (R^2) menunjukkan seberapa besar persentase variasi yang terjadi pada variabel terikat dapat dijelaskan oleh variabel bebas dalam model. Suatu model dikatakan lebih baik apabila koefisien determinasinya mendekati satu. Uji F dikenal dengan uji serentak yaitu uji untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Selain itu, untuk menguji apakah model regresi yang kita buat signifikan atau non signifikan. Uji t untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya. Uji ini dapat dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel. Jika t hitung > t tabel, maka H_0 ditolak. Jika t hitung < t tabel maka H_0 ditolak (Sugiyono, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pulau Biawak terletak di sebelah utara Indramayu sekitar kurang lebih 40 km dari daratan Indramayu ini dapat dijangkau dengan menggunakan kapal nelayan, *speedboat* dan kapal dengan lama perjalanan 3-4 jam. Beberapa akses lokasi alternatif menuju Pulau Biawak, antara lain dari Pantai Dadap-Kecamatan Juntinyuat sekitar 34 millaut; dari Pantai Karangsong-Kecamatan Indramayu sekitar 28 mil laut; dari Tempat Pelelangan Ikan Bedahan-Kecamatan Pasekan sekitar 27 millaut; dari Tempat Pelelangan Ikan Limbangan-Kecamatan Juntinyuat sekitar 30 mil laut; dari Tempat Pelelangan Ikan Glayem-Kecamatan Juntinyuat sekitar 30 mil laut; dan dari Eretan-Kecamatan Kandanghaur sekitar 40 mil laut.

Topografi, Geologi dan Iklim Pulau Biawak

Di wilayah daratannya, Pulau Biawak memiliki topografi datar, beberapa bagian pulau ditumbuhi mangrove yang tersebar di sekitar kawasan pulau. Pulau Biawak memiliki luas lahan 120 ha lebih, terdiri kurang lebih 80ha berupa hutan bakau dan sisanya kurang lebih 40ha berupa hutan pantai atau daratan. Pulau Biawak memiliki panjang dari timur ke barat sekitar satu kilo meter dan luas panjang dari arah utara ke selatan kurang lebih setengah kilo meter, perkiraan ketinggian darat dari permukaan air

laut kurang lebih dua mdpl. Pulau Biawak memiliki areal hamparan batuan yang luas, jarak antara pantai ke tubir pantai rata-rata kurang lebih 150 meter, adapun dari arah barat dan barat laut berupa hamparan batuan yang kurang lebih memiliki lahan sekitar 300 meter yang terdiri atas batu-batuan karang mati dan batu-batuan hancuran karang (*reeflat*).

Secara geologi, Pulau Biawak di bagian Barat Laut dan Utara memiliki hamparan bebatuan karang, hamparan hancuran batu karang, hampar pasir putih atau hamparan kersik lumpur dan hamparan humus yang merupakan media tumbuh hutan bakau khususnya spesies *Bruguiera sp.* *Bruguiera sp.*, memiliki ciri yang khas berupa perakaran jangkar pendek. Susunan hamparan geologi wilayah pesisir pantai utara Indramayu secara umum merupakan hamparan batuan sedimen atau endapan terdiri dari campuran hancuran berupa bahan literit beserta berupa jenis batuan *pliocene sedimentary facies* serta *aluvium*.

Pulau Biawak seperti wilayah lainnya di pesisir Indramayu memiliki curah hujan sekitar 1.621 mm/tahun. Rata-rata suhu 30°C, dan dipengaruhi angin musim timur dan angin musim barat. Berdasarkan klasifikasi Schmidt dan Ferguson seluruh daratan Jawa, khususnya Indramayu merupakan tipe iklim D (Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu, 2017).

Kondisi Hidrooseanografi Pulau Biawak

Gerakan pasang surut air laut menyebabkan terjadinya perubahan permukaan air laut sepanjang garis pantai secara teratur setiap hari. Berdasarkan pendapat Dahuri (1996) dalam Dinas Perikanan dan Kelautan, Provinsi Jabar, 2005 bahwa karakteristik pasang surut (pasut) Cirebon dan daerah sekitarnya mempunyai tipe pasut ganda campuran.

Arus di Pulau Biawak cukup tinggi pada waktu angin musim barat dan angin musim timur. Ketinggian gelombang di perairan Pulau Biawak dapat mencapai 2-4 meter, sedangkan arusnya dapat mencapai 5-10 m/dtk.

Potensi Bakau, Hutan Pantai dan Padang Lamun

Pulau Biawak banyak ditumbuhi banyak sekali ragam jenis tanaman mangrove. Hal ini sesuai dengan kondisi lahannya yang masih baik. Berbagai jenis ragam tumbuhan mangrove yang sudah langka sebagaimana jarang dijumpai di pantai utara Jawa banyak terdapat di pulau biawak. adapun Jenis-jenis mangrove yang biasa tumbuh di antaranya

1. *Sonneratia spp.*,
2. *Avicennia spp.*,
3. *Bruguiera spp.*,
4. *Rhizophora spp.*,
5. *Ceriops spp.*,
6. *Acanthus spp.*,

7. *Lummitterae*,
8. *Xylocarpus*,
9. *Aegicera*,
10. *Nipa spp.*, dan
11. *Heritiera spp.*

Pulau Biawak sendiri memiliki kerapatan tegakan pohon mangrove yang sangat bervariasi mulai dari rendah sampai tinggi dengan kisaran tegakan antara 6 meter sampai 18 meter, dengan rata-rata ketinggian pohon sekitar 4 meter hingga 5 meter. Pulau Biawak selain itu memiliki hutan pantai campuran yang cukup beragam atau bervariasi dari mulai tumbuhan tingkat rendah atau perdu sampai dengan jenis tumbuhan tingkat tinggi, beberapa jenis tumbuhan yang banyak dijumpai di pulau biawak adalah antara lain: *Hibiscus tiliaceus*, *Pongamia*, *Erythrina*, *Premna*, *Redermachera*, *Phempis Cordia*, Cemara laut (*Casuarina spp.*), Ketapang (*Terminalia catappa*), Pandan (*Pandanus spp.*) Bintangur laut (*Calophyllum inophyllum*), Mengkudu (*Morinda spp.*), Kelapa (*Cocos nucifera*) dan Petai cina (*Leucaena glauca*).

Bibir pantai (tubir) Pulau Biawak pada saat terjadi pasang tinggi hanya mencapai kedalaman sekitar 1,5 meter pada bagian tubir yang merupakan areal perairan yang kaya dengan lamun (sejenis rumput laut). Adapun wilayah yang paling banyak ditumbuhi lamun suka dijumpai di wilayah perairan bagian Barat Daya sampai Barat Laut pulau biawak, dengan tingkat kerapatan yang relatif cukup tinggi. Padang lamun adalah hamparan lokasi yang menjadi sumber untuk makanan (*feeding ground*) bagi berbagai hewan laut seperti ikan duyung (*Dugong dugon*) dan penyu. Hampir semua jenis biota lamun yang ada di wilayah perairan pulau biawak merupakan spesies *Enhalus acoroides* dan substratnya merupakan pasir.

Kawasan perairan pulau biawak juga dihuni pula oleh beberapa jenis udang-udangan antaranya jenis udang karang, lobster laut dan binatang laut pemakan karang (*crown of thorn*). Dapat juga ditemukan jenis-jenis ikan hias yang tersebar di wilayah perairan pulau Biawak dan daerah di sekitarnya antara lain adalah: ikan kiper (*Scatophagus argus*), ikan Samandar (*Siganus verniculatus*), ikan Kerapu (*Chremileptis altivelia*), ikan Dokter (*Labroides dimidiatus*), ikan Kakatua (*Callyodon ghabbon*), ikan Kerapu Tikus (*Cinhiictichy aprianus*), ikan Zebra (*Dendrichirus zebra*), ikan Kupu-kupu (*Chaetodon chrysurus*), ikan Kokotokan, ikan Merakan (*Pterois valiteus*), ikan Pisau-pisau, ikan Petek perak (*Desayllus reticulatus*), ikan Kapasan, ikan Buntul, ikan Grapu, ikan Kerong-kerong (*Plectorhynchusspp.*) (Dinas Perikanan dan Kelautan, Provinsi Jabar, 2005).

Fauna

Di Pulau Biawak jenis hewan darat yang sering jumpai dan sudah menjadi ciri khas pulau Biawak

adalah Biawak (*Varanus salvator*). Selain itu juga dapat ditemui berbagai jenis burung antara lain: burung Trinil pantai (*Bubulcus ibis*), burung Cagak abu (*Ardea cinerea*), burung Cagak laut (*Ardea sumatrana*), burung Cekaka (*Halycon chloris*), Burung udang biru (*Alcedo caerulescens*), burung Trulek (*Phuvialis dominica*), dan lain sebagainya. Banyak pula terdapat aneka burung-burung yang bermigrasi atau singgah sementara di Pulau Biawak selain untuk berlindung, bersarang, dan berkembangbiak, burung-burung tersebut umumnya melakukan migrasi harian ke pesisir pantai sekitar Indramayu untuk mencari makan pada siang hari dan kembali pada sore hari. terutama pada vegetasi hutan sisi timur yang kondisi tegakan hutannya masih relatif tinggi.

Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat

Sejauh observasi di Pulau Biawak tidak pernah satupun dijumpai satu pemukiman pun, yang ada hanya seorang petugas penjaga mercusuar yang ditugaskan oleh Direktorat Jendral Perhubungan Laut. Para petugas tersebut secara rutin bergiliran untuk waktu-waktu tertentu. Mereka bertugas dalam kurun waktu selama 6 bulan secara bergiliran untuk mengawasi dan menjaga fasilitas mercusuar. Adapun jumlah petugas rata-rata tiga orang, didalamnya terdapat rumah penjaga mercusuar yang berfungsi sebagai tempat tinggal para petugas, dan ada juga gudang, dan ruang mesin diesel. Pihak pengelola melakukan kunjungan dan monitoring yang dilakukan sesuai agenda dan program kerja yang dibuat. Hal ini dikarenakan jauhnya jarak antara pulau biawak dengan daratan daerah Indramayu (Dinas Perikanan dan Kelautan, Provinsi Jawa Barat, 2005).

Pulau Biawak sering disinggahi para nelayan. Para nelayan datang ke Pulau Biawak untuk berlabuh, beristirahat dan memperbaiki peralatan menangkap ikannya. Pulau Biawak dan sekitarnya juga sering di kunjungi para peneliti dan wisatawan. Para peneliti datang ke Pulau Biawak dan sekitarnya untuk melakukan survei dan penelitian terkait kawasan, sedangkan wisatawan berkunjung untuk melakukan wisata sejarah, *snorkling*, *diving*, dan memancing (Dinas Perikanan dan Kelautan, Provinsi Jawa Barat, 2005).

Sarana dan Prasarana

Fasilitas umum yang terdapat di Pulau Biawak di antaranya pusat informasi, rumah singgah (*Homestay*), mushola, penangkaran ikan hias, papan interpretasi, mercusuar dan 6 mess yang dibangun oleh Kementerian Perhubungan sebagai tugas menjaga lalu lintas kapal laut yang melintas disekitarkawasan (Dinas Perikanan dan Kelautan, Provinsi Jawa Barat, 2005).

Produksi Perikanan Tangkap

Berdasarkan Statistik Perikanan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu 2017, produksi

perikanan tangkap di KKP Pulau Biawak Kabupaten Indramayu (Tabel 1).

Tabel 1. Produksi Perikanan Tangkap di KKP Pulau Biawak

No.	Tahun	Jumlah Produksi (Ton)
1	2014	126.792,92
2	2015	136.091,48
3	2016	139.048,57

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu 2017

Tabel tersebut memiliki makna yaitu sebagai tempat produksi kegiatan perikanan yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Produksi perikanan tangkap terbesar terjadi pada tahun 2016 yang mencapai hasil 139.048,57 ton. Indramayu sangat banyak memberikan kontribusi besar dibandingkan dengan daerah atau kabupaten lain di wilayah bagian utara Provinsi Jawa Barat yaitu sebesar 61,50% dari total jumlah produksi perikanan tangkap seJawa Barat (BPS Provinsi Jawa Barat 2017). Produksi perikanan tangkap tersebut diperoleh dari hasil tangkapan nelayan yang berjumlah 40.545 Rumah Tangga Perikanan (RTP) dimana 14,94% diantaranya merupakan pemilik kapal dan 85,06% adalah nelayan buruh perikanan (Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu, 2017).

Profil Responden

Masyarakat yang menjadi sasaran atau target dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan metode *accidental sampling*, yaitu suatu metode sampling yang mengambil objek secara langsung di lapangan, adapun objek penelitian ini adalah para nelayan yang menangkap ikan dan wisatawan yang berkunjung ke Pulau Biawak.

Objek sasarannya berupa orang yang mudah ditemui, dan berada pada saat dan waktu yang tepat dan mudah dijangkau. Berdasarkan hal tersebut, maka responden yang dipilih pada penelitian ini nelayan sebanyak 37 orang, serta wisatawan sebanyak 6 orang yang melakukan kegiatan di sekitaran Pulau Biawak. Hasil identifikasi karakteristik objek sasaran penelitian berdasarkan kriteria usia dapat digolongkan ke dalam dua golongan, yaitu kelompok A: usia produktif 18-50 tahun, dan kelompok B: usia non produktif >50 tahun (Tabel 2).

Tabel 2. Data Sebaran Umur Responden

Umur responden (tahun)	Jumlah (orang)	Persentase (%)
18– 50	36	83,72
> 50	7	16,28
Jumlah	43	100

Sumber : Data Primer (Diolah) 2018

Berdasarkan data tabel tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar sebaran umur responden berada pada usia produktif (83,72%). Menurut Ikhsan (2014), tingkat usia mempengaruhi kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas maupun konsep berpikir sehingga tergolong usia produktif. Hal tersebut dilihat dari kondisi fisik yang kuat dan pengalaman yang lebih banyak dibandingkan dengan yang berumur muda.

Tabel 3. Data Pendidikan Responden

Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
SD	19	44,18
SMP	5	11,63
SMA	4	9,30
D3	1	2,33
S1	13	30,23
S2	1	2,33
Jumlah	43	100,00

Sumber : Data Primer (Diolah) 2018

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa umumnya pendidikan responden di lokasi riset adalah sekolah menengah ke bawah (65,11%). Kondisi pendidikan akan mempengaruhi pola perilaku masyarakat. Pendidikan akan membuat cara berfikir dan bersikap masyarakat akan menjadi lebih baik. Kesadaran akan pentingnya lingkungan akan termotivasi dengan adanya tingkat pendidikan.

Analisis Willingness to Pay

Data-data yang digunakan dalam riset ini dilakukan dengan cara mewawancarai responden menggunakan kuisioner yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Nilai dari manfaat keberadaan (eksistensi) diperoleh dengan cara mengalikan nilai rata-rata yang diberikan responden terhadap keberadaan terumbu karang dengan luas terumbu karang secara keseluruhan. Menurut FAO, 2000 dalam Adrianto, L. 2007 rumus untuk rata-rata WTP yaitu sebagai berikut :

$$WTP = \sum_{i=1}^{i=n} \frac{y_i}{n}$$

Keterangan :

n = Besaran atau jumlah sampel

Y_i = Besaran WTP yang diberikan responden ke i

Tabel 4. Nilai Kisaran WTP yang diberikan Responden untuk Terumbu Karang

No.	Parameter	Nilai (Rp)
1	WTP Max	500.000
2	WTP Min	100.000
3	WTP Rata-rata	230.814
4	WTP Median	200.000
5	WTP Modus	100.000

Sumber : Data Primer (Diolah) 2018

Nilai modus (nilai yang paling banyak) WTP dari responden sebesar Rp 100.000. Langkah selanjutnya yaitu mengalikan nilai WTP yang diberikan oleh masyarakat yang berada di kawasan Pulau Biawak (Rp 100.000) dikalikan dengan jumlah penduduk yang ada di kawasan (4.214 KK) dikalikan luas sebaran terumbu karang Pulau Biawak (21,43 ha) diperoleh nilai manfaat keberadaan (*existence*) dari ekosistem terumbu karang di Pulau Biawak yaitu sebesar Rp 9.030.602.000 per tahun .

Analisis Hubungan WTP dan Faktor-Faktor Sosial Ekonomi

Hipotesis yang digunakan dalam riset ini sebagai berikut:

Hipotesis 0: Faktor-faktor Sosial Ekonomi $X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6$ berpengaruh terhadap WTP masyarakat

Hipotesis 1: Faktor-faktor Sosial Ekonomi $X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6$ tidak berpengaruh terhadap WTP masyarakat

Dimana: X_1 (profesi), X_2 (gender), X_3 (usia), X_4 (pendidikan), X_5 (penghasilan), X_6 (pengalaman kerja)

Analisis Korelasi

Nilai *P-value* variabel (pendidikan) 0,6% <(5%), hal tersebut menunjukkan H_0 ditolak, artinya bahwa tingkat pendidikan masyarakat akan sangat berpengaruh dalam menentukan besar kecilnya nilai WTP. Nilai *P-value* variabel (penghasilan) 4,3% <(5%), hal tersebut menunjukkan H_0 ditolak, artinya penghasilan masyarakat juga sangat berpengaruh dalam menentukan besar kecilnya nilai WTP.

Nilai *P-value* variabel lainnya, yaitu variabel *dummy* (profesi) 65,4%, (gender) 57,7%, (usia) 89,7%, dan (pengalaman kerja) 85,3% > (5%), variabel-variabel tersebut menunjukkan bahwa H_0 diterima. Artinya profesi, gender, usia, dan pengalaman kerja masyarakat dalam penentuan nilai WTP tidak berpengaruh.

Tabel 5. Analisis Korelasi Faktor-faktor Sosial Terhadap WTP

Variabel	Koefisien	Pvalue	Keterangan
X_1	20261,981	0,654	Profesi
X_2	-16804,298	0,577	Gender
X_3	-166,081	0,897	Usia
X_4	15935,069	0,006*	Pendidikan
X_5	0,047	0,043*	Penghasilan
X_6	-282,013	0,853	Pengalaman kerja

Sumber : Data Primer (Diolah) 2018

Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui bahwa terdapat makna bahwa variabel pendidikan (X_4) berpengaruh positif terhadap WTP, tingkat jenjang pendidikan dengan 15.935,069. Sehingga dapat diartikan bahwa jika variabel lain konstan, pertambahan satu tingkat pendidikan seseorang akan meningkatkan WTP sebesar Rp 15.935,069. Kondisi tingkat pendidikan seseorang dapat mempengaruhi kecakapan, tingkah laku dan sikap seseorang. Pendidikan

seorang, akan mendorong cara penilaian terhadap sumber daya terumbu karang karena memiliki wawasan yang cukup untuk mempertimbangkan dari berbagai hal yang terkait dengan potensi terumbu karang ini. Dengan bertambahnya tingkat pendidikan seseorang diharapkan kesadaran pentingnya lingkungan juga semakin meningkat.

Menurut Neolaka (2008) ada empat faktor yang diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kesadaran lingkungan dari masyarakat, yaitu faktor pendidikan, faktor kemiskinan, faktor kemanusiaan, dan faktor gaya hidup. Perbedaan latar belakang pendidikan akan mempengaruhi pola atau cara berfikir dan cara bersikap seseorang dalam menghadapi berbagai masalah yang dihadapi, walaupun terkadang faktor lingkungan tempat tinggal dan kebiasaan juga akan berperan dalam mempengaruhi pola pikir dan perilakunya, namun latar belakang pendidikan akan mempengaruhi tindakan manusia akan permasalahan yang ada, seperti permasalahan kesadaran lingkungan. Dengan kata lain, pendidikan merupakan proses dimana seseorang atau masyarakat mengalami proses transformasi secara sengaja dalam hal transfer ilmu pengetahuan, teknologi, nilai, keterampilan bagi generasi yang akan datang (Siswoyo, 2008).

Pendidikan lingkungan hidup dalam sistem pendidikan nasional telah diperkenalkan secara luas berbagai muatan ilmu lingkungan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan terhadap kesadaran, sikap dan tingkah laku masyarakat yang bertanggung jawab dan memikirkan berbagai akibat yang ditimbulkannya baik secara langsung ataupun tidak langsung (Soedijarto, 2009).

Variabel X_5 (Penghasilan) berpengaruh positif terhadap WTP, dapat diartikan bahwa jika variabel lainnya konstan, ketika jumlah penghasilan bertambah satu rupiah maka akan meningkatkan tingkat WTP sebesar Rp 0,047. Semakin tinggi penghasilan maka penilaian terhadap terumbu karang juga semakin tinggi. Hasil penelitian untuk kasus sumberdaya mangrove menunjukkan bahwa dorongan kebutuhan hidup / ekonomi masyarakat yang semakin meningkat telah mendorong masyarakat tidak menghiraukan lagi kelestarian lingkungan (Gumilar, 2018).

Uji Tingkat Kebajikan (R^2)

Setelah dilakukan pengolahan data, Koefisien determinasi (R^2) diperoleh sebesar 0,80. Maknanya adalah variabel-variabel yang digunakan dalam model WTP dapat dijelaskan sebesar 80%, sisanya yang 20% dapat dipengaruhi oleh variabel profesi, gender, usia dan pengalaman kerja.

Uji F dan Uji T

Nilai F tabel yang diperoleh dengan derajat bebas 24,311 dan α 0,005 yaitu 2,36. Karena F hitung > F tabel, maka H_0 diterima artinya seluruh variabel dalam model secara signifikan berpengaruh terhadap WTP. Nilai t pada

tiap variabel yaitu nilai t pada variabel X_1 0,451, X_2 -0,563, X_3 -0,131, X_4 2,917, X_5 2,101, dan X_6 -0,187. Nilai dari tiap variabel tersebut menunjukkan variabel yang berpengaruh terhadap WTP yaitu X_4 (pendidikan) dan X_5 (penghasilan) karena nilai t hitung pada variabel-variabel tersebut lebih besar dari t tabel yaitu 2,028 (Tabel 6).

Tabel 6. Hasil t-hitung

Variabel	t hitung	t tabel	Keterangan
X_1	0,451		Profesi
X_2	-0,563		Gender
X_3	-0,131	2,028	Usia
X_4	2,917*		Pendidikan
X_5	2,101*		Penghasilan
X_6	-0,187		Pengalaman kerja

Sumber : Data Primer (Diolah) 2018

SIMPULAN

Penulis berkesimpulan bahwa tingkat pendidikan dan penghasilan secara parsial memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap pengambilan keputusan masyarakat dalam menentukan besar kecilnya nilai WTP sumber daya alam di KKP Pulau Biawak. *P-value* variabel pendidikan (0,6%) dan penghasilan (4,3%), jadi yang didapat adalah *P-value* <5%, beragam profesi, gender, usia dan pengalaman kerja masyarakat secara parsial tidak mempengaruhi pengambilan keputusan masyarakat dalam menentukan besar kecilnya nilai WPT. Variabel profesi (65,4%), gender (57,7%), usia (89,7%), dan pengalaman kerja (85,3%), sehingga tidak berpengaruh karena *P-value* >5%; Koefisien determinasi (R^2) diperoleh hasil sebesar 80%. Artinya WTP dapat dijelaskan 80% oleh variabel-variabel profesi, gender, usia, pendidikan, penghasilan dan pengalaman kerja sedangkan sisanya 20% lainnya; Nilai F tabel ($df = 24,31$, $\alpha 0,005$) sebesar 2,36 karena F hitung > F tabel, maka keseluruhan variabel secara serentak signifikan berpengaruh terhadap WTP.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrianto, (2007). *Metode Valuasi Ekonomi Sumberdaya Alam*. Bogor: Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor.
- Amirullah, (2015). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Arikunto, (1986). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu, (2017). *Kabupaten Indramayu Dalam Angka Tahun 2017*. Indramayu: Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. (2015). *Jawa Barat dalam Angka Tahun 2015*. Bandung: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.

Dinas Perikanan dan Kelautan, Provinsi Jawa Barat, (2005). *Laporan Akhir Penyusunan Naskah Akademik Pengelolaan KKLD Pulau Biawak Kabupaten Indramayu*. Indramayu: DPK.

Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu. (2017). *Statistik Perikanan Kabupaten Indramayu*.

Dahuri, R., Rais, J., Ginting, S.P. & Sitepu, M.J. (2001). *Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan secara Terpadu*. Jakarta: PT Pradnya Paramita,

Fauzi, A. 2007. *Studi Valuasi Ekonomi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Di Kawasan Lindung (Konservasi): Laporan Akhir 2007*. Jakarta: PT. Bernal Nirwana.

Gumilar, I. (2018). *Partisipasi Masyarakat Pesisir Dalam Pelestarian Ekosistem Hutan Mangrove (Studi Kasus di Kabupaten Indramayu Jawa Barat)*. *Sosiohumaniora*, 20, (2), 145-153.

Ikhsan & Syahrival, B. (2014). *Willingness To Pay Masyarakat Untuk Melindungi Terumbu Karang di Pulau Weh*. *Jurnal Kebangsaan*, 3, (5), 38-47.

Neolaka, (2008). *Kesadaran Lingkungan*. Jakarta: Rineka Cipta

Pet-Soede, L. (2000). *The Effects Of Coral Bleaching On Fisheries In The Indian Ocean*. Pp. 145-178. *In Socioeconomic Assessment Of The Impacts Of The 1998 Coral Reef Bleaching In The Indian Ocean* (S Westmacott, H Cesar, And L Pet-Soede, Eds.). Resources Analysis And Institute For Environmental Science (Ivm). Report To The World Bank, African Environmental Division For The Cordio Programme.

Siswoyo, (2008). *Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press

Soedijarto, (2009). *Some Notes on the Ideals and Goals of Indonesia's National Education System and the Inconsistency of its Implementation. A Comparative Analysis*. In *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities*, 2, 1-11.

Sugiyono, (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.

Sugiyono, (2013). *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 23 tahun (2014) tentang *Pemerintah Daerah*

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 05 Tahun (2019) *Tentang RZWP-3K Provinsi Jawa Barat*

FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDUKUNG BADAN USAHA MILIK DESA PADA KAWASAN PERTAMBANGAN EMAS DI SUMBAWA BARAT

Ibrahim,¹ Iwan Tanjung Sutarna,² Ibrahim Abdullah,³ Kamaluddin,⁴ dan Mas'ad⁵

^{1,4,5} Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,

^{2,3} Fakultas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram, 831273

E-mail: ibrahimali.geo@email.com;

ABSTRAK. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada perdesaan kawasan pertambangan emas memiliki nilai tambah dalam mengembangkan usaha. Namun pada kenyataannya program BUMDes belum mampu berbuat banyak dalam menanggulangi kemiskinan di sekitarnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penghambat dan pendukung Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada kawasan pertambangan emas di Sumbawa Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengambilan data dilakukan pada perdesaan kawasan pertambangan emas Kabupaten Sumbawa Barat. Kecamatan yang termasuk dalam kawasan pertambangan emas yaitu: Kecamatan Jereweh, Maluk dan Sekongkang. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi dengan subyek penelitian dari pihak desa, pengelola BUMDES, masyarakat penerima manfaat program dan instansi terkait. Validitas data menggunakan teknik triangulasi. Analisis data menggunakan reduksi, display, verifikasi dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa factor penghambat BUMDes pada kawasan pertambangan emas adalah 1) faktor anggaran, 2) factor Sumberdaya Manusia pengelola, dan 3) Terbatasnya dukungan dari pihak swasta,. Factor pendukung sebagai penguat adalah 1) komitmen pemerintah, dan 2) tersedianya potensi Sumber Daya Alam. Keberadaan factor penghambat karena banyak program pemerintah yang dibiayai. Diperlukan kerja keras pengelola BUMDes dalam mengembangkan usaha melalui program-program kreatif dan inovatif untuk dapat berdaya saing.

Kata kunci: Penghambat; pendukung; BUMDes; Kawasan Tambang

SUPPORTING FACTORS AND SUPPORT OF VILLAGE BUSINESS ENTITIES IN THE GOLD MINING AREA IN WEST SUMBAWA

ABSTRACT. The existence of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in rural gold mining areas has added value in developing business. But in reality, the BUMDes program has not been able to do much in tackling poverty around it. This study aims to analyze the inhibiting and supporting factors of BUMDes in the gold mining area in West Sumbawa. This research uses a descriptive qualitative approach. Data was collected in the rural gold mining area of West Sumbawa Regency. The sub-districts included in the gold mining area are: Jereweh, Maluk and Sekongkang Districts. Data collection techniques using interviews, documentation, and observation with research subjects from the village, BUMDES managers, program beneficiary communities, and related agencies. Data validity uses triangulation techniques. Data analysis uses reduction, display, verification, and conclusion. The results showed that the inhibiting factors of BUMDes in the gold mining area were 1) economic factor; 2) Human Resources management factors, and 3) Limited support from the private sector. Supporting elements as reinforcement are 1) government commitment, and 2) the availability of natural resources potential — the existence of inhibiting factors because many government programs are funded. BUMDes manager hard work is needed in developing businesses through creative and innovative programs to be competitive.

Key words: Inhibitors; supporters; BUMDes; Mining Area

PENDAHULUAN

Keberadaan BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa menjadi salah satu program desa sebagai sarana untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Peranan BUMDes sebagai instrumen penguatan otonomi desa dan juga sebagai instrumen kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa memiliki kekuasaan dalam mengembangkan potensi sesuai dengan kemampuan desa. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan BUMDes akan dapat mendorong dibukanya usaha baru dan dapat mengurangi tingkat pengangguran.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa dalam pasal 3 menyebutkan

bahwa tujuan pendirian BUMDes adalah a. meningkatkan perekonomian Desa; b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa; c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa; d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga; e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga; f. membuka lapangan kerja; g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Keberadaan BUMDes diperlukan peran aktif masyarakat dalam mengelola program. Tingkat partisipasi masyarakat baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengambilan manfaat, dan evaluasi dapat dikategorikan

positif artinya partisipasi masyarakat dinilai cukup aktif (Saepudin dkk, 2018).

Peran aktif masyarakat sebagai modal utama dalam mengembangkan usaha. Keberadaan BUMDes akan mampu mencapai tujuan sebagai bagian dalam pemberdayaan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Sasaran program berorientasi pada masyarakat dengan tingkat kemiskinan rendah.

Kondisi dan karakteristik masyarakat desa nan miskin beragam. Menurut Sutopo (2017) menunjukkan bahwa kondisi kemiskinan demikian ini disebabkan karena beberapa hal mendasar, yaitu: (1) mayoritas warga sebagai petani memiliki derajat ketergantungan yang tinggi terhadap tanah yang menjadi sumber penghidupan mereka di bidang pertanian, (2) dalam hal produksi ruang pertanian yang sangat bergantung pada iklim, (3) tingkat hasil produksinya tidak cukup memberikan keuntungan bagi pemenuhan kebutuhan hidup mayoritas warga sebagai buruh petani karena ketiadaan kepemilikan lahan pertanian karena lahan secara terbatas hanya dimiliki oleh segelintir warga, dan (4) ketergantungan mayoritas warga terhadap pemilik lahan menjadikan struktur sosial yang erat kaitannya dengan lahan, sehingga tercipta kemiskinan sebagai bentuk morfologi sosial.

Kabupaten Sumbawa Barat sebagai penghasil Sumber Daya Alam yang melimpah dan mampu memberikan memanfaatkan potensi ini guna kepentingan pelaksanaan pembangunan daerah khususnya di bidang pembangunan dan penyediaan infrastruktur dasar.

Selain potensi tersebut Kabupaten Sumbawa Barat memiliki potensi yang belum dikelola secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BUMDes sebagai lembaga ekonomi mikro pada tingkat desa memiliki peluang dalam mengembang ekonomi perdesaan. Program BUMDes belum menunjukkan kontribusi dalam peningkatan akses terhadap pelayanan jasa keuangan pada tingkat perdesaan sebagai proses pumutusan mata rantai kemiskinan.

Berdasarkan paparan diatas, penelitian ini bertujuan mengkaji faktor penghambat dan pendukung Badan Usaha Milik Desa pada kawasan pertambangan emas di Sumbawa Barat

METODE

Pengambilan data dalam penelitian dilakukan pada perdesaan kawasan pertambangan emas Kabupaten Sumbawa Barat. Lokasi penelitian ini mewakili 3 (tiga) kecamatan yang termasuk dalam kawasan pertambangan emas terdiri dari: Kecamatan Jereweh, Maluk dan Sekongkang.

Data diperoleh dari tiga sumber yaitu: pertama, akan digali dari pengamatan langsung dari proses aktivitas

pengelola BUMDes; kedua, diperoleh melalui informan (narasumber) yang terlibat langsung dilapangan pada program BUMDes; ketiga, informasi *stakeholders* pada pihak desa masing-masing yang memahami kondisi masyarakat dan pelaksanaan program BUMDes serta instansi terkait.

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan 4 (empat) cara antara lain: observasi, wawancara, perekaman dan pencatatan. Validitas data menggunakan teknik triangulasi sumber.

Analisis data menggunakan model analisis interaktif yaitu analisis dengan menggunakan reduksi data, display data dan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penghambat Dan Pendukung Badan Usaha Milik Desa

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desa dapat mendirikan badan usaha sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa. Dijelaskan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa bahwa untuk meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Hal tersebut berarti pembentukan BUMDes di dasarkan pada kebutuhan, potensi, dan kapasitas desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan dan pembentukan BUMDes adalah atas prakarsa masyarakat desa.

BUMDes didirikan berdasarkan kebutuhan dan potensi desa yang merupakan prakarsa masyarakat desa. Artinya usaha yang kelak akan diwujudkan adalah digali dari keinginan dan hasrat untuk menciptakan sebuah kemajuan di dalam masyarakat desa.

Hasil penelitian Meigawati (2018) menjelaskan bahwa menunjukkan bahwa implementasi program BUMDes belum berjalan dengan baik. Faktor penghambatnya yaitu dari kurangnya sumberdaya manusia dan finansial serta lemahnya sosialisasi Program BUMDes kepada masyarakat. Adapun faktor pendukungnya yaitu Adanya partisipasi masyarakat dalam mengikuti program BUMDes melalui kegiatan simpan pinjam.

Pernyataan ini diperkuat dari hasil penelitian Ibrahim dan Sutarna (2018) menjelaskana bahwa BUMDES pada perdesaan kawasan pertambangan emas belum berhasil secara total dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dari unit-unit program BUMDES yang ada. BUMDES Kawasan pertambangan emas memiliki kelebihan yaitu: a) mudahnya akses keuangan dan b) peningkatan ekonomi rumah tangga. Kelemahan: a) Sumberdaya Manusia pengelola dan b) rencana usaha rendah. Perlu adanya

participasi aktif dari masyarakat dalam menjalankan program BUMDes menuju ekonomi berkembang.

Selain faktor kelebihan secara umum keberadaan BUMDes dapat mengurangi kelemahan dengan berbagai usaha dilakukan dalam mensejahterahkan anggota. Pelaksanaan program BUMDes menitikberatkan pada kawasan pertambangan emas Kabupaten Sumbawa Barat memiliki faktor penghambat dan pendukung dalam meningkatkan perekonomian masyarakat perdesaan sekitar.

Faktor Penghambat

1. faktor Anggaran

Keberadaan BUMDes dalam meaksanakan program dan usaha tidak bias lepas dari anggaran yang dimiliki. Sebagai lembaga usaha keberadaan modal usaha salah satu nadi untuk hidup dan berkembang. Kesiapan dana usaha terbatas memiliki tingkat kemampuan pengelola usahapun akan mengalami kemunduran.

Keberadaan BUMDes pada masyarakat perdesaan kawasan pertambangan emas di Kabupaten Sumbawa Barat sebagai alternative dalam mengembangkan usaha ekonomi masyarakat. Berdasarkan wawancara mendalam dengan AGT (Pengelola Program BUMDes dasan Anyar) pada tanggal 16 Juli 2019 menyebutkan bahwa keberadaan program BUMDes di desa kami masih terbatas pada usaha penjualan minyak tanah dan bensin. Selain program ini kami juga pernah ada program simpan pinjam tapi terkendala dalam pelaksanaannya karena uangnya sedang di bendahara yang saat ini masih sebagai Tenaka Kerja wanita ke Arab. Keberadaan anggaran yang kami olah masih sangat minim dan usahapun kami sesuai dengan anggaran yang kami miliki.

Hal senada dari wawancara mendalam dengan MIK (Kepala Desa) pada tanggal 16 Juli 2019 menyebutkan bahwa anggaran yang dimiliki desa dalam menjalankan usaha BUMDes ada, namun masih sangat kecil untuk mengembangkan usaha yang besar. Oleh karena itu, diperlukan adanya terobosan dari pengelola BUMDes dalam memilih usaha yang sesuai dengan anggaran yang dimiliki.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa keberadaan BUMDes dalam mengelola program usaha di tengah masyarakat masih mengalami kendala terutama terbatasnya anggaran yang dimiliki. Menurut Ihsan (2018) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan BUMDes melalui unit-unit usaha yang dimiliki BUMDes dan kelompok-kelompok masyarakat yang bermitra dengan BUMDes. Namun masih terdapat hambatan dan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan dan pengelolaan BUMDes. Permasalahan yang terjadi adalah adanya potensi desa yang belum bisa dikembangkan melalui BUMDes karena belum adanya modal.

Pernyataan ini diperkuat Rani (2018) menjelaskan bahwa BUMDES sudah cukup berperan dan berkontribusi bagi masyarakat hanya saja belum dapat dikatakan maksimal, yakni masih adanya ketimpangan kesejahteraan antar masyarakat. Hal itu dikarenakan masih banyaknya kendala yaitu seperti kurangnya modal, pengetahuan masyarakat dan kurang maksimalnya kinerja serta manajemen BUMDES itu sendiri.

Pernyataan diatas diperkuat dari hasil penelitian Liow dkk (2019) menjelaskan bahwa penerapan standard oprasional prosedur BUMDes yang kurang maksimal karena belum rampungnya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDes, dan sumber daya yang ada di BUMDes Tondegesan saat ini seperti kompetensi sumber daya manusia, fasilitas dan pendanaan yang masih sangat minim sehingga berakibat pada hambatan dari pengembangan program-program BUMDes kedepannya.

2. faktor Sumber Daya Manusia pengelola

Otonomi desa merupakan peluang bagi desa dalam mengembang desa sesuai dengan potensi yang dimiliki. Keberadaan BUMDes sebagai instrumen dalam meningkatkan kesejahteraan dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan.

Keterlibatan masyarakat dalam program BUMDes memiliki keterbatasan dalam mengembangkan usaha. Berdasarkan wawancara mendalam dengan SS (Seksi Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dan Teknologi Tepat Guna DPMD) pada tanggal 21 Juni 2019 menyebutkan bahwa keterlibatan masyarakat BUMDes sangat terbuka, namun kendala di masyarakat masih rendah pada tingkat SDM pengelola. Usaha dilakukan dari kami dengan mengadakan pelatihan-pelatihan yang mendukung program BUMDes yang sedang kelolah.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa keberadaan BUMDes masih membutuhkan dukungan semua pihak dalam meningkatkan sumberdaya manusia pengelola. Menurut Ibrahim dkk (2017) menjelaskan bahwa persebaran program BUMDes di Kabupaten Sumbawa Barat dapat lebih fokus pada program simpan pinjam dibandingkan dengan program lainnya. Program ini belum optimal karena masih rendahnya Sumberdaya Manusia dan enterpreneurshif dan perlu adanya pelatihan pendukung, guna meningkatkan tata kelola BUMDes secara berkelanjutan.

Hal ini diperkuat Ibrahim dkk (2018) karakteristik program Badan Usaha Milik Desa pada perdesaan kawasan pertambangan emas di Kabupaten Sumbawa Barat menitikberatkan pada bidang usaha dari dari simpan pinjam dan tingkat perkembangan usahanya rendah karena tingkat Sumberdaya Manusia dan tanggung jawab pihak desa dalam memanfaatkan program dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pernyataan diatas diperkuat hasil penelitian Ibrahim dkk (2017) menjelaskan bahwa keberadaan BUMDes belum mampu memberikan manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini karena minimnya Sumberdaya Manusia dan tata kelola yang tidak berkelanjutan. Sinergitas pengelola BUMDes dan masyarakat dalam partisipasi secara aktif dari dalam perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi guna memberikan manfaat keberadaan BUMDes ditengah masyarakat.

3. Terbatasnya dukungan dari pihak swasta

Pemberdayaan BUMDes Melalui Kelompok Ekonomi Kewirausahaan Secara Partisipatif adalah untuk mewujudkan kemandirian ekonomi desa melalui pengembangan kelembagaan dan pemberdayaan pengelolaan usaha ekonomi masyarakat yang dilaksanakan dengan keterlibatan masyarakat, pemerintah, dan swasta sehingga semua stake holder didesa berperan optimal dalam menumbuh kembangkan perekonomian desa (Mustanir & Jusman, 2016a) (Mustanir, Yasin, Irwan, & Rusdi, 2018) (Mustanir & Jaya, 2016a) (Mustanir, Abadi, & Nasri, 2016) (Mustanir & Darmiah, 2016) (Mustanir & Lubis, 2017a).

Keterlibatan pihak swasta dalam pengembangan usaha BUMDes akan dapat menumbuhkembangkan usaha secara berkelanjutan. Berdasarkan wawancara mendalam dengan MMT (KAUR Keuangan Desa Goa) pada tanggal 20 Juli 2019 menyebutkan bahwa program BUMDes dengan pendanaan berasal dari desa semata. Namun pada pihak swasta masih terbatas pada program-program tertentu. Apalagi dengan hadirnya perusahaan swasta baru pengganti PT. Newmont Nusa Tenggara masih belum ada partisipasi terhadap masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab social terhadap masyarakat.

Peran swasta dalam pengembangan mesyarakat melalui pendanaan social yang dimilikisebagai bentuk tanggung jawab social pada masyarakat. Menurut The Organization for Economic Cooperation and Development (dalam Ismail Sholihin, 2011) merumuskan CSR sebagai berikut: kontribusi bisnis bagi pembangunan berkelanjutan serta adanya perilaku korporasi yang tidak semata-mata menjamin adanya pengembalian kepada pemegang saham, upah bagi para karyawan, dan pembuatan produk serta jasa bagi para pelanggan, melainkan perusahaan bisnis juga harus memberi perhatian terhadap berbagai hal yang dianggap penting serta nilai-nilai masyarakat

Faktor pendukung

1. Komitmen Pemerintah

Peran BUMDes dalam mengembangkan usaha dan perekonomian masyarakat desa memerlukan penanganan yang komprehensif, sehingga tumbuhnya ekonomi nasional

ditopang kokoh oleh perekonomian desa yang kokoh dan terarah.

Komitmen pemerintah terhadap keberlangsungan BUMDes dibuktikan dengan pemberian dana dalam usaha mengembangkan BUMDes. Berdasarkan wawancara mendalam dengan EK (Staff Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dan Tekhnologi Tepat Guna DPMD) pada tanggal 21 Juni 2019 menyebutkan bahwa peran pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan desa melalui BUMDes sangat tinggi. Ini dibuktikan dengan suntikan dana BUMDes berasal dari dana desa, APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan kementerian terkait. Pemerintah sangat mendukung peningkatan kesejahteraan pada tingkat desa. Selain program BUMDes pemerintah melaksanakan program-program lain yang berbasis pada masyarakat desa.

Keseriusan pemerintah daerah terhadap keberlangsungan BUMDes pada kawasan pertambangan emas di Kabuapten Sumbawa Barat dengan memiliki sumber dana BUMDes (lampiran 1).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, menyebutkan bahwa: untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan, didirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Pernyataan ini diperkuat dengan hasil penelitian Ramadana dkk (2013) menjelaskan bahwa BUMDes ini merupakan usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa dimana kepemilikan modal serta pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. BUMDes ini diharapkan dapat menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan.

2. Tersedianya potensi Sumberdaya Alam

Desa saat ini sudah diberikan kebebasan untuk mengatur wilayah, ekonomi dan masyarakatnya sendiri. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Saat ini desa diberikannya kewenangan untuk mengatur wilayahnya sendiri, desa juga sudah dapat mengembangkan perekonomiannya sendiri. Ada banyak cara untuk mengembangkan ekonomi desa, salah satunya adalah melalui pemanfaatan aset desa sebagai potensi desa. Desa memiliki aset-aset asli desa yang dapat berbentuk tanah, kolam, sumber mata air ataupun sumber daya alam lainnya.

Keberadaan BUMDes sendiri memiliki tujuan yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Keberadaan peraturan ini diperkuat dalam meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan penggunaan aset desa dan meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa. Tujuan lain yang dapat dicapai oleh kehadiran BUMDes adalah mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dalam kajian ini dapat disimpulkan diantaranya, yaitu: Faktor penghambat BUMDes pada kawasan pertambangan emas di Kabupaten Sumbawa Barat adalah: 1) faktor anggaran, 2) faktor Sumberdaya Manusia pengelola, dan 3) Terbatasnya dukungan dari pihak swasta; Faktor pendukung sebagai penguat adalah 1) komitmen pemerintah, dan 2) tersedianya potensi Sumber Daya Alam; Keberadaan faktor penghambat karena banyak program pemerintah yang dibiayai. Diperlukan kerja keras pengelola BUMDes dalam mengembangkan usaha melalui program-program kreatif dan inovatif untuk dapat berdaya saing.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kemenristek DIKTI yang telah memberikan dana Hibah Penelitian Terapan Tahun 3 (2019). Pihak-pihak yang membantu pelaksanaan penelitian dilapangan Bappeda dan Litbang Sumbawa Barat, BPMD KSB, Desa Se-Kecamatan Kawasan tambang, Pengelola BUMDes dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ibrahim & Tanjung, S.I. (2018), Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perdesaan Kawasan Pertambangan Emas Di Kabupaten Sumbawa Barat, *Jurnal Tata Loka*, 20, (3), 309-316
- Ibrahim, Kamaluddin, & Mintasrihardi (2017). Persebaran Program Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Sumbawa Barat. *Prosiding*. Seminar Nasional Pendidikan Ekonomi, Bisnis, Dan Keuangan. Universitas Sebelas Maret Surakarta
- Ibrahim, Mintasrihardi, & Djunaidi, A. (2017). Sinergisitas Program Badan Usaha Milik Desa Dalam Penangan-
gulangan Kemiskinan Di Kabupaten Sumbawa Barat. *Prosiding*. Seminar Nasional Geografi 2017. Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang
- Ibrahim, Mintasrihardi, Junaidi A. (2018) Karakteristik Badan Usaha Milik Desa Pada Perdesaan Kawasan Pertambangan Emas Di Kabupaten Sumbawa Barat. *Prosiding*. Seminar Nasional Asosiasi Sekolah Perencana Indonesia (ASPI) 2018
- Ihsan, N.A. (2018). Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep, *Journal of Politic and Government Studies*, 7, (4), 221-230.
- Ismail, S. (2011). Corporate Social Responsibility from Charity to Sustainability. Jakarta : Salemba Empat
- Liow, H., Lengkong F.D.J. & Novie, P. (2019). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tondegesan Kecamatan Kawangkoan. AP: *Jurnal Administrasi Publik*. 4, (61)
- Meigawati, D. (2018), Implementasi Program Bumdes Di Kabupaten Sukabumi (Studi Kasus Desa Cisande Kecamatan Cicantayan), *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*
- Mustanir, A., & Darmiah, D. (2016). Implementasi Kebijakan Dana Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Politik Profetik*, 4, (2), 225–238
- Mustanir, A., & Jaya, I. (2016a). Pengaruh Kepemimpinan Dan Budaya Politik Terhadap Perilaku Pemilih Towani Tolotang Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Politik Profetik*, 4, (1), 84-97
- Mustanir, A., & Jusman. (2016a). Implementasi Kebijakan Dan Efektivitas Pengelolaan Terhadap Penerimaan Retribusi Di Pasar Lancirang Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Ilmiah Akmen*, 13, (3), 542–558
- Mustanir, A., & Lubis, S. (2017a). Participatory Rural Appraisal In Deliberations Of Development Planning. International Conference On Democracy, Accountability, And Governance (Icodag 2017) (Vol. 163).
- Mustanir, A., Abadi, P., & Nasri, A. (2016). Participation of Ethnic Community Towani Tolotang in Deliberation of Development Plan. In *International Conference on Ethics in Governance (ICONEG 2016)* (Vol. 84, pp. 356 – 359). Makassar: Atlantis Press.

- Mustanir, A., Yasin, A., Irwan, I., & Rusdi, M. (2018). Potret Irisan Bumi Desa Tonrong Rijang Dalam Transect Pada Perencanaan Pembangunan Partisipatif. *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4, (4), 1–14.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
- Ramadana., Berlian, C., Ribawanto, H. & Suwondo. (2013). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguat Ekonomi Desa. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1, (6). 1068-1076.
- Rani, S. (2018) Peran Dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Study Pada BUMDes Karya Abadi Di Desa Karya Mulya Sari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan) Skripsi, fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
- Saepudin, E, Agustini, D.A. Agung, B. (2018). Partisipasi Masyarakat Ada Program Desa Mandiri Pangan Di Kabupaten Bandung. *Sosiohumaniora*, 20, (1), 86-94
- Sutopo Dhanny S (2017) Kemiskinan Di Perdesaan Dalam Tinjauan Morfologi Sosial (Studi Kasus Kemiskinan Di Desa Sumber Salak Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso Jawa Timur). *Sosiohumaniora*, 19, (3), 268-273
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

**IMPLEMENTASI DIGITAL MARKETING UNTUK MENINGKATKAN
KEPUASAN NASABAH DAN BERDAMPAK PADA CITRA LEMBAGA PERBANKAN
(Suatu Survey pada Lembaga Perbankan Nasioanal)
PT. Bank Negara Indonesia (persero), Tbk**

Andi Sukandi, Nunung Ayu Sofiati (Efi), dan Yoyo Sudaryo

Program Studi Magister Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Indonesia Membangun

E-mail: andi.sukandi1977@gmail.com

ABSTRAK. Teknologi digital di era diglobal saat ini telah merambah pada dunia pemasaran yang dikenal dengan *digital marketing*. Berbagai cara dapat dilakukan dalam kampanye pemasaran di era digital saat ini, seperti lewat website, blog, email marketing serta media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari pemasaran digital yang dilakukan oleh perusahaan terhadap tingkat kepuasan yang dirasakan oleh nasabah serta *corporate image* yang dihasilkan oleh lembaga perbankan dari dilakukannya pemasaran digital, sampel kuesioner yang digunakan adalah konsumen lembaga perbankan PT. Bank Negara Indonesia (BNI). Metode yang digunakan adalah *survey deskriptif dan eksplanatori*, sedangkan metode analisisnya menggunakan *structural equation model* (SEM). Penelitian menunjukkan bahwa implementasi *digital marketing* pada PT. BNI, dengan variabel *Website engagement, Sosial Engagement, klik trough rate, conversion rate* serta *duration*. Masuk dalam kategori cukup baik, kepuasan nasabah masuk dalam kategori puas, citra lembaga perbankan PT. BNI, masuk dalam kategori tinggi. Serta menunjukkan bahwa *digital marketing* berdampak terhadap kepuasan nasabah dan *image* lembaga perbankan, kepuasan yang dirasakan oleh konsumen lembaga keuangan berpengaruh terhadap citra perusahaan, *digital marketing* berpengaruh terhadap tingkat kepuasan yang dirasakan oleh nasabah serta berakibat pada kesan atau citra lembaga keuangan nasional pada PT. BNI .

Kata kunci: Pemasaran Digital; Kepuasan Pelanggan; Citra Perbankan

**DIGITAL MARKETING IMPLEMENTATION TO IMPROVE
CUSTOMER SATISFACTION AND IMPACT ON BANKING INDUSTRY IMAGES
(A Survey of National Banking Institutions)
PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk**

ABSTRACT. Digital technology in the global era has now penetrated the world of marketing known as digital marketing. Various ways can be done in today's digital era marketing campaigns, such as through websites, blogs, email marketing and social media. This study aims to analyze the impact of digital marketing conducted by companies on the level of satisfaction felt by customers as well as the corporate image generated by banking institutions from digital marketing, the sample questionnaire used is the consumer banking institution PT. BNI. The method used is descriptive and explanatory surveys, while the analysis method uses the structural equation model. Research shows that the implementation of digital marketing at PT. BNI, with variable website management, Social Engaging management, click through rate, conversion rate and duration. In the good enough category, customer satisfaction is in the satisfied category, the image of the banking institution PT BNI, included in the high category. As well as showing that digital marketing has an impact on customer satisfaction and the image of banking institutions, the satisfaction felt by consumers of financial institutions affects the image of the company, digital marketing influences the level of satisfaction felt by customers and results in the impression or image of national financial institutions at PT BNI .

Key words: Digital Marketing; Customer satisfaction; Image Banking

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah memasuki semua lini kehidupan dimasyarakat, sehingga jarak antara wilayah sudah tidak sekat antara satu kawasan dengan daerah yang lain. Faktor ini yang menjadikan semua perusahaan untuk berusaha menggunakan internet sebagai bahan penetrasi kegiatan perusahaan dalam memasarkan produk dan jasa mereka. Karena dengan menggunakan internet perusahaan dapat melakukan efisiensi biaya marketing, efisiensi biaya pembukaan cabang baru, biaya SDM dan biaya oprasional perusahaan. Kemajuan dunia atas teknologi informasi dan komunikasi (internet) menjadikan perubahan dari pola hidup dan perilaku konsumen,

sehingga kemajuan industri berbasis teknologi informasi dan komunikasi (internet) sudah menjadi kebutuhan yang seolah tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan manusia. Hal ini menjadikan pula tingkat harapan konsumen berubah terhadap produk dan layanan perusahaan.

Konsep perilaku konsumen dimasa lalu yang bersifat *Fist Moment Of Truth* lalu berakhir di *Second Moment Of truth*. Adanya perkembangan internet maka perilaku konsumen ikut berubah menjadi *ZMOT (Zero Moment Of Truth)* lalu berakhir di *SMOT (Second Moment Of Truth)*.

Menurut Asosiasi *E-commerce* seluruh Indonesia dalam jurnal Haris kadarisman mengungkapkan bahwa penduduk Indonesia menghabiskan tidak kurang dari 55% waktunya untuk mengakses internet atau *online*, secara

rinci Ide menjelaskan bahwa masyarakat Indonesia selama 106 menit dalam sehari menggunakan *mobile phone*, 80 menit menonton TV, 59 menit *online* di depan laptop dan sisanya masing-masing 28 menit dan 24 menit dihabiskan untuk mendengarkan radio dan membaca majalah atau koran.

Disrupsi digital membuat beberapa industri harus melakukan penyesuaian, Tidak terkecuali industri perbankan. dalam beberapa tahun belakangan ini banyak perusahaan keuangan di Indonesia yang mengeluarkan layanan *digital banking*, baik itu *internet banking* atau pun *mobile banking*. memasuki *era digital*, industri perbankan harus semakin gencar melakukan pengembangan teknologi (*digital banking*). Hal ini dilakukan untuk menggaet calon nasabah baru, terutama generasi milenial atau kalangan modern (*tech savvy*).

Ridho. 2017 mengatakan lingkup *e-marketing* tidak semata mata menyangkut transaksi online, namun juga meliputi berbagai aktifitas seperti melakukan riset pasar, mengidentifikasi peluang dan mitra bisnis, menjalin relasi dengan pelanggan dan pemasok, serta melakukan perancangan produk bersama mitra bisnis.

Menurut Pradiani 2017. Mengemukakan bahwa teknik yang memudahkan akses dan publikasi informasi menggunakan interaksi *social* melalui *social media*. Sehingga dengan hadirnya teknologi digital semua lapisan masyarakat baik yang berada di kota-kota besar, ataupun di daerah pingiran bisa menikmati layanan perbankan, dengan kondisi tersebut maka pemerataan pelayanan dapat dirasakan oleh sebagian besar lapisan masyarakat.

Menurut Nurcahyo 2018, promosi yang dilakukan perusahaan juga telah mengalami perubahan, dimana banyak perusahaan yang beralih dari promosi melalui media cetak dan elektronik, beralih ke promosi melalui media sosial dengan bantuan jaringan internet. Media sosial tersebut seperti *Facebook*, *Twitter*, dan *YouTube*. Media sosial telah menjadi platform yang kerap digunakan konsumen ketika menghabiskan waktunya secara online. Jadi media sosial menjadi sarana yang tepat. untuk mempromosikan produk ke konsumen.

Digital marketing pada lembaga keuangan nasioanal PT. BNI, yang bersumber pada Sosial Blade <http://www.Similiar.com> pada tahun 2018 bisa diukur dengan tingkat masing-masing kunjungan pada konten *website* yang disajikan masih kurang menarik pengguna internet terutama nasabah perbankan. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat kunjungan nasabah pada konten *website* di kuartal III dan IV tahun 2018 berturut-turut mengalami penurunan sebesar 2% dan 24% dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Demikian juga dengan ukuran durasi kunjungan pada kuartal IV mengalami penurunan mencapai 8,45%, dan rata-rata jumlah halaman konten yang dikunjungi mengalami penurunan mencapai 0,73% dari kuartal sebelumnya.

Sementara ukuran *digital marketing* lainnya seperti tingkat konversi pengunjung *website* nasabah terhadap konten yang ada di *website* BNI pada *conversion rate* paling tinggi hanya mencapai 21,96 %, sedangkan Internet banking masih berada di urutan ke 2 yaitu sebesar 16,95%. ini menunjukkan bahwa kampanye pemasaran digital masih belum mendapatkan respon yang baik dari nasabah pengguna internet. Selanjutnya pada ukuran keterlibatan pengguna sosial media terhadap *account* PT. BNI paling tinggi tingkat keterlibatannya terhadap *web* aplikasi yaitu sebesar 45,19% dan yang ke 2 adalah keterlibatan terhadap *youtube* yaitu sebesar 39,02%.

Data perbankan tahun 2018 yang di liris oleh <http://www.kinerjabank.com>, memperlihatkan bahwa PT.BNI. Berada diperingkat ke 5 dengan skor 8,44 yang jauh berada di bawah BCA berada diperingkat 1 dengan skor 9,32. Jika melihat dari data diatas maka diperlukan sebuah keunggulan dalam sektor pelayanan dibandingkan dengan lembaga perbankan lainnya.

Implementasi pemasaran digital dalam tahun 2018 dapat diukur dengan tingkat kunjungan pada konten *website* yang disajikan masih kurang menarik pengguna internet, terutama nasabah perbankan. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat kunjungan nasabah pada konten *website* di kuartal III dan IV tahun 2018 berturut-turut mengalami penurunan sebesar 2% dan 24% dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Demikian juga dengan ukuran rata-rata durasi kunjungan pada kuartal IV mengalami penurunan mencapai 8,45%, dan rata-rata jumlah halaman konten yang dikunjungi mengalami penurunan mencapai 0,73% dari kuartal sebelumnya. Pada setiap halaman konten.

Sementara ukuran *digital marketing* lainnya seperti tingkat konversi pengunjung *website* nasabah terhadap konten yang ada di *website* BNI pada *conversion rate* paling tinggi hanya mencapai 21,96%, sedangkan Internet banking masih berada di urutan ke 2 yaitu sebesar 16,95%. Hal ini menunjukkan bahwa kampanye digital masih belum mendapatkan respon yang baik dari nasabah pengguna internet. Selanjutnya pada ukuran keterlibatan pengguna sosial media terhadap *account* PT BNI paling tinggi tingkat keterlibatannya terhadap *web* aplikasi yaitu sebesar 45,19% dan yang ke 2 adalah keterlibatan terhadap *youtube* yaitu sebesar 39,02%.

PT. BNI harus bertindak sangat strategik dalam menyediakan layanan yang optimal, serta produk yang diharapkan oleh nasabah yang menunjang kegiatan usaha atau kebutuhan konsumen. jika melihat keadaan yang terjadi saat ini yang mana lembaga keuangan PT. BNI yang sedang mengalami penurunan kepuasan nasabahnya sehingga berdampak pada citra perbankan. Berdasarkan data Citra Perbankan Indonesia tahun 2018, posisi citra perbankan lembaga keuangan nasioanal PT.

BNI, berada diperingkat ke 5 dengan skor 8,44 masih jauh di bawah bank BCA. Sehingga dapat dikatakan bahwa citra perbankan PT BNI masih kurang. *Corporate image* yang masih relatif rendah dipertegas juga dengan rendahnya tingkat kepuasan yang dirasakan oleh nasabah lembaga keuangan nasional PT. BNI. Tingkat Kepuasan yang dirasakan oleh konsumen yang masih rendah diindikasikan bahwa ada permasalahan dalam hal pelayanan yang belum maksimal diberikan kepada konsumen perusahaan.

Berdasarkan data survei Perbankan dan Jasa Keuangan 2017 menunjukkan kepuasan yang dirasakan oleh nasabah PT. BNI hanya mendapatkan skor 2,829 atau berada pada ranking ke 4 (empat) di bawah bank-bank umum lainnya. dengan demikian bahwa perusahaan produk dan jasa yang diberikan kepada konsumen masih belum bisa memberikan kepuasan serta harapan nasabah. Jika kondisi demikian terus di pertahankan maka hal tersebut akan berimbas kepada pendapatan dan laba perusahaan.

Melihat hasil paparan dari uraian di atas, dapat kita dirumuskan latar belakang masalahnya adalah (1) seperti apa implementasi *digital marketing* pada lembaga keuangan PT. BNI, tingkat kepuasan dirasakan konsumen perbankan, dan *corporate image banking*; (2) apakah dalam implementasi *digital marketing* terdapat pengaruh secara parsial terhadap kepuasan yang dirasakan oleh nasabah serta terdapat pengaruh terhadap citra pada lembaga perbankan pada PT. BNI (persero); (3) apakah terdapat pengaruh tingkat kepuasan yang dirasakan oleh nasabah terhadap sebuah citra pada lembaga keuangan PT. BNI; (4) apakah ada dampak dari implementasi pemasaran digital terhadap tingkat kepuasan yang dirasakan nasabah dan berimplikasi pada peningkatan citra perbankan pada PT. BNI (Persero) Tbk.

Definisi pemasaran digital menurut *American marketing Association* (AMA) adalah aktivitas, intitusi dan proses yang difasilitasi oleh teknologi digital dalam menciptakan, mengkomunikasikan dan menyampaikan nilai-nilai kepada konsumen dan pihak yang berkepentingan lainnya (Kannan dan Li. 2016). Sementara menurut Wardhana. 2015, Pemasaran digital adalah kegiatan pemasaran yang menggunakan media yang berbasis internet, dengan demikian bahwa semua aktifitas kegiatan kampanye pemasaran yang menggunakan media internet baik itu melalui website, media sosial ataupun melalui *mobile application* dapat dikategorikan sebagai aktifitas *digital marketing*.

Lucyantoro, dkk 2018, mengatakan bahwa pemasaran digital adalah aktifitas pemasaran yang mencakup *branding* yang menggunakan beberapa media yang berbasis internet atau jejaring sosial seperti *blog, web site, e-mail, adwords*. Sehingga dapat dikatakan bahwa *e-marketing* merupakan bagian dari *e-commerce*. berdasarkan definisi

tersebut, maka *digital marketing* menurut penulis adalah pemasaran yang mempergunakan media internet melalui *computer* maupun telepon seluler yang menggunakan aplikasi media sosial *network, sosial bookmarking, video* atau *photo, website, email marketing, mobile application, ads sense, webinar, blog* dan *youtube*.

Sementara *Digital Marketing* menurut Prabowo, 2018 bahwa *Digital marketing* membantu sebuah perusahaan dalam mempromosikan dan memasarkan produk maupun jasa yang mereka punya. *Digital Marketing* juga dapat membuat atau membuka pasar baru yang sebelumnya tertutup karena adanya keterbatasan waktu, cara komunikasi, maupun jarak.

Menurut Sanjaya dan Tarigan (2009) dalam Lucyantoro, dkk 2018. Menyatakan bahwa Pemasaran Digital adalah kegiatan marketing termasuk branding yang menggunakan berbagai media berbasis web seperti *blog, web site, email, adwords*, ataupun *jejaring sosial*. Tentu saja *digital marketing* bukan hanya berbicara tentang *marketing internet*.

Kepuasan nasabah merupakan kolaborasi dari 2 faktor utama yang dirasakan oleh nasabah dalam menilai dan merasakan pelayanan dari sebuah lembaga atau perusahaan ke 2 faktor tersebut antara lain yaitu persepsi pelanggan atas pelayanan yang nyata mereka terima (*Perceived Service*) dengan sebuah tingkat layanan yang sesungguhnya diharapkan/ diinginkan oleh nasabah (*Expected Service*).

Kepuasan yang dirasakan oleh nasabah merupakan strategi yang bisa dilakukan serta digunakan oleh perusahaan agar dapat menghasilkan strategi untuk meningkatkan kepuasan nasabah, diantaranya *relationship marketing* dan *superior customer service* Tjiptono, dkk (2012;160).

Menurut Kotler, *at.al* (2012:274) Citra merupakan seperangkat keyakinan, ide serta kesan yang dimiliki oleh seseorang terhadap suatu obyek, dengan demikian sebuah citra dapat terbentuk dari apa yang dirasakan dan dilihat oleh konsumen atau nasabah terhadap tindakan atau pelayanan perusahaan yang diberikan untuk nasabah. Sehingga dapat di simpulkan bahwa citra perusahaan merupakan seperangkat kombinasi dampak terhadap observer dari semua komponen-komponen verbal maupun visual perusahaan baik yang direncanakan maupun tidak atau dari pengaruh eksternal lainnya.

Menurut Sofiati (2009). Dimensi citra ada 4, yaitu *reputation, recognition, affinity*, dan *brand loyalty*. Dengan demikian maka dimensi citra itu tidak berdiri sendiri, tetapi perpaduan dari kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memberikan pelayanan kepada nasabah, baik itu secara langsung yang berhubungan dengan kegiatan operasional atau pun kegiatan yang berupa identitas anggota perusahaan. Sehingga dari kegiatan tersebut memberikan kesan kepada nasabah atas apa yang dilakukan oleh

perusahaan. Perusahaan dapat mempengaruhi kualitas yang dirasakan oleh pelanggan, dengan cara meningkatkan citra perusahaan, dengan demikian maka perusahaan akan memiliki *corporate image* yang baik. Hal itu bagian yang sangat penting yang dapat berdampak terhadap kualitas jasa, yang dapat dinikmati oleh konsumen.

Afrilia, 2018 bahwa dalam meningkatkan Jumlah Konsumen, bahwa peran Media sosial merupakan sarana kampanye *digital marketing* yang paling mudah untuk dimanfaatkan. Media sosial tersebut dapat dikatakan sebagai gerbang pembuka sebuah promosi pemasaran untuk meluncur di dunia maya untuk menjangkau lebih luas target market yang sulit dijangkau dalam dunia nyata. Kecepatan dalam penyebaran informasi, merupakan salah keunggulannya yang dapat diperoleh dengan memanfaatkan media sosial. Tidak hanya itu hal-hal yang disampaikan melalui media sosial juga memiliki kekuatan yang “*shareable*” dengan mudah. Bahkan memberikan *feedback* dari khalayak juga dapat dengan segera dilihat serta dianalisis untuk kemajuan *market* yang bersangkutan.

Fitriana (2017). Sejumlah faktor yang diuji secara parsial yang mempengaruhi *e-Loyalty* nasabah Bank Syariah Mandiri cabang Pontianak untuk mengunjungi dan melakukan transaksi perbankan secara *online* adalah adanya penerapan strategi pemasaran produk-produk Bank Syariah Mandiri secara elektronik (*e-Marketing*) dan upaya mengelola hubungan dengan nasabah secara elektronik, sehingga dapat dikatakan bahwa strategi digital marketing dapat diterapkan dan akan efektif dijalankan untuk kepentingan kampanye perusahaan.

Isnaini, dkk (2017). salah satu faktor yang mampu meningkatkan *brand equity* produk pariwisata ialah *digital marketing*. Namun, di sisi lain perubahan perilaku konsumen dan inovasi perusahaan juga sangat mempengaruhi *brand equity* suatu produk khususnya di bidang pariwisata. dalam penelitian ini *performance variable digital marketing* menjadi sebuah pengungkit variabel *brand equity*, sehingga menjadikan faktor-faktor lainnya menjadi lebih efektif. Salah faktor kunci dari pemasaran digital marketing itu adalah berubahnya perilaku konsumen dalam kebiasaan bertransaksi dan gaya hidup.

Laksana, dkk 2018 bahwa pemasaran digital merupakan aspek penting, yang harus dimiliki oleh industri hotel bintang lima di Jawa Timur untuk terus berkembang dan bisa menghadapi persaingan dalam industri hotel berbintang lainnya. Hal ini dibuktikan dalam penghitungan statistik bahwa implementasi *Digital Marketing* berpengaruh kuat terhadap *Intellectual Capital* dan *Perceived Quality* serta variabel-variabel tersebut yang berperan penting dalam meningkatkan *Organizational Performance* industri hotel bintang lima di Jawa Timur

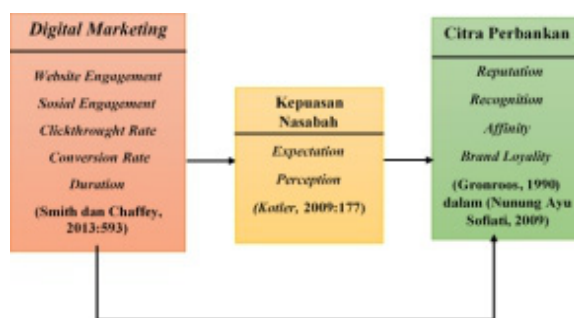
Sedangkan penelitian yang dikerjakan oleh Purwana. dkk. 2019 yang berjudul pemanfaatan *digital marketing*

bagi usaha mikro, menengah di kelurahan Malaka Sari. Duren Sawit bahwa Penggunaan teknologi digital telah mempengaruhi semua aspek kegiatan manusia, termasuk pemasaran. Pemasaran berbasis digital digunakan untuk memperoleh konsumen, membangun preferensi mereka, promosi merek, memelihara konsumen, serta meningkatkan penjualan yang pada akhirnya meningkatkan profit.

Pemasaran digital memungkinkan pembeli memperoleh seluruh informasi mengenai produk, jasa serta melakukan transaksi melalui internet, serta memungkinkan penjual untuk memantau dan menyediakan kebutuhan serta keinginan calon pembeli tanpa batasan waktu dan geografis. Digital marketing juga merupakan cara komunikasi dua arah yang dapat menimbulkan *awareness* dan *engagement* masyarakat terhadap produk dan merek tertentu. Platform yang sering digunakan untuk digital marketing adalah media sosial, terutama Facebook dan Instagram.

Rewah, (2018). Menunjukkan bahwa dalam melakukan promosi secara online empat variabel berperan penting dengan kata lain harus memperhatikan *Content, Trust, Price* dan *Product* dalam setiap promosi berbasis TIK. Empat variabel ini saling terkait satu dengan yang lain dalam menopang promosi berbasis TIK dimana pengusaha muda harus menyeimbangkan empat variabel ini. Empat variabel ini tidak dapat berdiri sendiri dalam melakukan promosi berbasis TIK baik di twitter, facebook dan Instagram.

Dari uraian teori yang dipaparkan di atas, maka kerangka pemikiran penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Diolah dari data 2019

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka konseptual diatas maka, dapat ditarik hipotesis penelitian nya adalah (1) terdapat pengaruh dari pemasaran digital terhadap tingkat kepuasan nasabah serta pandangan atau citra sebuah lembaga perbankan PT. BNI; (2) Terdapat pengaruh tingkat kepuasan yang dirasakan oleh konsumen perbankan kepada sebuah *Image* dari lembaga keuangan nasional PT. BNI; (3) Terdapat pengaruh *digital marketing* terhadap citra perbankan melalui tingkat kepuasan yang dirasakan oleh konsumen perbankan PT. BNI.

METODE

Metode yang digunakan adalah Menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif. Pengumpulan data bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari penelitian lapangan menggunakan kuesioner yang disebarakan kepada para nasabah PT. BNI. Pengguna fitur *digital marketing*. Sementara sumber data sekunder adalah kajian pustaka berupa literatur, jurnal penelitian, majalah, surat kabar, informasi internet, laporan-laporan yang diterbitkan Bank Indonesia, serta karya tulis ilmiah lain yang relevan dengan variabel-variabel yang diteliti. Unit analisis dalam penelitian ini adalah seluruh nasabah yang menggunakan *internet banking*, dengan unit observasi adalah pada PT. BNI (Persero) Tbk. Sementara tehnik pengambilan sampel dengan mempergunakan *simple random sampling method* dengan mempergunakan jumlah sampling adapapun perkiraan untuk ML minimal sebanyak 5 kali parameter bebas serta didalamnya termasuk *error* (Bentler dan Chou 1987). Metode analisi data yang digunakan adalah *Structural Equation Model*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi pemasaran digital, serta tingkat kepuasan yang dirasakan nasabah dan citra lembaga keuangan PT. BNI, yang di wakili oleh 40 item pertanyaan. Berdasarkan dari data yang diolah dengan mempergunakan analisis korelasi *rank spearman* diperoleh nilai item dari data yang dipergunakan menghasilkan nilai yang valid atau baik. hal ini ditunjukkan dengan setiap item memiliki nilai korelasi dengan signifikansi lebih kecil 0,05. Hasil pengujian reliabilitas variabel *digital marketing*, kepuasan nasabah, dan citra menunjukkan semua variabel memiliki reliabilitas yang baik atau reliabel, hal ini ditunjukkan dengan setiap variabel memiliki nilai reliabilitas yang lebih besar dari 0,7.

Variable Digital Marketing

Berdasarkan hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa *digital marketing* dengan sub variabel *website engagement*, *click through rates*, *conversion rates*, *duration*, dan media sosial *engagement* berada pada klasifikasi cukup baik (50%-60%). *Click through rates* adalah sub variabel *digital marketing* dengan total skor terkecil yaitu sebesar 51,7%, sementara persentasi ter-besar pada *website engagement* yang mencapai 61,5%. Pengujian hipotesis deskriptif untuk implementasi *digital marketing* ditetapkan batas minimal variabel penelitian dikatakan baik jika proporsinya lebih dari 50% ($\pi > 0,5$). Hasil uji proporsi pihak kanan menunjukkan variabel *digital marketing* telah diterapkan dengan baik, data tersebut dapat dilihat dari

hasil nilai proporsi 0,577 dengan nilai yang lebih besar dari 0,5 pada taraf nyata 5% dengan $Z_{\text{tabel}} = 1,645$.

Kepuasan Nasabah

Pengujian Hipotesis deskriptif untuk kepuasan nasabah ditetapkan batas minimal variabel penelitian dikatakan baik jika proporsinya lebih besar dari 50% ($\pi > 0,5$) Hasil uji proporsi pihak kanan untuk variabel kepuasan nasabah, hasilnya signifikan pada taraf nyata 5%, hasil menunjukkan bahwa kepuasan nasabah berada dalam klasifikasi tinggi/puas (60%-70%) pada implementasi *digital marketing* yang dilakukan oleh lembaga keuangan PT. BNI, Tbk. Sementara nilai dari uji proporsi pihak kanan untuk variabel citra perbankan, hasilnya signifikan pada taraf nyata 5%, hasil ini menunjukkan bahwa klasifikasi citra lembaga keuangan nasional PT. BNI .Tbk masuk dalam klasifikasi sudah tinggi/baik (60%-70%).

Kepuasan nasabah menurut sub variabel *expectation/kepuasan yang diharapkan* nasabah. Dari hasil penilaian responden mengindikasikan bahwa indikator yang memiliki persentase total skor terkecil berkaitan dengan situs bank memiliki produk yang lengkap yaitu sebesar 59,1% (cukup lengkap), sedangkan indikator yang memiliki persentase total skor terbesar berkaitan dengan kinerja situs website bank dapat dipercaya sebesar 61,9% (dipercaya). Secara keseluruhan sub variabel *expectation* ini memiliki persentase total skor sebesar 60,8% yang mengindikasikan bahwa nasabah memiliki tingkat harapan yang tinggi (puas).

Sedangkan sub variabel kepuasan nasabah, yang memiliki persentase total skor aktual terkecil adalah mengenai kepuasan nasabah yang diharapkan */perception*. (60,8.%) sedangkan yang memiliki tingkat persentase terbesar ada pada sub variabel kepuasan nasabah yang dirasakan (60,9.%), berdasarkan kategorinya kedua sub variabel kepuasan nasabah yaitu kepuasan nasabah yang diharapkan dan kepuasan nasabah yang dirasakan pada klasifikasi puas (60 %-80%).

Variable Citra Perbankan

Citra Perbankan diukur dengan menggunakan 4 (empat sub variabel), yaitu meliputi *reputation*, *recognition*, *affiniton*, dan *brand loyalty*. Setiap sub variabel digambarkan melalui indikator-indikator dan kemudian dari setiap indikator dibuatkan item pertanyaan untuk mengukurnya.

Pengujian Hipotesis deskriptif untuk citra perbankan sub variabel Reputasi (*reputation*) Dari hasil penilaian responden mengindikasikan bahwa citra perbankan PT. BNI, telah dinilai baik (61,6%) oleh nasabah. Hal tersebut tercermin dari dapat dipercayanya bank dalam melindungi data nasabah (62,1%), mudahnya bank untuk dihubungi melalui telepon oleh nasabah (61,4%), terpenuhinya permintaan nasabah pada situs website bank (61,3%),

dan bank memiliki program tanggung jawab social yang bermanfaat (62,1%). Dalam hal bank dapat dipercaya dalam melindungi finansial nasabah PT.BNI. Tbk dalam kategori dipercaya (61,1%).

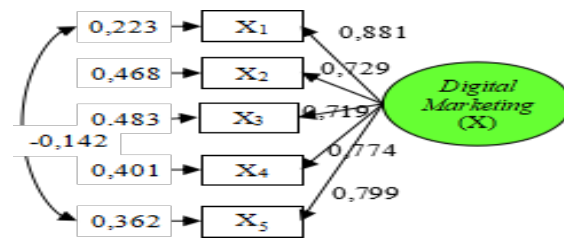
Sub variabel *recognition*, dari hasil penilaian responden mengindikasikan bahwa citra perbankan PT. BNI, Tbk telah dinilai baik (63,6%) oleh nasabah. Hasil tersebut didukung dengan mudahnya mendapatkan informasi bank dari sosial media (66,3%), mudahnya memperoleh informasi yang bermanfaat dari situs website bank (64,1%), situs bank dapat menjaga kepercayaan nasabah (63,0%), nasabah merasa puas bertransaksi finansial melalui bank (62,7%), dan kenyamanan menggunakan sistem online bank (62,1%).

Citra perbankan menurut sub variabel *affinity*. Dari hasil penilaian responden mengindikasikan bahwa citra perbankan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah dinilai baik (63,9%) oleh nasabah. Hasil tersebut didukung dengan mudahnya produk bank dapat dilihat secara online melalui situs website bank (63,2%), mudahnya produk bank dapat dibaca secara online (62,7%), seringnya nasabah memperoleh informasi produk yang baik mudah diperoleh pada situs website bank (64,8%), nasabah sering memberikan penilaian yang positif terhadap produk pada situs *website* bank (62,7%), dan seringnya nasabah bersedia untuk bertransaksi lebih banyak disitus *website* bank dimasa yang akan datang (64,8%).

Citra perbankan menurut sub variabel *brand loyalty*. Dari hasil penilaian responden mengindikasikan bahwa citra perbankan PT. BNI (Persero) Tbk telah dinilai baik (63,5%) oleh nasabah. Hal tersebut tercermin dari seringnya nasabah merekomendasikan situs website PT. BNI, kepada keluarga dan teman (62,9%), sering mereko-mendasikan situs bank kepada orang lain (62,3%), seringnya nasabah mengutamakan situs bank dalam setiap transaksi finansial (64,5%), seringnya nasabah melakukan transaksi setelah melihat situs bank (63,4%), dan sedikit nasabah yang pindah ke situs bank lain (64,5%). Berdasarkan hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa uji proporsi pihak kanan untuk variabel Citra Perbankan, hasilnya signifikan pada taraf nyata 5% dan secara statistic hipotesis nol ditolak. Artinya citra perbankan pada PT. BNI, dinyatakan sudah baik. Secara keseluruhan hasil ini menunjukkan bahwa klasifikasi citra lembaga keuangan nasioanal PT. BNI.Tbk masuk dalam klasifikasi sudah tinggi/baik (60% - 70%).

Model Pengukuran Digital Marketing

Berdasarkan model SEM maka model pengukuran (unidimensi) untuk variabel laten *Digital Marketing* (X) yang diprediksi oleh sub variabel *Website Engagement* (X_1), *Sosial Engagement* (X_2), *Clickthrough rate* (X_3), *Conversion rate* (X_4), dan *Duration* (X_5) dapat digambarkan sebagai berikut:



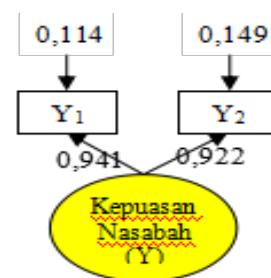
Sumber : Hasil olah data 2019

Gambar 2. Model Pengukuran Digital Marketing

Pada model pengukuran *Digital Marketing* (X), sub variabel yang memiliki muatan dibakukan (*loading factor*) terbesar adalah *Website Engagement* (X_1) sebesar 0,881 ($R^2 = 0,777$), artinya sub variabel *Website Engagement* mampu memprediksi *Digital Marketing* sebesar 77,7% dan kekeliruannya sebesar 22,3%. Sementara itu muatan dibakukan terkecil dimiliki sub variabel *Clickthrough rate* (X_3) sebesar 0,719 ($R^2 = 0,517$) artinya sub variabel *Clickthrough rate* hanya mampu memprediksi *Digital Marketing* sebesar 51,7% sedangkan kekeliruannya mencapai 48,3%. Hasil pengujian model pengukuran pada Tabel 4.23 menunjukkan semua sub variabel *Digital Marketing* signifikan ($t > 1,96$) yang menunjukkan hasil yang baik dalam memprediksi *Digital Marketing*. Hasil modifikasi model CFA, dalam model pengukuran terdapat hubungan antara kekeliruan sub variabel *Website Engagement* dengan kekeliruan sub variabel *Duration* sebesar -0,142.

Model Pengukuran Kepuasan Nasabah

Berdasarkan model SEM, maka model pengukuran (unidimensi) untuk variabel laten Kepuasan Nasabah (Y) yang diprediksi oleh sub variabel *Expectation* (Y_1) dan *Perception* (Y_2) dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Hasil olah data 2019

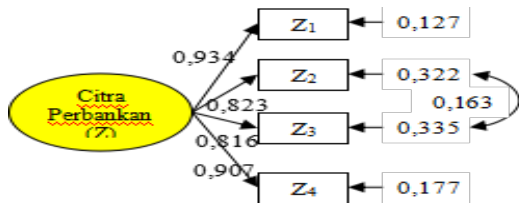
Gambar 3. Model Pengukuran Kepuasan Nasabah

Pada model pengukuran Kepuasan Nasabah (Y), sub variabel yang memiliki muatan dibakukan (*loading factor*) terbesar adalah *expectation* (Y_1) sebesar 0,941 ($R^2 = 0,886$), artinya sub variabel *expectation* (kepuasan yang diharapkan nasabah) mampu memprediksi kepuasan nasabah sebesar 88,6% dan kekeliruannya hanya sebesar 11,4%. Sementara itu muatan dibakukan terkecil dimiliki sub variabel *perception* (Y_2) sebesar 0,922 ($R^2 = 0,851$) artinya sub variabel *perception* (kepuasan yang dirasakan nasabah) hanya mampu memprediksi kepuasan nasabah

sebesar 85,1% sedangkan kekeliruannya mencapai 14,9%. Hasil pengujian model pengukuran menunjukkan semua sub variabel kepuasan nasabah signifikan ($t > 1,96$) yang menunjukkan hasil yang baik dalam memprediksi kepuasan nasabah.

Model Pengukuran Citra Perbankan

Berdasarkan model SEM pada Gambar 4.11 maka model pengukuran (unidimensi) untuk variabel laten Citra Perbankan (Z) yang diprediksi oleh sub variabel Reputation (Z₁), Recognition (Z₂), Affinity (Z₃), dan Brand Loyalty (Z₄) dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Hasil olah data 2019

Gambar 4. Model Pengukuran Citra Perbankan

Pada model pengukuran Citra Perbankan (Z), sub variabel yang memiliki muatan dibakukan (*loading factor*) terbesar adalah Reputation (Z₁) sebesar 0,934 ($R^2 = 0,873$), artinya sub variabel Reputation mampu memprediksi Citra Perbankan sebesar 87,3% dan kekeliruannya sebesar 12,7%. Sedangkan muatan dibakukan terkecil dimiliki sub variabel Affinity (Z₃) sebesar 0,816 ($R^2 = 0,665$) artinya sub variabel Recognition hanya mampu memprediksi Citra Perbankan sebesar 66,5% sedangkan kekeliruannya mencapai 33,5%. Hasil pengujian model pengukuran menunjukkan semua sub variabel Citra Perbankan signifikan ($t > 1,96$) yang menunjukkan hasil yang baik dalam memprediksi Citra Perbankan. Hasil modifikasi model CFA, dalam model pengukuran terdapat hubungan antara kekeliruan sub variabel Recognition dengan kekeliruan sub variabel Affinity sebesar 0,162.

Uji Hipotesis Digital Marketing Terhadap Kepuasan Nasabah

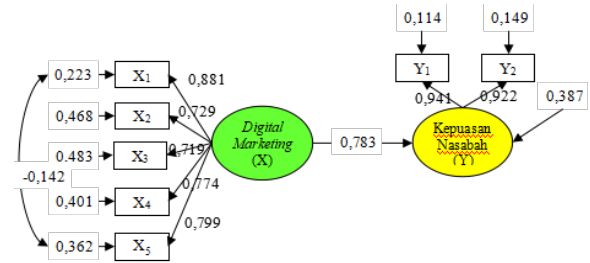
Dalam penelitian ini, salah satu variabel yang diuji keterkaitannya dengan variabel lainnya adalah variabel Digital Marketing yang terdiri dari sub variabel Website Engagement, Sosial Engagement, Clicktrough rate, Conversion rate, dan Duration terhadap Kepuasan Nasabah yang terdiri dari sub variabel Expectation dan Perception pada PT. BNI. Persamaan model terstruktur Digital Marketing terhadap kepuasan nasabah pada PT. BNI, dapat dilihat pada Gambar 5.

Statistik uji :

$$t = \frac{y_1}{se(y_1)} = \frac{0,836}{0,0811} = 10,316$$

Untuk uji dua pihak, pada tingkat kepercayaan 95% nilai kritis distribusi z-normal standard sebesar

1,96. Jika kita bandingkan nilai t hitung dengan nilai kritis tabel maka $t = 10,316 > 1,96$ sehingga hipotesis nol ditolak. Artinya Digital Marketing yang terdiri dari sub variabel Website Engagement, Sosial Engagement, Clicktrough rate, Conversion rate, dan Duration memiliki pengaruh besar (61,3%) terhadap Kepuasan Nasabah PT. BNI

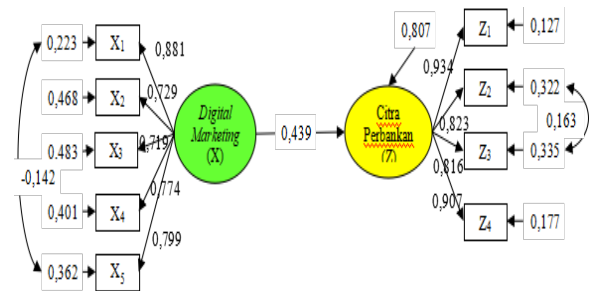


Sumber: Hasil olah data 2019

Gambar 5. Pengaruh Digital Marketing Terhadap Kepuasan Nasabah

Uji Hipotesis Digital Marketing Terhadap Citra Perbankan

Selanjutnya, variabel yang diuji keterkaitannya dengan variabel lainnya adalah variabel Digital Marketing yang terdiri dari sub variabel variabel Website Engagement, Sosial Engagement, Clicktrough rate, Conversion rate, dan Duration terhadap Citra Perbankan yang terdiri dari sub variabel Reputation, Recognition, Affinity, dan Brand Loyalty pada PT. BNI. Persamaan model terstruktur Digital Marketing terhadap Citra Perbankan pada PT. BNI (Persero) Tbk dinyatakan sebagai:



Sumber: Hasil olah data 2019

Gambar 6. Pengaruh Digital Marketing Terhadap Citra Perbankan

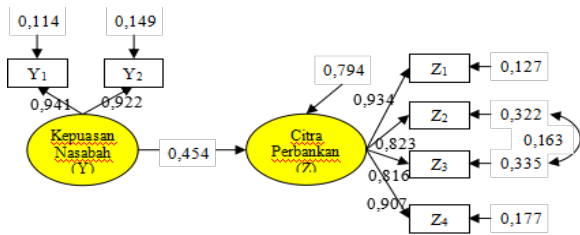
Statistik uji :

$$t = \frac{y_2}{se(y_2)} = \frac{0,465}{0,109} = 4,271$$

Untuk uji dua pihak, pada tingkat kepercayaan 95% nilai kritis distribusi z-normal standard sebesar 1,96. Jika kita bandingkan nilai t hitung dengan nilai kritis tabel maka $t = 4,271 > 1,96$ sehingga hipotesis nol ditolak. Artinya Digital Marketing yang terdiri dari sub variabel Website Engagement, Sosial Engagement, Clicktrough rate, Conversion rate, dan Duration memiliki pengaruh yang signifikan terhadap terhadap Citra Perbankan pada PT. BNI dengan nilai pengaruh yang cukup besar (19,3%).

Uji Hipotesis Kepuasan Nasabah Terhadap Citra Perbankan

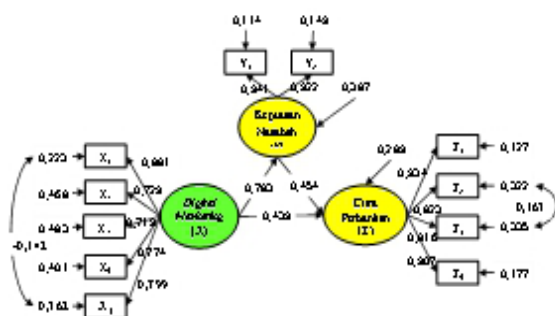
Variabel yang diuji keterkaitannya dengan variable Lainnya adalah variabel Kepuasan Nasabah yang terdiri dari sub variabel *Expectation* (Kepuasan yang diharapkan Nasabah) dan *Perception* (Kepuasan yang dirasakan Nasabah) terhadap Citra Perbankan yang terdiri dari sub variable *Reputation, Recognition, Affinity, dan Brand Loyalty* pada PT. BNI. Persamaan model terstruktur Kepuasan Nasabah terhadap Citra Perbankan pada PT. BNI dinyatakan sebagai :



Sumber: Hasil olah data 2019

Gambar 7. Pengaruh Kepuasan Nasabah Terhadap Citra Perbankan

Persamaan model terstruktur *Digital Marketing* terhadap Kepuasan Nasabah dan dampaknya terhadap Citra Perbankan pada PT. BNI (Persero) Tbk secara simultan dinyatakan sebagai:



Sumber: Hasil Pengolahan Data 2019

Gambar 8. Hasil Penelitian Menggunakan Model Structural Equation Model

Digital marketing (X), sub variabel yang memiliki muatan dibakukan (*loading factor*) terbesar adalah *website engagement* (X1) sebesar 0,881 ($R^2=0,777$), artinya sub variabel *website engagement* mampu memprediksi *digital marketing* sebesar 77,7% dan kekeliruannya sebesar 22,3%. Sementara itu muatan dibakukan terkecil dimiliki sub variabel *click trough rate* (X3) sebesar 0,719 ($R^2=0,517$) artinya sub variabel *Click trough rate* hanya mampu memprediksi *Digital Marketing* sebesar 51,7% sedangkan kekeliruannya mencapai 48,3%. Hasil pengujian model pengukuran menunjukkan semua sub variabel digital marketing signifikan ($t>1,96$) yang menunjukkan hasil yang baik dalam memprediksi digital marketing. Hasil modifikasi model CFA, dalam model pengukuran terdapat hubungan antara kekeliruan sub

variabel *website engagement* dengan kekeliruan sub variabel *duration* sebesar -0,142.

Pengukuran Kepuasan Nasabah (Y), sub variabel yang memiliki muatan dibakukan (*loading factor*) terbesar adalah *expectation* (Y1) sebesar 0,941 ($R^2= 0,886$), artinya sub variabel *expectation* mampu memprediksi kepuasan nasabah sebesar 88,6% dan kekeliruannya hanya sebesar 11,4%. Sementara itu muatan dibakukan terkecil dimiliki sub variabel *perception* (Y2) sebesar 0,922 ($R^2 = 0,851$) artinya sub variabel *perception* hanya mampu memprediksi kepuasan nasabah sebesar 85,1% sedangkan kekeliruannya mencapai 14,9%. Selanjutnya hasil pengujian model pengukuran menunjukkan semua sub variabel kepuasan nasabah signifikan ($t >1,96$) yang menunjukkan hasil yang baik dalam memprediksi kepuasan nasabah. Pada model pengukuran citra perbankan (Z), sub variabel yang memiliki muatan dibakukan (*loading factor*) terbesar adalah *Reputation* (Z1) sebesar 0,934 ($R^2=0,873$), artinya sub variabel *reputation* mampu memprediksi citra perbankan sebesar 87,3% dan kekeliruannya sebesar 12,7%.

Sedangkan muatan dibakukan terkecil dimiliki sub variabel *affinity* (Z3) sebesar 0,816 ($R^2=0,665$), artinya sub variabel *affinity* hanya mampu memprediksi citra perbankan sebesar 66,5% kekeliruannya mencapai 33,5%. Hasil pengujian model pengukuran menunjukkan semua sub variabel citra perbankan signifikan ($t >1,96$) yang menunjukkan hasil yang baik dalam memprediksi citra perbankan. Hasil modifikasi model CFA, dalam model pengukuran terdapat hubungan antara kekeliruan sub variabel *recognition* dengan kekeliruan sub variabel *affinity* sebesar 0,162.

Implementasi Pemasaran Digital terhadap Tingkat Kepuasan konsumen serta Citra lembaga keuangan PT. BNI, Tbk

Berdasarkan model SEM (Gambar.8), persamaan model struktural digital marketing (X) terhadap kepuasan nasabah (Y) dan *corporate image* (Z) di lembaga keuangan PT.BNI masing-masing dinyatakan sebagai berikut.

$$Y = 0,783 (X) + 0,387$$

$$Z = 0,439 (X) + 0,807$$

Tabel 1. Pengaruh Antar Variabel

Variable Effect	Regression Coef.	Std. Estimate	Std. error	t
Digital Marketing à Kepuasan Nasabah	0,836	0,783	0,081	10,316*
Digital Marketing à Citra Perbankan	0,465	0,439	0,109	4,271*

(Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2019)

Keterangan: Signifikan dengan nilai asli 0,05.

Berdasarkan uraian dari hasil nilai dari uji dua pihak pada tingkat kepercayaan 95% nilai kritis distribusi

z-normal standard sebesar 1,96. Sehingga nilai *t* hitung dengan nilai kritis tabel maka $t = 10,316 > 1,96$ sehingga hipotesis nol ditolak. Artinya pemasaran digital yang terdiri dari sub variabel *website engagement*, *sosial engagement*, *klik through rates*, *conversion rates* serta *duration* berpengaruh terhadap tingkat kepuasan yang dirasakan oleh nasabah PT. BNI, sementara pengaruhnya sebesar 0,836 atau dengan kontribusi secara langsung sebesar 61,3%. Hasil uji dua pihak pada tingkat kepercayaan 95% nilai kritis distribusi *z-normal standard* sebesar 1,96. Sehingga nilai *t* hitung dengan nilai kritis tabel maka $t = 4,271 > 1,96$ sehingga hipotesis nol ditolak. Artinya pemasaran digital dengan sub variabel *website*, *sosial media*, *jumlah klik konten website*, *jumlah pengunjung website* yang langsung melakukan transaksi, dan lamanya waktu dalam berinteraksi di website berpengaruh terhadap *image* lembaga keuangan PT.BNI, dengan besar nilai 0,465 atau dengan kontribusi secara langsung sebesar 19,3%.

Pengaruh pemasaran digital terhadap tingkat Kepuasan konsumen serta berimplikasi kepada Citra Perbankan PT.BNI

Dengan model SEM, persamaan model struktural digital marketing (X) terhadap kepuasan nasabah (Y) dan berimplikasi pada peningkatan citra lembaga perbankan (Z) di PT, Bank negara Indonesia, Tbk dinyatakan .

$$Z = 0,439 (X) + 0,454 (Y) + 0,289$$

Statistik Uji :

$$F = \frac{(ps - p - 1)R_{xy}^2}{p(1 - R_{xy}^2)} \sim F_{[a; (p, n-p-1)]}$$

$$F = \frac{(140 - 3 - 1)(0,711)}{3(1 - 0,711)} = 111,529$$

$$F_{\text{tabel}} = F_{[0,05; (3, 140-3-1)]} = 2,671$$

Berdasarkan $F_{\text{hitung}} = 111,529 > F_{\text{tabel}} = 2,671$ maka H_0 ditolak, artinya secara simultan pengaruh pemasaran digital dengan sub variable *website engagement*, *sosial engagement*, *clickthrough rates*, *conversion rates* dan *duration* terhadap kepuasan nasabah dan berimplikasi pada peningkatan corporate image PT. BNI.

Melihat hasil penelitian di atas maka dapat dikatakan bahwa variabel *digital marketing* sangat berpengaruh dikalangan nasabah pengguna digital banking, hal ini bisa dilihat dengan presentase yang sangat besar yaitu sebesar 71,1% pengaruhnya, sementara sisanya sebesar 28,9% dipengaruhi oleh variable yang lain yang ada dalam variable *digital marketing*, seperti Facebook, IG dan kecepatan *customer service* dalam merespon setiap kebutuhan nasabah. Serta kecepatan dalam jaringan internet turut pula mempengaruhi nya sebab dalam era *digital marketing* kecepatan jaringan internet merupakan

kebutuhan pokok yang harus selalu aman dan cepat. Hal itu tentu saja akan mempengaruhi transaksi dan interaksi antara nasabah dengan pihak lembaga perbankan. Dengan begitu akan memberikan dampak pada citra perusahaan.

SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan dapat disimpulkan bahwa, penerapan dari kampanye pemasaran digital yang mencakup dimensi *website engagement*, *social engagement*, *click through rates*, *conversion rates* serta lamanya waktu berinteraksi di website lembaga keuangan PT. BNI. sudah dilaksanakan oleh perusahaan dengan cukup baik, konsumen perbankan di lembaga keuangan PT. BNI, termasuk kategori sudah merasa puas, dan citra pada lembaga perbankan PT. BNI, telah memiliki citra yang baik. Pelaksanaan kampanye pemasaran digital yang mencakup dimensi *web engagement*, *sosial engagement*, *clickthrough*, *conversion rates* dan *duration* berpengaruh positif dan signifikan secara parsial kepada tingkat kepuasan yang dirasakan oleh nasabah serta citra perusahaan nasional perbankan PT. BNI. Tingkat kepuasan yang dirasakan konsumen perbankan berpengaruh kepada *Image* lembaga keuangan PT. BNI.

Penerapan *marketing digital* dengan sub variable yang mencakup dimensi *web engagement*, *sosial engagement*, *clickthrough*, *conversion rate* serta *duration* berpengaruh kepada tingkat kepuasan yang dirasakan oleh nasabah dan berimplikasi pada peningkatan citra lembaga perbankan nasional PT. BNI, Tbk

DAFTAR PUSTAKA

- Afrilia, A.M. (2018). Digital Marketing Sebagai Strategi Komunikasi Pemasaran “Waroenk Ora Umum” Dalam Meningkatkan Jumlah Konsumen. *Jurnal Riset Komunikasi*, 1, (1), 147–157. <https://doi.org/10.24329/jurkom.v1i1.21>
- Bentler, P.M. & Chou, C. (1987). Practical issues in structural modeling. *Sociological Methods and Research*, 16, (1), 78–117.
- Kadarisman, H., & Ariyani, N. (2018). Hubungan e-Word of Mouth dan Citra Merk dengan Minat Membeli pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Management & Accounting Expose*, 1, (2), 1–11.
- Fitriana, A. (2019). Pengaruh E-Marketing dan E-CRM terhadap Loyalitas Nasabah Menggunakan Internet Banking Bank Syariah Mandiri. *Creative Information Technology Journal*, 4, (4), 306. <https://doi.org/10.24076/citec.2017v4i4.124>
- <http://www.Kinerjabank.com> 2018

- Kannan, P. K., & Li, H. (2017). Digital marketing: A framework, review and research agenda. *International Journal of Research in Marketing*, 34, (1), 22–45. <https://doi.org/10.1016/j.ijresmar.2016.11.006>
- Kotler, P & Keller, K. (2012). *Managemen pemasaran* (13th ed.). Jakarta: Erlangga.
- Laksana, D. & Dharmayanti, D. (2018). Pengaruh Digital Marketing terhadap Organizational Performance dengan Intellectualcapital dan Perceived Quality Sebagai Variabel Intervening Pada Industri. *Jurnal Pemasaran*, 12, (1), 10–24. <https://doi.org/10.9744/pemasaran.12.1.10>
- Lucyantoro, B., & Rachmansyah, M. (2018). Penerapan Strategi Digital Marketing, Teori Antrian Terhadap Tingkat Kepuasan Pelanggan (Studi Kasus di MyBCA Ciputra World Surabaya). *Jurnal Ekonomika* '45, 5, (1), 38-54.
- Isnaini, N.L., & Fauziyyah, S.(2017). Peran Digital Marketing Terhadap Brand Equity Produk Pariwisata. *Snaper-Ebis*, 406–410.
- Nurchahyo, A. (2018). Peran Digital Marketing dan Harga Kompetitif Terhadap Keputusan Berlangganan Indihome. *RELEVANCE: Journal of Management and Business*, 1, (1), 15-34. <https://doi.org/10.22515/relevance.v1i1.1270>
- Prabowo, W.A. (2018). Pengaruh Digital Marketing terhadap Organizational Performance Dengan intellectual Capital Dan Perceived Quality sebagai Variabel Intervening Pada Industri Hotel Bintang Tiga di Jawa Timur. *Jurnal Manajemen Pemasaran*, 12, (2), 101–112. <https://doi.org/10.9744/pemasaran.12.2.101-112>
- Pradiani, T. (2018). Pengaruh Sistem Pemasaran Digital Marketing Terhadap Peningkatan Volume Penjualan Hasil Industri Rumahan. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 11, (2), 46–53. <https://doi.org/10.32812/jibeka.v11i2.45>
- Purwana, D., Rahmi, R., & Aditya, S. (2017). Pemanfaatan Digital Marketing Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di Kelurahan Malaka Sari, Duren Sawit. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Madani (JPMM)*, 1, (1),1–17. <https://doi.org/10.21009/jpmm.001.1.01>
- Rewah, J.M. (2018). Pengaruh Promosi Berbasis Teknologi Informasi Terhadap Pengusaha Muda Universitas Klabat The Influence of Information Technology-Based Promotion on Young Entrepreneurs of Klabat University. *Cogito Smart Journal*, 4, (1), 24–36.
- Ridho, M.R. (2013) Pengaruh E-Marketing Terhadap Citra Merek Nay@ Dam Pada Pt Kreasi Putra Serayu. *CBIS (Computer Based Information System Journal)*, 1, 1)57–76.
- Sofiati, N.A., & Limakrisna, N. (2017). Holistic marketing implementation to increase company trust and image on state banking industries (a customer survey on customers of state banks in West Java province). *International Journal of Applied Business and Economic Research*, 15, (6), 117–130.
- Tjiptono, F. & Chandra, G. (2012). *Pemasaran Strategik*. Yogyakarta: CV Andi.
- Wardhana, A. (2015). *strategi digital marketing dan implikasinya pada keunggulan bersaing*. Jakarta: Erlangga.

PETUNJUK PENULISAN:

Berikut ini adalah petunjuk penulisan dan template artikel yang telah direvisi dan mulai diberlakukan pada edisi penerbitan tahun 2019. Artikel di tulis tidak kurang dari 5000 kata dan tidak lebih dari 7000 kata

This is the revised author guidelines and article template of the Jurnal Sosiohumaniora Unpad that applied for publication year 2016 onwards. Article begins with title followed by authors' name, affiliation, and address, then abstract.

PENYERAHAN ARTIKEL:

Lakukan pendaftaran atau registrasi online pada alamat <http://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/user/register>. di bagian akhir form, pilih Daftar sebagai: penulis. Pada tahap selanjutnya, lakukan unggah file artikel dalam bentuk .doc (Ms.Word di utamakan office 2003-2007) di link [Penyerahan Naskah Baru]. Berilah Checklist pada isian Checklist naskah untuk menunjukkan bahwa naskah yang akan diunggah sudah mengikuti templet jurnal dan panduan penulisan. Jika sudah, klik Simpan dan lanjutkan. Di tahap ini klik Browse dan pilih file artikel yang akan dikirimkan untuk Jurnal Sosiohumaniora. Klik Unggah. Klik Simpan dan lanjutkan. Selanjutnya, isi form yang ada hingga Penyerahan Selesai.

PANDUAN PENULIS

JUDUL ARTIKEL (TNR,12pt Bold)

Asep Sumaryana¹, Rd. Ahmad Buchari¹, Agus Nero² Ini namaku di sini² (TNR,10pt Bold)

¹Fakultas, Universitas/instansi, Jl. Raya Bandung-Sumedang KM. 21 Jatinangor, 456363 (TNR, 10pt Normal)

²Afiliasiku ditulis di sini, Ini alamat afiliasiku dituliskan lengkap di sini

E-mail: xxxxx@email.com ; penulis2@email.com ; penulis3@email.com ; penulis3@email.com

ABSTRAK (10pt Bold)

Abstrak ditulis dalam satu paragraf, spasi tunggal, berisi maksimal 250 kata, dengan menggunakan huruf Times New Roman 10pt. Abstrak ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris yang baik dan benar. Abstrak harus memuat tujuan penelitian, metode (karakteristik subjek penelitian, populasi, sampel, teknik sampling, metode pengumpulan data, serta analisis data), hasil penelitian, serta kesimpulan singkat. Jika dianggap perlu, pada bagian akhir paragraph dapat diberikan rekomendasi berdasarkan temuan penelitian. Di bawah abstrak, sertakan lima kata kunci yang masing-masing dipisahkan dengan tanda titik koma (;). Pilihlah kata kunci yang memudahkan artikel Anda ditemukan mesin penjelajah.

Kata kunci; petunjuk penulisan; jurnal sosiohumaniora; Unpad; template

ENGLISH TITLE ARTICLES (TNR,12pt Bold)

ABSTRACT (10pt Bold)

Abstract should be written in a one-space paragraph, containing max 250 words, and written in Times New Roman 10 pt. Abstract should be written in Bahasa Indonesia and English. Abstract should include study aims, methods (participant characteristics, population, sample, sampling methods, data collection, and data analysis), findings, and conclusions. If necessary, a recommendation can be given at the end of paragraph. Following the abstract, provide five keywords separated with semicolon (;). Choose keywords carefully that enable search engine to locate your article.

Key words; author guidelines; jurnal sosiohumaniora; Unpad; template

PENDAHULUAN

Pada bagian pendahuluan, penulis harus menuliskan tujuan penelitian di bagian akhir pendahuluan. Sebelum menuliskan tujuan penelitian, penulis harus menuliskan (secara berurutan) latar belakang, kajian literatur terdahulu (state of the art) sebagai dasar “gap analysis” pernyataan kebaruan ilmiah dari artikel, permasalahan penelitian, dan hipotesis (bila ada). Di dalam pendahuluan tidak diperkenankan adanya tinjauan pustaka yang terpisah dalam sub judul tersendiri sebagaimana di laporan penelitian, tetapi dituliskan terintegrasi dengan penjelasan mengenai latar belakang penelitian sehingga kajian literatur tersebut dapat menunjukkan state of the art- atau kebaruan temuan ilmiah.

METODE

Bagian metode berisi penjelasan tentang jenis penelitian/ desain penelitian. Bagian ini menjelaskan tentang jumlah subjek dan karakteristik subjek disertai data demografi (Azwar, 2007). Pada penelitian kuantitatif, jika penelitian menggunakan alat ukur tertentu, perlu disampaikan nama alat ukur, jumlah aitem, koefisien reliabilitas, serta metode analisis data yang digunakan. Pada penelitian kualitatif, dijelaskan perspektif kualitatif yang digunakan, hingga metode pengambilan data dan analisisnya (Willig, 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan berisi hasil-hasil temuan penelitian dan pembahasannya secara ilmiah. Tuliskan temuan-temuan ilmiah (scientific finding) yang diperoleh dari hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan tetapi harus ditunjang oleh data-data yang memadai. Temuan ilmiah yang dimaksud di sini adalah bukan data-data hasil penelitian yang diperoleh. Temuan-temuan ilmiah tersebut harus dijelaskan secara saintifik meliputi: Apakah temuan ilmiah yang diperoleh? Mengapa hal itu bisa terjadi? Mengapa trend variabel seperti itu? Semua pertanyaan tersebut harus dijelaskan secara ilmiah, tidak hanya deskriptif, dan ditunjang oleh data empiris yang memadai. Selain itu, harus dijelaskan juga perbandingannya dengan hasil-hasil para peneliti lain yang hampir sama topiknya. Hasil-hasil penelitian dan temuan harus bisa menjawab hipotesis dan/atau pertanyaan penelitian di bagian pendahuluan.

Tabel (maksimal 6 tabel) dan Gambar (maksimal 6 gambar) diletakkan di dalam kelompok teks sesudah tabel atau gambar tersebut dirujuk. Setiap gambar harus diberi judul gambar di sebelah bawah gambar tersebut dan bernomor urut angka diikuti dengan judul gambar. Setiap tabel harus diberi judul tabel dan bernomor urut angka di sebelah atas tabel tersebut diikuti dengan sumber tabel.

Gambar-gambar harus dijamin dapat tercetak dengan jelas (ukuran font, resolusi dan ukuran garis harus yakin tercetak jelas berupa jpeg). kelompok Gambar

terdiri dari diagram/skema, tabel dan sebaiknya diletakkan sesuai kolom diantara kelompok teks atau jika terlalu besar diletakkan di bagian tengah halaman. Tabel tidak boleh mengandung garis-garis vertikal, sedangkan garis-garis horisontal diperbolehkan tetapi hanya yang penting-penting saja.

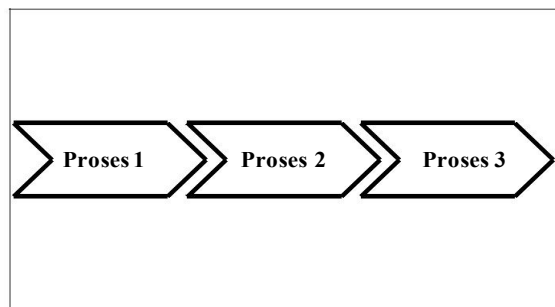
Tabel 1. Korelasi Antar Variabel

Aspek Dukungan Keluarga	Stres Kerja	
	<i>r</i>	<i>p</i>
Dukungan emosional	0,167
Dukungan penghargaan	0,255
Dukungan nasihat	0,285
Dukungan instrument

(Sumber:)

Keterangan: Tuliskan nilai *p* (bukan $p < 0,05$ atau $p < 0,001$) kecuali jika hasil analisisnya menunjukkan $p = 0,000$ maka harus dituliskan $p < 0,001$; atau jika hasilnya $p = 1,000$ maka harus dituliskan $p > 0,99$. Untuk memudahkan mengenali signifikansi, bisa ditambahkan tanda ** untuk nilai $p < 0,001$ dan * untuk nilai $p < 0,05$.

SIMPULAN



Gambar 1. Prosedur Penelitian

Bagian Simpulan terdiri dari satu paragraf saja namun menggambarkan jawaban dari hipotesis dan/atau tujuan penelitian atau temuan ilmiah yang diperoleh. Simpulan bukan berisi perulangan dari hasil dan pembahasan, tetapi lebih kepada ringkasan hasil temuan seperti yang diharapkan di tujuan penelitian. Bila perlu, di bagian akhir simpulan dapat juga dituliskan hal-hal yang akan dilakukan terkait dengan gagasan selanjutnya dari penelitian tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH (bila ada)

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada pemberi dana penelitian atau donatur dan pihak-pihak yang membantu pelaksanaan penelitian yang kontribusinya tidak cukup signifikan untuk dimasukkan dalam kelompok penulis (authorship).

DAFTAR PUSTAKA

Semua referensi yang dikutip/disitasi dalam naskah artikel harus dicantumkan dalam bagian Daftar Pustaka. Daftar Pustaka harus berisi pustaka-pustaka acuan yang berasal

dari sumber primer (jurnal ilmiah; minimum 80%) dari keseluruhan daftar pustaka) diterbitkan 10 (sepuluh) tahun terakhir. Jumlah referensi yang disitasi minimal 15 (lima belas) sumber pustaka. Penulisan kutipan atau sitasi disarankan menggunakan program aplikasi manajemen referensi misalnya: Mendeley, grammarly, EndNote, Zotero, atau lainnya. Format penulisan yang digunakan di Jurnal Sosiohumaniora Unpad adalah APA 6th Edition (American Psychological Association, 2010).

Pustaka yang berupa majalah/jurnal ilmiah:

Agustinus, W. (2016) Kerangka Ekonomi Makro Daerah Kota Bitung di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu. *Sosio-humaniora*, 18, 185-190.

Shintadewi, E.A & Sumartias S. (2017). Promosi Kesehatan Hiv-Aids dan Stigma Terhadap Penggunaan Narkoba Suntik (Penasun) di Kabupaten Sumedang. *Sosiohumaniora*, 19, (2), 129-140.

Nugrahanto, W. & Adyawardhina, R. (2018). Demokrasi Dalam Sejarah Militer Indonesia; Kajian Histois Tentang Pemilihan Panglima Tentara Pertama Tahun 1945. *Sosiohumaniora*, 20, (2), 78-85. doi: <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v20i1.14368>

Pustaka yang berupa judul buku:

Azwar, S. (2007). Metode penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Lunsford, A., & Ede, L. (2009). Child education: Perspective on teaching activities. Carbondale: Illinois University Press.

Willig, C. (2008). Introducing qualitative research in psychology: adventures in theory and method. (2nd ed.). London: McGraw-Hill Open University Press

Pustaka yang berupa Prosiding Seminar:

Desiningrum, D. R. (2011). Future time perspective, goal orientation, and subjective well being in elderly. The Padjadjaran International Conference on Psychology (pp.17-23). Bandung, Indonesia: Faculty of Psychology, Padjadjaran University.

Pustaka yang berupa disertasi/tesis/skripsi:

Pratama, A. G. (2009). Kontribusi kesejahteraan-an subjektif pada religiusitas Islam, persepsi tentang penyakit, dan perilaku menjaga kesehatan diri dalam model perilaku memelihara kesehatan: Suatu upaya menemukan model perilaku memelihara kesehatan dengan taraf keccokan optimal pada penderita HIV+. Disertasi. Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung.

Pustaka yang berupa Handbook:

Albarracin, Johnson, & Zanna. (2005). The handbook of attitudes. New Jersey: Erlbaum.

American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychological Association. Sixth edition. Washington D.C.: American Psychological Association

INDEKS PENULIS

- A**
Albina Ginting 287–295
Ali Muhammad 333–341, 334–341
Ardli Johan Kusuma 333–341
- D**
Deni Hamdani 269–278
Dessy Hasanah 279–286
- E**
Engkus 296–304, 300–304, 303–304, 304
- H**
Honorata Ratnawati Dwi Putranti 237–246
Hotden Leonardo Nainggolan 287–295
- I**
Ibrahim 349–354, 350–354, 351–354, 352–354, 353–354
Ibrahim Abdullah 349–354
Ishartono 279–286
Iwan Tanjung Sutarna 349–354
Iwang Gumilar 342–348
- J**
Johndikson Aritonang 287–295
Jongkers Tampubolon 287–295
- K**
Kamaluddin 349–354, 353–354
Kasir 269–278
- M**
Meiliani Hutagalung 287–295
- N**
Nurchayati 237, 237–246
- R**
Risna Resnawaty 279–286
Rizka Rahma Pradana 316–322
- S**
Sri Pudjarti 237–246
Surwandono 333–341
- T**
Tulus Warsito 333–341

INDEKS SUBJEK

- B**
bandung mayor regulation 296–304
Biawak 342–348, 343–348, 344–348, 345–348, 346–348, 347–348, 348
budaya Jawa 316–322
BUMDes 349–354, 350–354, 351–354, 352–354, 353–354, 354
- C**
community understanding 296–304
CSR 279–286, 280–286, 281–286, 282–286, 283–286, 284–286, 285–286, 286
- E**
ekonomi 287–295, 288–295, 291–295, 292–295, 293–295, 294–295, 295
e-Loyalty 237–246
erupsi 287–295, 288–295, 289–295, 290–295, 291–295, 292–295, 293–295, 294–295, 295
e-satisfaction 237–246, 238–246, 239–246, 240–246, 241–246, 242–246, 243–246, 244–246
e-Service quality 237–246, 239–246
- F**
Final 269–278, 270–278, 274–278, 275–278, 276–278, 277–278
- G**
green building 296–304, 297–304, 298–304, 299–304, 300–304, 301–304, 302–304, 303–304, 304
- I**
Ide 333–341, 339–341
Intoleransi 228–236, 231–236, 232–236, 234–236
- K**
karakteristik petani 247–255, 248–255
Kawasan Tambang 349–354
Keamanan Nasional 333–341
Kebijakan 305–315, 306–315, 307–315, 309–315, 310–315, 311–315, 312–315, 314–315, 315
Keluarga Politik 256–268
kesantunan berbahasa 316–322
Kinerja Implementasi 305–315, 309–315, 311–315
Kontestasi 256–268
- M**
Masyarakat 228–236, 229–236, 233–236
moda on line 237–246, 241–246
Modalitas 256–268
- P**
participation 323–332, 324–332, 325–332, 326–332, 329–332, 330–332
Pelaku UMKM 269–278
Pelestarian fungsi sungai 279–286
Pemahaman 269–278
pendapatan 287–295, 290–295, 291–295, 292–295, 293–295, 294–295
pendukung 349–354, 350–354, 351–354, 352–354, 353–354
Penghambat 349–354, 350–354, 351–354
Persepsi 333–341, 335–341, 338–341
petani 287–295, 288–295, 289–295, 290–295, 291–295, 292–295, 293–295, 294–295, 295
Pilkada 256–268, 257–268, 258–268, 260–268, 262–268, 265–268, 267–268, 268
policy formulation 296–304, 297–304, 299–304, 300–304, 301–304, 302–304, 303–304, 304
Polri 228–236, 229–236, 230–236, 232–236, 233–236, 234–236, 235–236, 236
poverty alleviation 323–332
Program Citarum Harum 279–286, 280–286, 282–286, 283–286, 284–286, 285–286
- R**
Radikal 228–236
responsiveness 323–332, 324–332, 325–332, 328–332, 329–332, 330–332
- S**
Sinergi 228–236, 230–236, 236
sosial 287–295, 288–295, 289–295, 290–295, 291–295, 294–295, 295
sosial ekonomi 342–348
sosiolinguistik 316–322, 317–322, 318–322, 319–322, 321–322
Sustainable Development 279–286, 280–286, 281–286, 285–286
- T**
Tarif 269–278, 270–278, 274–278, 275–278, 276–278, 277–278
Tata Kelola Hutan 305–315, 309–315, 310–315, 311–315, 314–315
Terorisme 333–341, 335–341, 337–341, 339–341, 340–341, 341
terumbu karang 342–348, 343–348, 346–348, 347–348
- U**
ubi jalar 247–255, 248–255, 249–255, 250–255, 251–255, 252–255, 253–255, 254–255, 255
usahatani 247–255, 248–255, 249–255, 250–255, 251–255, 253–255, 254–255
- V**
village fund 323–332, 324–332, 325–332, 326–332, 327–332, 328–332, 329–332
- W**
willingness to pay 342–348, 343–348

UCAPAN TERIMA KASIH

Dewan Redaksi Jurnal Sosiohumaniora menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. Kunto Sofianto, M.Hum. (Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran)
2. Prof. Dr. Ir. Yogi, MS. (Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, ITB)
3. Dr. Ir. Marina Sulistyati, MS. (Fakultas Peternakan, Universitas Padjadjaran)
4. Dr. Dra. R. Nunung Nurwati, M.Si. (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran)
5. Dr. Dra. Ypsi Soeria Soemantri, M.Hum (Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran)
6. Dr. Raden Muhammad Mulyadi, SS., M.Hum. (Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran)
7. Dr. Risna Resnawaty, MP. (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran)
8. Dr. Sawitri Budi Utami, S.IP., M.Si. (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran)
9. Dr. Rahman Mulyawan, Drs., M.Si. (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran)
10. Dr. Drs. Hazbini, M.Ag. (Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran)
11. Dr. Rudi Saprudin Darwis, M.Si. (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran)
12. Nur Syamsiyah, S.P., M.P. (Fakultas Pertanian, Universitas Padjadjaran)
13. Dr. Ramadhan Pancasilawan, M.Si. (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran)
14. Dr. Drs. Heru Nurasa, MA. (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran)
15. Dr. Tb. Chaeru Nugraha, M.Hum. (Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran)
16. Dr. Achmad Rizal, S.Pi., M.Si. (Fakultas Ilmu Perikanan dan Kelautan, Universitas Padjadjaran)
17. Dr. Caroline Paskarina, S.IP., M.Si. (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran)
18. Dr. Arianis Chan, S.IP., M.Si. (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran)
19. Egi Arvian Firmansyah, SE.,M.Si. (Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran)
20. Dr. Ir. Suyanti Kasimin, M.Si. (Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala)

Sebagai Mitra Bestari (*Peer Reviewer*) pada Jurnal Sosiohumaniora Volume 21 No. 3 Nopember 2019. Atas kerjasama yang terjalin selama ini dalam membantu kelancaran penerbitan Jurnal Sosiohumaniora, sehingga mulai pada edisi kali ini Jurnal Sosiohumaniora masuk Peringkat Akreditasi SINTA 2. Semoga kerjasama ini berjalan lebih baik untuk masa yang akan datang.

Pemimpin/Redaksi